PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2026



Prepared By :
BAPPERIDA KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah merupakan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah, pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026.

Pasal 3

(1) Penyusuan Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun 2026;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI memuat penutup.
(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026.
(2) Kepala Bapperida melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 kepada Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 19

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RKPD ini disusun sebagai wujud penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD Murni Tahun 2026, mencakup perubahan kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dinamika kebutuhan pembangunan masyarakat Solok Selatan. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan serta kebijakan teknis penyusunan rencana kerja yang berlaku.

Secara subtansial, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat penajaman terhadap program, kegiatan, target kinerja, serta alokasi pendanaan pembangunan daerah. Penyesuaian ini diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta efisiensi tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dokumen Perubahan RKPD ini akan menjadi landasan utama bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) serta Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-KUA dan P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan, jajaran Perangkat Daerah, serta seluruh lapisan masyarakat Solok Selatan yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Solok Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Padang Aro, Juli 2026
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR GRAFIK.....v

BAB I. PENDAHULUAN..... I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.7
1.4 Maksud dan Tujuan I.8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 .....I.8

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN..... II.1
2.1 Capaian Indikator Makro Daerah II.1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....II.1
2.1.2 PDRB Perkapita. II.5
2.1.3 Kemiskinan II.6
2.1.4 Tingkat Pengangguran II.8
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan II.10
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.....II.11
2.2. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. II.12
2.2.1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2025.... .....II.12
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2026..... .....II.31
2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.. .....II.423

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. III.1
3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah. III.3
3.2.1 Pendapatan III.4
3.2.2 Pembiayaan Daerah.....III.5
3.2.2 Belanja Daerah.....III.5

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. IV.1
4.1 Prioritas Pembangunan Nasional. IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....IV.6
4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.17
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....IV.23
4.5 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah IV.32

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. V.1

BAB VI PENUTUP VI.1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	II.14
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025	II.15
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2025	II.27
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan	II.29
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Per Triwulan II Tahun 2026	II.31
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Per Triwulan II	II.33
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Per Triwulan II Tahun 2026	II.35
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Per Triwulan II Tahun 2026	II.37
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Per Triwulan II Tahun 2026	II.39
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Per Triwulan II Tahun 2026	II.40
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per Triwulan II Tahun 2026	II.41
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per Triwulan II Tahun 2026	II.44
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per Triwulan II Tahun 2026	II.45
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Per Triwulan II Tahun 2026	II.47
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Per Triwulan II Tahun 2026	II.50
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Per Triwulan II Tahun 2026	II.51
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Per Triwulan II Tahun 2026	II.52
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Per Triwulan II Tahun 2026	II.54
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026	II.56
Tabel 2.20	Capaian Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Per Triwulan II Tahun 2026	II.59
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Per Triwulan II Tahun 2026	II.62
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Per Triwulan II Tahun 2026	II.64
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Per Triwulan II Tahun 2026	II.65
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Per Triwulan II Tahun 2026	II.67
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Per Triwulan II Tahun 2026	II.68
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Per Triwulan II Tahun 2026	II.70
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Per Kecamatan Per Triwulan II Tahun 2026	II.72
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Per Triwulan II Tahun 2026	II.79

		Hal
Tabel 2.29	Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah	II.423
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026	III.2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026	III.8
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV.6
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif Tahun 2026	IV.19
Tabel 4.3	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah Tahun 2026	IV.20
Tabel 4.4	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani Tahun 2026	IV.21
Tabel 4.5	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana Tahun 2026	IV.22
Tabel 4.6	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya Tahun 2026	IV.23
Tabel 4.7	Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026	IV.24
Tabel 4.8	Sinkronisasi Target Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV.32
Tabel 4.9	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Nasional Tahun 2026	IV.33
Tabel 4.10	Dukungan Program Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional	IV.34
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026	V.2

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026	II.1

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.8
Grafik 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025	II.3
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I (y on y) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026	II.5
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025 (Rp. Juta)	II.6
Grafik 2.4	Perkembangan Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025	II.7
Grafik 2.5	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025	II.8
Grafik 2.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2025	II.8
Grafik 2.7	Perkembangan Tingkat dan Jumlah Pengangguran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025	II.9
Grafik 2.8	Perkembangan Tingkat Penganguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025	II.10
Grafik 2.9	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025	II.11
Grafik 2.10	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025	II.12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen RKPD merupakan instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh perangkat Daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025, yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2025.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan setelah diundangkan, terdapat beberapa kondisi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang keluar setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026 yang kurang atau tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini antara lain disebabkan karena:

a. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
b. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Seperti, terdapatnya perubahan target kinerja pembangunan. serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2026.
c. Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 yang dapat digunakan pada Tahun 2026 yang didasarkan pada Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 33.A/T/LHP/DJPKN-V/PDG/PPD.01/05/2026 dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) tahun 2025.
d. Perubahan pendapatan dana transfer ke daerah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesisa Nomor 29 Tahun 2026 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah Dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian

Alokasi Dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

e. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 2026, Nomor 400.10.11/4615/SJ, tentang Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Aspresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera.
f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
g. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1.15.3/85/APKD/BPKAD-2026 tentangPercepatan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2026 Guna Mendukung Pelaksanaan PORPROV Sumatera Barat ke-16 Tahun 2026.
h. Evaluasi pelaksanaan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 sampai dengan triwulan ke-II tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Adanya penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD tahun 2026 ditetapkan.

Mempertimbangkan hal tersebut beberapa kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan perubahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

   Sesuai dengan proyeksi perkembangan makro daerah tahun 2026 yang telah mempertimbangkan pencapaian kinerja makro tahun 2025 dan kondisi tahun berjalan 2026, maka target makro Kabupaten Solok Selatan seperti yang digambarkan berikut ini:

   1. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksi sebesar 5,56%.
   2. PDRB Perkapita (ADHB) diproyeksi sebesar Rp 46,14 juta.
   3. PDRB Perkapita (ADHK) diproyeksi sebesar Rp 24,94 juta.
   4. Tingkat Pengangguran diproyeksikan sebesar 2,07%.
   5. Tingkat Kemiskinan diproyeksi sebesar 5,29%.
   6. Gini Ratio diproyeksikan sebesar 0,310 poin.
   7. Indek Pembangunan Manusia diproyeksi sebesar 74,12 poin.

b. Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Pemerintahan Daerah serta Indikator, Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

   Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 dilaksanakan secara beriringan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya rentang waktu yang sangat singkat antara penetapan kedua dokumen

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian maupun ketidakselarasan antara substansi RKPD dengan RPJMD yang menjadi pedoman pembangunan daerah jangka menengah.

Potensi ketidaksesuaian tersebut mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja daerah beserta targetnya, serta indikator dan target program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat kemungkinan belum terakomodasinya secara optimal arah kebijakan, strategi pembangunan, prioritas daerah, maupun program unggulan kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan, yang sebagian besar sudah ditindaklanjuti dalam APBD tahun 2026 dan Pergeseran APBD tahun 2026 serta penyesuaian terhadap proyeksi pendanaan riil tahun 2026 yang diuraikan sebagai berikut:
   1. Terjadinya perubahan dari struktur pendapatan daerah yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp 104.929.623.365,- (11,59%) dari RKPD Tahun 2026.
   2. Peningkatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dari perkiraan RKPD tahun 2026 yaitu sebesar Rp 27.714.559.037,- (143,35%) dari perkiraan RKPD tahun 2026.
d. Perubahan Kebijakan Teknis Penggunaan Anggaran.

   Perubahan kebijakan terkait dengan besaran alokasi dan kebijakan penggunaan belanja wajib mengikat seperti alokasi dan penggunanan anggaran DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya, Insentif Fiskal, DBH dan lainnya serta pemenuhan kebijakan penganggaran yang telah dilakukan melalui APBD dan Pergeseran APBD Tahun 2026.

Menindaklanjuti hal di atas maka ruang lingkup/batasan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (6), meliputi perubahan:

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Penambahan, pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan serta rasionalisasi dan realokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah; dan
d. Target kinerja program, kegiatan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka arah kebijakan perubahan RKPD Tahun 2026:

a. Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2026.
b. Penyesuaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan maupun belanja pembangunan tahun 2026
c. Pergeseran, penghapusan, rasionalisasi dan realokasi anggaran serta perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari kegiatan.
d. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer keuangan daerah dan desa yang bersumber dari pusat, provinsi, pendapatan asli daerah, serta penyesuaian terhadap pemanfaatan SiLPA berdasarkan Hasil Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) Tahun 2025 dan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e. Mengakomodir pergeseran penjabaran APBD Tahun 2026 akibat adanya penyesuaian-penyesuaian anggaran pada jenis belanja yang sama sebelum adanya perubahan APBD Tahun 2026.
f. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD tahun 2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
v. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah Dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat
aa. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026

Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara. dan Provinsi Sumatera Barat;

bb. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
cc. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
ee. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
hh. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
ii. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026;
jj. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 38 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026;

Selain itu terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, yaitu: Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1.15.3/85/APKD/BPKAD-2026 tentang Percepatan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2026 Guna Mendukung Pelaksanaan PORPROV Sumatera Barat ke-16 Tahun 2026

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara umum, keterkaitan antara RKPD dengan Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya tidak tidak memiliki perbedaan mendasar. Perubahan RKPD tetap disusun dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara berjenjang serta memperhatikan prinsip keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi antar dokumen perencanaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2045, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RKP Tahun 2026, serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Keterpaduan tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai secara sinergis.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan berbagai kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun regulasi yang diterbitkan setelah penetapan RKPD Tahun 2026. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa perubahan regulasi, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, maupun kebijakan strategis lainnya yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dalam penyempurnaan tingkatan dokumen perencanaan dilakukan sinergi dan penyelarasan dokumen melalui kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Perubahan RKPD oleh Kantor wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Barat dan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD oleh Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi, relevansi, dan adaptabilitas dokumen perencanaan tahunan terhadap dinamika kebijakan, kondisi pembangunan, serta kebutuhan daerah yang berkembang, sehingga pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap selaras dengan arah pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2026. Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2026. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan pelaporan dan penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan Tahun 2026.

Secara diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Grafik 1.1. Hubungan dan Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

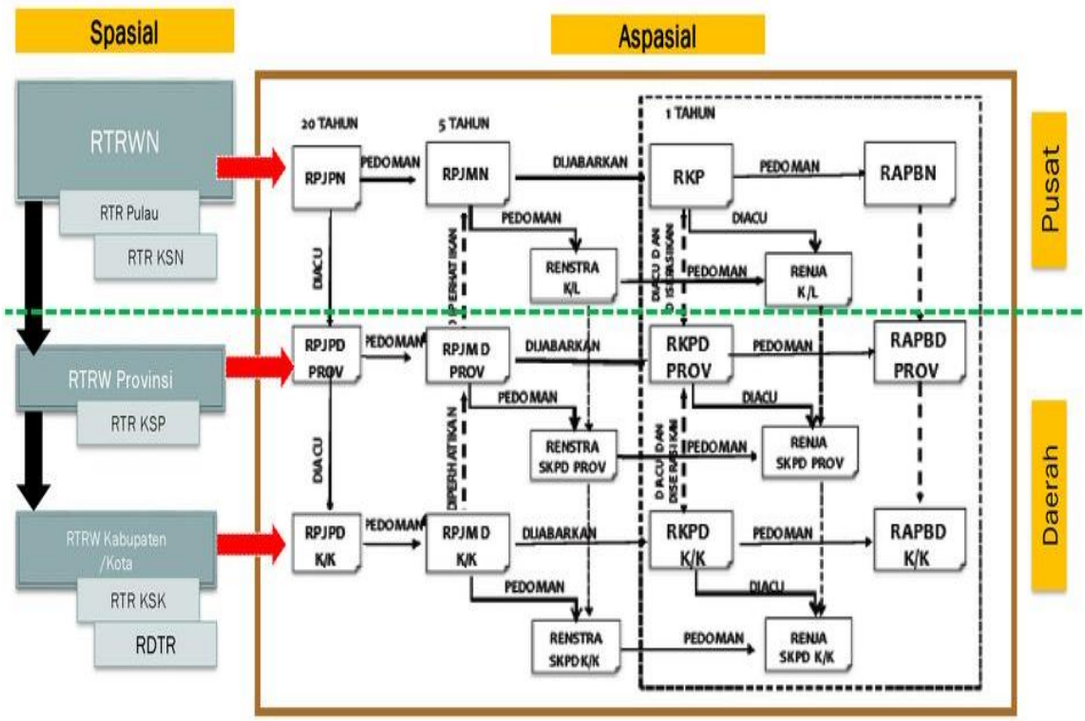

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan Bupati Solok Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun 2026.
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2026 yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 mempunyai Sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar, Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan.

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
Memuat Pencapaian Kinerja Pembangunan Makro Daerah Tahun 2025,dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Memuat perubahan kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah Tahun 2026.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Memuat prioritas dan sasaran dan target pembangunan tahun 2026.

BAB V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Berisikan rincian program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Tahun 2026, instansi pelaksana, indikator capaian kinerja serta pagu indikatifnya.

BAB VI. Penutup
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH

Perekonomian daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan. Kinerja perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal seperti struktur ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, investasi, dan infrastruktur, maupun faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global, kebijakan nasional, stabilitas politik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan. Kinerja perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal seperti struktur ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, investasi, dan infrastruktur, maupun faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global, kebijakan nasional, stabilitas politik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari kateristik perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer, terutama sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kondisi ini tidak terlepas dari potensi sumber daya alam dan kondisi *geografis* yang mendukung, serta sebagian besar penduduk yang bekerja pada sektor tersebut. Selain sektor primer tersebut, aktivitas ekonomi daerah juga ditopang oleh sektor perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan berbagai sektor jasa yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Struktur ekonomi tersebut menjadikan Kabupaten Solok Selatan memiliki ketahanan ekonomi yang relatif baik terhadap berbagai gejolak ekonomi dibandingkan daerah yang lebih bergantung pada sektor industri manufaktur atau jasa modern. Namun demikian, dominasi

sektor primer juga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas dan nilai tambah lebih tinggi masih perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator ini menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah atas seluruh aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, investasi, konsumsi, serta perdagangan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan daerah, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Meskipun demikian, terdapat karakteristik tersendiri yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Solok Selatan memiliki tingkat ketahanan (*economic resilience*) yang cukup baik dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Berangkat dari tahun 2020, dimana perekonomian dunia mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi, distribusi, perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas masyarakat, dimana kondisi ini berdampak terjadinya kontraksi perekonomian global dan seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Solok Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan mengalami kontraksi sebesar -1,24 persen. Walaupun mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai -1,61 persen maupun Nasional sebesar -2,07 persen.

Rendahnya kontraksi ekonomi Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari sebahagian besar struktur ekonomi tergantung pada sektor primer dan pengelolaan sumber daya alam, sedangkan pada kontribusi sektor industri manufaktur, pariwisata, maupun jasa modern masih realtif rendah

Memasuki tahun 2021 hingga 2023, seiring dengan pengendalian pandemi dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan meningkat secara bertahap menjadi 3,35 persen pada tahun 2021, kemudian 4,02 persen pada tahun 2022, dan mencapai 4,57 persen pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi berlangsung cukup cepat dan didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta pulihnya aktivitas investasi.

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, membaiknya kinerja ekspor komoditas unggulan, serta meningkatnya belanja pemerintah sebagai stimulus pemulihan ekonomi nasional. Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, pemulihan ekonomi juga berlangsung cukup baik, terutama didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan jasa.

Namun demikian, memasuki tahun 2024 hingga 2025 laju pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan turun dari 4,09 persen pada tahun 2024 menjadi 3,65 persen pada tahun 2025. Perlambatan ini juga dialami oleh Provinsi Sumatera Barat yang pertumbuhannya turun menjadi 3,37 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional relatif masih mampu bertahan pada level 5,11 persen.

Perbedaan kinerja tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian nasional lebih mampu mempertahankan pertumbuhan karena ditopang oleh sektor industri pengolahan, manufaktur, investasi, ekonomi digital, serta jasa modern yang memiliki produktivitas tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Solok

Selatan maupun Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor primer sehingga pertumbuhan ekonominya lebih sensitif terhadap perubahan harga komoditas, kondisi cuaca, serta gangguan terhadap aktivitas produksi pertanian serta memiliki nilai tambah yang rendah.

Selain itu perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai dinamika ekonomi global, nasional maupun regional. Di tingkat global, meningkatnya ketidakpastian geopolitik dunia menyebabkan terganggunya rantai pasok internasional (global supply chain), meningkatnya biaya logistik, serta melemahnya perdagangan internasional. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan permintaan terhadap berbagai komoditas primer yang menjadi basis ekonomi banyak daerah di Indonesia. Sedangkan di tingkat nasional, meskipun ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup tinggi, laju pertumbuhan mulai mengalami tekanan akibat menurunnya permintaan ekspor, perlambatan investasi swasta, serta menurunnya konsumsi pemerintah pada beberapa periode.

Sementara itu, pada tingkat regional, bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, serta terganggunya akses transportasi menyebabkan distribusi barang dan jasa menjadi kurang lancar. Kondisi tersebut berdampak terhadap menurunnya aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas masyarakat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025

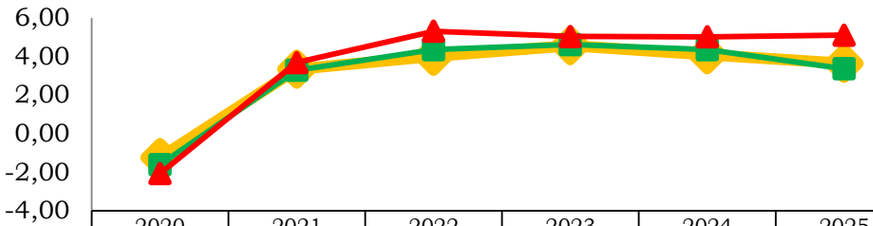

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09	3,65
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36	3,37
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,04	5,02	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2025, pada awal tahun 2026, perkembangan perekonomian Kabupaten Solok Selatan menunjukkan sinyal yang cukup positif. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan I Tahun 2026 (y on y), perekonomian Kabupaten Solok Selatan mampu tumbuh sebesar 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahunan tahun 2025 yang sebesar 3,65 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali mengalami penguatan setelah perlambatan yang terjadi pada tahun 2025 akibat tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi nasional, serta dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai sektor usaha mulai mengalami pemulihan. Hal ini didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, membaiknya distribusi barang dan jasa, mulai pulihnya aktivitas investasi, serta kembali normalnya aktivitas ekonomi setelah berbagai gangguan pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut memberikan optimisme bahwa perekonomian Kabupaten Solok Selatan memiliki kemampuan untuk kembali tumbuh lebih tinggi sepanjang tahun 2026 apabila didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif serta keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2026 terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 19,17 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini mengindikasikan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas perjalanan, penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat, serta mulai pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi tersebut juga mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong pertumbuhan usaha kuliner, hotel, dan jasa akomodasi.

Selain itu, lapangan usaha jasa lainnya tumbuh sebesar 10,37 persen, sedangkan pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 9,93 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada kedua sektor tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas jasa kemasyarakatan maupun pemanfaatan sumber daya alam yang mulai kembali meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh sebesar 5,41 persen, jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan sektor konstruksi sepanjang tahun 2025 yang hanya mencapai 0,06 persen. Perbaikan ini mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur pemerintah maupun investasi swasta yang diperkirakan akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, khususnya perdagangan, industri bahan bangunan, transportasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, pertanian, kehutanan dan perikanan masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,19 persen. Meskipun berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada triwulan I Tahun 2026, sektor ini tetap menjadi penopang utama stabilitas ekonomi daerah mengingat kontribusinya yang terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan yang relatif moderat pada sektor pertanian juga mencerminkan bahwa aktivitas produksi komoditas pertanian masih berjalan dengan baik, meskipun dipengaruhi oleh faktor musim, produktivitas lahan, serta perkembangan harga komoditas.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, seperti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang hanya tumbuh 0,11 persen, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,10 persen. Rendahnya pertumbuhan pada sektor pemerintahan menunjukkan bahwa aktivitas belanja pemerintah pada awal tahun anggaran belum sepenuhnya terealisasi, mengingat sebagian besar pelaksanaan program pembangunan umumnya mulai meningkat pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen pada triwulan i tahun 2026 memberikan indikasi bahwa perekonomian kabupaten solok selatan berada pada jalur pemulihan yang positif. dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,65 persen, peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi pada hampir seluruh lapangan usaha. Namun demikian, struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan upaya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hilirisasi hasil pertanian, serta pengembangan sektor jasa dan pariwisata. Dengan strategi tersebut diharapkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2026 dapat dipertahankan bahkan meningkat, sehingga mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I (y on y) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026

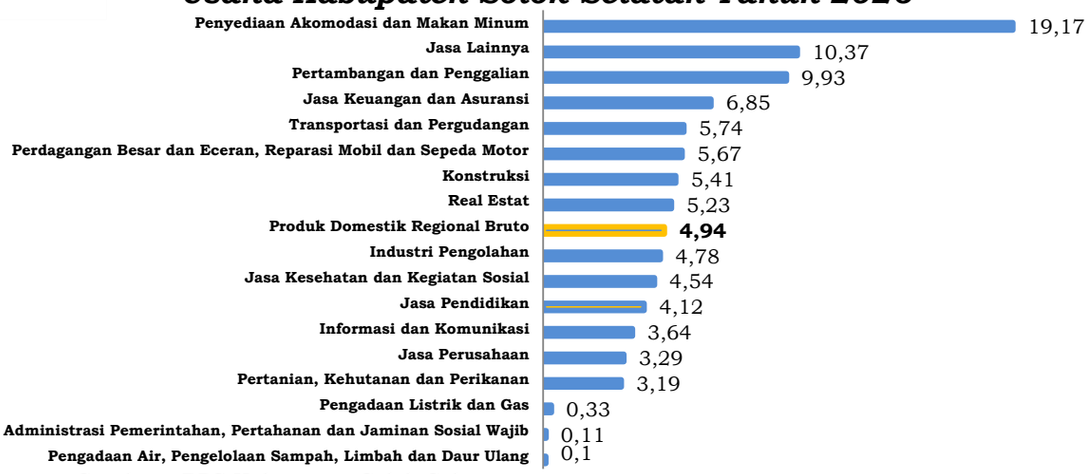

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara rata-rata dalam suatu wilayah. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB per kapita mencerminkan besarnya nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh aktivitas ekonomi untuk setiap penduduk dalam satu tahun. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, PDRB per kapita belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena indikator ini masih bersifat rata-rata (average income) dan belum memperhitungkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita perlu dilengkapi dengan indikator lainnya seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Dilihat dari perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Nilai PDRB per kapita meningkat dari Rp30,37 juta pada tahun 2020 menjadi Rp40,99 juta pada tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,99 persen per tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang seiring dengan meningkatnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha serta membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut juga menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok Selatan mengalami perbaikan. Bertambahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian daerah berdampak terhadap meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk, meskipun peningkatan tersebut belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memperluas pemerataan hasil pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional, capaian PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Selama periode 2020–2025, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan mencapai 6,99 persen per tahun, sedangkan Provinsi Sumatera Barat tumbuh rata-rata sebesar 9,63 persen per tahun, dan Nasional sebesar 9,24 persen per tahun. Selain masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, kesenjangan nilai PDRB per kapita juga menunjukkan kecenderungan semakin melebar dari tahun ke tahun.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi di Kabupaten Solok Selatan belum berlangsung secepat daerah lain. Kondisi ini erat kaitannya dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian, yang sebagian besar menghasilkan komoditas dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) dengan tingkat nilai tambah relatif rendah. Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan modern, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, serta sektor-sektor berbasis teknologi yang umumnya memiliki produktivitas lebih tinggi masih relatif rendah. Akibatnya, peningkatan nilai tambah ekonomi yang tercipta di daerah belum mampu tumbuh secara optimal sehingga pertumbuhan PDRB per kapita relatif lebih lambat dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional.

Ke depan, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan memerlukan upaya akselerasi transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi. Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan kapasitas industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta perbaikan sistem logistik dan rantai pasok daerah. Selain meningkatkan nilai tambah ekonomi, strategi tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing daerah, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih cepat.

Grafik 2.3. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025 (Rp. Juta)

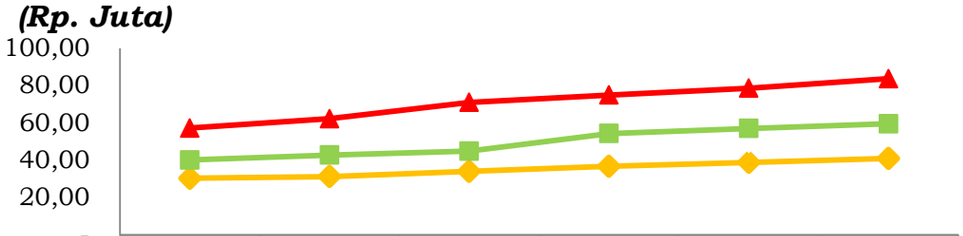

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	30,37	31,26	34,09	36,78	38,91	40,99
Sumatera Barat	40,19	42,80	44,89	54,32	57,04	59,55
Nasional	57,29	62,26	71,03	74,96	78,62	83,75

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, dan diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2025 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari 7,15% pada tahun 2020 menjadi 6,00% pada tahun 2025 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,23% pertahun. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 menjadi 7,52% dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 6,45% serta kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 6,56%, pada tahun 2025, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,00%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin meskipun berfluktuasi terutama pada tahun 2021-2025 dari 13.901 jiwa pada tahun 2021 menjadi 11.440 jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah pascapandemi mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain dipengaruhi oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin juga didukung oleh berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Grafik 2.4. Perkembangan Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025

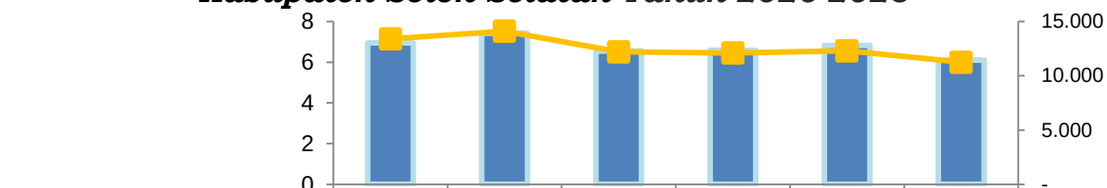

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin	13.015	13.901	12.281	12.354	12.793	11.440
Tingkat Kemiskinan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56	6,00

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Penurunan tingkat kemiskinan ini di iringi dengan perbaikan dari sebaran yang menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk suatu daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index (P1) yang mengambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami perbaikan dari 0,94 poin pada tahun 2024 menjadi 0,93 poin pada tahun 2025. Penurunan nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain, kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan batas minimum kebutuhan dasar semakin mengecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi cenderung semakin dangkal (*shallow poverty*), sehingga masyarakat miskin relatif lebih mudah keluar dari kondisi kemiskinan apabila memperoleh tambahan pendapatan atau intervensi kebijakan yang tepat.

Namun penurunan tingkatan kemiskinan kurang diiringi oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengambaran informasi mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang cendrung tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 yaitu 0,22 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin terus menurun, tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin belum mengalami perbaikan yang berarti. Dengan demikian, masih terdapat kelompok

masyarakat yang berada jauh di bawah garis kemiskinan dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, penguatan usaha mikro, serta perlindungan sosial yang adaptif.

Grafik 2.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025

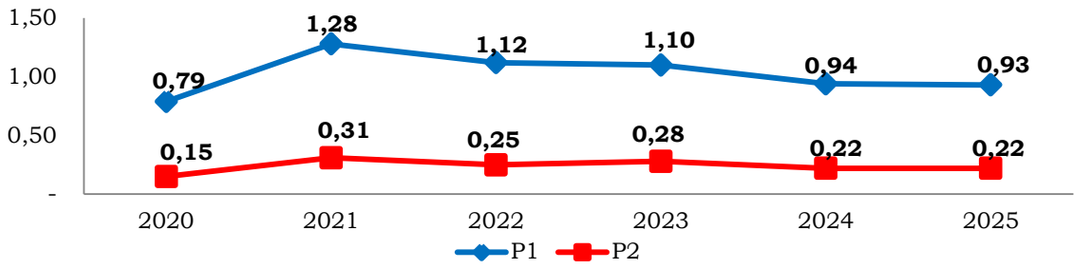

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan kabupaten Solok Selatan tahun 2025 berada di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 8,47%, namun berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional, tetapi masih memerlukan upaya yang lebih optimal agar mampu menyamai bahkan lebih baik daripada capaian tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan yang masih didominasi oleh sektor primer dan sektor informal. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan usaha mikro yang pendapatannya sangat dipengaruhi oleh produktivitas, musim, harga komoditas, serta kondisi pasar. Karakteristik tersebut menyebabkan sebagian rumah tangga memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang relatif tinggi terhadap berbagai guncangan, seperti inflasi pangan, perubahan iklim, bencana alam, maupun perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perkembangan yang positif, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan seluruh kelompok masyarakat secara merata.

Grafik 2.6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2025

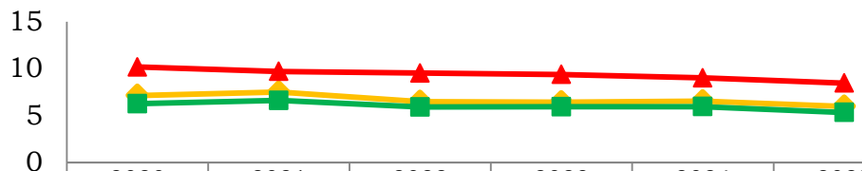

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56	6,00
Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97	5,35
Nasional	10,19	9,71	9,54	9,39	9,03	8,47

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran merupakan rasio penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Analis Tingkat pengganggurann atau sering disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bertujuan untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan

kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2025 menunjukkan trend positif dan terus mengalami penurunan yaitu dari 4,91% pada tahun 2020 menjadi 2,13% pada tahun 2025 dengan rata-rata penurunan 0,70% per tahun. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai lapangan usaha sehingga jumlah masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan semakin berkurang.

Penurunan TPT juga diikuti dengan menurunnya jumlah penganggur. Jumlah pengangguran berkurang dari 4.168 jiwa pada tahun 2020 menjadi 2.460 jiwa pada tahun 2025. Berkurangnya jumlah penganggur tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi telah memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, baik pada sektor formal maupun sektor informal.

Grafik 2.7. Perkembangan Tingkat dan Jumlah Pengangguran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2025

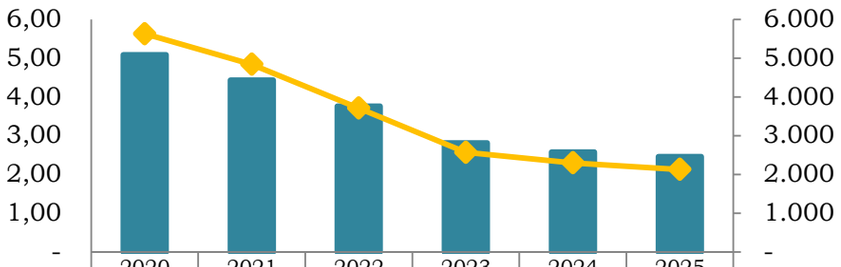

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pengangguran (Jiwa)	5.084	4.434	3.760	2.811	2.576	2.460
Tingkat Pengangguran (%)	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30	2,13

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2025, meskipun sama-sama terus mengalami penurunan, namun tren penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan lebih baik dengan gap yang semakin melebar. Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan rata-rata mencapai 0,70% pertahun sedangkan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat hanya mencapai 0,44% pertahun dan 0,25% pertahun. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan mencapai angka 2,13% jauh lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 5,62% dan 4,85%.

Namun demikian, rendahnya tingkat pengangguran terbuka tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas ketenagakerjaan telah sepenuhnya baik. Karakteristik perekonomian Kabupaten Solok Selatan yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor informal yang bersifat padat (*labour intensive*) menyebabkan sebagian tenaga kerja masih bekerja pada lapangan usaha dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Dengan demikian, tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan (*decent work*), produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Grafik 2.8. Perkembangan Tingkat Penganguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025

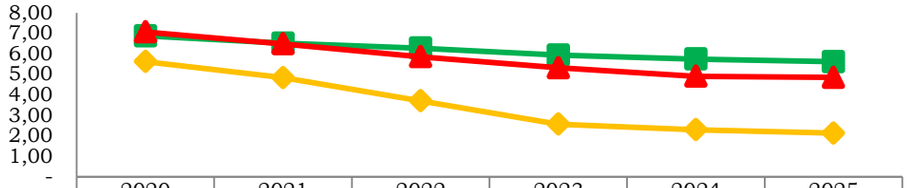

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30	2,13
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75	5,62
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Indeks Gini merupakan ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, Koefisien Gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar Indeks Gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Ketimpangan pendapatan ini dibagi atas 3 tingkatan yaitu: 1. Tingkat ketimpangan rendah (Indeks Gini <0,4); 2. Tingkat ketimpangan sedang (Indeks Gini 0,4-0,5); 3. Tingkat ketimpangan tinggi (Indeks Gini >0,5).

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan membaik. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,307, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 0,253 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya kesempatan kerja pada berbagai lapangan usaha.

Selanjutnya, pada periode 2023–2024 Indeks Gini kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 0,313 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tekanan inflasi terutama pada kelompok bahan pangan, serta menurunnya aktivitas ekonomi pada beberapa sektor yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Akibatnya, peningkatan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kesenjangan pendapatan kembali meningkat.

Namun demikian, pada tahun 2025 Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,256. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Solok Selatan kembali membaik. Kondisi ini sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,00 persen, serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,13 persen. Perbaikan ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin berkurang.

Meskipun mengalami fluktuasi, selama periode 2020–2025 nilai Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan secara konsisten berada di bawah 0,40, sehingga

masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Solok Selatan relatif lebih merata dibandingkan banyak daerah lainnya. Dengan kata lain, jarak tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah relatif tidak terlalu besar.

Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2025 , Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,363 poin dan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 0,282 poin. Rendahnya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari karakteristik struktur ekonomi Kabupaten Solok Selatan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro yang melibatkan sebagian besar penduduk sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Karakteristik tersebut menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat cenderung lebih merata dibandingkan daerah yang didominasi oleh sektor industri dan jasa modern yang umumnya.

Meskipun demikian, rendahnya Indeks Gini tidak serta-merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat telah tinggi. Kondisi pemerataan dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang relatif sama, namun masih berada pada tingkat pendapatan menengah ke bawah. Oleh karena itu, upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Solok Selatan ke depan tidak hanya diarahkan untuk menjaga pemerataan pendapatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat sehingga pendapatan rata-rata masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Grafik 2.9. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025

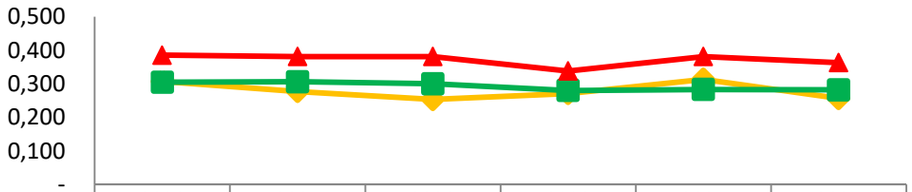

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313	0,256
Provinsi	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283	0,282
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,338	0,381	0,363

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan indeks pembangunan manusia bertujuan untuk melengkapi kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi dalam penilaian kesejahteraan masyarakat serta menempatkan manusia menjadi tujuan akhir pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2020-2025 menunjukkan trend positif dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 70,69 poin menjadi 74,01 poin

dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,66 poin setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kabupaten Solok Selatan terus mengalami perbaikan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kemampuan ekonomi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional capaian IPM Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Solok Selatan tercatat sebesar 74,01 poin, sedangkan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 76,43 poin, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 75,90 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Solok Selatan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi maupun nasional.

Namun demikian, apabila dilihat dari laju peningkatannya, Kabupaten Solok Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selama periode 2020–2025, rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Solok Selatan mencapai 0,66 poin per tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,58 poin maupun nasional sebesar 0,61 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun posisi IPM Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah provinsi dan nasional, namun kecepatan peningkatan kualitas pembangunan manusianya relatif lebih baik. Dengan kata lain, kesenjangan IPM dengan wilayah yang lebih maju secara bertahap mulai berkurang.

Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2025

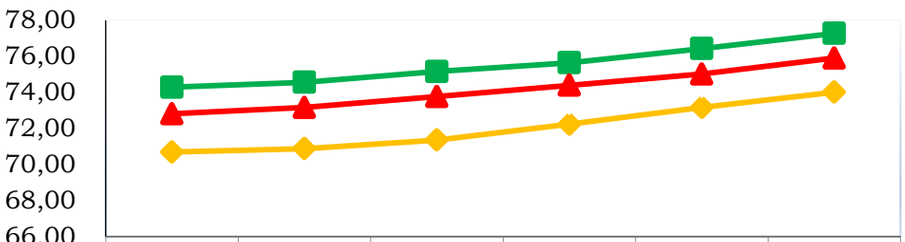

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17	74,01
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43	77,27
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2. EVALUASI KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2025

Untuk melihat keberhasilan dari kinerja pembangunan daerah diperlukann pengukuran hasil kinerja yang telah ditetapkan dengan relaisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui celah kinerja (performance gap) yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pencapaian kinerja dapat diukur melalui 3 analisis pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan yaitu Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah.

Jenis Data, terdiri dari: 1). Perhitungan Data Positif berarti semakin tinggi data tersebut maka semakin baik kinerja. 2) Perhitungan Data Negatif berarti semakin rendah nilai data maka semakin baik kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

No	Pencapaian	Kategori	Skor
1	91% s.d Lebih/Sama Dari 100%	Sangat Tinggi	5
2	76% s.d Kurang/Sama Dari 90%	Tinggi	4
3	66% s.d Kurang/Sama Dari 75%	Sedang	3
4	51% s.d Kurang/Sama Dari 65 %	Rendah	2
5	Kurang/Sama 50 %	Sangat Rendah	1

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.2.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah adalah merupakan indikator yang memperlihatkan keberhasilan kinerja dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 (dengan interval perhitungan indeks 1-5) adalah sebagai berikut:

- Untuk pencapaian kinerja Tujuan Daerah dari 9 indikator tujuan daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 42 poin sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 4,67 poin atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Terdapat 8 Indikator dengan tingkat capaian lebih dari 91% (sangat tinggi)
  2. Terdapat 1 Indikator dengan tingkat capaian 51% s.d kurang/sama dari 65% (rendah)

- Untuk pencapaian kinerja Sasaran Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). dari 28 indikator sasaran daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 135 poin, sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 4,82 poin atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut
  1. Terdapat 23 Indikator dengan tingkat capaian lebih dari 91% (sangat tinggi)
  2. Terdapat 5 Indikator dengan tingkat capaian 76% s.d kurang/sama dari 90% (tinggi)

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pencapaian Indikator kinerja Kinerja Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
VISI: TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA						
MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF						
Tujuan 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**73,46**	**74,01**	**100,75**	**5**
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka Rata –Rata Lama Sekolah	Tahun	8,89	9,2	103,49	5
	2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,08	99,54	5
	3. Angka Partisipasi Penduduk usia 7-15 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	18,15	14,53	80,06	4
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	72,81	72,77	99,95	5
Sasaran 3 Meningkatnya daya saing penduduk	5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,93	77,96	101,34	5
	6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)	Rp. milyar	70,87	72,08	101,71	5
MISI 2. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH						
Tujuan 2 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**3,84**	**3,65**	**95,05**	**5**
	Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**2,36**	**2,13**	**109,75**	**5**
	Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**5,59**	**6,00**	**92,67**	**5**
	Indeks Gini	**Indeks**	**0,311**	**0,256**	**117,68**	**5**
Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daera	7. Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah	Persen	3,74	5,4	144,39	5
	8. Rasio kewirausahaan	Persen	3,26	2,86	87,73	4
	9. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,39	3,55	104,72	5
MISI 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI						
Tujuan 3 Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**74,44**	**74,65**	**100,28**	**5**
Sasaran 5 Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani	10. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56,2	49,9	88,79	4
	11. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah *(cat: merupakan capaian tahun 2024)*	Nilai	2,9	2,9879	103,03	5
	12. Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio	13,76	14,07	102,25	5
	13. Nilai SAKIP	Nilai	65,25	61,57	94,36	5
	14. Indeks Transformasi Digital	Indeks	49,5	50,28	101,58	5
	15. Survey Penilaian Integritas	Persen	80	71,32	89,15	4
	16. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	5
	17. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4	4,03	100,75	5
MISI 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA						
Tujuan 4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Persen**	**71,43**	**72,916**	**102,08**	**5**
	Indeks Resiko Bencana	**Persen**	**123,31**	**172,25**	**60,31**	**2**
Sasaran 6 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan	18. Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	62,89	65,71	104,48	5
	19. Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	77,13	77,72	100,76	5
Sasaran 7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	20. Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	78,96	78,96	100,00	5
	21. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,42	0,42	100,00	5
MISI 5. PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA						
Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	**Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah**	**Indeks**	**64,91**	**63,37**	**97,63**	**5**
Sasaran 8 Meningkatnya ketahanan budaya daerah	22. Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	74,45	72,52	97,41	5
Sasaran 9 Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat	23. Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62	69,3	111,77	5
	24. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	51	41,27	80,92	4
	25. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		50	52,34	104,68	5
	26. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,804	0,792	101,49	5

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	27. Indeks Perlindungan Anak *(cat: merupakan capaian tahun 2024)*	Indeks	61,59	67,82	109,75	5
	28. Indeks Pemuda Hebat	Rasio	78,61	70,32	109,75	5
Total Skala Capaian Tujuan						**42**
Rata-Rata Skala Capaian Tujuan						**4,67**
Total Skala Capaian Sasaran						**135**
Rata-Rata Skala Capaian Sasaran						**4,82**

Sumber: Hasil Analisis Pencapaian Kinerja Gambaran Umum kondisi wilayah dengan Target IKU RPJMD pada Tahun 2027

2.2.1.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pembangunan Daerah adalah merupakan indikator yang memperlihatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh di daerah. Target IKD telah ditetapkan setiap tahunnya melalui RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada pada tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Deerah (IKD) daerah. Target capaian IKD tersebut telah ditetapkan pertahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 (dengan interval perhitungan indeks 1-5) adalah dari nilai total 281 indikator didapat nilai total pencapaian sebesar 1,218 poin, sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 4,49 poin atau termasuk kategori pencapaian target kinerja sangat tinggi , dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 206 Indikator dengan tingkat capaian lebih dari 91% (sangat tinggi)
2. Terdapat 33 Indikator dengan tingkat capaian 76% s.d kurang/sama dari 90% (tinggi)
3. Terdapat 9 Indikator dengan tingkat capaian 66% s.d kurang/sama dari 75% (sedang)
4. Terdapat 6 Indikator dengan tingkat capaian 51% s.d kurang/sama dari 65% (rendah)
5. Terdapat 17 Indikator dengan tingkat capaian kurang/sama dari 50 % (sangat rendah)
6. Terdapat 10 Indikator yang tidak dapat dihitung dikarenakan tidak tersedianya data atau target pada tahun 2025

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
I	**ASPEK ADMINISTRASI, GEOGRAFI, DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,92	78,91	91,84	5
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/ perkapita	417	373,56	89,58	4
3	Kapasitas Air baku (terpasang)	m3/detik	0,33	0,32	96,97	5
4	Indeks Kualiltas Lingkungan Hidup	Indeks	78,96	78,96	100,00	5
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,03	172,25	58,85	2
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,77	1,78	99,44	5
7	Rasio Penduduk (sex ratio)	Persen	103,2	103,06	100,14	5
8	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	60,48	59,66	101,36	5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,84	3,65	95,05	5
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,59	6,00	92,67	5
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	11.101	11.440	96,95	5
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta	11.408	11.542	101,17	5
5	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	41,84	40,99	97,97	5
6	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	24,03	23,99	99,83	5
7	Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB)	Rp Juta	70,87	72,08	101,71	5
8	Tingkat Pengangguran	Persen	2,36	2,13	109,75	5
9	Indeks Gini	Indeks	0,311	0,256	117,68	5
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,46	74,01	100,75	5
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,82	72,77	99,93	5
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,89	9,2	103,49	5
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,08	99,54	5
14	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	10	15,51	155,10	5
15	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	72,93	72,87	99,92	5
16	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen	25,84	25,7	99,46	5
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,34	65,7	94,75	5
18	Indeks Literasi Digital	Indeks	64,2	50,28	78,32	4
19	Persentase Nagari yang telah menerapkan moderasi agama	Persen	33,41	5,13	15,35	1
20	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,64	-	-	
21	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Indeks	64,91	63,15	97,29	5
22	Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	74,45	72,52	97,41	5
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,59	67,82	110,12	5
24	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62	69,3	111,77	5
25	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,805	0,792	101,61	5
26	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,84	95,78	99,94	5
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	51	41,27	80,92	4
28	Indeks Pemuda Hebat	Indeks	78,61	70,32	89,45	4
29	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	50	45,98	91,96	5
III	**ASPEK DAYA SAING**					
1	Angka Ketergantungan	per 100 penduduk	46,25	46,25	100,00	5
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,3	4,19	79,06	4
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,95	0,87	91,58	5
4	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	Orang	489	16	3,27	1
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)	Persen	1,46	1,48	101,37	5
6	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Persen	1,45	19,25	1.327,59	5
7	Proposi jumlah IKM	Persen	3,43	1,08	31,49	1
8	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,02	2,86	94,70	5
9	Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	1,09	0,99	90,83	5
10	Rasio Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,6	21,05	97,45	5
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,9	77,96	101,38	5
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	66,6	66,79	100,29	5
13	Rasio Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	26,58	29,75	111,93	5
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	49,3	50,28	101,99	5
15	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	1,12	1,25	88,39	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,7	27,65	96,34	5
17	Rasio Ekspor Barang dan Jasa	Persen	1,8	10,40	577,78	5
18	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	71,43	72,92	102,08	5
19	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	62,89	65,71	104,48	5
20	Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	77,13	77,72	100,76	5
21	Rasio Konektivitas	Rasio	0,57	0,25	43,86	1
22	Jumlah Kawasan kumuh	Kawasan	14	14	100,00	5
23	Persentase Desa Mandiri	Persen	6,5	51,28	788,92	5
24	Rasio Pajak terhadap PDRB	Persen	0,22	0,38	172,73	5
25	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	1,55	0,49	31,61	1
26	Koefisien Harga tahunan (Barang Pangan)	Persen	8,6	5,37	137,56	5
27	Rasio Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB	Persen	12,89	4,90	38,01	1
28	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp/orang	240.405	510.300	212,27	5
29	Rasio Total Kredit terhadap PDRB	Persen	15,75	10,79	68,51	3
30	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	Persen	0,79	0,77	97,47	5
IV	**ASPEK LAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,44	74,65	100,28	5
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks	2,900	2,9879	103,03	5
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72	96,42	133,92	5
4	Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	49,5	35,0	70,71	3
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,0	4,03	100,75	5
6	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Indeks	80,0	71,32	89,15	4
7	Rasio Kemandirian Fiskal	Indeks	17,6	14,07	79,94	4
8	Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	100,00	5
9	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3.72	-	-	-
10	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persen	80	100	125,00	5
11	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada/ Pilwana)	Persen	-	-	-	-
12	Angka Kriminalitas	per 10,000 penduduk	9	12,04	66,22	3
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	50	52,34	104,68	5
14	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	91,91	84,00	91,39	5
15	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,39	3,55	104,72	5
16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56,2	49,9	88,79	4
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**					
A	**Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1.	**Pendidikan**					
1	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama (APS)	Persen	100	94,45	94,45	5
2	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Usia Dini	Persen	63,24	73,17	115,70	5
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	32,83	57,72	175,81	5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Literasi (SD/SMP)	Persen	78,3	71,94	91,88	5
5	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Numerasi (SD/SMP)	Persen	74,79	69,59	93,05	5
6	Skor Literasi SD/MI	Indeks	66,15	78,57	118,78	5
7	Skor Literasi SMP/MTs	Indeks	73,69	80,67	109,47	5
8	Skor Numerasi SD/MI	Indeks	58,36	75,85	129,97	5
9	Skor Numerasi SMP/MTs	Indeks	63,49	72,34	113,94	5
2.	**Kesehatan**					
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 penduduk	104	150,56	55,23	2
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 penduduk	12,67	7,02	144,59	5
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 penduduk	15	16,88	87,47	4
4	Prevalensi Stunting	Persen	12,8	13,2	96,88	5
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	67	58,88	87,88	4
6	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	97	90,74	93,55	5
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional	Persen	99,8	99,65	99,85	5
8	Angka Kesakitan Penduduk	Persen	19	20,15	93,95	5
9	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,25	0,20	80,00	4
10	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 penduduk	0,083	0,88	1.065,89	5
11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100,00	5
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	86,07	86,07	4
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	88	100	113,64	5
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	99,35	99,35	5
15	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100,00	5
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	88,3	88,30	4
17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	35,6	35,60	1
18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	79,92	79,92	4
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	96,78	96,78	5
20	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100,00	5
21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100,00	5
22	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	Persen	100	67,6	67,60	3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	sesuai standar					
23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	35,5	35,50	1
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Persen	57,83	59,21	102,39	5
2	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Wilayah Bidang Perkerjaan Umum	Persen	48,18	65,62	136,20	5
3	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Dasar Bidang Perkejaan Umum	Persen	64,26	49,59	77,17	4
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan	Persen	29	28,58	98,55	5
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	84,7	82,07	96,89	5
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	6,72	0,71	10,57	1
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (sanitasi layak)	Persen	60	60,32	100,53	5
8	Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	50	45,00	90,00	4
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	26,89	31,52	117,22	5
10	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	91,5	80,00	87,43	4
11	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	53	54,99	103,75	5
12	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	0	-	1
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100,00	5
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
1	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,28	9,65	753,91	5
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau,dan Berkelanjutan	Persen	48,5	47,6	98,14	5
3	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	5
4	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	5
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	Persen	42,86	14,31	33,39	1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	ditangani					
6	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	48	30	62,50	2
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Persen	100	100	100,00	5
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100,00	5
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100,00	5
4	Rata-Rata Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	13,65	13,60	99,63	5
5	Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	92	100	108,70	5
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,42	0,42	100,00	5
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100,00	5
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,2	0,6	300,00	5
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100,00	5
6	**Urusan Sosial**					
1	Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	38,42	43,07	112,10	5
2	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	59,67	41,35	69,30	3
3	Indeks Peranan Sosial	Indeks	51	29,15	57,16	2
4	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	60	53,87	89,78	4
5	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	43	42,12	97,95	5
6	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	99,69	99,69	5
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	5
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**					
1	**Urusan Ketenagakerjaan**					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	-	-	-
2	Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas (Sektor pertanian, industri pengolahan, akomodasi makan minum dan jasa lainnya) PDRB ADHK	Rp. Juta	17,74	24,83	139,97	5
3	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	36,87	33,79	91,65	5
4	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	28,3	24,15	85,34	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	Persen	33,54	29,89	89,12	4
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	20	31,49	157,45	5
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	52	50,47	97,06	5
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	76,5	78,49	102,60	5
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	8,9	7,7	86,52	4
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100,00	5
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	per 100,000 penduduk perempuan)	10,42	5,54	146,83	5
3	**Urusan Pangan**					
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	Persen	7,15	7,19	99,44	5
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	140,8	152,5	108,31	5
4	**Urusan Pertanahan**					
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,67	-	-	-
2	Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100,00	5
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100,00	5
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100,00	5
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rIndeks penanaman modal	Persen	100		-	-
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100		-	-
7	Tersedianya tanah untuk Masyarakat	Persen	100		-	-
8	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100,00	5
5	**Urusan Lingkungan Hidup**					
1	Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	78,94	83,58	105,88	5
2	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	76,1	81,66	107,31	5
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	83,85	71,05	84,73	4
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26,47	33,84	127,84	5
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan	Persen	28,8	19,13	66,42	3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	Sampah					
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	45	57,58	127,96	5
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	15,38	15,38	1
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	82	99,4	121,22	5
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	18	22,23	123,50	5
3	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,4	98,29	98,88	5
4	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	67,3	72,09	107,12	5
5	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	99,91	99,91	5
6	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100,00	5
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,79	0,786	99,51	5
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif	Persen	50,65	80,0	157,95	5
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100,00	5
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	43,58	51,28	117,67	5
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	77,79	77,35	99,43	5
2	TFR (Indeks Kelahiran Total)	Jiwa	2,43	2,45	99,18	5
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,8	69,3	99,28	5
4	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,9	9,2	107,07	5
9	**Urusan Perhubungan**					
1	Kinerja lalu lintas	Indeks	0,32	0,28	87,50	4
10	**Urusan Komunikasi dan Informasi**					
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	Indeks	2,98	3,5	117,45	5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,98	3,5	117,45	5
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100,00	5
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	81,81	63,63	77,78	4
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100	82,07	82,07	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
11	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**					
1	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Persen	1,6	0,4	25,00	1
2	Rasio koperasi berkualitas	Persen	15,07	15	99,54	5
3	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	10,95	11,56	105,57	5
12	**Urusan Penanaman Modal**					
1	Pertumbuhan Investasi	Persen	25	2,25	9,00	1
13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,63	3,64	100,28	5
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	2,25	2,21	98,22	5
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	2	8,33	416,50	5
14	**Urusan Statistik**					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,5	2,49	99,60	5
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100,00	5
3	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100,00	5
15	**Urusan Persandian**					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	29,45	36,7	124,62	5
16	**Urusan Kebudayaan**					
1	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	Persen	50,65	92,86	183,34	5
2	Persentase lembaga/ perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi	Persen	69,85	66,66	95,43	5
3	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional	Persen	50	60	120,00	5
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100,00	5
17	**Urusan Perpustakaan**					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai	70	62,36	89,09	4
18	**Urusan Kearsipan**					
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	70	44,09	62,99	2
III	**Urusan Pilihan**					
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**					
1	Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan (ADHK)	Persen	5,3	5,21	98,30	5
2	Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persen	0,3	0,698	232,55	5
2	**Urusan Pariwisata**					
1	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum	Persen	7,5	3,32	44,27	1
2	Pertumbuhan PDRB sektor sektor jasa lainnya	Persen	8,3	8,34	100,48	5
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,204	1,5	35,68	1
3	**Urusan Pertanian**					
1	Pertumbuhan PDRB subsektor	Persen	4,2	5,44	129,52	5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	pertanian					
2	Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	44,83	50,67	113,03	5
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	4,35	4,95	113,79	5
4	Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani	Persen	100	100	100,00	5
4	**Urusan Perdagangan**					
1	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	5,44	4,29	78,86	4
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	90	100	111,11	5
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	70,83	70,83	3
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75	88,9	118,53	5
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	26,98	27,66	102,52	5
5	**Urusan Perindutrian**					
1	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,56	6,17	395,51	5
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	17,5	2,49	14,23	1
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	92	89,23	96,99	5
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100,00	5
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100,00	5
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Persen	100	100	100,00	5
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100,00	5
6	**Urusan Transmigrasi**					
1	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandirian	Persen	-	-	-	-
IV	**Fungsi Penunjang**					
1	**Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**					
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	65,25	61,57	94,36	5
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	65	76,33	117,43	5
3	lndeks Kematangan Organisasi	Indeks	30	32,6	108,67	5
4	Angka partisipasi penduduk	Persen	18,15	14,83	81,71	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Quran					
5	Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	29	14,83	51,14	2
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5	0,5	100,00	5
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7	4,97	71,06	3
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	11,23	23	204,59	5
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	40	91,94	229,85	5
2	**Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**					
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90	-	-	-
2	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan	Persen	100	85,71	85,71	4
3	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	91	90,34	99,27	5
2	Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah	Persen	70	66,73	95,33	5
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**					
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	5
2	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB	Persen	0,35	1,20	342,86	5
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	40,65	38,2	93,97	5
5	Rasio PAD	Persen	14,1	13,81	97,94	5
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89,66	85,91	95,82	5
7	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Rasio	0,04	0,15	375,00	5
8	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Rasio	0,87	0,27	168,97	5
9	Manajemen Aset	Nilai	4	4	100,00	5
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,3	2,7	82,61	4
11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100	100	100,00	5
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian**					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,46	80,31	99,81	5
2	Indeks merit system ASN	Indeks	260	251,5	96,73	5
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	96,79	96,79	5
4	Rasio pegawai Fungsional (%)	Persen	19,5	13,93	71,44	3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
	(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	27,84	28,96	104,02	5
6	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan**					
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	75	80,31	107,08	5
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	27,84	28,93	103,92	5
7	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**					
1	Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	40	45,0	112,50	5
2	Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah	Indeks	56,2	49,9	88,79	4
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	60	60,0	100,00	5
8	**Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan**					
1	Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan	Persen	41,49	41,49	100,00	5
9	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)**					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengemdalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Indeks	2,9	2,51	86,55	4
2	Capaian Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja	Persen	64,63	71,32	110,35	5
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	100,00	5
10	**Unsur Kewilayahan (Kecamatan)**					
1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	100,00	5
2	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100,00	5
3	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100,00	5
4	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	100	100,00	5
5	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan	Persen	100	100	100,00	5
11	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)**					
1	Persentase penyelesaian konflik	Persen	100	100	100,00	5
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam lembaga sosial politik	Persen	20	20,18	100,90	5
					Total Indikator	281
					Indikator Yang Tidak di Hitung	10
					Total Indikator di Hitung	**271**
					Total Skala Capaian Kinerja	**1.218**
					Skala Capaian Kinerja	**4,49**

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2025

2.2.1.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal meupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman,Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian kinerja SPM Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 26 Total skor capaian adalah 108 poin dari total skor maksimal sebesar 130 poin. Sehingga capaian kinerja dari indikator SPM adalah adalah 83,08% dengan kategori nilai pencapaian 4,15 poin (kategori Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 16 Indikator dengan tingkat capaian lebih dari 91% (sangat tinggi).
2. Terdapat 4 Indikator dengan tingkat capaian 76% s.d kurang/sama dari 90% (tinggi).
3. Terdapat 2 Indikator dengan tingkat capaian 66% s.d kurang/sama dari 75% (sedang).
4. Terdapat 2 Indikator dengan tingkat capaian 51% s.d kurang/sama dari 65% (rendah).
5. Terdapat 2 Indikator dengan tingkat capaian kurang/sama dari 50 % (sangat rendah).

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pencapaian Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	94,45	94,45	5
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	57,72	57,72	2
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	73,17	73,17	3
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,07	86,07	4
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	5
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,35	99,35	5
7	Pelayanan kesehatan	Persentase Balita yang	100	100	100	5

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
	balita	mendapatkan layanan kesehatan				
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	88,3	88,3	4
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	35,6	35,6	1
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	79,92	79,92	4
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96,78	96,78	5
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	5
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100	100	100	5
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	67,6	67,6	3
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahun Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	35,5	35,5	1
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	100	82,07	82,07	4
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	100	60,32	60,32	2
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	5
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	100	100	5
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	100	100	100	5
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	5
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	99,72	99,72	5
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di	Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar	100	100	100	5

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
	luar panti	panti				
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	5
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	5
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	5
					Total Capaian	**108**
					Tingkat Capaian	**83,07**
					Nilai Capaian	**4,15**

Sumber: Hasil Analisis Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah Terhadap Target SPM Tahun 2025

2.2.1.4. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menyandingkan target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian Indikator TPB/SDGs ke dalam 4 (empat) kategori:

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
c. Indikator TPB yang belum dilaksakan dan belum tercapai (BB)
d. Indikator yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian indikator TPB/SDGs KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029 untuk capaian indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 51,22% tahun 2024. Kemudian capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) sebesar 34,15%. Sedangkan indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) mencapai sebesar 7,80% dan 6,83%.

Tabel 2.4. Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan

No	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
1	TPB 1. Tanpa Kemiskinan	12	9	2	0	23
2	TPB 2. Tanpa Kelaparan	6	3	0	2	11
3	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	23	10	0	1	34

No	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
4	TPB 4. Pendidikan Berkualitas	7	5	0	1	13
5	TPB 5. Kesetaraan Gender	8	4	1	1	14
6	TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	7	5	1	17
7	TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	2
8	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	10	0	2	19
9	TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	3	1	2	9
10	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	6	0	0	1	7
11	TPB 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	3	2	0	9
12	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	2	0	1	5
13	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	1	0	2
14	TPB 14. Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0
15	TPB 15. Ekosistem Daratan	1	2	1	0	4
16	TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	13	6	1	1	21
17	TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	6	2	1	15
		105	**70**	**16**	**14**	**205**

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas bahwa status capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan jumlah indikator yang telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)", "Sedang Berlangsung (SB)", "Belum Berkembang (BB)", dan "Tidak Ada (NA)" dari total indikator yang ada untuk setiap TPB. Secara keseluruhan, dari 205 indikator TPB yang dinilai, sebanyak 105 indikator (51,2%) sudah sesuai (SS), 70 indikator (34,1%) sedang berlangsung (SB), 16 indikator (7,8%) belum berkembang (BB), dan 14 indikator (6,8%) tidak ada (NA).

TPB dengan jumlah indikator "Sudah Sesuai (SS)" tertinggi adalah TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 23 indikator, diikuti oleh TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan 12 indikator, dan TPB 16 (Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan 13 indikator. Beberapa TPB menunjukkan proporsi indikator "Sudah Sesuai (SS)" yang sangat tinggi relatif terhadap total indikatornya, seperti TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dengan 2 dari 2 indikator (100% SS) dan TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan 6 dari 7 indikator (85,7% SS).

Namun, terdapat beberapa TPB yang memiliki indikator "Belum Berkembang (BB)" atau "Tidak Ada (NA)". TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki 5 indikator "Sedang Berlangsung (SB)" dan 5 indikator "Belum Berkembang (BB)". TPB 14 (Ekosistem Lautan) menjadi satu-satunya TPB yang tidak memiliki indikator satupun yang dinilai (0 total indikator, semua 0). TPB 2 (Tanpa Kelaparan) memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)", dan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) masing-masing memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)".

Data capaian TPB ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan pembangunan berkelanjutan. Secara agregat, fakta bahwa lebih dari separuh (51,2%) indikator TPB telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)" merupakan pencapaian yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan program pembangunan di berbagai sektor telah berjalan efektif dan selaras dengan target-target TPB. Proporsi signifikan dari indikator "Sedang Berlangsung (SB)" (34,1%) juga mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dan progres yang sedang berjalan, yang diharapkan akan bergeser ke status "Sudah Sesuai" di masa mendatang.

Fokus pada TPB yang memiliki tingkat "Sudah Sesuai" yang tinggi, seperti TPB 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Capaian TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) yang 100% SS, meskipun hanya memiliki 2 indikator, juga perlu

diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap energi berkelanjutan. Keberhasilan pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh) mengindikasikan perbaikan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2026

Sesuai dengan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

2.2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD per Perangkat Daerah Hingga Triwulan II

Tingkat capaian realisasi anggaran pelaksanaan program Per Perangkat Daerah dan Per Urusan Pemerintahan sampai triwulan II sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Secara umum, hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan Dinas Pendidikan mencapai Rp72.881.070.574,00 atau 31,77% dari total alokasi anggaran sebesar Rp229.418.630.512,00 dengan predikat Realisasi Anggaran Sangat Rendah. Meskipun demikian, rata-rata capaian kinerja program secara keseluruhan telah mencapai 97,44% dengan predikat Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tingkat subkegiatan tercatat sebesar 29,45% dengan predikat Sangat Rendah. Tingginya realisasi program disebabkan perhitungan indikator program dilakukan pada per semester berdasarkan kondisi indikator pada semester perhitungan.

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			229.418.630.512		72.881.070.574	29,45	31,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			193.937.517.712		59.639.895.618	51,14	30,75
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,05		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	86,00		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	96,00		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			35.171.142.800		5.070.549.409	26,61	36,45
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	66,45		69,01		103,85	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	37,47		59,14		157,83	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100		101,72		101,72	
	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam	100		82,56		82,56	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
	Pendidikan Menengah Pertama (APS) (Persentase)						
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			209.970.000		-	0	0
Meningkatnya kualitas kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	75,00		0		0	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100.000.000		-	0	0
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Persentase)	90,00		84,46		93,84	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Persentase)	85,00		90,36		106,31	
	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	0,55		0,68		123,64	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			0		-	0	0
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100,00		100		100	
JUMLAH			229.418.630.512		72.881.070.574		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**29,45**	**31,09**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**97,44**	
Predikat kinerja						**Sangat tinggi**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Pendidikan:

a. Faktor Pendukung

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.
3. Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Faktor Penghambat

1. Sebagian kegiatan fisik dan pengadaan sarana prasarana pendidikan masih dalam proses persiapan dan pelaksanaan sehingga realisasi keuangan belum optimal.
2. Belum optimalnya capaian partisipasi pendidikan pada kelompok usia tertentu, khususnya jenjang pendidikan menengah pertama.
3. Keterbatasan anggaran pada beberapa program prioritas yang berdampak terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan.
4. Masih terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan jadwal akademik dan tahapan administrasi lainnya.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan secara berkala.

3. Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan peningkatan angka partisipasi sekolah.
4. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta penyelesaian administrasi kegiatan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada semester kedua.
5. Meningkatkan koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target kinerja pendidikan Tahun 2026.

2. Dinas Kesehatan

Secara umum, hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan Dinas Kesehatan mencapai Rp64.725.391.226,00 atau 37,90% dari total alokasi anggaran sebesar Rp170.781.722.497,00 dengan predikat Realisasi Anggaran Sangat Rendah. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja pada tingkat subkegiatan mencapai 627,12% dengan predikat Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata capaian kinerja program tercatat sebesar 49,69% dengan predikat Sangat Rendah. .

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			170.781.722.497		64.725.391.226	627,12	37,9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			54.621.335.514		26.232.011.551	61,62	48,03
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		89		109,88	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			114.789.164.983		38.262.015.775	236,31	33,33
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0,31		0,2		64,52	
	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	99,10		25		25,23	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			832.371.000		182.977.600	97,5	21,98
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	20,00		5,1		25,5	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			162.618.000		45.746.300	208,06	28,13
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan (Persentase)	63,00		45,1		71,59	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			376.233.000		2.640.000	120	0
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Persentase)	79,00		79,65		100,82	
JUMLAH			170.781.722.497		64.725.391.226		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**627,12**	**37,9**
Predikat kinerja						**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**49,69**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Kesehatan:

a. Faktor Pendukung

1. Tersedianya jaringan pelayanan kesehatan yang didukung oleh puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4. Adanya dukungan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat sesuai target yang ditetapkan.
2. Sebagian kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan sehingga realisasi keuangan belum optimal pada Triwulan II.
3. Keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung pada beberapa layanan kesehatan.
4. Masih terdapat perbedaan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di beberapa wilayah.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat melalui pendataan dan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah.
3. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
4. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
5. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Secara umum, hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan mencapai Rp. 5.809.701.500,00 atau 11,90% dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 48.813.311.275,00 (Predikat Realisasi Anggaran: Sangat Rendah). Meskipun realisasi pada tingkat sub-kegiatan telah mencapai rata-rata 10,67%, rata-rata capaian kinerja program secara akumulatif masih tercatat 0,00% (Predikat Kinerja Program: Sangat Rendah).

Adapun rincian kinerja per urusan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Adalah sebagai berikut

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

   Alokasi anggaran sebesar Rp 47.813.311.275,00 terealisasi sebesar Rp 5.804.622.500,00 (12,14%), dengan rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 11,33%.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

   Alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.079.000,00 (0,51%). Pada periode Triwulan II, indikator kinerja urusan pertanahan belum menyajikan capaian fisik secara kuantitatif dikarenakan masih dalam tahap mediasi dan inventarisasi lapangan.

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			47.813.311.275		5.804.622.500	11,33	12,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.637.574.073		4.242.957.399	30,22	55,55
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,11		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.825.000.000		85.102.900	0	4,66
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi (Persentase)	55		0		0	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	28,09		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			3.694.388.325		92.418.308	0	2,5
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Air Minum aman perpipaan (Persentase)	30,50		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			463.550.000		31.745.100	0	6,85
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase)	9,98		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			350.000.000		11.429.000	0	3,27
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	45				0	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			3.963.790.000		693.828.050	0	17,5
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)	69				0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			28.999.838.977		646.761.743	0	2,23
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	54,50				0	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			-		-	0	0
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	7				0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			879.169.900		380.000	0	0,04
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.000.000.000		5.079.000	0	0,51
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			-		-	0	0
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			1.000.000.000		5.079.000	0	0,51
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	100		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
santunan tanah untuk pembangunan	Pembangunan (Persentase)						
JUMLAH			**48.813.311.275**		**5.809.701.500**		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**10,67**	**11,9**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**0**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

a. Faktor Pendukung
   1. Dukungan operasional & administrasi relatif baik.
   2. Tersedianya beberapa dokumen perencanaan teknis (DED, Dokumen Lingkungan/AMDAL/UKL-UPL, Masterplan) dan dokumen tata ruang (KKPR) sebagai landasan pelaksanaan pekerjaan fisik.

b. Faktor Penghambat
   1. Proses pelelangan/tender di UKPBJ serta perbaikan AHSP/HPS penyesuaian harga tahun 2026 yang terlambat
   2. Mayoritas paket pekerjaan infrastruktur baru memasuki tahap persiapan penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), sehingga pembayaran termijn/pembayaran fisik belum terealisasi di Triwulan II
   3. Kendala Lahan & Legalitas Aset.

c. Upaya Tindak Lanjut
   1. Percepatan Realisasi Fisik dan Pencairan Termijn
   2. Pengawasan dan Pengendalian Lapangan Secara Ketat.
   3. Akselerasi Penyusunan Dokumen & Regulasi
   4. Melakukan evaluasi dan penyesuaian (*rekonsiliasi*) target kinerja fisik maupun anggaran yang diproyeksikan tidak selesai hingga akhir tahun anggaran untuk diusulkan penyesuaian pada APBD Perubahan.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Secara keseluruhan, hingga Triwulan II Tahun 2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 16.900.772.101,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.631.937.682,00 atau 45,16% (Predikat Realisasi Anggaran: Sangat Rendah). Untuk pencapaian fisik pada tingkat sub-kegiatan mencapai rata-rata 66,38% (Predikat Kinerja Sub-Kegiatan: Sedang). Namun demikian, rata-rata capaian kinerja program secara akumulatif tercatat sebesar 9,50% (Predikat Kinerja Program: Sangat Rendah).

Adapun rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
   Alokasi anggaran sebesar Rp 14.266.465.751,00 terealisasi sebesar Rp 7.153.796.742,00 (50,14%), dengan rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sebesar 28,19% (*Sangat Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:
   Alokasi anggaran sebesar Rp 2.307.355.050,00 terealisasi sebesar Rp 375.268.540,00 (16,26%), dengan rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sebesar 121,80% (*Sangat Tinggi*).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan:
   Alokasi anggaran sebesar Rp 326.951.300,00 terealisasi sebesar Rp 102.872.400,00 (31,46%), dengan rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sebesar 26,05% (*Sangat Rendah*)).

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			14.266.465.751		7.153.796.742	28,19	50,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.687.772.101		3.787.008.151	44,64	49,26
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	80,00		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,15		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			124.810.000		-	0	0
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100,00		0		0	
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00		0		0	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			28.364.000		190.000	0	0,67
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten /kota ditangani (%)	42,86		0		0	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			6.425.519.650		3.366.598.591	0	52,39
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	52,00		0		0	
	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	71,00		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.307.355.050		375.268.540	121,8	16,26
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			210.225.000		850.300	0	0,4
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100,00		0		0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			117.849.000		1.608.000	16,67	1,36
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)	78,00		0		0	
	Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100,00		0		0	
	Jumlah Titik Pantau Aktif (%)	30,00		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			-		-	0	0
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terbangun (%)	0,11		0		0	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.120.000		662.000	0	12,93
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100,00		0		0	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			20.780.000		2.287.000	53,33	11,01
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100,00		25		25	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
persetujuan lingkungan yang diterbitkan							
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			74.801.000		330.000	850	0,44
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100,00		100		100	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			6.570.000		-	66,67	0
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100,00		65		65	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.872.010.050		369.531.240	4,25	19,74
Meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	63,00		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			326.951.300		102.872.400	26,05	31,46
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			326.951.300		102.872.400	26,05	31,46
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)	0,33		0		0	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	30,00		0		0	
JUMLAH			16.900.772.101		7.631.937.682		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub Kegiatan**	**66,38**	**45,16**
Predikat kinerja						**Sedang**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**9,5**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat, dan tindak lanjut program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan:

a. Faktor Pendukung:
   1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Tenaga Teknis yang kompeten dalam menyusun dokumen perencanaan serta pengawasan administrasi kegiatan.
   2. Tingginya komitmen pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta responsifnya penanganan pengaduan/sengketa lingkungan masyarakat di lapangan.

b. Faktor Penghambat:
   1. Siklus Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Konstruksi.
   2. Sebagian besar indikator Dampak/Outcome atau perhitungannya memerlukan survei lapangan skala kabupaten sehingga dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun
   3. Keterbatasan Peralatan Lapangan Khusus
   4. Ketidaksesuaian Pagu RKPD dan APBD.

c. Upaya Tindak Lanjut:
   1. Percepatan Realisasi Fisik dan Pencairan Termijn
   2. Rekonsiliasi & Penyesuaian Target pada APBD Perubahan.
   3. Optimasi Alat Lapangan dan Koordinasi Pengujian.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melalui 3 (tiga) program utama. Pada Triwulan II Tahun 2026, alokasi anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp 6.196.100.668,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 3.294.524.253,00

atau sebesar 53,17% (Predikat Realisasi Anggaran: Sedang). Pencapaian kinerja fisik pada tingkat sub-kegiatan tercatat rata-rata sebesar 52,78% (Predikat Kinerja Sub-Kegiatan: Sedang). Adapun Rata-rata Capaian Kinerja Program secara akumulatif hingga Triwulan II adalah sebesar 44,57% (Predikat Kinerja Program: Sangat Rendah).

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.196.100.668		3.294.524.253	52,78	53,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.445.122.668		2.892.849.653	54,79	53,13
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,00		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		74		91,36	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			341.532.000		199.548.500	45,56	58,43
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100		50		50	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100		50		50	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		50		50	
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		50		50	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			409.446.000		202.126.100	62,5	49,37
Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100		50		50	
	Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime) (Persentase)	92		50		54,35	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100		50		50	
JUMLAH			6.196.100.668		3.294.524.253		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**52,78**	**53,17**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**44,57**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat, dan tindak lanjut program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

a. Faktor Pendukung

1. Partisipasi aktif pemerintah dan dukungan peraturan daerah yang jelas;
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat;
3. Adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
4. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi antar instansi; dan
5. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

b. Faktor Penghambat

1. Belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana;
2. Implementasi perda dan perkada yang belum efektif; dan
3. belum adanya ASN sebagai PPNS karena keterbatasan anggaran.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait
2. Peningkatan Intensitas Patroli & Edukasi.

3. Pengembangan Kompetensi SDM dan Pengusulan PPNS
4. Melakukan perawatan berkala terhadap unit pemadam dan sarana pendukung guna mempertahankan standar waktu tanggap (*response time*) penyelamatan di bawah target maksimum.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, layanan pengaduan dan pengamanan kegiatan masyarakat;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melalui 2 (dua) program utama. Pada Triwulan II Tahun 2026, total alokasi anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp 3.493.600.278,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 1.529.551.113,00 atau sebesar 43,78% (Predikat Realisasi Anggaran: Sangat Rendah). Secara akumulatif hingga Triwulan II, Rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan tercatat sebesar 24,01% (Predikat Kinerja: Sangat Rendah), sedangkan Rata-rata Capaian Kinerja Program mencapai 52,55% (Predikat Kinerja: Rendah).

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.493.600.278		1.529.551.113	24,01	43,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.793.600.278		1.463.173.298	36,57	52,38
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		93		114,81	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			700.000.000		66.377.815	9,78	9,48
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100		100		100	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100		100		100	
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100		0,51		0,51	
JUMLAH			3.493.600.278		1.529.551.113		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**24,01**	**43,78**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**52,55**	
Predikat kinerja						**Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat, dan tindak lanjut program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

a. Faktor Pendukung

1. Sudah ada kegiatan penyuluhan, tetapi hanya menjangkau sebagian wilayah/kelompok masyarakat;
2. Ketersediaan logistik darurat yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat belum memadai;
3. Sudah memberikan pengaruh yang cukup dalam mempercepat pemulihan, tetapi masih perlu diperkuat agar proses penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

b. Faktor Penghambat

1. Prioritas anggaran lebih banyak ke penanganan darurat dibanding pencegahan;

2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur tanggap darurat sehingga memperlambat proses evakuasi dan penanganan;
2. Keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar lembaga, kerusakan infrastruktur serta rendahnya partisipasi Masyarakat

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Menyusun prioritas wilayah yang belum terjangkau;
2. Peningkatan kapasitas respon cepat melalui pelatihan dan penambahan personil tanggap darurat; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut seperti rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi, serta pemulihan sosial masyarakat sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal

7. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan daerah, yaitu Bidang Sosial serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara keseluruhan, total anggaran yang dikelola pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 7.484.886.773,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 2.995.680.761,00 (40,02% dengan predikat *Sangat Rendah*). Capaian kinerja fisik tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 23,58% (*Sangat Rendah*), sementara Rata-rata Capaian Kinerja Program secara akumulatif mencapai 16,84% (*Sangat Rendah*).

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial: Alokasi anggaran sebesar Rp 4.915.068.373,00 terealisasi sebesar Rp 2.470.126.719,00 (50,26%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 22,22% (*Sangat Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Alokasi anggaran sebesar Rp 2.569.818.400,00 terealisasi sebesar Rp 525.554.042,00 (20,45%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 27,00% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.915.068.373		2.470.126.719	22,22	50,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.255.901.998		2.390.451.969	37,75	56,17
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71,50		60,77		84,99	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	83		93,75		112,95	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			40.565.775		-	0	0
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	100		99,17		99,17	
	Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100		0		0	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang	56,97		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
	Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)						
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100		0		0	
	Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			287.165.000		31.887.800	6,67	11,1
Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		0		0	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		0		0	
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		100		100	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		0		0	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			196.454.700		2.786.950	0	1,42
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	60		0		0	
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	2,00		0		0	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	95		0		0	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			134.980.900		45.000.000	1,25	33,34
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau NonAlam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Persentase)	100		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.569.818.400		525.554.042	27	20,45
PROGRAM PENATAAN DESA			81.702.000		2.675.000	0	3,27
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			29.569.000		11.999.800	30	40,58
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1.918.332.600		225.284.800	34,04	11,74
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100		12,24		12,24	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100		25,64		25,64	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA			540.214.800		285.594.442	39,46	52,87

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	JUMLAH		7.484.886.773		2.995.680.761		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**23,58**	**40,02**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**16,84**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat, dan tindak lanjut program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. Faktor pendorong:
   1. Tingginya semangat dari pilar-pilar sosial sebagai relawan;
   2. Dukungan dari stakeholder terkait seperti perangkat nagari;
   3. Pilar-pilar sosial ditingkat nagari cepat tanggap dalam penanganan bencana.

b. Faktor penghambat:
   1. Belum optimalnya pemahaman tupoksi pilar-pilar sosial;
   2. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak pemerintah nagari dan pilar-pilar sosial terkait dengan rehabilitasi sosial;Data yang tersedia belum seluruhnya valid;
   3. Kurang cepatnya Laporan dari Pemerintah Nagari; dan
   4. Kurangnya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.

c. Upaya tindak lanjut:
   1. Peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial melalui rakor, bimtek, dan sosialisasi;
   2. Koordinasi dengan pemerintah nagari dan pilar-pilar sosial terkait dengan rehabilitasi sosial;
   3. Melakukan verifikasi dan validasi kelayakan penerima Bantuan Sosial;
   4. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan nagari dalam penanganan bencana; dan
   5. Meningkatkan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan daerah, yaitu Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA yang dikelola pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp 15.479.955.322,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 6.696.384.609,00 (43,26% dengan predikat *Sangat Rendah*). Sedangkan capaian kinerja fisik tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 52,82% (*Rendah*), sedangkan Rata-rata Capaian Kinerja Program secara akumulatif mencapai 40,98% (*Sangat Rendah*).

Adapun rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja: Alokasi anggaran sebesar Rp 15.453.590.322,00 terealisasi sebesar Rp 6.686.580.091,00 (43,27%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 54,12% (*Sedang*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi: Alokasi anggaran sebesar Rp 26.365.000,00 terealisasi sebesar Rp 9.804.518,00 (37,19%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 21,67% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA- Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			15.453.590.322		6.686.580.091	54,12	43,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.456.153.971		1.739.838.955	40,1	70,84
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	82,29		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-		-	0	0
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja (%)	100		0		0	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			139.110.000		398.974.500	100	286,81
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	20		12,57		62,85	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			12.508.075.556		4.546.866.636	119,05	36,35
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	20		53		265	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			350.250.795		900.000	33,33	0,26
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan (%)	60,00		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			26.365.000		9.804.518	21,67	37,19
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			26.365.000		9.804.518	21,67	37,19
Menigkatnya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya (Persentase)	12,5		0		0	
JUMLAH			15.479.955.322		6.696.384.609		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**52,82**	**43,26**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**40,98**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. Faktor pendukung:
   1. Telah tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja daerah periode 2025-2029 di Kabupaten Solok Selatan;
   2. Meningkatnya kesadaran dari pencari kerja dalam melaporkan penempatannya di dunia kerja melalui aplikasi Sisfoizin;
   3. Sebagian Perusahaan sudah melakukan tata kelola yang layak yang mendukung perlindungan bagi pekerja; dan
   4. Adanya peraturan daerah tentang kemudahan dan insentif bagi penanam modal/investor.

b. Faktor penghambat:
   1. Siklus Jadwal Pembinaan & Pengawasan Perusahaan diagendakan optimal pada triwulan III dan IV
   2. Belum terselenggaranya pengukuran tingkat produktivitas tenaga kerja secara berkala akibat keterbatasan instrumen pengujian dan anggaran operasional.

3. Keterbatasan anggaran dan cakupan kawasan transmigrasi:.

c. Upaya tindak lanjut:
   1. Optimalisasi Pengawasan dan Hubungan Industrial: Melakukan monitoring, edukasi, dan evaluasi berkala ke perusahaan-perusahaan;
   2. Penataan Administrasi Pencari Kerja (Kartu AK-1): Memperluas kewajiban kepemilikan Kartu Pencari Kerja (AK-1) bagi seluruh calon tenaga kerja/pencari kerja dalam proses rekrutmen dan penempatan.
   3. Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta instansi teknis daerah untuk penguatan sarana, prasarana, dan status legalitas kawasan pemukiman transmigrasi.

9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.695.505.431,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.820.528.537,00 (49,26%). Capaian kinerja fisik tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 41,38% (*Sangat Rendah*), sementara Rata-rata Capaian Kinerja Program secara akumulatif mencapai 81,65% (*Tinggi*).

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.695.505.431		1.820.528.537	41,38	49,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.306.186.531		1.786.672.890	54,64	54,04
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	82,44		96		116,45	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			155.775.300		7.428.300	14,29	4,77
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	65		80,15		123,31	
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)	100		99,98		99,98	
	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)	99,40		98,06		98,65	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			120.771.300		1.534.800	30	1,27
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		99,91		99,91	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			78.369.700		24.892.547	66,67	31,76
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase)	100		41,46		41,46	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			34.402.600		-	0	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)	100		100		100	
JUMLAH			3.695.505.431		1.820.528.537		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**41,38**	**49,26**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**81,65**	
Predikat kinerja						**Tinggi**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a. Faktor Pendukung
1. Pelaksanaan sosialisasi masif melalui media sosial, situs resmi, hingga layanan jemput bola secara langsung.
2. Penggunaan dokumen kependudukan (KIA, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) sebagai syarat wajib urusan publik (pendaftaran sekolah, BPJS/kesehatan, perbankan, klaim asuransi, hingga pengurusan warisan) menjadi pendorong kuat masyarakat untuk melapor secara aktif.
3. Kerjasama dan integrasi layanan dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) mempermudah penerbitan paket dokumen kependudukan secara langsung saat terjadi kelahiran/kematian.
4. Persyaratan yang lebih ringkas (cukup salinan putusan pengadilan *inkracht* dan identitas dasar) mendorong percepatan pelaporan perceraian dan perkawinan.
5. Terdapatnya regulasi (UU No. 24 Tahun 2013) yang menetapkan data Kemendagri sebagai basis data tunggal pelayanan publik memperluas peluang kerja sama pemanfaatan data antar-instansi.

b. Faktor Penghambat
1. Sebagian masyarakat masih kurang memahami manfaat KIA/IKD serta cenderung menunda pengurusan dokumen (seperti Akta Kelahiran dan Akta Kematian) hingga ada kebutuhan administratif yang mendesak.
2. Koneksi internet yang belum stabil di wilayah/daerah tertentu sering menghambat pengunggahan dokumen, verifikasi data, dan kelancaran sistem SIAK Terpusat.
3. Terdapatnya kendala administratif, seperti pernikahan yang belum sah secara hukum negara/agama serta dokumen pendukung yang hilang/rusak akibat konflik keluarga pasca-perceraian.
4. Proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan lembaga pengguna memakan waktu lama, ditambah sulitnya pemenuhan standar keamanan informasi (ISO 27001) oleh Perangkat Daerah calon pengguna.
5. Kurangnya tenaga teknis kompeten di lembaga pengguna untuk integrasi sistem, serta keterbatasan analis data di daerah dalam mengolah data mentah menjadi dokumen Profil Kependudukan.
6. Rendahnya cakupan layanan kelompok marjinal dan daerah terpencil

c. Upaya Tindak Lanjut
1. Akselerasi Layanan Jemput Bola & Prioritas ASN: Melakukan aktivasi IKD dan pemuatan dokumen secara langsung ke sekolah, kampus, perusahaan, hingga pusat keramaian, serta mewajibkan seluruh ASN sebagai *role model* penyerapan IKD.
2. Penguatan kolaborasi dengan Rumah Sakit/Puskesmas untuk penerbitan akta otomatis pasca-kelahiran/kematian, serta sinergi dengan Pengadilan Agama/Negeri untuk percepatan pemutakhiran status perkawinan/perceraian.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan

4. Percepatan PKS & Bimbingan Teknis Lembaga Pengguna.
5. Pemutakhiran dan Pembersihan Data (*Data Cleansing*) secara berkala untuk mengeliminasi data ganda atau anomali sebelum penyusunan dan penerbitan dokumen Profil Kependudukan daerah.

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Secara akumulatif, total alokasi anggaran yang dikelola pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp 4.342.658.869,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 1.800.162.543,00 (41,45% dengan predikat *Sangat Rendah*). Capaian kinerja fisik tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 58,12% (*Rendah*), dan Rata-rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 57,10% (*Rendah*).

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Alokasi anggaran sebesar Rp 314.953.900,00 terealisasi sebesar Rp 83.321.178,00 (26,46%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 61,24% (*Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Alokasi anggaran sebesar Rp 4.027.704.969,00 terealisasi sebesar Rp 1.716.841.365,00 (42,63%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 57,17% (*Rendah*).

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			314.953.900		83.321.178	61,24	26,46
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			314.953.900		83.321.178	166,67	26,46
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9		4,1		45,56	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66,00		0		0	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						6	0
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			-		-	50	0
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Persentase)	100		54,76		54,76	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-		-	0	0
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100		100		100	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			-		-	0	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,50		0		0	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-		-	16,67	0
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.027.704.969		1.716.841.365	57,17	42,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.813.472.669		1.550.146.525	41,81	55,1
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		83		102,47	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		-	50	0
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,42		0		0	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	25.30-25.09		0		0	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			519.432.300		166.694.840	99,93	32,09
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69,90		74		105,87	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,80		3,6		163,27	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			694.800.000		-	40	0
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	13,00		11		84,62	
	JUMLAH		4.342.658.869		1.800.162.543		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**58,12**	**41,45**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**57,1**	
Predikat kinerja						**Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:

a. Faktor Pendukung

1. Komitmen Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA): Adanya predikat KLA, kemudahan akses layanan dasar anak, serta dukungan program pengurangan kemiskinan keluarga mempermudah pencapaian Pemenuhan Hak Anak (PHA).
2. Akses layanan kesehatan yang luas, edukasi kesehatan yang baik, ketersediaan metode kotrasepsi yang beragam, adanya dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung Program KB yang efektif dan terintegrasi.

3. Ketersediaan Sarana & SDM Konseling: Tersedianya fasilitas tempat konseling yang memadai, konselor bersertifikat pelatihan konseling keluarga dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA/PPKS), serta dukungan tim pengelola yang responsif.

b. Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG/GBS) serta ketersediaan data terpilah gender dan anak.
2. Belum tersedianya tenaga ahli penanganan kasus (seperti Psikolog Klinis), terbatasnya keterampilan ekonomi perempuan, serta masih minimnya fasilitas umum/infrastruktur yang ramah anak.
3. Adanya tantangan budaya/norma patriarki, kurangnya dukungan suami/keluarga terhadap program KB, serta keterbatasan jangkauan alokon modern di wilayah terpencil.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Penguatan dan optimalisasi koordinasi Tim Pokja, Tim *Driver*, dan *Focal Point* PUG dalam mendampingi seluruh Perangkat Daerah menyusun GBS/ARG serta mengompilasi Buku Profil Gender dan Anak.
2. Peningkatan keterampilan (*skill*) bagi perempuan serta memperkuat layanan PUSPAGA.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dan nagari, mengoptimalkan partisipasi anak melalui Forum Anak, serta mendorong pembentukan KLA berbasis nagari/desa.
4. Memperluas jangkauan kontrasepsi modern, melakukan edukasi berperspektif gender untuk meningkatkan keterlibatan suami dalam KB, serta melaksanakan monitoring evaluasi pelayanan KB secara berkala.

11. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA yang dikelola pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp 10.971.949.255,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 2.923.811.690,00 (26,65% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 1.817,35% (*Sangat Tinggi*), yang dipengaruhi oleh tingginya capaian akumulatif output sub-kegiatan operasional dan pelayanan informasi. Namun demikian, Rata-rata Capaian Kinerja Program secara akumulatif tercatat sebesar 0,00% (*Sangat Rendah*). Tingginya realisasi sub kegiatan lebih disebabkan karena terjadinya perubahan metode perhitungan target belum mengacu kepada RPJMD tahun 2025-2029.

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika: Alokasi anggaran sebesar Rp 10.871.949.255,00 terealisasi sebesar Rp 2.906.416.690,00 (26,73%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 2.127,53% (*Sangat Tinggi*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik: Alokasi anggaran sebesar Rp 74.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.305.000,00 (11,15%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 11,75% (*Sangat Rendah*).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian: Alokasi anggaran sebesar Rp 25.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 9.090.000,00 (35,65%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 100,00% (*Sangat Tinggi*).

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.871.949.255		2.906.416.690	2127,53	26,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.645.832.283		1.931.429.390	418,45	52,98
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	97		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,95		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			540.000.000		207.529.946	8475,27	38,43
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	76,00		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			6.686.116.972		767.457.354	93,33	11,48
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	3,30		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			74.500.000		8.305.000	11,75	11,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			74.500.000		8.305.000	11,75	11,15
Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,50		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			25.500.000		9.090.000	100	35,65
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			25.500.000		9.090.000	100	35,65
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	31,00		0		0	
JUMLAH			10.971.949.255		2.923.811.690		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**1817,35**	**26,65**
Predikat kinerja						**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**0**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Komunikasi dan Informatika:

a. Faktor pendukung :
1. Terdapatnya regulasi nasional yang jelas (seperti Perpres SPBE, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU ITE) memberikan acuan dan pedoman hukum yang kuat dalam pelaksanaan transformasi digital dan pengamanan informasi.
2. Tersedianya SDM pengelola TI yang kompeten di bidang pengembangan aplikasi, infrastruktur jaringan, serta pengelolaan komunikasi publik
3. Tersedianya jaringan intra-pemerintah dan Pusat Data Daerah yang memfasilitasi integrasi layanan berbasis elektronik.

b. Faktor penghambat :
1. Meningkatnya ancaman serangan siber (seperti *ransomware*, *deface* situs web pemerintah, dan kebocoran data) yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pertahanan yang solid.
2. Adanya indikator Kinerja yang belum selaras antara target dan realiasi menyebabkan nilai capaian yang terlalu tinggi.

3. Siklus Evaluasi Indikator Outcome dapat diukur hasilnya secara resmi pada akhir tahun anggaran

b. Upaya tindak lanjut:
   1. Penguatan Sistem Pertahanan Siber & Tim CSIRT
   2. Penyesuaian keselarasan indictor dan target RKPD pada Perubahan RKPD Tahun 2026
   3. Mendorong koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pemenuhan kriteria Indeks Pembangunan Statistik (IPS) serta percepatan integrasi aplikasi layanan publik berbasis SPBE.

12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan total alokasi anggaran RENJA Tahun 2026 sebesar Rp 3.060.035.423,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 1.407.680.992,00 (46,00% dengan predikat *Sangat Rendah*). Tingkat capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 42,23% (*Sangat Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program sebesar 30,65% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.060.035.423		1.407.680.992	42,23	46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.889.135.423		1.391.112.992	54,81	48,15
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	80,76		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			52.950.000		8.480.000	0	16,02
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	97		42,8		44,12	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			-		-	0	0
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	7		2		28,57	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			77.950.000		6.668.000	69,3	8,55
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	7		11,7		167,14	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			30.000.000		1.420.000	4,25	4,73
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal (Persentase)	100		35		35	
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		1		1	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			10.000.000		-	0	0
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		0		0	
JUMLAH			3.060.035.423		1.407.680.992		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**42,23**	**46**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**30,65**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP:

a. Faktor Pendukung
1. Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS-RBA): Adanya efisiensi sistem perizinan berbasis risiko nasional yang mempermudah penerbitan izin usaha secara mandiri bagi pelaku usaha lokal maupun investor.
2. Optimalisasi Layanan Penunjang Perangkat Daerah: Dukungan administrasi operasional dan operasional pelayanan yang memadai pada Program Penunjang, sehingga penyerapan anggaran operasional penunjang mencapai 48,15%.

b. Faktor Penghambat
1. Siklus Pelaporan dan Pengukuran Indikator: Sebagian besar indikator kinerja tata kelola (seperti Nilai Inovasi, AKIP, IKM) serta pemanfaatan data penanaman modal penilaiannya dilakukan secara tahunan.
2. Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Teknis.
3. Partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala masih belum optimal, yang berdampak pada pencatatan angka penyelesaian hambatan usaha.

c. Upaya Tindak Lanjut
1. Mendorong eksekusi langsung kegiatan pelayanan, sosialisasi perizinan berbasis risiko, serta pengawasan dan pengendalian penanaman modal di lapangan.
2. Meningkatkan kegiatan fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam pengisian LKPM serta pengaduan hambatan berinvestasi.
3. Melakukan reviu dan penyesuaian target/kinerja periodik sub-kegiatan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 agar target indikator triwulanan lebih terukur dan sesuai dengan kondisi rill di lapangan.

13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA Tahun 2026 yang dikelola adalah sebesar Rp 2.897.548.869,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 1.612.978.931,00 (55,67% dengan predikat *Rendah*). Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 55,10% (*Rendah*). Sementara itu, Rata-Rata Capaian Kinerja Program tercatat sebesar 0,00% (*Sangat Rendah*).

Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan: Alokasi anggaran sebesar Rp 2.823.867.920,00 terealisasi sebesar Rp 1.592.756.931,00 (56,40%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 55,96% (*Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan: Alokasi anggaran sebesar Rp 73.680.949,00 terealisasi sebesar Rp 20.222.000,00 (27,45%), with tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 52,00% (*Rendah*).

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA- yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA- Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.823.867.920		1.592.756.931	55,96	56,4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.343.410.920		1.501.425.130	60,34	64,07
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85,00		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			480.457.000		91.331.801	40,63	19,01
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	10,20		0		0	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			-		-	0	0
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (%)	0		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			73.680.949		20.222.000	52	27,45
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			62.761.099		20.222.000	86,67	32,22
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	83,33		0		0	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			10.919.850		-	0	0
Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	30		0		0	
	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)	60		0		0	
JUMLAH			2.897.548.869		1.612.978.931		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**55,1**	**55,67**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**0**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

a. Faktor Pendukung

1. Dukungan Operasional Layanan Rutin mendukung kelancaran administrasi dan operasional harian dinas.
2. Ketersediaan regulasi penataan arsip dan penerapan aplikasi kearsipan digital (seperti Srikandi) yang menjadi rujukan pembinaan tata kelola arsip dinamis diPerangkat Daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Siklus Evaluasi Indikator Outcome di Akhir Tahun.
2. Kualitas dan ketersediaaan SDM yang belum memenuhi standar jabatan dan keahlian
3. Alokasi anggaran untuk Urusan Kearsipan belum memadai sehingga membatasi jangkauan pembinaan dan pendampingan kearsipan langsung ke seluruh Perangkat Daerah.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Perlindungan Arsip pada Triwulan berikutnya agar penyerapan anggaran dan output fisik dapat tercapai sesuai target.
2. Pencatatan Data Kunjungan dan Penataan Arsip Secara Periodik
3. Penyelarasan Target Triwulanan pada Perubahan RKPD 2026.

14. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kebudayaan, dan Urusan Pariwisata. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA Tahun 2026 yang dikelola adalah sebesar Rp 6.073.365.935,00 dengan realisasi keuangan hingga

Triwulan II sebesar Rp 2.615.664.683,00 (43,07% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara gabungan tercatat sebesar 34,44% (*Sangat Rendah*). Sementara itu, Rata-Rata Capaian Kinerja Program tercatat sebesar 0,00% (*Sangat Rendah*). Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga: Alokasi anggaran sebesar Rp 1.229.701.000,00 terealisasi sebesar Rp 551.892.900,00 (44,88%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 47,62% (*Sangat Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan: Alokasi anggaran sebesar Rp 1.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 163.302.380,00 (15,41%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 30,00% (*Sangat Rendah*).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata: Alokasi anggaran sebesar Rp 3.783.664.935,00 terealisasi sebesar Rp 1.900.469.403,00 (50,23%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 31,25% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-D (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.229.701.000		551.892.900	47,62	44,88
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			80.000.000		-	0	0
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	3,76		0		0	
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	2,25		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.024.701.000		427.090.900	58,33	41,68
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)	4,16		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			125.000.000		124.802.000	100	99,84
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.060.000.000		163.302.380	30	15,41
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.035.000.000		159.302.380	44,44	15,39
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	85		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			25.000.000		4.000.000	16,67	16
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	77,77		0		0	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			-		-	0	0
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	60		0		0	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			-		-	0	0
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	80		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-D (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.783.664.935		1.900.469.403	31,25	50,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.263.664.935		1.732.043.918	34,44	53,07
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75		0		0	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			190.000.000		48.507.560	33,33	25,53
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	14		0		0	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5,2		0		0	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			230.000.000		39.319.325	66,67	17,1
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya (Persentase)	80		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			75.000.000		70.500.000	0	94
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	12,69		0		0	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			25.000.000		10.098.600	12,5	40,39
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	63,49		0		0	
	JUMLAH		6.073.365.935		2.615.664.683		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**34,44**	**43,07**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**0**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga:

a. Faktor Pendukung

1. Tersedianya data potensi ODCB, benda koleksi bersejarah, serta sejarah lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi cagar budaya dan destinasi wisata sejarah.
2. Masih tingginya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan adat budaya serta keberadaan sanggar dan grup kesenian yang aktif di daerah.
3. Dukungan Kemitraan Kepramukaan & Ekraf yang solid.

b. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya alokasi anggaran operasional serta belum memadainya sarana dan prasarana (seperti keterbatasan panggung kesenian, sarana latihan, dan belum adanya gedung museum daerah).
2. Belum tersedianya Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang tersertifikasi di daerah untuk menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya resmi.
3. Seluruh indikator outcome program (pencatatannya berbasis tahunan sehingga hasilnya belum tampak pada Triwulan II.

4. Lambatnya Penyerapan Anggaran Kegiatan Teknis sebagai akibat penjadwalan *event* eksekusi kegiatan di Semester II.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. penyelenggaraan festival seni, pergelaran budaya, serta promosi pariwisata pada Triwulan berikutnya untuk menggenjot kunjungan wisatawan serta penyerapan anggaran.
2. Melakukan inventarisasi dan pembukuan sejarah lokal untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta mengusulkan pembentukan/sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya guna menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya.
3. Menyusun skema fasilitasi sarana prasarana penunjang bagi kelompok kesenian dan sanggar budaya secara bertahap.

15. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan, dan Urusan Pertanian. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA Tahun 2026 yang dikelola adalah sebesar Rp 14.960.025.149,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 5.316.915.328,00 (35,54% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara gabungan tercatat sebesar 25,55% (*Sangat Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program tercatat sebesar 16,12% (*Sangat Rendah*). Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan: Alokasi anggaran sebesar Rp 187.994.000,00 terealisasi sebesar Rp 51.082.800,00 (27,17%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 0,00% (*Sangat Rendah*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan: Alokasi anggaran sebesar Rp 538.164.070,00 terealisasi sebesar Rp 258.303.000,00 (48,00%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 25,00% (*Sangat Rendah*).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian: Alokasi anggaran sebesar Rp 14.233.867.079,00 terealisasi sebesar Rp 5.007.529.528,00 (35,18%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 29,61% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			187.994.000		51.082.800	0	27,17
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			10.000.000		7.030.000	0	70,3
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	142,90		152,5		106,72	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			104.228.000		24.793.200	0	23,79
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93,60		94,7		101,18	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			53.766.000		5.239.600	0	9,75
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	17,95		28,21		42,84	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			20.000.000		14.020.000	0	70,1
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100,00		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			538.164.070		258.303.000	25	48
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			217.062.220		40.465.000	0	18,64
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3313		0		0	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			21.101.850		-	0	0
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	33,54		19,6		58,44	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			300.000.000		217.838.000	100	72,61
Meningkatnya produksi perikanan budidava						100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14.233.867.079		5.007.529.528	29,61	35,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.150.696.929		4.607.536.794	49,81	37,92
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,63		0		0	
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	85		85		100	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			999.901.000		67.399.734	0	6,74
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Total Produksi Ternak Besar (Ekor)	17995		0		0	
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	4344		0		0	
	Jumlah Produksi Telur (Ton)	377,42		0		0	
	Jumlah Produksi Padi (Ton)	89491		0		0	
	Total Produksi Durian (Ton)	41010		0		0	
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	6006		0		0	
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	2100		0		0	
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	77179		0		0	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			527.522.150		170.977.700	50	32,41
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Prodktivitas Padi (Ton/Ha)	4,4		0		0	
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Persentase)	40		0		0	
	Prodktivitas Jagung (Ton/Ha)	5,7		0		0	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			71.735.000		49.127.800	0	68,49
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100		0		0	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	42		4,17		9,93	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			20.000.000		1.050.000	0	5,25
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			-		-	0	0
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			201.012.000		8.952.000	0	4,45
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			98.000.000		15.336.000	25	15,65
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			165.000.000		87.149.500	0	52,82
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						0	
JUMLAH			14.960.025.149		5.316.915.328		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**25,55**	**35,54**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**16,12**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan:

a. Faktor Pendukung

1. Ketersediaan lahan pertanian yang memadai, akses pasar yang cukup baik, serta kemudahan perizinan yang didukung ketersediaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) mandiri maupun penerima bantuan.
2. Dukungan Kelembagaan dan SDM Lapangan: Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di seluruh kecamatan, 4 (empat) Unit Puskeswan yang aktif, serta keberadaan kelompok tani penangkar benih bersertifikat.
3. Pengaturan kualitas air, suhu, dan salinitas yang optimal pada sentra perikanan yang menunjang tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) serta pertumbuhan ikan.

b. Faktor Penghambat

1. Adanya efisiensi/rasionalisasi anggaran serta tidak terakomodir sejumlah alokasi target RKPD pada APBD 2026 akibat keterbatasan ruang fiskal daerah.
2. Terjadinya bencana alam yang merusak sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, serangan hama tikus dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta terbatasnya diseminasi informasi iklim secara cepat kepada petani.
3. Sebagian besar indikator volume produksi (padi, jagung, komoditas hortikultura, perkebunan, dan produksi perikanan) pengukurannya berbasis panen raya akhir tahun,.
4. Fluktuasi dan tingginya harga pakan pada budidaya peternakan unggas serta kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Penguatan Penyediaan Sarana dan Pembenihan Unggul: Mengakselerasi pengadaan calon induk ikan berkualitas, benih tanaman bersertifikat, serta peningkatan operasional Puskeswan dan BPP di tingkat kecamatan.
2. Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Perubahan RKPD 2026): Memperbaiki sinkronisasi target indikator kinerja dengan alokasi APBD pada perubahan anggaran guna menghindari ketidaksesuaian (*mismatch*) target dan dana.
3. Meningkatkan integrasi informasi perubahan iklim dengan jadwal tanam petani serta mengoptimalkan Satuan Tugas Pengendali OPT untuk meminimalkan risiko gagal panen.

16. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, serta Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran RENJA Tahun 2026 yang dikelola sebesar Rp 6.222.215.882,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 2.920.561.373,00 (46,94% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara gabungan tercatat sebesar 55,48% (*Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program secara keseluruhan berada pada angka 26,17% (*Sangat Rendah*). Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian: Alokasi anggaran sebesar Rp 4.215.043.682,00 terealisasi sebesar Rp 2.135.847.048,00 (50,67%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 72,17% (*Sedang*).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan: Alokasi anggaran sebesar Rp 1.139.327.200,00 terealisasi sebesar Rp 541.039.500,00 (47,49%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 53,24% (*Rendah*).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah: Alokasi anggaran sebesar Rp 867.845.000,00 terealisasi sebesar Rp 243.674.825,00 (28,08%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 8,00% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.20. Capaian Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			867.845.000		243.674.825	8	28,08
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			-		-	0	0
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	100		65		65	
	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	60		71,29		118,82	
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100		100		100	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			22.000.000		11.456.460	8	52,07
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			28.000.000		-	0	0
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	20		0		0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			-		-	0	0
Meningkatnya	Persentase Koperasi yang	15,75		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
produktivitas koperasi	Berkualitas (Persentase)						
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			81.952.000		3.130.000	6,67	3,82
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	15		0		0	
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	6		2		33,33	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			735.893.000		229.088.365	20	31,13
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil (Persentase)	1,8		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.139.327.200		541.039.500	53,24	47,49
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			-		-	0	0
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6.150.000		149.555.000	0	2431,79
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	15		0		0	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			442.862.200		201.595.600	50	45,52
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	94		94		100	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			190.000.000		15.546.000	22,71	8,18
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100		0		0	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			50.315.000		24.787.900	100	49,27
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	25		10		40	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			450.000.000		149.555.000	100	33,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			4.215.043.682		2.135.847.048	72,17	50,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.715.043.682		1.895.572.038	79,94	51,02
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		0		0	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			460.000.000		240.275.010	100	52,23
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sentra industri yang dibina dan dikembangkan (Persentase)	41,67		16,67		40	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			40.000.000		-	0	0
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			-		-	0	0
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas (Persentase)	10		0		0	
	JUMLAH		6.222.215.882		2.920.561.373		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**55,48**	**46,94**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**26,17**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah:

a. Faktor Pendukung

1. Meningkatnya kesadaran pengurus koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara periodik, serta tersedianya alokasi Dana Dekonsentrasi untuk pendampingan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Terdapatnya komitmen pemerintah dalam mempermudah akses pengurusan izin usaha, pelaksaan sosialisasi legalitas bagi pelaku UMKM, serta pendampingan intensif dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) harga bahan kebutuhan pokok secara rutin di pasar-pasar daerah untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.

b. Faktor Penghambat

1. Kesadaran masyarakat untuk berwirausaha masih terbatas, serta minimnya inisiatif pelaku UMKM dalam mengurus legalitas/perizinan usaha secara mandiri (perizinan umumnya hanya diurus saat ada pemicu persyaratan bantuan modal/peralatan).
2. Kecenderungan pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran secara konvensional/mandiri tanpa memanfaatkan jejaring promosi daerah, serta tingginya fluktuasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar.
3. Terdapatnya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara target indikator dalam RKPD 2026 dengan alokasi yang disetujui dalam APBD 2026 akibat keterbatasan ruang fiskal, sehingga sejumlah program non-prioritas tidak terakomodir.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Peningkatan Pengawasan, Pendampingan, dan Sosialisasi Usaha: Melakukan pendampingan, sosialisasi kewirausahaan secara masif, monev rutin kepada pelaku usaha, serta mendorong percepatan integrasi IKM ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2. Penguatan Stabilitas Pangan dan Pasar: Meningkatkan efektivitas pemantauan stok dan harga bahan pokok, serta mengagendakan pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi untuk menekan laju inflasi daerah.
3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Mengusulkan kembali kegiatan prioritas (seperti peningkatan sarana distribusi perdagangan) pada mekanisme Perubahan RKPD/APBD dan alokasi tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas daerah.

17. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Pada RENJA Tahun 2026, Sekretariat Daerah mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 34.575.749.142,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 17.705.675.870,00 (51,21% dengan predikat Rendah). Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara keseluruhan rata-rata tercatat sebesar 45,42% (Sangat Rendah), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program tercatat sebesar 15,34% (Sangat Rendah).

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
SEKRETARIAT DAERAH			34.575.749.142		17.705.675.870	45,42	51,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			93.682.000		29.737.105	75	31,74
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						75	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			90.818.000		61.133.160	35	67,31
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100		50		50	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Indeks)	2,93		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			30.001.031		9.692.700	50	32,31
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						50	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			149.498.600		52.398.300	0	35,05
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			50.000.000		27.494.600	75	54,99
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						75	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			7.873.999.000		2.913.370.809	4,76	37
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)	91,57		80,66		88,09	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			337.500.000		133.763.584	60	39,63
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.000.000		3.490.900	75	8,73
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)						
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)						
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			22.000.000		6.020.000	33,33	27,36
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.000.000		7.291.000	56,25	18,23
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						56,25	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			9.500.000		1.466.640	16,67	15,44
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.000.000		10.599.941	75	26,5
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						75	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			14.500.000		-	0	0
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			49.500.000		18.803.938	42	37,99
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	32		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN			20.529.964.301		11.982.518.811	46,56	58,37

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						46,56	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.204.786.210		2.447.894.382	57,78	47,03
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah						57,78	
JUMLAH			34.575.749.142		17.705.675.870		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**45,42**	**51,21**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)						**15,34**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Sekretariat Daerah:

a. Faktor Pendukung
1. Ketersediaan Data Kelengkapan variabel utama dan dokumen pendukung (*data dukung*) dapat dipenuhi dalam penilaian
2. Penggunaan aplikasi/sistem informasi berbasis digital dalam pengusulan pengadaan barang/jasa, pencatatan agenda/protokoler, serta koordinasi surat-menyelurat yang mempercepat alur administrasi internal.
3. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga keagamaan dan pengelola Rumah Tahfidz dalam verifikasi data penerima hibah/bantuan sosial

b. Faktor Penghambat
1. Keterbatasan Kompetensi Fungsional Perancang dan SDM Teknis Khusus.
2. Mekanisme Pengukuran Indikator Utama Berbasis Evaluasi Tahunan
3. Adanya pergeseran/revisi alokasi anggaran pada pertengahan tahun yang memperlambat percepatan penyerapan fisik dan keuangan di beberapa bagian.

c. Upaya Tindak Lanjut
1. Akselerasi Proses Tender dan Pendampingan Pengadaan.
2. Penguatan Kapasitas dan Penambahan Personel SDM Aparatur.
3. Pemberkasan dan Monitoring Data Dukung Tahunan Secara Berkala.
4. Pengendalian Administrasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran.
5. Penyelarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

18. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan. Pada RENJA Tahun 2026, Sekretariat DPRD mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 22.157.864.425,00 dengan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 10.448.325.929,00 (47,15% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara keseluruhan tercatat sebesar 73,33% (*Sedang*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 54,87% (*Rendah*).

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
SEKRETARIAT DPRD			22.157.864.425		10.448.325.929	73,33	47,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.855.274.550		7.104.746.138	63,55	47,83
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		84,625		104,48	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,00		87,31		116,41	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			7.302.589.875		3.343.579.791	84,65	45,79
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		33,33		33,33	
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		37,5		37,5	
	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan (Persentase)	100		37,5		37,5	
JUMLAH			22.157.864.425		10.448.325.929		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**73,33**	**47,15**
Predikat kinerja						**Sedang**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**54,87**	
Predikat kinerja						**Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Sekretariat DPRD:

a. Faktor Pendorong

1. Penyesuaian Target Kinerja dan Dukungan Fiskal: Target kinerja dan alokasi anggaran operasional kesekretariatan telah dirancang secara proporsional sesuai kebutuhan fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD.
2. Kinerja Layanan Internal yang Baik.
3. Terjalinnya koordinasi yang efektif dalam penjadwalan agenda persidangan, rapat dengar pendapat (RDP), dan kunjungan kerja pengawasan DPRD.

b. Faktor Penghambat

1. Kegiatan fasilitasi pembentukan Perda dan pengawasan dilaksanakan secara bertahap mengikuti jadwal Masa Sidang DPRD, sehingga penyerapan anggaran dan pencapaian target fisik bersifat fluktuatif dan belum terakumulasi penuh pada Triwulan II.
2. Proses fasilitasi pembahasan Raperda membutuhkan waktu koordinasi, harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi/Kementerian, serta konsultasi publik yang cukup panjang sehingga penetapan Perda baru terealisasi bertahap.
3. Pengukuran indikator kinerja inovasi berbasis evaluasi akhir tahun.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Optimalisasi Pengasistensian Administrasi Persidangan.
2. Percepatan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jadwal Bamus.
3. Pencatatan dan Inventarisasi Dokumen Inovasi Layanan Kesekretariatan

19. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan bidang urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan dengan total alokasi anggaran pada RENJA Tahun 2026 sebesar

Rp 5.059.061.697,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 2.178.967.873,00 (43,07% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan secara gabungan tercatat sebesar 55,90 % (*Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program secara keseluruhan berada pada angka 7,02 % (*Sangat Rendah*). Rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan: Alokasi anggaran sebesar Rp 4.836.561.597,00 terealisasi sebesar Rp 2.137.333.748,00 (44,19), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 59,63% (*rendah*).
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan: Alokasi anggaran sebesar Rp 222.500.100,00 terealisasi sebesar Rp 41.634.125,00 (18,71%), dengan tingkat capaian kinerja fisik urusan sebesar 0% (*sangat rendah*).

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PERENCANAAN			4.836.561.597		2.137.333.748	59,63	44,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.121.378.812		1.933.573.769	57,35	46,92
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		91		112,35	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			407.182.885		150.611.079	53,33	36,99
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi (Persentase)	100		0		0	
	Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi proses dan isi (Persentase)	93,06		0		0	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			307.999.900		53.148.900	65,28	17,26
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		0	
	Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	90,00		0		0	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		0	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			222.500.100		41.634.125	0	18,71

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			222.500.100		41.634.125	0	18,71
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	45		0		0	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			-		-	0	0
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	75		0		0	
JUMLAH			5.059.061.697		2.178.967.873		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**55,9**	**43,07**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**7,02**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:

a. Faktor Pendorong (Pendukung)

1. Kepastian Kalender Perencanaan Daerah: Pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan diawal tahun (seperti Forum Konsultasi Publik dan Persiapan Rancangan Awal RKPD) berjalan tepat waktu sesuai dengan tahapan pedoman Permendagri.
2. Terjalinnya sinergi dan komunikasi yang aktif dengan Bappeda Provinsi, Bappenas, serta Perangkat Daerah pemampu dalam penyelarasan prioritas pembangunan daerah.
3. Kinerja Layanan Internal Perangkat Daerah baik.

b. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti/Perekayasa di Bapperida untuk mengampu beban analisis data mikro dan penyusunan dokumen kelitbangan.
2. Siklus Evaluasi Indikator Makro Berbasis Tahunan.
3. Proses Pelaksanaan Riset/Kajian Masih Tahap Persiapan:.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Mempercepat proses pendampingan dan penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah serta menyegera kan pelaksanaan tender/kontrak kerja sama kajian kelitbangan.
2. Melakukan pendokumentasian dan pemetaan keselarasan program secara berkala (*real-time*) dalam sistem informasi perencanaan untuk memudahkan penilaian keselarasan dokumen saat evaluasi pertengahan tahun.
3. Mendorong keikutsertaan ASN Bapperida dalam pelatihan teknis analisis data pembangunan, metodologi penelitian, serta mengoptimalkan tim kerja lintas bidang guna menutupi keterbatasan personel fungsional.

20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dengan total alokasi anggaran pada RENJA Tahun 2026 sebesar Rp 113.713.451.310,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 38.781.364.848,00 (34,10% dengan predikat *Sangat Rendah*). Rata-rata capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan tercatat

sebesar 36,29% (*Sangat Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 10,66% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran ENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
KEUANGAN			113.713.451.310		38.781.364.848	36,29	34,1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.165.047.260		9.350.748.741	51,3	42,19
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			88.094.062.050		27.759.042.072	32,19	31,51
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik (Persentase)	14,6		0		0	
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	60,80		0		0	
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42,56		0		0	
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2,45		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.054.342.000		1.505.189.328	37,5	49,28
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6,7		0		0	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			400.000.000		166.384.707	16,67	41,6
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	22,20		8,43		37,97	
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100		45		45	
	Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100		45		45	
JUMLAH			113.713.451.310		38.781.364.848		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**36,29**	**34,1**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**10,66**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Faktor Pendorong (Pendukung)

1. Peran aktif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta komitmen Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam mengawal administrasi perbendaharaan dan penganggaran.
2. Pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi (SIPD-RI) serta aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mempercepat tata kelola verifikasi dan pelaporan.
3. Adanya kemitraan strategis dengan Bank Nagari melalui perluasan kanal pembayaran digital (*QRIS*) dan pemasangan alat rekam transaksi (*Tapping Box*) pada rumah makan/hotel untuk optimalisasi Pajak Daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Adanya regulasi efisiensi anggaran pemerintah pusat (seperti penyesuaian DAU peruntukan infrastruktur dan Pagu DAK Fisik) yang berdampak pada perubahan alokasi serta daya serap anggaran belanja modal/infrastruktur daerah.
2. Keterbatasan Evaluasi Indikator SILPA dan Laporan Keuangan di Triwulan II karena masih menunggu selesainya Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI.
3. Lambatnya Penyerapan Anggaran di Perangkat Daerah Pengampu Urusan.
4. Kesadaran sebagian wajib pajak/retribusi daerah yang masih rendah, serta belum meratanya kepemilikan saluran *mobile banking*/pembayaran non-tunai di tingkat masyarakat pelaku usaha mikro.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Belanja Daerah:
2. Optimalisasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah (PAD):
3. Pemberkasan Data Dukung dan Akuntabilitas Akhir Tahun:

21. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan Urusan Kepegawaian serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan total alokasi anggaran pada RENJA Tahun 2026 sebesar Rp 41.621.152.851,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 19.132.724.568,00 (45,97% dengan predikat *Sangat Rendah*).

Capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan untuk Urusan Kepegawaian tercatat sebesar 38,27% (*Sangat Rendah*), sedangkan Urusan Pendidikan dan Pelatihan tercatat sebesar 0,00% (*Sangat Rendah*), sehingga rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan BKPSDM secara keseluruhan sebesar 36,95% (*Sangat Rendah*). Adapun Rata-Rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 9,65% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
KEPEGAWAIAN			41.365.108.651		18.961.554.668	38,27	45,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.640.152.851		15.819.708.386	62,25	47,03
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		86		106,17	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7.724.955.800		3.141.846.282	14,29	40,67
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3,90		0		0	
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96,50		0		0	
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			256.044.200		171.169.900	0	66,85
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			256.044.200		171.169.900	0	66,85
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	63,00		0		0	
	Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)	6,50		0		0	
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100		0		0	
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100		0		0	
JUMLAH			41.621.152.851		19.132.724.568		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub.Kegiatan**	**36,95**	**45,97**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**9,65**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

a. Faktor Pendorong (Pendukung)

1. Terdapatnya komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengimplementasikan Manajemen Talenta dan Sistem Merit sebagai acuan utama penempatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan CASN/PPPK.
2. Kualitas Layanan Internal yang Baik.
3. Adanya kebijakan daerah yang mengarahkan pengembangan kompetensi teknis ASN sesuai urusan pemerintahan dan

b. Faktor Penghambat

1. Alokasi anggaran yang belum memadai yang membatasi jumlah dan jenis pengembangan kompetensi ASN, sehingga tidak seluruh ASN yang berkontribusi dapat difasilitasi secara optimal;
2. Penempatan, mutasi, dan promosi ASN yang belum
3. sepenuhnya berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja menghambat kesesuaian pengembangan karier ASN dengan kompetensinya;
4. Seringnya aplikasi maintenance dikarenakan satu aplikasi dipakai untuk seluruh ASN se Indonesia;
5. Pemahaman dari pejabat penilai yang masih rendah terhadap penilaian kinerja;
6. Keterbatasan jumlah dan akses lembaga sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan ASN menghambat percepatan peningkatan ASN tersertifikasi;
7. Ketidaksesuaian antara jenis sertifikasi dan kebutuhan jabatan menyebabkan ASN belum dapat mengikuti sertifikasi kompetensi yang relevan;
8. Tingkat kesadaran dan motivasi ASN yang berbeda-beda menjadi kendala dalam pencapaian target persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.;

9. Belum optimalnya pemanfaatan metode pembelajaran teknis berbasis teknologi.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Mendorong penggunaan pembelajaran daring, blended learning, on the job training, coaching, dan mentoring untuk memperluas jangkauan ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi;
2. Penguatan penerapan sistem merit khususnya pada Aspek Manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN;
3. Melanjutkan proses pengusulan formasi sesuai aturan yang berlaku;
4. Melakukan Asistensi berkelanjutan bagi setiap ASN yang datang berkonsultasi mengenai SKP;
5. Koordinasi intensif dengan BKN terkait kelancaran aplikasi e- kinerja;
6. Melanjutkan proses usulan kuota dan jadwal ke PPSDM Regional Baso dan BPSDM Provinsi Sumatera Barat;
7. Menyusun dan memutakhirkan peta sertifikasi kompetensi ASN sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
8. Melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional ASN berdasarkan standar kompetensi;
9. Mengupayakan peningkatan dan efisiensi pemanfaatan anggaran pelatihan teknis ASN secara bertahap dan berkelanjutan.

22. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan total alokasi anggaran pada RENJA Tahun 2026 sebesar Rp 4.762.056.636,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 2.619.621.184,00 (55,01% dengan predikat *Rendah*). Rata-rata capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 68,75% (*Sedang*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 5,56% (*Sangat Rendah*).

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
INSPEKTORAT DAERAH			4.762.056.636		2.619.621.184	68,75	55,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.241.982.306		2.467.215.184	53,47	58,16
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			282.952.200		134.452.000	121,53	47,52
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	81,00		0		0	
	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	86,00		0		0	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			237.122.130		17.954.000	41,67	7,57
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3		1		33,33	
JUMLAH			4.762.056.636		2.619.621.184		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Rata-rata capaian kinerja (%)					Sub.Kegiatan	68,75	55,01
Predikat kinerja						Sedang	Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)					Program	5,56	
Predikat kinerja						Sangat Rendah	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Inspektorat Daerah:

a. Faktor Pendorong (Pendukung)

1. Pelaksanaan Pemantauan Rekomendasi Berkelanjutan: Terjadwalnya *monitoring dan evaluasi* (Monev) pemutakhiran penyelesaian TLRHP BPK dan APIP secara berkala bersama Perangkat Daerah entitas pemeriksaan.
2. Berjalannya kegiatan asistensi, sosialisasi, dan pendampingan pengawasan (*probity audit*, reviu LPPD, dan reviu RKPD) secara berkesinambungan kepada OPD.
3. Tersedianya pedoman Standar Audit, Kode Etik APIP, serta terlaksananya beberapa program Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan bagi fungsional auditor/PPUPD.

b. Faktor Penghambat

1. Lambatnya pemenuhan dokumen pertanggungjawaban serta tindak lanjut pengembalian kerugian daerah oleh entitas terperiksa (OPD/Sekolah/Desa), sehingga menahan peningkatan persentase TLRHP BPK dan APIP pada Triwulan II.
2. Terbatasnya alokasi anggaran diklat/sertifikasi audit bagi auditor dan PPUPD, yang membatasi percepatan pemenuhan elemen penilaian Kapabilitas APIP Level 3 secara menyeluruh.
3. Penilaian tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP, penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, serta penyerahan LHP BPK Triwulanan memerlukan tahapan rekonsiliasi teknis yang output resminya diterbitkan pada triwulan berikutnya.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Melaksanakan Pembahasan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut secara berkala setiap bulan bersama Perangkat Daerah entitas dan memberikan teguran tertulis bagi OPD yang lambat menindaklanjuti temuan BPK/APIP.
2. Memanfaat program pelatihan non-klasikal/daring (*e-learning* BPKP/Kementerian Dalam Negeri) serta mengoptimalkan *Quality Assurance* / Kendali Mutu Hasil Pengawasan secara internal untuk menutup keterbatasan anggaran diklat tatap muka.
3. Melakukan reviu mandiri (*self-assessment*) Kapabilitas APIP dan melengkapi dokumen pendukung (*evidence*) pada instrumen penilaian BPKP secara bertahap pada Triwulan III.
4. Meningkatkan peran asistensi/konsultatif sejak tahap perencanaan program OPD guna meminimalkan potensi penyelewengan, penyimpangan, atau risiko administratif pada tahap pelaksanaan anggaran.

23. Kecamatan

Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Secara keseluruhan,

hingga Triwulan II Tahun 2026, kinerja kecamatan menunjukkan capaian yang bervariasi baik dari sisi realisasi keuangan maupun capaian fisik program.
Adapun rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1. **Kecamatan Sangir**: Alokasi anggaran sebesar Rp2.075.734.702,00 terealisasi sebesar Rp996.131.856,00 (47,99%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 43,66% (Sangat Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 28,74% (Sangat Rendah).
2. **Kecamatan Sungai Pagu**: Alokasi anggaran sebesar Rp3.002.784.883,00 terealisasi sebesar Rp1.400.757.301,00 (46,65%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 42,34% (Sangat Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 33,69% (Sangat Rendah).
3. **Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD)**: Alokasi anggaran sebesar Rp2.617.035.648,00 terealisasi sebesar Rp1.393.418.039,00 (53,24%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 113,64% (Sangat Tinggi). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 35,47% (Sangat Rendah). Kecamatan ini mencatat capaian fisik tertinggi di antara seluruh kecamatan.
4. **Kecamatan Sangir Batanghari**: Alokasi anggaran sebesar Rp2.185.820.864,00 terealisasi sebesar Rp946.012.931,00 (43,28%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 53,89% (Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 15,63% (Sangat Rendah).
5. **Kecamatan Sangir Jujuan**: Alokasi anggaran sebesar Rp1.910.650.587,00 terealisasi sebesar Rp982.497.389,00 (51,42%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 58,17% (Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 26,24% (Sangat Rendah).
6. **Kecamatan Pauh Duo**: Alokasi anggaran sebesar Rp2.653.478.604,00 terealisasi sebesar Rp1.376.883.854,00 (51,89%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 44,87% (Sangat Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 31,24%.
7. **Kecamatan Balai Janggo**: Alokasi anggaran sebesar Rp1.793.736.111,00 terealisasi sebesar Rp818.001.007,00 (45,60%), dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 56,45% (Rendah). Rata-rata capaian kinerja program mencapai 21,88% (Sangat Rendah).

Secara umum, realisasi keuangan kecamatan hingga Triwulan II Tahun 2026 berada pada kisaran 43%–53% dari total pagu anggaran, sedangkan capaian kinerja fisik menunjukkan hasil yang cukup beragam. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh menjadi kecamatan dengan capaian fisik tertinggi, sementara kecamatan lainnya masih memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan realisasi anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Per Kecamatan Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
KECAMATAN SANGIR			2.075.734.702		996.131.856	43,66	47,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.942.934.702		944.133.656	40,48	48,59
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	82		86		104,88	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN			3.000.000		250.000	50	8,33

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.000.000		-	50	0
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000.000		200.000	50	4
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			68.000.000		15.780.040	41,67	23,21
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			41.800.000		35.768.160	57,14	85,57
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
JUMLAH			2.075.734.702		996.131.856		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**43,66**	**47,99**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**28,74**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	
KECAMATAN SUNGAI PAGU			3.002.784.883		1.400.757.301	42,34	46,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.812.134.883		1.354.982.461	64,56	48,18
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	82		98		119,51	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,2		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.400.000		-	0	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000		480.000	50	4,8
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		-	0	0
Meningkatnya	Persentase	100		50		50	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			138.750.000		14.373.000	0,67	10,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			39.500.000		30.921.840	0	78,28
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
JUMLAH			3.002.784.883		1.400.757.301		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**42,34**	**46,65**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**33,69**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	
KECAMATAN KPGD			2.617.035.648		1.393.418.039	113,64	53,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.434.233.550		1.336.158.139	74,12	54,89
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		25		26,32	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,2		25		33,69	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		80		98,77	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.000.000		235.000	200	11,75
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000.000		4.000.440	33,33	40
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.000.000		498.000	1250	24,9
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			119.960.000		18.591.420	13,18	15,5
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			48.842.098		33.935.040	81,25	69,48

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
JUMLAH			2.617.035.648		1.393.418.039		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**113,64**	**53,24**
Predikat kinerja						**Sangat tinggi**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**35,47**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	
KECAMATAN SANGIR BATANGHARI			2.185.820.864		946.012.931	53,89	43,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.015.470.864		910.588.931	49,31	45,18
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,24		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.050.000		-	50	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			9.900.000		-	50	0
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.700.000		-	50	0
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			105.900.000		7.799.000	22,27	7,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			47.800.000		27.625.000	100	57,79
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
JUMLAH			2.185.820.864		946.012.931		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**53,89**	**43,28**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**15,63**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	
KECAMATAN SANGIR JUJUAN			1.910.650.587		982.497.389	58,17	51,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.767.935.886		933.517.185	46,02	52,8

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
KABUPATEN/KOTA							
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,24		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81		89		109,88	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			975.000		-	150	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		0		0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.075.000		280.000	50	9,11
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			675.000		-	50	0
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			103.500.007		31.787.164	86,67	30,71
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			34.489.694		16.913.040	73,33	49,04
Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
JUMLAH			1.910.650.587		982.497.389		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**58,17**	**51,42**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**26,24**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	
KECAMATAN PAUH DUO			2.653.478.604		1.376.883.854	44,87	51,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.483.997.204		1.334.579.854	45,31	53,73
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	91		90		98,9	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		1		1,05	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.569.400		-	50	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	100		0		0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Tingkat Kecamatan	(Persentase)						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			11.507.000		-	50	0
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.700.000		-	50	0
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			101.805.000		6.379.000	30,56	6,27
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		50		50	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			49.900.000		35.925.000	50	71,99
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		50		50	
JUMLAH			2.653.478.604		1.376.883.854		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**44,87**	**51,89**
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**31,24**	
KECAMATAN BALAI JANGGO			1.793.736.111		818.001.007	56,45	45,6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.622.436.111		741.417.727	55,46	45,7
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	89,19		0		0	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		0	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.800.000		-	50	0
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.050.000		6.093.680	50	43,37
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.800.000		-	50	0
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		25		25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			118.250.000		40.189.600	60,42	33,99
Meningkatnya	Persentase	100		25		25	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026i		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			35.400.000		30.300.000	62,5	85,59
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		0		0	
JUMLAH			1.793.736.111		818.001.007		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**56,45**	**45,6**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**21,88**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Kecamatan:

a. Faktor Pendukung

1. Dukungan aparatur kecamatan dan pemerintah nagari dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, dan pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.
3. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan tingkat kecamatan.
4. Ketersediaan dukungan anggaran operasional yang menunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

b. Faktor Penghambat

1. Sebagian kegiatan masih berada pada tahap administrasi, persiapan pelaksanaan, dan proses pengadaan sehingga realisasi fisik dan keuangan belum optimal.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur pada beberapa kecamatan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan beberapa target kinerja belum dapat direalisasikan pada Triwulan II.
4. Kondisi geografis dan jangkauan wilayah pelayanan yang cukup luas pada beberapa kecamatan sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih dalam tahap persiapan dan administrasi agar realisasi fisik dan keuangan meningkat pada semester kedua.
2. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan antara kecamatan, pemerintah nagari, dan perangkat daerah terkait.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap kecamatan.

24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total alokasi

anggaran pada RENJA Tahun 2026 sebesar Rp 4.270.838.002,00 dan realisasi keuangan hingga Triwulan II sebesar Rp 959.851.830,00 (22,47% dengan predikat *Sangat Rendah*). Rata-rata capaian kinerja fisik pada tingkat Sub-Kegiatan tercatat sebesar 57,91% (*Rendah*), sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja Program berada pada angka 39,48% (*Sangat Rendah*)

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Per Triwulan II Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2026 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.270.838.002		959.851.830	57,91	22,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.626.166.846		723.440.254	70	44,49
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,75		0		0	
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81,00		93		114,81	
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95,00		0		0	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			980.207.380		103.829.400	45,83	10,59
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100		50		50	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			958.521.976		1.976.200	1	0,21
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100		1		1	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			4.150.000		-	20	0
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100		50		50	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			5.190.000		-	50	0
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100		50		50	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			696.601.800		130.605.976	3,38	18,75
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100		50		50	
JUMLAH			4.270.838.002		959.851.830		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Sub. Kegiatan**	**57,91**	**22,47**
Predikat kinerja						**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja (%)					**Program**	**39,48**	
Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	

Sumber : SIPD Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2026

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik:

a. Faktor Pendorong (Pendukung)

1. Sinergi dan Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan: Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pengurus Partai Politik, Tokoh Agama (FKUB), Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan dalam menghadiri agenda sosialisasi serta pembinaan politik daerah.
2. Kepuasan publik yang tinggi terhadap pelayanan administrasi internal dan rekomendasi keorganisasian.
3. Kolaborasi Antar-Lembaga dan Intelijen Daerah: Terbangunnya koordinasi yang solid dalam Tim Kewaspadaan Dini Daerah (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bersama aparat keamanan (TNI/Polri) untuk pemantauan potensi konflik sosial secara dini.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Personil dan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah aparatur yang terbatas dibandingkan dengan luas daerah jangkauan pembinaan, pengawasan Ormas, serta cakupan pemantauan kewaspadaan dini di tingkat kecamatan/nagari.
2. Prosedur administratif dan verifikasi bantuan keuangan parpol baru dapat terealisasi maksimal dapat terealisasi di Triwulan III.
3. Mekanisme Pelaporan Indikator Berbasis Siklus Akhir Tahun.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya Manusia:
2. Percepatan Verifikasi dan Pencairan Bantuan Keuangan Parpol:
3. Penguatan Digitalisasi Pendataan Ormas dan Waspada Dini:
4. Percepatan Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Ideologi.

2.2.2.2. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2026 Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Realisasi keuangan daerah hingga Triwulan II telah mencapai sebesar 36,02% dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2026, dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 26,28% dengan predikat kinerja masih sangat rendah. Meskipun demikian capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pada semester kedua untuk memastikan target kinerja dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Kondisi ini tidak terlepas pada sebahagian besar indikator program hanya dapat dihitung pada akhir tahun anggaran namun selain itu masih terdapat indikator program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum sesuai target akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, proses administrasi dan pengadaan yang memerlukan waktu lebih panjang, keterbatasan kapasitas pelaksana kegiatan, serta adanya penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan pengendalian dan evaluasi, serta optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah agar target pembangunan daerah Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.165.086.433**		**226.171.696**		**229.418.631**		**46.511.417**		**26.369.654**		**72.881.071**	**26,99**	**31,77**		**72.881.071**	**10,88**	**6,26**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**952.144.000**		**181.435.018**		**193.937.518**		**43.579.803**		**16.060.092**		**59.639.896**	**51,14**	**30,75**		**59.639.896**	**9,65**	**6,26**	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		71,45		75,05		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	90		82,86		86,00		89		89		89		103,49		89		98,89		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	96		96		96,00		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	9,09	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	22		4		0		0		2		2		0		2		9,09		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	9,09	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	22		4		0		0		2		2		0		2		9,09		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			946.421.500		180.611.054		193.637.821		43.519.473		15.919.071		59.438.544	140,92	30,7		59.438.544	13,05	6,28	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8957		450,25		1801		1.474		1.474		1.474		81,84		1.474		16,46		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	249		7,25		12		12		12		24		200		24		9,64		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			944.796.500		180.311.994		193.344.941		43.416.438		15.843.996		59.260.434	81,84	30,65		59.260.434	16,46	6,27	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8957		450,25		1801		1.474		1.474		1.474		81,84		1.474		16,46		
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.625.000		299.060		292.880		103.035		75.075		178.110	200	60,81		178.110	9,64	10,96	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	249		7,25		12		12		12		24		200		24		9,64		
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Barang Milik Daerah terinventarisir	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	50		2		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	50		2		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.047.500		297.985		158.999		19.311		78.544		97.855	42,86	61,54		97.855	10	4,78	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Tangga yang Disediakan (Paket)																			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		2		1		1		1		50		1		20		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			75.000		14.979		7.220		-		2.309		2.309	50	31,98		2.309	10	3,08	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			250.000		47.350		25.000		-		22.430		22.430	50	89,72		22.430	10	8,97	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		9.981		8.000		2.638		1.500		4.138	50	51,73		4.138	10	16,55	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			150.000		26.656		20.000		-		3.510		3.510	25	17,55		3.510	5	2,34	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		1		25		1		5		
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.000		7.181		4.995		-		4.498		4.498	50	90,05		4.498	10	7,5	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.362.500		191.838		93.784		16.673		44.297		60.970	25	65,01		60.970	5	4,47	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			125.000		-		-		-		-		-	50	0		-	20	0	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		2		1		1		1		50		1		20		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.431.000		28.760		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		6		6		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			275.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			306.000		28.760		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		6		6		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			850.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			420.000		241.501		35.699		3.858		9.794		13.652	43,75	38,24		13.652	10,25	3,25	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		11		13		13		13		13		100		13		26		
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.000		7.500		5.000		1.500		1.000		2.500	25	50		2.500	5	5	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			220.000		34.236		23.199		1.605		4.815		6.420	25	27,67		6.420	5	2,92	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		3		25		3		5		
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000		21.352		7.500		753		3.980		4.733	25	63,1		4.733	5	4,73	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		1		25		1		5		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.000		178.413		-		-		-		-	100	0		-	26	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		11		13		13		13		13		100		13		26		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.524.000		255.718		104.999		37.162		52.683		89.845	56,25	85,57		89.845	23,37	5,9	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	115		0		0		25		25		25		0		25		21,74		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		22		25		25		25		25		100		25		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan	4		2		8		1		1		1		12,5		1		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																			
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			900.000		-		-		18.581		26.014		44.595	0	0		44.595	21,74	4,96	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	115		0		0		25		25		25		0		25		21,74		
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		116.439		89.989		18.581		26.014		44.595	100	49,56		44.595	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		22		25		25		25		25		100		25		0		
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			624.000		139.279		15.010		-		655		655	12,5	4,36		655	25	0,1	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		8		1		1		1		12,5		1		25		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**194.708.928**		**22.401.453**		**13.912.600**		**248.374**		**4.822.175**		**5.070.549**	**26,61**	**36,45**		**5.070.549**	**9,25**	**2,6**	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	78,94		0		66,45		64,12		69,01		69,01		103,85		69,01		87,42		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	56,03		0		37,47		59,08		59,14		59,14		157,83		59,14		105,55		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100		0		100		99,02		101,72		101,72		101,72		101,72		101,72		
		Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS) (Persentase)	100		0		100		86,68		82,56		82,56		82,56		82,56		82,56		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			94.398.151		9.834.374		4.789.721		9.891		2.456.543		2.466.434	32,94	51,49		2.466.434	18,53	2,61	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	28		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	67		2,75		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	34		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	21		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	19		0,25		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1895		282		100		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	115		196		75		0		505		505		673,33		505		439,13		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	612		140		25		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1400		840		275		0		158		79		28,73		79		5,64		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	125		140		50		0		132		66		132		66		52,8		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	140		140		137		140		140		140		102,19		140		100		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	280		560		150		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	18		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Mebel Sekolah yang	70		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)																			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1985		175		150		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	200		10		15		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	140		140		137		249		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	125		140		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	74		10		12		0		6		6		50		6		8,11		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	690		140		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	19		0		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	125		2,5		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	9650		0		1000		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	900		0		350		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	16		8		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	660		52,75		60		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	140		34,5		137		0		138		138		100,73		138		98,57		
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	59		11		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik Sekolah	24032		3.694		4225		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)																			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10		9		5		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			8.249.248		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	28		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			5.892.320		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.464.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			10.055.360		1.297.817		100.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	67		2,75		4		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			10.472.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	34		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.298.005		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			331.443		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.392.061		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	21		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			2.355.286		116.998		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	19		0,25		4		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			2.268.672		286.919		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1895		282		100		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			900.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.105.126		376.186		48.000		-		13.766		13.766	673,33	28,68		13.766	439,13	1,25	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	115		196		75		0		505		505		673,33		505		439,13		
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			110.513		30.749		10.050		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	612		140		25		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.105.126		852.224		33.630		-		12.773		12.773	28,73	37,98		12.773	5,64	1,16	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1400		840		275		0		158		79		28,73		79		5,64		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			138.141		37.215		8.510		-		6.403		6.403	132	75,24		6.403	52,8	4,63	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	125		140		50		0		132		66		132		66		52,8		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			151.955		22.296		9.000		-		-		-	102,19	0		-	100	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	140		140		137		140		140		140		102,19		140		100		
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			231.489		36.288		20.935		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	280		560		150		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			5.784.912		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	18		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			292.779		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	70		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			165.769		27.888		13.940		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1985		175		150		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			193.397		32.988		12.230		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital	Jumlah konten digital untuk	200		10		15		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	untuk pendidikan yang dikembangkan	pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)																			
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			179.583		15.970		15.400		9.891		3.600		13.491	0	87,6		13.491	0	7,51	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	140		140		137		249		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			138.141		36.240		12.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	125		140		12		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			151.955		88.140		13.515		-		8.167		8.167	50	60,43		8.167	8,11	5,37	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	74		10		12		0		6		6		50		6		8,11		
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			165.769		36.500		17.880		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	690		140		50		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			2.375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	19		0		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			138.141		18.553		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	125		2,5		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			482.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	9650		0		1000		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			225.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	900		0		350		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.923.968		846.245		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	16		8		3		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			720.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			193.397		64.533		47.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	660		52,75		60		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			11.410.841		1.940.160		2.747.068		-		2.407.190		2.407.190	100,73	87,63		2.407.190	98,57	21,1	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	140		34,5		137		0		138		138		100,73		138		98,57		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.450.600		1.926.351		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	59		11		3		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			8.500.656		1.179.876		1.660.163		-		4.645		4.645	0	0,28		4.645	0	0,05	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	24032		3.694		4225		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			600.000		564.238		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10		9		5		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			45.563.776		4.842.412		2.820.068		121.917		376.475		498.393	25,88	17,67		498.393	8,69	1,09	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	12		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	9		3		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	16		1		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	19		1		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	510		90		250		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19898		3.481		4368		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	450		904		75		36		300		336		448		336		74,67		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	225		23,5		25		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1240		50,25		250		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	180		36		37		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	180		9		37		36		36		36		97,3		36		20		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	540		41,5		108		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	590		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	540		179		108		0		37		37		34,26		37		6,85		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	64		88		15		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	636		138		37		0		54		54		145,95		54		8,49		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	70		10		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan	50		10		5		1		0		0,5		10		0,5		1		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)																			
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	215		20,5		48		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	70		1		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	20		1		37		0		37		37		100		37		185		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	140		22		50		0		48		48		96		48		34,29		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5750		0		370		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1195		0		250		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	12		6		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	19		0		5		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.296.060		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.814.484		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.592.120		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			3.772.837		453.538		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	12		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.473.080		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.029.119		177.285		100.026		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan	9		3		3		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Sekolah yang Terbangun	Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)																			
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.829.546		581.207		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	16		1		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			960.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			975.930		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			487.965		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.308.070		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	7		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.563.076		49.755		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	19		1		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			1.020.000		410.377		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	510		90		250		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			360.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			7.748.620		1.340.486		1.748.292		-		2.295		2.295	0	0,13		2.295	0	0,03	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19898		3.481		4368		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.516.411		356.124		261.457		118.839		89.815		208.654	448	79,8		208.654	74,67	13,76	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	450		904		75		36		300		336		448		336		74,67		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			110.513		8.577		9.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	225		23,5		25		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)																			
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			663.076		115.986		48.215		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1240		50,25		250		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			138.141		27.161		17.820		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	180		36		37		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			193.397		14.760		7.100		-		1.823		1.823	97,3	25,67		1.823	20	0,94	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	180		9		37		36		36		36		97,3		36		20		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			276.282		22.014		7.692		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	540		41,5		108		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			295.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	590		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			248.653		32.178		12.060		-		9.198		9.198	34,26	76,27		9.198	6,85	3,7	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	540		179		108		0		37		37		34,26		37		6,85		
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			193.397		24.504		5.190		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	64		88		15		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			149.304		14.163		4.860		-		2.916		2.916	145,95	60		2.916	8,49	1,95	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	636		138		37		0		54		54		145,95		54		8,49		
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			138.141		17.063		6.480		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	70		10		12		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			165.769		38.145		4.860		3.078		-		3.078	10	63,33		3.078	1	1,86	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50		10		5		1		0		0,5		10		0,5		1		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pendidikan	(Dokumen)																			
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			179.583		23.163		23.220		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	215		20,5		48		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			165.769		16.669		6.886		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	70		1		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			4.591.238		582.500		539.400		-		262.437		262.437	100	48,65		262.437	185	5,72	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	20		1		37		0		37		37		100		37		185		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.237.448		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			221.025		3.232		9.910		-		7.992		7.992	96	80,65		7.992	34,29	3,62	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	140		22		50		0		48		48		96		48		34,29		
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			287.500		-		7.200		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5750		0		370		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			544.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1195		0		250		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			993.223		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			900.000		533.525		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	12		6		3		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			2.375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	19		0		5		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			36.780.797		5.503.438		4.203.198		116.566		1.020.509		1.137.075	17,89	27,05		1.137.075	2,59	3,09	
	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	13		4		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	500		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	25		8		8		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta	26020		3.851		5200		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Didik (Peserta Didik)																			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	150		42		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1000		86,25		150		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	240		154		164		30		0		15		9,15		15		6,25		
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	775		38,5		164		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1750		48,75		328		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	400		7,5		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	40		1,25		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	400		38,5		50		0		50		50		100		50		12,5		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25		28		6		2		0		1		16,67		1		4		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	50		10		4		1		0		1		25		1		2		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	13		10		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	50		11		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	8		3		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	100		30		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100		19,25		30		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		yang dilaksanakan (Orang)																			
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5500		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	30		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	775		38,75		164		155		155		310		189,02		310		40		
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	9		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.105.000		525.645		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	13		4		2		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	500		0		100		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			1.875.000		401.852		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	25		8		8		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			8.846.868		1.235.143		1.679.695		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	26020		3.851		5200		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			110.513		13.438		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	150		42		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			221.025		35.960		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1000		86,25		150		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			828.845		137.240		56.910		2.370		-		2.370	9,15	4,16		2.370	6,25	0,29	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	240		154		164		30		0		15		9,15		15		6,25		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			185.769		18.681		26.140		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	775		38,5		164		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			110.513		12.448		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1750		48,75		328		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			123.024		15.380		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	400		7,5		50		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			96.699		12.674		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	40		1,25		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			110.513		15.974		17.560		-		16.191		16.191	100	92,2		16.191	12,5	14,65	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	400		38,5		50		0		50		50		100		50		12,5		
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			116.038		16.785		18.433		7.550		-		7.550	16,67	40,96		7.550	4	6,51	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25		28		6		2		0		1		16,67		1		4		
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			138.141		14.419		19.840		7.326		-		7.326	25	36,93		7.326	2	5,3	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	50		10		4		1		0		1		25		1		2		
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.404.000		336.132		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	13		10		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			300.000		39.361		34.140		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	50		11		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.041.984		272.472		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	8		3		1		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			375.000		10.340		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	100		30		10		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			125.000		18.314		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		19,25		30		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			687.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta	5500		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	yang Tersedia	Didik yang Tersedia (Paket)																			
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			420.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			780.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			1.513.440		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	30		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			13.300.000		2.371.182		2.350.480		99.320		1.004.318		1.103.638	189,02	46,95		1.103.638	40	8,3	
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	775		38,75		164		155		155		310		189,02		310		40		
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.590.926		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	9		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			17.966.203		2.221.229		2.099.613		-		968.648		968.648	25,13	46,13		968.648	2,36	5,39	
	Persentase Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1500		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	80		7,25		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		6,75		30		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		3		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	60		3		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	240		9		40		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan	180		9		25		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)																			
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	18		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		9		36		0		31		15,5		43,06		15,5		8,61		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25		10		6		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1,25		6		0		2		2		33,33		2		8		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	23		17		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	48		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	540		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	4800		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		8,75		60		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	60		12		12		12		12		24		200		24		40		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	11		0,25		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga	8		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)																			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			1.325.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1500		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			40.000		2.462		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	80		7,25		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			175.000		13.464		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		6,75		30		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			105.000		8.591		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		3		12		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			100.000		10.253		12.340		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	60		3		12		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			100.000		14.010		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	240		9		40		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			100.000		11.354		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	180		9		25		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			90.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	18		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			100.000		7.788		12.760		-		8.874		8.874	43,06	69,55		8.874	8,61	8,87	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		9		36		0		31		15,5		43,06		15,5		8,61		
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			120.000		11.248		16.633		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25		10		6		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			125.000		14.233		14.440		-		2.032		2.032	33,33	14,07		2.032	8	1,63	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1,25		6		0		2		2		33,33		2		8		
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			180.000		34.751		20.940		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	23		17		12		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			140.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	48		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			270.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	540		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			114.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	4800		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			745.816		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			440.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			210.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			122.500		11.090		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		8,75		60		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			10.179.000		1.866.650		2.022.500		-		957.742		957.742	200	47,35		957.742	40	9,41	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	60		12		12		12		12		24		200		24		40		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			412.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			935.000		215.335		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	11		0,25		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			600.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.237.387		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**500.000**		**83.783**		**209.970**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100		0		75,00		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			325.000		83.783		209.970		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase sekolah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	900		625		2500		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	75		0		90		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			45.000		83.783		135.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	900		625		2500		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			60.000		-		74.970		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	75		0		90		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase sekolah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	300		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	45		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	300		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	45		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**757.538**		**87.750**		**100.000**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Persentase)	100		0		90,00		84,46		84,46		84,46		93,84		84,46		84,46		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Persentase)	100		0		85,00		90,36		90,36		90,36		106,31		90,36		90,36		
		Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	0,95		0		0,55		0,68		0,68		0,68		123,64		0,68		71,58		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			757.538		87.750		100.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	50		3,75		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			540.000		87.750		100.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	50		3,75		12		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)																			
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			217.538		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**210.968**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100		0		100,00		100		100		100		100		100		100		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			75.968		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang diterbitkan Izinnya	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			30.968		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			45.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			135.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diterbitkan Izinnya	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**13.714.200**		**2.802.894**		**2.687.303**		**569.396**		**629.205**		**1.198.601**	**100**	**44,6**		**1.198.601**	**20**	**8,74**	UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														100				20		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			13.714.200		2.802.894		2.687.303		569.396		629.205		1.198.601	100	44,6		1.198.601	20	8,74	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	105		21		21		21		21		21		100		21		20		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			13.714.200		2.802.894		2.687.303		569.396		629.205		1.198.601	100	44,6		1.198.601	20	8,74	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	105		21		21		21		21		21		100		21		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**2.406.875**		**2.432.563**		**371.792**		**463.045**		**834.837**	**102,27**	**34,32**		**834.837**	**19,57**	**0**	UPTD Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														102,27				19,57		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		2.406.875		2.432.563		371.792		463.045		834.837	102,27	34,32		834.837	19,57	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		23		22		23		22		22,5		102,27		22,5		19,57		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		2.406.875		2.432.563		371.792		463.045		834.837	102,27	34,32		834.837	19,57	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		23		22		23		22		22,5		102,27		22,5		19,57		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**1.410.273**		**1.364.723**		**290.879**		**251.518**		**542.398**	**100**	**39,74**		**542.398**	**20**	**0**	UPTD Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														100				20		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		1.410.273		1.364.723		290.879		251.518		542.398	100	39,74		542.398	20	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	80		16		16		16		16		16		100		16		20		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		1.410.273		1.364.723		290.879		251.518		542.398	100	39,74		542.398	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	80		16		16		16		16		16		100		16		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**4.702.070**		**4.507.143**		**585.280**		**1.068.768**		**1.654.048**	**96,97**	**36,7**		**1.654.048**	**19,39**	**0**	UPTD Kecamatan Sangir
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														96,97				19,39		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		4.702.070		4.507.143		585.280		1.068.768		1.654.048	96,97	36,7		1.654.048	19,39	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	165		33		33		33		31		32		96,97		32		19,39		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		4.702.070		4.507.143		585.280		1.068.768		1.654.048	96,97	36,7		1.654.048	19,39	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	165		33		33		33		31		32		96,97		32		19,39		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**1.230.340**		**1.219.023**		**123.822**		**178.528**		**302.350**	**100**	**24,8**		**302.350**	**20**	**0**	UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														100				20		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		1.230.340		1.219.023		123.822		178.528		302.350	100	24,8		302.350	20	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	60		12		12		12		12		12		100		12		20		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		1.230.340		1.219.023		123.822		178.528		302.350	100	24,8		302.350	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	60		12		12		12		12		12		100		12		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**1.392.186**		**1.143.823**		**197.600**		**177.096**		**374.696**	**100**	**32,76**		**374.696**	**20**	**0**	UPTD Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														100				20		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		1.392.186		1.143.823		197.600		177.096		374.696	100	32,76		374.696	20	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	60		12		12		12		12		12		100		12		20		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		1.392.186		1.143.823		197.600		177.096		374.696	100	32,76		374.696	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	60		12		12		12		12		12		100		12		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**2.124.067**		**2.007.683**		**268.421**		**436.860**		**705.281**	**100**	**35,13**		**705.281**	**20**	**0**	UPTD Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														100				20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		2.124.067		2.007.683		268.421		436.860		705.281	100	35,13		705.281	20	0	
Persentase Warga Usia 7	12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	105		21		21		21		21		21		100		21		20		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			-		2.124.067		2.007.683		268.421		436.860		705.281	100	35,13		705.281	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	105		21		21		21		21		21		100		21		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**3.050.800**		**697.863**		**615.960**		**73.830**		**210.828**		**284.659**	**0,19**	**46,21**		**284.659**	**20**	**9,33**	SMPN 1
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,19				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3.050.800		697.863		615.960		73.830		210.828		284.659	0,19	46,21		284.659	20	9,33	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		532		1		1		1		0,19		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			3.050.800		697.863		615.960		73.830		210.828		284.659	0,19	46,21		284.659	20	9,33	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		532		1		1		1		0,19		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**156.664**		**165.880**		**8.009**		**76.405**		**84.414**	**0,81**	**50,89**		**84.414**	**20**	**0**	SMPN 2
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,81				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		156.664		165.880		8.009		76.405		84.414	0,81	50,89		84.414	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		123		1		1		1		0,81		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		156.664		165.880		8.009		76.405		84.414	0,81	50,89		84.414	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		123		1		1		1		0,81		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**533.738**		**503.440**		**-**		**176.530**		**176.530**	**0,23**	**35,06**		**176.530**	**20**	**0**	SMPN 3
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,23				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		533.738		503.440		-		176.530		176.530	0,23	35,06		176.530	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		438		1		1		1		0,23		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		533.738		503.440		-		176.530		176.530	0,23	35,06		176.530	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		438		1		1		1		0,23		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**593.801**		**561.440**		**-**		**258.909**		**258.909**	**0,21**	**46,12**		**258.909**	**20**	**0**	SMPN 4
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,21				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		593.801		561.440		-		258.909		258.909	0,21	46,12		258.909	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		477		1		1		1		0,21		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		593.801		561.440		-		258.909		258.909	0,21	46,12		258.909	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		477		1		1		1		0,21		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**156.400**		**153.120**		**2.000**		**73.486**		**75.486**	**2,04**	**49,3**		**75.486**	**40**	**0**	SMPN 5
	Meningkatnya partisipasi anak usia														2,04				40		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	sekolah																				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		156.400		153.120		2.000		73.486		75.486	2,04	49,3		75.486	40	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		98		1		1		2		2,04		2		40		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		156.400		153.120		2.000		73.486		75.486	2,04	49,3		75.486	40	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		98		1		1		2		2,04		2		40		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**182.032**		**207.640**		**-**		**100.499**		**100.499**	**2,33**	**48,4**		**100.499**	**40**	**0**	SMPN 6
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														2,33				40		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		182.032		207.640		-		100.499		100.499	2,33	48,4		100.499	40	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		86		1		1		2		2,33		2		40		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		182.032		207.640		-		100.499		100.499	2,33	48,4		100.499	40	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		86		1		1		2		2,33		2		40		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**97.340**		**78.880**		**-**		**20.916**		**20.916**	**1,14**	**26,52**		**20.916**	**20**	**0**	SMPN 7
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,14				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		97.340		78.880		-		20.916		20.916	1,14	26,52		20.916	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		88		1		1		1		1,14		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		97.340		78.880		-		20.916		20.916	1,14	26,52		20.916	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		88		1		1		1		1,14		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**236.735**		**255.200**		**-**		**69.659**		**69.659**	**0,47**	**27,3**		**69.659**	**20**	**0**	SMPN 8
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,47				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		236.735		255.200		-		69.659		69.659	0,47	27,3		69.659	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		213		1		1		1		0,47		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		236.735		255.200		-		69.659		69.659	0,47	27,3		69.659	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		213		1		1		1		0,47		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**114.894**		**78.880**		**-**		**26.836**		**26.836**	**1,39**	**34,02**		**26.836**	**20**	**0**	SMPN 9
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,39				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		114.894		78.880		-		26.836		26.836	1,39	34,02		26.836	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		72		1		1		1		1,39		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		114.894		78.880		-		26.836		26.836	1,39	34,02		26.836	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		72		1		1		1		1,39		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**69.520**		**153.120**		**-**		**69.113**		**69.113**	**0,64**	**45,14**		**69.113**	**20**	**0**	SMPN 10

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,64				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		69.520		153.120		-		69.113		69.113	0,64	45,14		69.113	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		156		1		1		1		0,64		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		69.520		153.120		-		69.113		69.113	0,64	45,14		69.113	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		156		1		1		1		0,64		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**252.880**		**280.720**		**25.070**		**114.790**		**139.860**	**0,41**	**49,82**		**139.860**	**20**	**0**	SMPN 11
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,41				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		252.880		280.720		25.070		114.790		139.860	0,41	49,82		139.860	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		243		1		1		1		0,41		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		252.880		280.720		25.070		114.790		139.860	0,41	49,82		139.860	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		243		1		1		1		0,41		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**293.398**		**242.440**		**24.809**		**95.282**		**120.092**	**0,43**	**49,53**		**120.092**	**20**	**0**	SMPN 12
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,43				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		293.398		242.440		24.809		95.282		120.092	0,43	49,53		120.092	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		230		1		1		1		0,43		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		293.398		242.440		24.809		95.282		120.092	0,43	49,53		120.092	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		230		1		1		1		0,43		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**185.736**		**187.920**		**3.450**		**46.813**		**50.263**	**0,74**	**26,75**		**50.263**	**20**	**0**	SMPN 13
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,74				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		185.736		187.920		3.450		46.813		50.263	0,74	26,75		50.263	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		135		1		1		1		0,74		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		185.736		187.920		3.450		46.813		50.263	0,74	26,75		50.263	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		135		1		1		1		0,74		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**397.198**		**397.880**		**65.147**		**131.633**		**196.779**	**0,3**	**49,46**		**196.779**	**20**	**0**	SMPN 14
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,3				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		397.198		397.880		65.147		131.633		196.779	0,3	49,46		196.779	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		330		1		1		1		0,3		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		397.198		397.880		65.147		131.633		196.779	0,3	49,46		196.779	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		330		1		1		1		0,3		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**80.505**		**82.360**		-		**34.750**		**34.750**	**1,47**	**42,19**		**34.750**	**25**	**0**	SMPN 15
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,47				25		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		80.505		82.360		-		34.750		34.750	1,47	42,19		34.750	25	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4		0,25		68		1		1		1		1,47		1		25		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		80.505		82.360		-		34.750		34.750	1,47	42,19		34.750	25	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4		0,25		68		1		1		1		1,47		1		25		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**106.720**		**109.040**		-		**42.775**		**42.775**	**1,89**	**39,23**		**42.775**	**40**	**0**	SMPN 16
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,89				40		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		106.720		109.040		-		42.775		42.775	1,89	39,23		42.775	40	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		106		1		1		2		1,89		2		40		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		106.720		109.040		-		42.775		42.775	1,89	39,23		42.775	40	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		106		1		1		2		1,89		2		40		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**119.118**		**110.200**		-		**37.799**		**37.799**	**1,35**	**34,3**		**37.799**	**20**	**0**	SMPN 17
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,35				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		119.118		110.200		-		37.799		37.799	1,35	34,3		37.799	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		74		1		1		1		1,35		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		119.118		110.200		-		37.799		37.799	1,35	34,3		37.799	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		74		1		1		1		1,35		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**82.899**		**69.600**		-		**34.800**		**34.800**	**1,45**	**50**		**34.800**	**20**	**0**	SMPN 18
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,45				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		82.899		69.600		-		34.800		34.800	1,45	50		34.800	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		69		1		1		1		1,45		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		82.899		69.600		-		34.800		34.800	1,45	50		34.800	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		69		1		1		1		1,45		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**87.912**		**93.960**		-		**44.103**		**44.103**	**1,35**	**46,94**		**44.103**	**20**	**0**	SMPN 19
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,35				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		87.912		93.960		-		44.103		44.103	1,35	46,94		44.103	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		74		1		1		1		1,35		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		87.912		93.960		-		44.103		44.103	1,35	46,94		44.103	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan	5		0,25		74		1		1		1		1,35		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pendidikan)																				
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**233.836**		**230.840**		**22.838**		**88.970**		**111.808**	**0,46**	**48,44**		**111.808**	**20**	**0**	SMPN 20
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,46				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		233.836		230.840		22.838		88.970		111.808	0,46	48,44		111.808	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		216		1		1		1		0,46		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		233.836		230.840		22.838		88.970		111.808	0,46	48,44		111.808	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		216		1		1		1		0,46		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**89.165**		**75.400**		**9.759**		**20.685**		**30.443**	**1,47**	**40,38**		**30.443**	**20**	**0**	SMPN 21
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,47				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		89.165		75.400		9.759		20.685		30.443	1,47	40,38		30.443	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		68		1		1		1		1,47		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		89.165		75.400		9.759		20.685		30.443	1,47	40,38		30.443	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		68		1		1		1		1,47		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**75.280**		**67.280**		-		**33.640**		**33.640**	**1,33**	**50**		**33.640**	**20**	**0**	SMPN 23
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,33				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		75.280		67.280		-		33.640		33.640	1,33	50		33.640	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		75		1		1		1		1,33		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		75.280		67.280		-		33.640		33.640	1,33	50		33.640	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		75		1		1		1		1,33		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**76.680**		**69.600**		-		**34.800**		**34.800**	**1,67**	**50**		**34.800**	**20**	**0**	SMPN 24
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,67				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		76.680		69.600		-		34.800		34.800	1,67	50		34.800	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		60		1		1		1		1,67		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		76.680		69.600		-		34.800		34.800	1,67	50		34.800	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		1		60		1		1		1		1,67		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**139.340**		**100.920**		**14.403**		**30.162**		**44.565**	**1,09**	**44,16**		**44.565**	**20**	**0**	SMPN 25
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,09				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		139.340		100.920		14.403		30.162		44.565	1,09	44,16		44.565	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		92		1		1		1		1,09		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		139.340		100.920		14.403		30.162		44.565	1,09	44,16		44.565	20	0	
	Terselenggaranya Proses	Jumlah Peserta Didik yang	5		0,25		92		1		1		1		1,09		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Belajar bagi Peserta Didik	Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)																			
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**76.638**		**82.360**		**5.762**		**29.766**		**35.528**	**1,56**	**43,14**		**35.528**	**20**	**0**	SMPN 26
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,56				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		76.638		82.360		5.762		29.766		35.528	1,56	43,14		35.528	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		64		1		1		1		1,56		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		76.638		82.360		5.762		29.766		35.528	1,56	43,14		35.528	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		64		1		1		1		1,56		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**86.217**		**91.640**		-		**34.416**		**34.416**	**1,41**	**37,56**		**34.416**	**20**	**0**	SMPN 27
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,41				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		86.217		91.640		-		34.416		34.416	1,41	37,56		34.416	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		71		1		1		1		1,41		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		86.217		91.640		-		34.416		34.416	1,41	37,56		34.416	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		71		1		1		1		1,41		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**203.200**		**178.640**		-		**89.051**		**89.051**	**0,75**	**49,85**		**89.051**	**25**	**0**	SMPN 28
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,75				25		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		203.200		178.640		-		89.051		89.051	0,75	49,85		89.051	25	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4		0,25		133		1		1		1		0,75		1		25		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		203.200		178.640		-		89.051		89.051	0,75	49,85		89.051	25	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	4		0,25		133		1		1		1		0,75		1		25		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**249.574**		**230.840**		**19.622**		**85.522**		**105.144**	**0**	**45,55**		**105.144**	**20**	**0**	SMPN 29
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		249.574		230.840		19.622		85.522		105.144	0	45,55		105.144	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		0		1		1		1		0		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		249.574		230.840		19.622		85.522		105.144	0	45,55		105.144	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		0		1		1		1		0		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			-		**69.292**		**83.520**		-		**28.426**		**28.426**	**1,79**	**34,03**		**28.426**	**20**	**0**	SMPN 30
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,79				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		69.292		83.520		-		28.426		28.426	1,79	34,03		28.426	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		56		1		1		1		1,79		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		69.292		83.520		-		28.426		28.426	1,79	34,03		28.426	20	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		56		1		1		1		1,79		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**76.877**		**69.600**		**-**		**24.435**		**24.435**	**1,67**	**35,11**		**24.435**	**20**	**0**	SMPN 31
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,67				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		76.877		69.600		-		24.435		24.435	1,67	35,11		24.435	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		60		1		1		1		1,67		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		76.877		69.600		-		24.435		24.435	1,67	35,11		24.435	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		60		1		1		1		1,67		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**194.662**		**178.640**		**-**		**86.117**		**86.117**	**0,78**	**48,21**		**86.117**	**20**	**0**	SMPN 32
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														0,78				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		194.662		178.640		-		86.117		86.117	0,78	48,21		86.117	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		128		1		1		1		0,78		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		194.662		178.640		-		86.117		86.117	0,78	48,21		86.117	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		128		1		1		1		0,78		1		20		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**-**		**78.872**		**89.320**		**1.350**		**30.452**		**31.802**	**1,2**	**35,6**		**31.802**	**20**	**0**	SMPN 36
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														1,2				20		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		78.872		89.320		1.350		30.452		31.802	1,2	35,6		31.802	20	0	
Persentase Warga Usia 13	15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		83		1		1		1		1,2		1		20		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			-		78.872		89.320		1.350		30.452		31.802	1,2	35,6		31.802	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		0,25		83		1		1		1		1,2		1		20		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.197.504.990**		**162.536.941**		**170.781.722**		**35.505.505**		**29.219.886**		**64.725.391**	**627,12**	**37,9**		**64.725.391**	**100,3**	**5,41**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**356.120.804**		**60.092.365**		**54.621.336**		**12.518.485**		**13.713.526**		**26.232.012**	**61,62**	**48,03**		**26.232.012**	**10,45**	**7,37**	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		75,75		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		81		81,00		91		89		89		109,88		89		104,71		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		95		95,00		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	7,43	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		0		0		1		1		0		1		2,86		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		5		0		2		1		3		0		3		12		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	2,86	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		0		0		1		1		0		1		2,86		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	12	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		5		0		2		1		3		0		3		12		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			341.259.054		56.864.760		53.873.550		12.504.684		13.613.686		26.118.370	73,8	48,48		26.118.370	18,16	7,65	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3345		659		668		655		649		652		97,6		652		19,49		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		1		0		1		1		1		0		1		25		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			338.105.154		56.191.040		53.507.670		12.437.599		13.539.947		25.977.546	97,6	48,55		25.977.546	19,49	7,68	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3345		659		668		655		649		652		97,6		652		19,49		
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.078.900		673.720		365.880		67.085		73.739		140.824	50	38,49		140.824	10	4,57	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	25	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		1		0		1		1		1		0		1		25		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.493.000		343.237		140.070		-		61.307		61.307	50	43,77		61.307	10	1,36	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.000		11.165		5.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			250.000		53.021		10.750		-		4.442		4.442	50	41,32		4.442	10	1,78	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			780.000		7.370		3.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			338.000		34.506		18.820		-		7.409		7.409	50	39,37		7.409	10	2,19	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		-		2.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.000.000		237.175		100.000		-		49.457		49.457	50	49,46		49.457	10	1,65	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.200.000		1.609.774		100.000		-		-		-	50	0		-	6,67	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		2		0		1		1		50		1		20		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			550.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000		1.609.774		100.000		-		-		-	50	0		-	20	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		2		0		1		1		50		1		20		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.068.750		990.953		92.000		8.801		19.501		28.302	37,5	30,76		28.302	7,5	0,4	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		3.000		3.000		-		2.000		2.000	50	66,67		2.000	10	13,33	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			500.000		92.165		85.000		8.801		16.301		25.102	50	29,53		25.102	10	5,02	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000		9.150		4.000		-		1.200		1.200	50	30		1.200	10	2,4	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.503.750		886.638		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.950.000		283.642		415.716		5.000		19.033		24.033	100	5,78		24.033	13,33	1,23	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		1		2		2		2		200		2		20		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		7		6		6		6		6		100		6		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		1		1		1		100		1		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			950.000		117.443		42.950		5.000		8.751		13.751	200	32,02		13.751	20	1,45	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		1		2		2		2		200		2		20		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			750.000		96.199		70.000		-		10.282		10.282	100	14,69		10.282	20	1,37	
	Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	30		7		6		6		6		6		100		6		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																			
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		302.766		-		-		-	100	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		1		1		1		100		1		0		
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000		70.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**361.194.397**		**34.022.677**		**28.960.201**		**9.406.138**		**209.871**		**9.616.009**	**236,31**	**33,2**		**9.616.009**	**24,34**	**2,66**	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0,7		0,2		0,31		0		0,2		0,2		64,52		0,2		28,57		
		Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	100		92,04		99,10		25		25		25		25,23		25		25		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			225.580.677		9.304.049		3.174.304		-		72.248		72.248	14,06	2,28		72.248	2,5	0,03	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	6		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	15		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	44		2		8		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	5		0		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	1150		8		10		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)																			
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		4		1		0		1		1		100		1		20		
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	20		12		8		0		1		1		12,5		1		5		
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			3.100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			11.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	6		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.200.000		2.454.143		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	15		4		4		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.550.000		129.600		250.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	44		2		8		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			1.450.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	5		0		10		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Regional/Regional Maintainance Center (Unit)																			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.100.000		95.114		191.974		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1150		8		10		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			156.500.000		888.515		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			35.781.677		5.664.377		2.636.274		-		60.740		60.740	100	2,3		60.740	20	0,17	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		4		1		0		1		1		100		1		20		
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			899.000		72.300		96.055		-		11.508		11.508	12,5	11,98		11.508	5	1,28	
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	20		12		8		0		1		1		12,5		1		5		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			134.788.720		24.677.350		25.607.707		9.406.138		132.628		9.538.766	256,54	37,25		9.538.766	30,86	7,08	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13807		2.076		4330		460		1.456		1.916		44,25		1.916		13,88		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3515		2.139		4304		537		1.123		1.660		38,57		1.660		47,23		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3540		2.155		954		534		1.138		1.672		175,26		1.672		47,23		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14815		11.903		18903		3.754		8.522		12.276		64,94		12.276		82,86		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	23460		43.952		21678		255		5.123		5.378		24,81		5.378		22,92		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																			
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	571291		57.491		79835		0		31.995		31.995		40,08		31.995		5,6		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11580		15.620		4675		2.241		3.406		5.647		120,79		5.647		48,77		
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115000		5.595		23000		841		2.980		3.821		16,61		3.821		3,32		
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11900		3.324		2100		171		911		1.082		51,52		1.082		9,09		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2100		542		260		216		189		405		155,77		405		19,29		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	2132		406		2567		445		882		1.327		51,69		1.327		62,24		
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	560		2.264		3505		225		619		844		24,08		844		150,71		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5		2.618		1		1		1		2		200		2		40		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	5		1		0		1		1		1		0		1		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2025		358		405		88		201		289		71,36		289		14,27		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	100		37		4		1		2		3		75		3		3		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5		127.084		4		0		1		1		25		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	20		14		6		1		3		4		66,67		4		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	20		8		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		8		12		1		1		2		16,67		2		10		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2100		938		100		221		189		410		410		410		19,52		
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	320		80		14		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	40		8		4		8		1		9		225		9		22,5		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	317885		181.390		4		100		100		200		5000		200		0,06		
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	60		0		12		4		0		4		33,33		4		6,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		1		4		1		2		3		75		3		60		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		1		12		2		4		6		50		6		60		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	25		8		0		8		8		16		0		16		64		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		0		12		0		1		1		8,33		1		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	40		8		12		8		1		9		75		9		22,5		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0		0		554		554		0		554		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			195.000		13.990		5.000		-		-		-	44,25	0		-	13,88	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13807		2.076		4330		460		1.456		1.916		44,25		1.916		13,88		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			420.000		80.866		133.800		40.000		-		40.000	38,57	29,9		40.000	47,23	9,52	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3515		2.139		4304		537		1.123		1.660		38,57		1.660		47,23		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			115.000		9.825		396.755		-		-		-	175,26	0		-	47,23	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3540		2.155		954		534		1.138		1.672		175,26		1.672		47,23		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			145.000		10.195		5.000		-		-		-	64,94	0		-	82,86	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14815		11.903		18903		3.754		8.522		12.276		64,94		12.276		82,86		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			145.000		17.785		5.000		-		-		-	24,81	0		-	22,92	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23460		43.952		21678		255		5.123		5.378		24,81		5.378		22,92		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			143.000		6.300		5.000		-		-		-	40,08	0		-	5,6	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	571291		57.491		79835		0		31.995		31.995		40,08		31.995		5,6		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			145.000		8.100		5.000		-		-		-	120,79	0		-	48,77	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11580		15.620		4675		2.241		3.406		5.647		120,79		5.647		48,77		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			130.000		4.332		5.000		-		-		-	16,61	0		-	3,32	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	115000		5.595		23000		841		2.980		3.821		16,61		3.821		3,32		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			125.500		57.920		5.000		-		-		-	51,52	0		-	9,09	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11900		3.324		2100		171		911		1.082		51,52		1.082		9,09		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			125.550		2.985		5.000		-		-		-	155,77	0		-	19,29	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2100		542		260		216		189		405		155,77		405		19,29		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			130.000		3.270		540.300		-		-		-	51,69	0		-	62,24	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	2132		406		2567		445		882		1.327		51,69		1.327		62,24		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			130.000		3.110		5.000		-		-		-	24,08	0		-	150,71	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	560		2.264		3505		225		619		844		24,08		844		150,71		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			125.000		3.540		3.500		-		-		-	200	0		-	40	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5		2.618		1		1		1		2		200		2		40		
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			100.000		9.260		3.500		-		-		-	0	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	5		1		0		1		1		1		0		1		20		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			500.000		42.312		3.500		-		-		-	71,36	0		-	14,27	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2025		358		405		88		201		289		71,36		289		14,27		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			168.000		30.180		3.500		-		-		-	75	0		-	3	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	100		37		4		1		2		3		75		3		3		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			415.830		30.527		486.497		-		-		-	25	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5		127.084		4		0		1		1		25		1		20		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.170.000		234.780		144.672		-		-		-	66,67	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	20		14		6		1		3		4		66,67		4		20		
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			117.000		-		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	20		8		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			305.500		37.407		3.500		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		8		12		1		1		2		16,67		2		10		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			135.000		1.800		3.500		-		-		-	410	0		-	19,52	0	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Orang dengan Masalah	2100		938		100		221		189		410		410		410		19,52		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			145.000		2.780		3.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	320		80		14		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.735.000		211.629		3.500		-		160		160	225	4,57		160	22,5	0,01	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	40		8		4		8		1		9		225		9		22,5		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			114.587.353		23.441.908		23.261.655		9.355.038		10.599		9.365.637	5000	40,26		9.365.637	0,06	8,17	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	317885		181.390		4		100		100		200		5000		200		0,06		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			87.000		-		120.685		-		-		-	33,33	0		-	6,67	0	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	60		0		12		4		0		4		33,33		4		6,67		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			170.500		19.297		3.500		-		-		-	75	0		-	60	0	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		1		4		1		2		3		75		3		60		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.350.000		153.622		155.000		11.100		121.869		132.969	50	85,79		132.969	60	1,28	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		1		12		2		4		6		50		6		60		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			599.487		-		-		-		-		-	0	0		-	64	0	
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	25		8		0		8		8		16		0		16		64		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			85.000		880		3.500		-		-		-	8,33	0		-	0	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		0		12		0		1		1		8,33		1		0		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			86.000		1.920		3.000		-		-		-	75	0		-	22,5	0	
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	40		8		12		8		1		9		75		9		22,5		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			108.000		-		39.704		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0		0		554		554		0		554		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.850.000		236.831		245.638		-		-		-	100	0		-	20	0	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			250.000		14.148		40.633		-		-		-	1600	0		-	40	0	
	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	40		8		1		8		8		16		1600		16		40		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			250.000		14.148		40.633		-		-		-	1600	0		-	40	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	40		8		1		8		8		16		1600		16		40		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			575.000		27.130		137.558		-		4.995		4.995	150	3,63		4.995	28	0,87	
	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		4		200		4		40		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	50		10		8		10		8		8		100		8		16		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			325.000		9.735		3.500		-		910		910	200	26		910	40	0,28	
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		4		200		4		40		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			250.000		17.395		134.058		-		4.085		4.085	100	3,05		4.085	16	1,63	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	50		10		8		10		8		8		100		8		16		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**2.900.000**		**577.514**		**832.371**		**52.900**		**130.078**		**182.978**	**97,5**	**21,98**		**182.978**	**16,79**	**6,31**	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	20		23,4		20,00		3,6		5,1		5,1		25,5		5,1		25,5		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			50.000		5.700		3.500		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	20		1		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	20		1		12		1		1		2		16,67		2		10		
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	20		1		0		1		1		2		0		2		10		
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			25.000		5.700		3.500		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	20		1		12		1		1		2		16,67		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)																			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			250.000		6.288		192.732		-		2.565		2.565	150	1,33		2.565	45,45	1,03	
	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	44		8		10		10		10		20		200		20		45,45		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0		1		1		0		1		1		100		1		0		
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			250.000		6.288		3.500		-		1.035		1.035	200	29,57		1.035	45,45	0,41	
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	44		8		10		10		10		20		200		20		45,45		
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-		-		189.232		-		1.530		1.530	100	0,81		1.530	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0		1		1		0		1		1		100		1		0		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.600.000		565.526		636.139		52.900		127.513		180.413	73,33	28,36		180.413	1,71	6,94	
	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1290		124		30		22		0		22		73,33		22		1,71		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.600.000		565.526		636.139		52.900		127.513		180.413	73,33	28,36		180.413	1,71	6,94	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1290		124		30		22		0		22		73,33		22		1,71		
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**2.878.670**		**334.875**		**162.618**		-		**45.746**		**45.746**	**208,06**	**28,13**		**45.746**	**8,85**	**1,59**	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan (Persentase)	88		75		63,00		0		45,1		45,1		71,59		45,1		51,25		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			776.000		63.338		2.500		-		-		-	525	0		-	5,19	0	
	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	405		4		4		21		0		21		525		21		5,19		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			776.000		63.338		2.500		-		-		-	525	0		-	5,19	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	405		4		4		21		0		21		525		21		5,19		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			549.400		66.244		78.964		-		38.753		38.753	36,8	49,08		38.753	18,4	7,05	
	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	250		58		125		21		25		46		36,8		46		18,4		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			549.400		66.244		78.964		-		38.753		38.753	36,8	49,08		38.753	18,4	7,05	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	250		58		125		21		25		46		36,8		46		18,4		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			90.000		5.552		3.500		-		-		-	12,11	0		-	2,42	0	
	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2105		463		421		0		51		51		12,11		51		2,42		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			90.000		5.552		3.500		-		-		-	12,11	0		-	2,42	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2105		463		421		0		51		51		12,11		51		2,42		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)																			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			1.463.270		199.740		77.654		-		6.993		6.993	258,33	9,01		6.993	9,39	0,48	
	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	330		12		12		21		10		31		258,33		31		9,39		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			1.463.270		199.740		77.654		-		6.993		6.993	258,33	9,01		6.993	9,39	0,48	
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	330		12		12		21		10		31		258,33		31		9,39		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**435.276**		**30.549**		**17.300**		-		-		-	**120**	**0**		-	**17,73**	**0**	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Persentase)	83		73,1		79,00		0		79,65		79,65		100,82		79,65		95,96		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			86.000		4.500		3.500		-		-		-	100	0		-	20	0	
	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		8		1		1		1		1		100		1		20		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			86.000		4.500		3.500		-		-		-	100	0		-	20	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		8		1		1		1		1		100		1		20		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			99.276		7.169		3.500		-		-		-	60	0		-	15	0	
	Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	20		8		5		1		2		3		60		3		15		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			99.276		7.169		3.500		-		-		-	60	0		-	15	0	
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	20		8		5		1		2		3		60		3		15		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.000		18.880		10.300		-		-		-	200	0		-	18,18	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	11		8		1		1		1		2		200		2		18,18		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			250.000		18.880		10.300		-		-		-	200	0		-	18,18	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	11		8		1		1		1		2		200		2		18,18		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**11.156.600**		**154.914**		**1.940.781**		-		**7.760**		**7.760**	**93,92**	**0,4**		**7.760**	**35,86**	**0,07**	UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														93,92				35,86		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.156.600		154.914		1.940.781		-		7.760		7.760	93,92	0,4		7.760	35,86	0,07	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1568		422		646		101		128		229		35,45		229		14,6		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	480		349		0		73		172		245		0		245		51,04		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	504		323		0		86		172		258		0		258		51,19		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3360		1.694		0		621		821		1.442		0		1.442		42,92		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2655		3.146		3024		786		1.280		2.066		68,32		2.066		77,82		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	104578		14.455		0		1.913		1.989		3.902		0		3.902		3,73		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2035		970		0		1.274		1.470		2.744		0		2.744		134,84		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	335		45		53		45		51		96		181,13		96		28,66		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		264		587		2		75		77		13,12		77		154		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	335		25		2038		45		50		95		4,66		95		28,36		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		3		1		1		2		66,67		2		10		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		1		1		1		2		200		2		40		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			250.000		2.695		3.807		-		160		160	35,45	4,2		160	14,6	0,06	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1568		422		646		101		128		229		35,45		229		14,6		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	51,04	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	480		349		0		73		172		245		0		245		51,04		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	51,19	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504		323		0		86		172		258		0		258		51,19		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Orang)																			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	42,92	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3360		1.694		0		621		821		1.442		0		1.442		42,92		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			140.000		20.604		10.880		-		-		-	68,32	0		-	77,82	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2655		3.146		3024		786		1.280		2.066		68,32		2.066		77,82		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		3.200		-		-		-		-	0	0		-	3,73	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	104578		14.455		0		1.913		1.989		3.902		0		3.902		3,73		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		10.702		-		-		-		-	0	0		-	134,84	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2035		970		0		1.274		1.470		2.744		0		2.744		134,84		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			65.000		2.160		1.680		-		-		-	181,13	0		-	28,66	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	335		45		53		45		51		96		181,13		96		28,66		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			118.600		1.200		6.400		-		-		-	13,12	0		-	154	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		264		587		2		75		77		13,12		77		154		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			750.000		39.745		128.062		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			65.000		2.960		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			65.000		2.720		2.560		-		-		-	100	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			65.000		1.600		6.240		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			65.000		-		320		-		-		-	4,66	0		-	28,36	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	335		25		2038		45		50		95		4,66		95		28,36		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			240.000		26.400		24.640		-		-		-	66,67	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		3		1		1		2		66,67		2		10		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			8.100.000		34.888		1.712.512		-		-		-	200	0		-	40	0	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		1		1		1		2		200		2		40		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			18.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			115.000		3.200		-		-		-		-	100	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			40.000		1.560		960		-		7.600		7.600	100	791,67		7.600	10	19	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			85.000		-		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			215.000		1.280		42.720		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		**-**		**67.476**		**-**		**-**		**-**	**66,67**	**0**		**-**	**10**	**0**	UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		50.436		-		-		-	33,33	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		18		4		2		6		33,33		6		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		50.436		-		-		-	33,33	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		18		4		2		6		33,33		6		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														100				10		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		-		17.040		-		-		-	100	0		-	10	0	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Daerah Kabupaten/Kota	(Dokumen)																			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		-		17.040		-		-		-	100	0		-	10	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**12.760.645**		**312.739**		**2.297.195**		**-**		**766.969**		**766.969**	**153,45**	**33,39**		**766.969**	**17,04**	**6,01**	UPT. Puskesmas Sungai Pagu
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														153,45				17,04		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.760.645		312.739		2.297.195		-		766.969		766.969	153,45	33,39		766.969	17,04	6,01	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2057		459		745		105		90		195		26,17		195		9,48		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	510		353		0		87		10		97		0		97		19,02		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	504		346		0		147		0		147		0		147		29,17		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	685		1.900		0		210		0		210		0		210		30,66		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2851		3.400		4993		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	96660		21.000		0		1.503		0		1.503		0		1.503		1,55		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1950		3.138		0		191		0		191		0		191		9,79		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	410		95		25		73		73		146		584		146		35,61		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	53		206		15		27		27		54		360		54		101,89		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		1		0		1		1		100		1		5		
		Jumlah Dokumen Hasil	20		4		1		1		0		1		100		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	410		88		100		15		0		15		15		15		3,66		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		2		0		1		1		50		1		20		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		3		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		10		1		1		2		20		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		0		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			223.000		20.871		6.600		-		325		325	26,17	4,92		325	9,48	0,15	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2057		459		745		105		90		195		26,17		195		9,48		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			410.000		-		-		-		-		-	0	0		-	19,02	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	510		353		0		87		10		97		0		97		19,02		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	29,17	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	504		346		0		147		0		147		0		147		29,17		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		15.600		-		-		-		-	0	0		-	30,66	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	685		1.900		0		210		0		210		0		210		30,66		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			118.100		22.089		6.080		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2851		3.400		4993		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	1,55	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	96660		21.000		0		1.503		0		1.503		0		1.503		1,55		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		4.560		-		-		-		-	0	0		-	9,79	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1950		3.138		0		191		0		191		0		191		9,79		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			66.250		8.640		960		-		640		640	584	66,67		640	35,61	0,97	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	410		95		25		73		73		146		584		146		35,61		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			72.100		5.520		8.000		-		1.600		1.600	360	20		1.600	101,89	2,22	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	53		206		15		27		27		54		360		54		101,89		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.010.800		78.220		111.940		-		2.640		2.640	100	2,36		2.640	5	0,26	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		1		0		1		1		100		1		5		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			18.600		480		-		-		-		-	100	0		-	5	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		1		1		0		1		100		1		5		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			38.250		3.440		3.520		-		560		560	200	15,91		560	10	1,46	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.425		4.160		6.952		-		1.680		1.680	200	24,17		1.680	10	4,16	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			40.850		4.240		2.080		-		-		-	15	0		-	3,66	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	410		88		100		15		0		15		15		15		3,66		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			167.750		25.360		32.480		-		4.560		4.560	200	14,04		4.560	10	2,72	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	20		4		1		1		1		2		200		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular (Dokumen)																			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			9.920.520		71.799		2.063.383		-		736.964		736.964	50	35,72		736.964	20	7,43	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		2		0		1		1		50		1		20		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			6.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		5		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.000		160		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		3		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			18.200		1.520		640		-		560		560	20	87,5		560	10	3,08	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		10		1		1		2		20		2		10		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			39.600		-		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		0		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			241.200		46.080		54.560		-		17.440		17.440	200	31,96		17.440	10	7,23	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		**-**		**49.538**		**-**		**1.120**		**1.120**	**50**	**2,26**		**1.120**	**10**	**3,92**	UPT. Puskesmas Sungai Pagu
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		22.010		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		22.010		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														100				10		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		-		27.528		-		1.120		1.120	100	4,07		1.120	10	3,92	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		-		27.528		-		1.120		1.120	100	4,07		1.120	10	3,92	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	20		4		2		1		1		2		100		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)																			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.770.261**		**231.846**		**1.348.138**		**-**		**20.280**		**20.280**	**6477,38**	**1,5**		**20.280**	**840,81**	**0,26**	UPT. Puskesmas Pauh Duo
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														6477,38				840,81		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.770.261		231.846		1.348.138		-		20.280		20.280	6477,38	1,5		20.280	840,81	0,26	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1617		443		321		47		47		94		29,28		94		5,81		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	350		0		0		55		55		110		0		110		31,43		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	355		0		0		57		57		114		0		114		32,11		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1430		0		0		1.572		1.550		3.122		0		3.122		218,32		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2831		2.119		3454		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60246		0		0		327		327		654		0		654		1,09		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1400		0		0		232		230		462		0		462		33		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	250		55		55		32		32		64		116,36		64		25,6		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	32		65		401		78		75		153		38,15		153		478,13		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		3		914		914		1.828		60933,33		1.828		9140		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20		4		2		100		100		200		10000		200		1000		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		2		2		2		4		200		4		20		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	250		55		55		0		2		2		3,64		2		0,8		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		22.170		5		336		336		672		13440		672		3360		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		30		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		93		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		1.550		4		232		232		464		11600		464		2320		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		396		3		11		11		22		733,33		22		110		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			91.200		5.300		4.000		-		-		-	29,28	0		-	5,81	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1617		443		321		47		47		94		29,28		94		5,81		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			410.000		-		-		-		-		-	0	0		-	31,43	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	350		0		0		55		55		110		0		110		31,43		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	32,11	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	355		0		0		57		57		114		0		114		32,11		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	218,32	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1430		0		0		1.572		1.550		3.122		0		3.122		218,32		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			115.250		16.800		10.720		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2831		2.119		3454		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	1,09	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60246		0		0		327		327		654		0		654		1,09		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	33	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1400		0		0		232		230		462		0		462		33		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			48.000		8.960		2.400		-		-		-	116,36	0		-	25,6	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	250		55		55		32		32		64		116,36		64		25,6		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			53.200		4.560		2.080		-		560		560	38,15	26,92		560	478,13	1,05	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	32		65		401		78		75		153		38,15		153		478,13		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			556.150		65.012		91.724		-		480		480	60933,33	0,52		480	9140	0,09	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		3		914		914		1.828		60933,33		1.828		9140		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			19.500		2.080		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			29.400		5.600		1.200		-		-		-	10000	0		-	1000	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		100		100		200		10000		200		1000		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			29.630		4.720		3.280		-		1.360		1.360	200	41,46		1.360	20	4,59	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		2		2		2		4		200		4		20		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			19.800		1.920		160		-		-		-	3,64	0		-	0,8	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	250		55		55		0		2		2		3,64		2		0,8		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			191.510		23.040		13.360		-		-		-	13440	0		-	3360	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		22.170		5		336		336		672		13440		672		3360		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.664.831		51.664		1.168.014		-		4.440		4.440	66,67	0,38		4.440	40	0,08	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			6.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		30		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			40.790		1.585		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		93		2		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			19.025		685		160		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		2		2		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			22.800		3.520		-		-		-		-	11600	0		-	2320	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		1.550		4		232		232		464		11600		464		2320		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			193.175		36.400		51.040		-		13.440		13.440	733,33	26,33		13.440	110	6,96	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		396		3		11		11		22		733,33		22		110		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		**1.440**		**42.776**		**-**		**480**		**480**	**107,14**	**1,12**		**480**	**20**	**1,68**	UPT. Puskesmas Pauh Duo
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		27.216		-		160		160	14,29	0,59		160	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		7		0		1		1		14,29		1		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		27.216		-		160		160	14,29	0,59		160	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		7		0		1		1		14,29		1		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														200				20		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		1.440		15.560		-		320		320	200	2,06		320	20	1,12	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		3		2		2		2		4		200		4		20		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		1.440		15.560		-		320		320	200	2,06		320	20	1,12	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		3		2		2		2		4		200		4		20		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**16.316.144**		**2.520.947**		**2.990.171**		**265.543**		**2.238.186**		**2.503.729**	**460,77**	**83,73**		**2.503.729**	**34,53**	**15,35**	UPT. Puskesmas Sangir
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														460,77				34,53		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.316.144		2.520.947		2.990.171		265.543		2.238.186		2.503.729	460,77	83,73		2.503.729	34,53	15,35	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4190		746		77		197		205		402		522,08		402		9,59		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1075		580		0		128		175		303		0		303		28,19		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1064		580		0		128		175		303		0		303		28,48		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1355		2.418		0		2.561		1.649		4.210		0		4.210		310,7		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7853		5.186		330		194		3.724		3.918		1187,27		3.918		49,89		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70765		10.038		0		2.030		1.192		3.222		0		3.222		4,55		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3375		3.765		0		963		836		1.799		0		1.799		53,3		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	575		96		74		47		25		72		97,3		72		12,52		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	63		392		35		19		13		32		91,43		32		50,79		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		48		1		1		2		4,17		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		3		1		1		2		66,67		2		10		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	575		96		15		47		25		72		480		72		12,52		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		230		5		112		117		229		4580		229		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		4		14		1		1		2		14,29		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		2		12		1		1		2		16,67		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		35		1		1		2		5,71		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		5		1		1		2		40		2		10		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			165.000		34.340		7.000		-		-		-	522,08	0		-	9,59	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4190		746		77		197		205		402		522,08		402		9,59		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	28,19	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1075		580		0		128		175		303		0		303		28,19		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	28,48	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1064		580		0		128		175		303		0		303		28,48		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	310,7	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1355		2.418		0		2.561		1.649		4.210		0		4.210		310,7		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			115.000		24.720		8.480		-		-		-	1187,27	0		-	49,89	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7853		5.186		330		194		3.724		3.918		1187,27		3.918		49,89		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	4,55	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70765		10.038		0		2.030		1.192		3.222		0		3.222		4,55		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	53,3	0	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	3375		3.765		0		963		836		1.799		0		1.799		53,3		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			165.000		10.720		7.680		-		1.920		1.920	97,3	25		1.920	12,52	1,16	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	575		96		74		47		25		72		97,3		72		12,52		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			68.600		5.040		6.400		-		1.760		1.760	91,43	27,5		1.760	50,79	2,57	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	63		392		35		19		13		32		91,43		32		50,79		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			650.000		105.009		124.310		-		9.890		9.890	50	7,96		9.890	10	1,52	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			65.000		5.840		-		-		-		-	4,17	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		48		1		1		2		4,17		2		10		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			43.200		6.560		4.800		-		1.600		1.600	100	33,33		1.600	10	3,7	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		1		1		2		100		2		10		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			48.100		7.255		14.320		-		960		960	66,67	6,7		960	10	2	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		3		1		1		2		66,67		2		10		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			24.000		3.120		1.600		-		-		-	480	0		-	12,52	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	575		96		15		47		25		72		480		72		12,52		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			240.000		39.100		30.400		-		1.360		1.360	50	4,47		1.360	10	0,57	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			13.938.244		2.220.824		2.745.821		265.543		2.220.456		2.485.999	66,67	90,54		2.485.999	40	17,84	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			9.000		160		-		-		-		-	4580	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		230		5		112		117		229		4580		229		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			115.000		13.520		-		-		-		-	14,29	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan	Jumlah dokumen hasil	20		4		14		1		1		2		14,29		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	pelayanan kesehatan reproduksi	pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			40.000		1.140		1.680		-		240		240	16,67	14,29		240	10	0,6	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		2		12		1		1		2		16,67		2		10		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			90.000		5.200		-		-		-		-	5,71	0		-	10	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		35		1		1		2		5,71		2		10		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			215.000		38.400		37.680		-		-		-	40	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		5		1		1		2		40		2		10		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		**2.080**		**57.400**		**-**		**1.040**		**1.040**	**50**	**1,81**		**1.040**	**5**	**3,64**	UPT. Puskesmas Sangir
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		25.640		-		400		400	50	1,56		400	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		20		4		6		10		50		10		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		25.640		-		400		400	50	1,56		400	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		20		4		6		10		50		10		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														50				5		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		2.080		31.760		-		640		640	50	2,02		640	5	2,24	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		4		2		0		1		1		50		1		5		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		2.080		31.760		-		640		640	50	2,02		640	5	2,24	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		4		2		0		1		1		50		1		5		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.033.572**		**117.028**		**1.406.026**		**5.360**		**8.300**		**13.660**	**221,19**	**0,97**		**13.660**	**14,68**	**0,17**	UPT. Puskesmas Sangir Jujuan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														221,19				14,68		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.033.572		117.028		1.406.026		5.360		8.300		13.660	221,19	0,97		13.660	14,68	0,17	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1685		103		34				0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	335		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	326		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	520		0		0		20		0		20		0		20		3,85		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2119		1.962		1340		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	142035		0		0		3.000		3.000		6.000		0		6.000		4,22		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1175		200		0		12		12		24		0		24		2,04		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	175		41		41		25		25		50		121,95		50		28,57		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	31		31		0		4		4		8		0		8		25,81		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		39.321.000		1				5		5		500		5		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		1		0		2		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		1		5		5		10		1000		10		50		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		1		2		2		4		400		4		20		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	175		21		1165				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		1				2		2		200		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		0		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0		0		150				12		12		8		12		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		1		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		3		3		6		600		6		30		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			50.000		8.567		7.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1685		103		34				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	335		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	326		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	3,85	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	520		0		0		20		0		20		0		20		3,85		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			50.000		5.840		3.360		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2119		1.962		1340		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	4,22	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	142035		0		0		3.000		3.000		6.000		0		6.000		4,22		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	2,04	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1175		200		0		12		12		24		0		24		2,04		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			65.000		9.520		1.200		240		400		640	121,95	53,33		640	28,57	0,98	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Orang yang	175		41		41		25		25		50		121,95		50		28,57		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			37.600		2.480		-		160		-		160	0	0		160	25,81	0,43	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	31		31		0		4		4		8		0		8		25,81		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			430.000		-		85.194		-		-		-	500	0		-	25	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		39.321.000		1				5		5		500		5		25		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			65.000		-		-		-		-		-	200	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		1		0		2		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			50.000		640		4.480		160		160		320	1000	7,14		320	50	0,64	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		1		5		5		10		1000		10		50		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			65.000		3.440		4.275		480		720		1.200	400	28,07		1.200	20	1,85	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		4		1		2		2		4		400		4		20		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			25.000		2.080		1.120		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	175		21		1165				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			290.000		15.200		12.435		-		560		560	200	4,5		560	10	0,19	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		1				2		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			6.408.472		41.021		1.257.762		2.160		2.220		4.380	66,67	0,35		4.380	40	0,07	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		1		1		2		66,67		2		40		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			7.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		2.400		-		160		160	8	6,67		160	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0		0		150				12		12		8		12		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		2.000		640		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		1		1				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			165.000		26.240		25.760		2.160		4.080		6.240	600	24,22		6.240	30	3,78	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		3		3		6		600		6		30		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		-		**24.883**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	UPT. Puskesmas Sangir Jujuan
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		19.233		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		19.233		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		1				0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														0				0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		-		5.650		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		-		5.650		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.686.150**		**184.715**		**1.501.355**		-		**17.040**		**17.040**	**96,37**	**1,13**		**17.040**	**8,69**	**0,22**	UPT. Puskesmas Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														96,37				8,69		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.686.150		184.715		1.501.355		-		17.040		17.040	96,37	1,13		17.040	8,69	0,22	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1604		253		248		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	380		0		0				0		0		0		0		0		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	510		0		0				0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																			
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3100		0		0				0		0		0		0		0		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4625		98		105		1		1		2		1,9		2		0,04		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55635		0		0				0		0		0		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	985		0		0				0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	200		80		136		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	34		56		20		3		0		3		15		3		8,82		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		1		7		0		7		700		7		35		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		48				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	16		4		1		4		0		4		400		4		25		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	200		21		24		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		14		17		0		17		121,43		17		85		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	0		4		6				0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)																			
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		4				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		4		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		1		2		0		2		200		2		10		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		56				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			115.000		20.240		5.840		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1604		253		248		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	380		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	510		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3100		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			60.750		7.840		4.400		-		80		80	1,9	1,82		80	0,04	0,13	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4625		98		105		1		1		2		1,9		2		0,04		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55635		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	985		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			65.200		6.400		2.320		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	200		80		136		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			52.600		4.480		1.680		-		240		240	15	14,29		240	8,82	0,46	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	34		56		20		3		0		3		15		3		8,82		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			430.000		30.121		67.054		-		560		560	700	0,84		560	35	0,13	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		4		1		7		0		7		700		7		35		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			30.000		6.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		4		48				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			25.000		4.480		6.240		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		4		2		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.000		2.640		7.040		-		320		320	400	4,55		320	25	1,6	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	16		4		1		4		0		4		400		4		25		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			9.600		1.680		720		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	200		21		24		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			115.000		15.280		19.840		-		1.360		1.360	121,43	6,85		1.360	85	1,18	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		4		14		17		0		17		121,43		17		85		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			6.150.000		35.714		1.321.581		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		1		3		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2.400		320		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		4		6				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.100		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		4				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			26.500		1.680		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan	Jumlah dokumen hasil	20		4		1				0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	pelayanan kesehatan reproduksi	pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)																			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			19.000		720		640		-		160		160	200	25		160	10	0,84	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		4		1		2		0		2		200		2		10		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			23.000		3.520		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		4		56				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			215.000		43.600		64.000		-		14.320		14.320	200	22,38		14.320	10	6,66	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		-		**5.040**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	UPT. Puskesmas Sangir Balai Janggo
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		3.840		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		3.840		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														0				0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		-		1.200		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		26		0		0		0		0		0		0		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		-		1.200		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		26		0		0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.942.100**		-		**1.289.592**		-		**35.115**		**35.115**	**59,32**	**2,72**		**35.115**	**21,72**	**0,44**	UPT. Puskesmas Sangir Batang Hari
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														59,32				21,72		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.942.100		-		1.289.592		-		35.115		35.115	59,32	2,72		35.115	21,72	0,44	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	779		0		263		30		50		80		30,42		80		10,27		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	250		0		0		50		112		162		0		162		64,8		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	365		0		0		50		112		162		0		162		44,38		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2095		0		0		200		198		398		0		398		19		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1692		0		8332		0		220		220		2,64		220		13		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	37252		0		0		3.777		1.530		5.307		0		5.307		14,25		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450		0		0		290		270		560		0		560		124,44		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	150		0		30		13		13		26		86,67		26		17,33		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		0		252		1		5		6		2,38		6		12		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		0		4		1		2		3		75		3		15		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		0				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		0		2				7		7		350		7		35		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		0		3				0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	150		0		30				15		15		50		15		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		0		3				2		2		66,67		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		0		3				2		2		66,67		2		40		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0				4		4		0		4		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		0		1				1		1		100		1		5		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			250.000		-		15.020		-		920		920	30,42	6,13		920	10,27	0,37	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	779		0		263		30		50		80		30,42		80		10,27		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			320.000		-		-		-		-		-	0	0		-	64,8	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	250		0		0		50		112		162		0		162		64,8		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	44,38	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	365		0		0		50		112		162		0		162		44,38		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.000		-		-		-		1.070		1.070	0	0		1.070	19	1,65	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2095		0		0		200		198		398		0		398		19		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			140.000		-		800		-		480		480	2,64	60		480	13	0,34	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1692		0		8332		0		220		220		2,64		220		13		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	14,25	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	37252		0		0		3.777		1.530		5.307		0		5.307		14,25		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	124,44	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450		0		0		290		270		560		0		560		124,44		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			65.000		-		960		-		320		320	86,67	33,33		320	17,33	0,49	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Orang yang	150		0		30		13		13		26		86,67		26		17,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)																			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			104.600		-		800		-		320		320	2,38	40		320	12	0,31	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	50		0		252		1		5		6		2,38		6		12		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			750.000		-		197.720		-		4.305		4.305	75	2,18		4.305	15	0,57	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20		0		4		1		2		3		75		3		15		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		0				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			65.000		-		10.400		-		480		480	350	4,62		480	35	0,74	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		0		2				7		7		350		7		35		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			200.000		-		2.720		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		0		3				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			25.000		-		480		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	150		0		30				15		15		50		15		10		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			240.000		-		14.336		-		6.240		6.240	66,67	43,53		6.240	10	2,6	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		0		3				2		2		66,67		2		10		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.050.000		-		1.016.836		-		7.700		7.700	66,67	0,76		7.700	40	0,15	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		0		3				2		2		66,67		2		40		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			7.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0				4		4		0		4		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			25.000		-		240		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	20		0		1				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			200.000		-		29.280		-		13.280		13.280	100	45,36		13.280	5	6,64	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		0		1				1		1		100		1		5		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**28.600**		-		**79.300**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	UPT. Puskesmas Sangir Batang Hari
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		39.280		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		4				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		39.280		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		4				0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														0				0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600		-		40.020		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		3				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			28.600		-		40.020		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	20		0		3				0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.944.100**		-		**680.266**		-		**26.130**		**26.130**	**360,27**	**3,84**		**26.130**	**186,23**	**0,44**	UPT. Puskesmas Lubuk Ulang Aling
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														360,27				186,23		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.944.100		-		680.266		-		26.130		26.130	360,27	3,84		26.130	186,23	0,44	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	307		0		29		38		12		50		172,41		50		16,29		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	135		0		0		38		1		39		0		39		28,89		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	149		0		0		38		0		38		0		38		25,5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																			
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2270		0		0		35		1		36		0		36		1,59		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	637		0		83		400		200		600		722,89		600		94,19		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4119		0		0		150		0		150		0		150		3,64		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210		0		0		20		0		20		0		20		9,52		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		0		40		1		3		4		10		4		80		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5		0		32		1		8		9		28,13		9		180		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	5		0		100		1		1		2		2		2		40		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		10		1		0		1		10		1		5		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		0		9		1		7		8		88,89		8		40		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		0		56		1		2		3		5,36		3		15		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5		0		15		1		0		1		6,67		1		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		0		23		401		200		601		2613,04		601		3005		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		0		3		1		2		3		100		3		60		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		20				1		1		5		1		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		0		20				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		0		32				0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	3		0		23				0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	20		0		1		14		6		20		2000		20		100		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			250.000		-		2.640		-		470		470	172,41	17,8		470	16,29	0,19	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	307		0		29		38		12		50		172,41		50		16,29		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			410.000		-		-		-		-		-	0	0		-	28,89	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	135		0		0		38		1		39		0		39		28,89		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	25,5	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	149		0		0		38		0		38		0		38		25,5		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			50.000		-		-		-		80		80	0	0		80	1,59	0,16	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2270		0		0		35		1		36		0		36		1,59		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			125.000		-		3.360		-		1.040		1.040	722,89	30,95		1.040	94,19	0,83	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	637		0		83		400		200		600		722,89		600		94,19		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	3,64	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4119		0		0		150		0		150		0		150		3,64		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	9,52	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210		0		0		20		0		20		0		20		9,52		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			50.000		-		800		-		240		240	10	30		240	80	0,48	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5		0		40		1		3		4		10		4		80		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			101.600		-		2.000		-		640		640	28,13	32		640	180	0,63	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga	5		0		32		1		8		9		28,13		9		180		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			750.000		-		50.865		-		5.000		5.000	2	9,83		5.000	40	0,67	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	5		0		100		1		1		2		2		2		40		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			50.000		-		-		-		-		-	10	0		-	5	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	20		0		10		1		0		1		10		1		5		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			50.000		-		2.080		-		560		560	88,89	26,92		560	40	1,12	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20		0		9		1		7		8		88,89		8		40		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			50.000		-		3.520		-		160		160	5,36	4,55		160	15	0,32	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	20		0		56		1		2		3		5,36		3		15		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			25.000		-		1.440		-		-		-	6,67	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5		0		15		1		0		1		6,67		1		20		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			225.000		-		24.160		-		12.080		12.080	2613,04	50		12.080	3005	5,37	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	20		0		23		401		200		601		2613,04		601		3005		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.250.000		-		564.841		-		1.660		1.660	100	0,29		1.660	60	0,05	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5		0		3		1		2		3		100		3		60		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			7.500		-		-		-		-		-	5	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		20				1		1		5		1		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20		0		20				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			25.000		-		400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20		0		32				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	3		0		23				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			200.000		-		24.160		-		4.200		4.200	2000	17,38		4.200	100	2,1	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil	20		0		1		14		6		20		2000		20		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)																			
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**27.600**		**-**		**32.520**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	UPT. Puskesmas Lubuk Ulang Aling
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		17.040		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		8				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		17.040		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		0		8				0		0		0		0		0		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														0				0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.600		-		15.480		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5		0		4				0		0		0		0		0		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			27.600		-		15.480		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5		0		4				0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**83.000.000**		**6.350.607**		**12.268.837**		**129.907**		**453.840**		**583.747**	**200**	**4,76**		**583.747**	**40**	**0,7**	RUMAH SAKIT BATANG SANGIR
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		7.241.845		-		67.237		67.237	200	0,93		67.237	0	0	
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		1		1		1		2		200		2		0		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			-		-		7.241.845		-		67.237		67.237	200	0,93		67.237	0	0	
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		1		1		1		2		200		2		0		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														200				40		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			83.000.000		6.350.607		5.026.992		129.907		386.603		516.510	200	10,27		516.510	40	0,62	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	5		1		1		1		1		2		200		2		40		
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			83.000.000		6.350.607		5.026.992		129.907		386.603		516.510	200	10,27		516.510	40	0,62	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	5		1		1		1		1		2		200		2		40		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.500.000**		**614.250**		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														0				0		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000		614.250		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		614.250.000		12		0		0		0		0		0		0		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.500.000		614.250		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		614.250.000		12		0		0		0		0		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**310.638.472**		**56.988.395**		**60.106.604**		**13.127.172**		**11.544.405**		**24.671.577**	**50**	**41,05**		**24.671.577**	**5**	**7,94**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat														50				5		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			43.750.000		3.321.447		5.077.643		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	3		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1000		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			25.000.000		3.321.447		5.077.643		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	3		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	1000		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Maintainance Center	Center (Unit)																			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			266.888.472		53.666.948		55.028.961		13.127.172		11.544.405		24.671.577	100	44,83		24.671.577	20	9,24	
	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			266.888.472		53.666.948		55.028.961		13.127.172		11.544.405		24.671.577	100	44,83		24.671.577	20	9,24	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**866.266.248**		**33.317.944**		**47.813.311**		**1.718.937**		**4.085.685**		**5.804.623**	**11,33**	**12,14**		**5.804.623**	**1,25**	**0,67**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**56.555.315**		**10.181.710**		**7.637.574**		**1.718.937**		**2.524.020**		**4.242.957**	**30,22**	**55,55**		**4.242.957**	**4,23**	**7,5**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		74,25		81		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		90		95		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,85		76,11		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			425.000		-		7.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			125.000		-		3.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175.000		-		3.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.461.792		6.562.391		6.323.392		1.585.747		1.799.842		3.385.589	43,85	53,54		3.385.589	9,11	8,37	
	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	306		13,25		65		54		52		53		81,54		53		17,32		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20		12		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Dokumen)																			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		5		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.500.000		6.158.521		6.141.072		1.488.702		1.767.217		3.255.919	81,54	53,02		3.255.919	17,32	8,68	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	306		13,25		65		54		52		53		81,54		53		17,32		
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.901.792		403.870		179.920		97.045		32.625		129.670	50	72,07		129.670	10	4,47	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			60.000		-		2.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		5		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.042.142		374.489		190.414		44.754		81.674		126.428	16,67	66,4		126.428	3,48	4,16	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		12		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		5		4		0		1		1		25		1		5,88		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		10		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		9		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	26		9		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		100		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000		9.746		9.999		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		12		4		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000		65.713		46.668		600		6.500		7.100	25	15,21		7.100	5,88	4,73	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		5		4		0		1		1		25		1		5,88		
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			125.142		24.824		15.003		300		-		300	0	2		300	0	0,24	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		10		4		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			190.000		34.587		16.500		-		2.719		2.719	25	16,48		2.719	5	1,43	
	Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	20		9		4		0		1		1		25		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																			
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000		2.041		2.250		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	26		9		4		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.502.000		237.577		99.993		43.854		72.454		116.308	50	116,32		116.308	10	4,65	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		100		4		1		1		2		50		2		10		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.886.035		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.365.345		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			4.480.690		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			490.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000		1.873.086		52.950		8.305		14.819		23.124	37,5	43,67		23.124	4,17	7,71	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	25		125		300		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																			
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		3.000		2.000		-		-		-	50	0		-	3,33	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.000		34.058		36.750		7.805		8.717		16.521	50	44,96		16.521	10	9,44	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000		24.527		14.200		500		6.103		6.603	50	46,5		6.603	3,33	13,21	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.000		1.811.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25		125		300		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.440.345		1.371.744		1.063.818		80.132		627.685		707.817	31,25	66,54		707.817	2,22	13,01	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		8		8		3		2		5		62,5		5		6,67		
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	50		8		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.625.000		225.400		1.043.818		80.132		627.685		707.817	62,5	67,81		707.817	6,67	43,56	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		8		8		3		2		5		62,5		5		6,67		
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			3.215.345		1.045.066		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	50		8		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000		101.278		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**42.500.000**		**283.377**		**1.825.000**		**-**		**85.103**		**85.103**	**0**	**4,66**		**85.103**	**0**	**0,2**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya perlindungan	Persentase kawasan pemukiman	75		0		55		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	rawan banjir yang terlindungi (Persentase)																			
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	32,25		0		28,09		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			13.000.000		193.611		1.225.000		-		83.693		83.693	0	6,83		83.693	0	0,64	
	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air dan bangunan pada wilayah sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	13		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	17		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	31		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	13		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			1.300.000		-		500.000		-		83.693		83.693	0	16,74		83.693	0	6,44	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	13		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai			3.400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	17		0		2		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			6.200.000		-		725.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	31		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			2.100.000		193.611		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	13		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			29.500.000		89.766		600.000		-		1.410		1.410	0	0,24		1.410	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	21		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	43		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	41		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bendung Irigasi yang	21		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Ditingkatkan (UNIT)																			
		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	17		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	14		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			2.600.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	21		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			8.300.000		-		100.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	43		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			8.200.000		89.766		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	41		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			2.900.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi			4.200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	21		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0051	Pembangunan Bendung Irigasi			1.700.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	17		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			1.350.000		-		500.000		-		1.410		1.410	0	0,28		1.410	0	0,1	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	14		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**4.318.562**		**283.754**		**3.694.388**		**-**		**92.418**		**92.418**	**0**	**2,5**		**92.418**	**0**	**2,14**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Air Minum aman perpipaan (Persentase)	36,5		87,56		30,50		0		0		0		0		0		0		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			4.318.562		283.754		3.694.388		-		92.418		92.418	0	2,5		92.418	0	2,14	
	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	66		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0		5		5		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			4.318.562		3.590		2.507.190		-		1.760		1.760	0	0,07		1.760	0	0,04	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	66		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			-		280.164		1.187.198		-		90.658		90.658	0	7,64		90.658	0	0	
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0		5		5		0		0		0		0		0		0		
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**29.100.000**		**5.147.947**		**463.550**		**-**		**31.745**		**31.745**	**0**	**6,85**		**31.745**	**0**	**0,11**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase)	17,9		0		9,98		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.100.000		5.147.947		463.550		-		31.745		31.745	0	6,85		31.745	0	0,11	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	0		13		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1100		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terpusat Skala Permukiman																				
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			-		5.147.947		256.060		-		900		900	0	0,35		900	0	0	
	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	0		13		5		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			900.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			6.730.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			755.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			17.400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1100		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			815.000		-		207.490		-		30.845		30.845	0	14,87		30.845	0	3,78	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**30.912.371**		**484.861**		**350.000**		**-**		**11.429**		**11.429**	**0**	**3,27**		**11.429**	**0**	**0,04**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50		0		45								0				0		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.912.371		484.861		350.000		-		11.429		11.429	0	3,27		11.429	0	0,04	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	5		0		2500		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Sistem Drainase	5		500		2000		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)																			
		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	2.9		1		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			16.200.000		44.858		350.000		-		11.429		11.429	0	3,27		11.429	0	0,07	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	5		0		2500		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan			2.882.371		139.187		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5		500		2000		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan			10.830.000		300.817		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	2.9		1		4		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**115.000.000**		**15.796.878**		**3.963.790**		**-**		**693.828**		**693.828**	**0**	**17,5**		**693.828**	**0**	**0,6**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)	85		0		69								0				0		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			115.000.000		15.796.878		3.963.790		-		693.828		693.828	0	17,5		693.828	0	0,6	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	9		6		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	250		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)																			
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			104.500.000		15.792.343		3.892.160		-		692.928		692.928	0	17,8		692.928	0	0,66	
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	9		6		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			2.500.000		4.535		71.630		-		900		900	0	1,26		900	0	0,04	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	250		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**586.000.000**		**1.111.415**		**28.999.839**		**-**		**646.762**		**646.762**	**0**	**2,23**		**646.762**	**0**	**0,11**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	60		52,56		54,50								0				0		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			586.000.000		1.111.415		28.999.839		-		646.762		646.762	0	2,23		646.762	0	0,11	
	Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	26		4		1		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	5890.65		0		50		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	190		0		35		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	34		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	69.66		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	113		0		20		0		0		0		0		0		0		
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	65.55		0		33.17		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	132		0		10		0		0		0		0		0		0		
		Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	8		0		222		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			9.500.000		1.111.415		500.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	26		4		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			8.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	5890.65		0		50		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			13.500.000		-		2.200.000		-		166.499		166.499	0	7,57		166.499	0	1,23	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	190		0		35		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			17.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	34		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			104.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	69.66		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			27.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	113		0		20		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			323.000.000		-		23.162.279		-		327.350		327.350	0	1,41		327.350	0	0,1	
	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	65.55		0		33.17		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			11.000.000		-		1.000.000		-		152.913		152.913	0	15,29		152.913	0	1,39	
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	132		0		10		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			72.000.000		-		2.137.560		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	8		0		222		0		0		0		0		0		0		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**325.000**		**3.445**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	15		0		7								0				0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			125.000		3.445		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			50.000		3.445		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**1.555.000**		**24.557**		**879.170**		**-**		**380**		**380**	**0**	**0,04**		**380**	**0**	**0,02**	Dinas Pekerjaan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			190.000		6.005		879.170		-		380		380	0	0,04		380	0	0,2	
	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0		0		0		0		0		0		
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	6		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			-		6.005		21.770		-		380		380	0	1,75		380	0	0	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			50.000		-		857.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	6		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			85.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah			785.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kabupaten/Kota																				
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar			310.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			175.000		18.552		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	25		4		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			50.000		18.552		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	25		4		10		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen	Jumlah dokumen sinkronisasi	5		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	program pemanfaatan ruang (Dokumen)																			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			405.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			55.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen	Jumlah dokumen tekstual dan	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)																			
1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**93.842.500**		**8.348.191**		**14.266.466**		**2.983.923**		**4.169.873**		**7.153.797**	**28,19**	**50,14**		**7.153.797**	**3,83**	**7,62**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**48.600.000**		**8.254.855**		**7.687.772**		**1.563.323**		**2.223.685**		**3.787.008**	**44,64**	**49,26**		**3.787.008**	**5,9**	**7,79**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		89		80,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		72,8		69,15		0		0		0		0		0		0		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.774.669		7.521.757		7.387.772		1.473.229		2.152.990		3.626.219	67,82	49,08		3.626.219	13,69	8,28	
	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	340		17,25		69		59		59,17		59,085		85,63		59,085		17,38		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			42.765.722		7.314.717		7.231.772		1.431.704		2.113.865		3.545.569	85,63	49,03		3.545.569	17,38	8,29	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	340		17,25		69		59		59,17		59,085		85,63		59,085		17,38		
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.008.947		207.040		156.000		41.525		39.125		80.650	50	51,7		80.650	10	7,99	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.574.331		147.507		100.887		28.945		27.089		56.034	41,67	55,54		56.034	6,05	3,56	
	Persentase administrasi umum Perangkat Dearah yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	120		6		4		0		2		2		50		2		1,67		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2,5		4		0		2		2		50		2		8		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0,25		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi	0		2		4		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kunjungan Tamu (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340		60		4		1		1		2		50		2		0,59		
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			87.500		7.000		2.000		-		500		500	50	25		500	1,67	0,57	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	120		6		4		0		2		2		50		2		1,67		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			170.000		27.403		14.700		-		2.900		2.900	50	19,73		2.900	8	1,71	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2,5		4		0		2		2		50		2		8		
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			99.000		5.995		5.687		-		2.103		2.103	50	36,98		2.103	10	2,12	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0,25		4		0		2		2		50		2		10		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			83.331		11.248		5.000		4.145		320		4.465	50	89,3		4.465	10	5,36	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		984		3.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0		2		4		0		0		0		0		0		0		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.134.500		94.876		70.500		24.800		21.266		46.066	50	65,34		46.066	0,59	4,06	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340		60		4		1		1		2		50		2		0,59		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.451.000		264.790		56.113		14.820		15.049		29.869	50	53,23		29.869	4,17	2,06	
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		4		0		2		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			47.250		9.000		3.000		-		1.000		1.000	50	33,33		1.000	3,33	2,12	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		4		0		2		2		50		2		3,33		
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			364.750		39.512		42.813		9.693		11.661		21.354	50	49,88		21.354	10	5,85	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			106.250		16.779		10.300		5.127		2.388		7.515	50	72,96		7.515	3,33	7,07	
	Tersedianya Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60		9		4		1		1		2		50		2		3,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																			
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			932.750		199.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.800.000		320.800		143.000		46.330		28.557		74.887	0	52,37		74.887	1,19	4,16	
	Persentase Pemeliharaan barang milik daearh penunjang urusan pemerintah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	295		29		0		7		7		7		0		7		2,37		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		3		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.600.000		240.074		128.000		46.330		26.217		72.547	0	56,68		72.547	2,37	4,53	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	295		29		0		7		7		7		0		7		2,37		
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000		80.727		15.000		-		2.340		2.340	0	15,6		2.340	0	1,17	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		3		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**1.042.500**		**57.156**		**124.810**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100		0		100,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100		100		100,00		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			45.000		1.780		4.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota yang disusun	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	28		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0		1		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			45.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	28		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-		1.780		4.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0		1		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			150.000		14.000		27.450		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Diklat untuk TimTeknis/Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	10		2		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			150.000		14.000		27.450		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	10		2		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			812.500		41.376		89.860		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	19		2		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	9		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			430.000		3.111		42.074		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	19		2		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			382.500		38.265		47.786		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	9		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			35.000		-		3.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	28		0		3		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			35.000		-		3.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang	28		0		3		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)																			
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**4.200.000**		**36.180**		**28.364**		**190**		-		**190**	**0**	**0,67**		**190**	**0**	**0**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	71,43		100		42,86		0		0		0		0		0		0		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.200.000		36.180		28.364		190		-		190	0	0,67		190	0	0	
	Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	23		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			4.200.000		36.180		28.364		190		-		190	0	0,67		190	0	0	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	23		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**40.000.000**		-		**6.425.520**		**1.420.411**		**1.946.188**		**3.366.599**	**0**	**52,39**		**3.366.599**	**0**	**8,42**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	75		0		52,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	87		0		71,00		0		0		0		0		0		0		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			40.000.000		-		6.425.520		1.420.411		1.946.188		3.366.599	0	52,39		3.366.599	0	8,42	
	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35		0		7		0		0		0		0		0		0		
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			40.000.000		-		6.425.520		1.420.411		1.946.188		3.366.599	0	52,39		3.366.599	0	8,42	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35		0		7		0		0		0		0		0		0		
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**74.028.587**		**10.835.956**		**9.689.701**		**1.840.333**		**2.983.742**		**4.824.075**	**36,91**	**49,79**		**4.824.075**	**9,31**	**6,52**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.856.200**		**5.798.110**		**5.445.123**		**1.151.197**		**1.741.653**		**2.892.850**	**54,79**	**53,13**		**2.892.850**	**8,64**	**7,85**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,25		75,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		92		81,00		74		74		74		91,36		74		87,06		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		91		95,00		85		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	evaluasi kinerja perangkat daerah																				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.796.200		5.458.855		5.245.123		1.129.391		1.688.129		2.817.520	93,64	53,72		2.817.520	11,37	8,1	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	275		54		55		48		48		48		87,27		48		17,45		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		1		4		100		4		6,67		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.192.500		5.399.575		5.176.723		1.107.212		1.675.069		2.782.280	87,27	53,75		2.782.280	17,45	8,14	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	275		54		55		48		48		48		87,27		48		17,45		
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			578.700		59.280		68.400		22.180		13.060		35.240	100	51,52		35.240	6,67	6,09	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		1		4		100		4		6,67		
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			785.000		117.398		79.820		-		22.595		22.595	50	28,31		22.595	10	2,88	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000		5.973		3.481		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			97.500		17.774		14.025		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.000		8.439		5.401		-		2.088		2.088	50	38,66		2.088	10	5,97	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			122.500		24.932		12.891		-		750		750	50	5,82		750	10	0,61	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000		60.282		44.022		-		19.757		19.757	50	44,88		19.757	10	3,95	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.000		-		17.940		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	35		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		10		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			55.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	35		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.000		-		17.940		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		10		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.000		32.305		26.090		7.717		2.404		10.120	50	38,79		10.120	10	6,33	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000		2.460		2.000		-		1.000		1.000	50	50		1.000	10	10	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.000		15.875		15.000		6.717		614		7.330	50	48,87		7.330	10	8,62	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			65.000		13.970		9.090		1.000		790		1.790	50	19,69		1.790	10	2,75	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			940.000		189.551		76.150		14.089		28.526		42.615	62,5	55,96		42.615	7,5	4,53	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		10		15		15		15		15		100		15		20		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		2		0		1		0,5		25		0,5		10		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			700.000		131.399		65.308		14.089		23.273		37.362	100	57,21		37.362	20	5,34	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		10		15		15		15		15		100		15		20		
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			140.000		58.152		10.842		-		5.253		5.253	25	48,45		5.253	10	3,75	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		2		0		1		0,5		25		0,5		10		
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.250.000**		**406.648**		**341.532**		**31.582**		**167.967**		**199.549**	**45,56**	**58,43**		**199.549**	**13,57**	**8,87**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
		Persentase Perda dan Perkada	100		100		100		25		25		50		50		50		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		yang ditegakkan (%)																			
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.725.000		383.005		257.138		31.582		138.791		170.373	52	66,26		170.373	14,44	9,88	
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		4		5		0		3		3		60		3		60		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		4		4		0		3		3		75		3		60		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0		4		4		0		3		3		75		3		0		
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	58		30		7		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	16		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	81		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	20		30		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	20		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penindakan (Laporan)																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			75.000		21.013		6.606		-		3.700		3.700	60	56,01		3.700	60	4,93	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		4		5		0		3		3		60		3		60		
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			75.000		23.712		11.250		-		-		-	75	0		-	60	0	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		4		4		0		3		3		75		3		60		
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-		35.066		17.650		-		-		-	75	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0		4		4		0		3		3		75		3		0		
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			75.000		11.471		12.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	58		30		7		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	16		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			145.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	81		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			1.085.000		291.745		209.132		31.582		135.091		166.672	50	79,7		166.672	10	15,36	
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	20		30		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			400.000		20.181		45.041		-		14.776		14.776	50	32,81		14.776	6,67	3,69	
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			150.000		-		31.103		-		6.373		6.373	50	20,49		6.373	10	4,25	
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			125.000		20.181		13.938		-		8.403		8.403	50	60,29		8.403	10	6,72	
	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			125.000		3.462		39.353		-		14.400		14.400	25	36,59		14.400	20	11,52	
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		0		4		0		2		2		50		2		40		
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		4		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			75.000		-		39.353		-		14.400		14.400	50	36,59		14.400	40	19,2	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	5		0		4		0		2		2		50		2		40		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			50.000		3.462		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		4		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**6.940.000**		**552.983**		**409.446**		**39.170**		**162.956**		**202.126**	**62,5**	**49,37**		**202.126**	**2,5**	**2,91**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
		Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime) (Persentase)	96		100		92		25		25		50		54,35		50		52,08		
		Cakupan Layanan Penyelamatan	100		100		100		25		25		50		50		50		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)																			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.665.000		552.983		409.446		39.170		162.956		202.126	62,5	49,37		202.126	4	3,03	
	Capaian waktu tanggap (response time)	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	60		4		4		3		0		3		75		3		5		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	60		4		4		3		0		3		75		3		5		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0		0		4		0		2		2		50		2		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	22		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.250.000		540.393		269.160		39.170		124.662		163.832	50	60,87		163.832	10	7,28	
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			85.000		7.500		82.945		-		-		-	75	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60		4		4		3		0		3		75		3		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)																			
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			75.000		5.090		-		-		-		-	75	0		-	5	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	60		4		4		3		0		3		75		3		5		
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			60.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			-		-		57.341		-		38.294		38.294	50	66,78		38.294	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0		0		4		0		2		2		50		2		0		
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			4.195.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	22		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah kebakaran yang terinvestigasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah relawan kebakaran yang tersedia	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan	235		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)																			
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	235		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	235		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	235		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.889.379**		**3.371.608**		**2.793.600**		**615.775**		**847.399**		**1.463.173**	**36,57**	**52,38**		**1.463.173**	**9,61**	**7**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,25		75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		0		81		91		93		93		114,81		93		109,41		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		76		95		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	12,5	0	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		6		0		0		2		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		2		1		3		0		3		15		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		6		0		0		2		2		0		2		10		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	15	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	20		4		0		2		1		3		0		3		15		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.832.879		2.663.184		2.619.920		610.622		790.938		1.401.560	75	53,5		1.401.560	26,67	8,85	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		21		20		20		20		20		100		10		50		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		1		0		1		0		1		20		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.178.519		2.604.224		2.565.200		610.622		768.258		1.378.880	100	53,75		1.378.880	50	9,08	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		21		20		20		20		20		100		10		50		
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			579.360		58.960		54.720		-		22.680		22.680	50	41,45		22.680	10	3,91	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	20	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		1		0		1		0		1		20		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.433.000		263.101		56.000		337		24.562		24.899	50	44,46		24.899	10	1,74	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			63.000		6.948		1.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000		46.060		10.000		-		30		30	50	0,3		30	10	0,02	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			75.000		13.046		7.000		337		2.451		2.788	50	39,83		2.788	10	3,72	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			145.000		35.410		8.000		-		1.530		1.530	50	19,13		1.530	10	1,06	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			27.000		5.400		5.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			973.000		156.236		25.000		-		20.551		20.551	50	82,2		20.551	10	2,11	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			95.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.023.500		149.080		24.500		-		2.173		2.173	37,5	8,87		2.173	5,83	0,21	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.500		5.000		2.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			180.000		24.830		21.500		-		1.816		1.816	50	8,45		1.816	3,33	1,01	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000		-		1.000		-		357		357	50	35,7		357	10	1,43	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			795.000		119.250		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60		12		12		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.425.000		296.242		93.180		4.815		29.726		34.541	5,44	37,07		34.541	0,98	1,42	
	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105		21		17		2		2		2		11,76		2		1,9		
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		1		0		1		10		1		2		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.250.000		183.524		69.680		3.315		26.604		29.920	11,76	42,94		29.920	1,9	2,39	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105		21		17		2		2		2		11,76		2		1,9		
1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			850.000		57.138		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			175.000		11.276		3.500		1.500		-		1.500	10	42,86		1.500	2	0,86	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		1		0		1		10		1		2		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150.000		44.304		20.000		-		3.121		3.121	0	15,61		3.121	0	2,08	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**7.093.008**		**706.607**		**700.000**		**2.610**		**63.768**		**66.378**	**9,78**	**9,48**		**66.378**	**9,41**	**0,94**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100		100		100		100		100		100		100		50		50		
		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		50		50		
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	500		100		100		0		0,51		0,51		0,51		0,51		0,1		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			549.601		6.799		58.204		-		760		760	0,51	1,31		760	0,05	0,14	
	Persentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Bencaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang	907625		181.525		181525		0		930		930		0,51		930		0,1		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	bencana	memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)																			
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			249.601		6.799		58.204		-		760		760	0,51	1,31		760	0,1	0,3	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	907625		181.525		181525		0		930		930		0,51		930		0,1		
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			300.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			3.435.907		453.995		175.000		-		3.467		3.467	20,88	1,98		3.467	18,8	0,1	
	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	5		1		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		80		0		80		80		100		80		160		
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1		4		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	30		30		35		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	65		13		13		3		3		6		46,15		6		9,23		
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			250.000		39.526		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	5		1		2		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			255.000		2.128		5.000		-		3.467		3.467	100	69,34		3.467	160	1,36	
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		80		0		80		80		100		80		160		
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			417.345		102.093		150.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan	1		4		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	kesiapsiagaan menghadapi bencana	menghadapi bencana (Kawasan)																			
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			290.000		39.441		5.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	30		30		35		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			655.000		197.860		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			475.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			392.863		46.752		5.000		-		-		-	46,15	0		-	9,23	0	
	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	65		13		13		3		3		6		46,15		6		9,23		
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			300.700		26.196		10.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2.307.500		210.613		436.796		2.610		59.541		62.151	0	14,23		62.151	0	2,69	
	Persentase Penduduk Terdampak Bencana Yang Ditangani	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	1		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)																			
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	125		0		25		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	2500		300		500		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			37.500		-		1.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1.150.000		66.957		324.796		-		59.061		59.061	0	18,18		59.061	0	5,14	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			110.000		907		10.000		1.150		-		1.150	0	11,5		1.150	0	1,05	
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	125		0		25		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			960.000		142.749		100.000		1.460		480		1.940	0	1,94		1.940	0	0,2	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	2500		300		500		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			50.000		-		1.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			800.000		35.199		30.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Daerah Pascabencana Yang ditindaklanjuti Penanganannya	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)																			
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			675.000		35.199		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			125.000		-		10.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**30.538.904**		**5.610.583**		**4.915.068**		**1.148.282**		**1.321.844**		**2.470.127**	**22,22**	**50,26**		**2.470.127**	**4,26**	**8,09**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.777.509**		**4.887.539**		**4.255.902**		**1.099.745**		**1.290.707**		**2.390.452**	**37,75**	**56,17**		**2.390.452**	**7,48**	**9,65**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		70,7		71,50		0		60,77		60,77		84,99		60,77		71,49		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		82,25		83		92		93,75		93,75		112,95		93,75		110,29		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		1		1		2		0		2		10		
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		1		1		2		0		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		1		1		2		0		2		10		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.581.777		4.123.536		4.058.187		1.038.315		1.246.641		2.284.956	75	56,3		2.284.956	10,15	11,67	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	132		27		27		27		27		27		100		27		20,45		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.135.577		4.040.996		3.976.487		1.018.305		1.226.931		2.245.236	100	56,46		2.245.236	20,45	11,73	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	132		27		27		27		27		27		100		27		20,45		
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			421.200		82.540		81.700		20.010		19.710		39.720	50	48,62		39.720	10	9,43	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			946.502		163.633		68.826		14.620		20.993		35.613	45,83	51,74		35.613	9,17	3,76	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.846		6.591		4.419		-		112		112	25	2,53		112	5	0,4	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		4		4		0		1		1		25		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			138.107		19.788		12.681		2.088		3.426		5.514	50	43,48		5.514	10	3,99	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.845		8.007		4.677		328		2.665		2.993	50	63,99		2.993	10	11,58	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			113.238		11.388		7.342		504		-		504	50	6,86		504	10	0,45	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			32.933		6.958		1.350		-		375		375	50	27,78		375	10	1,14	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			608.533		110.901		38.357		11.700		14.415		26.115	50	68,08		26.115	10	4,29	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			420.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		10		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0		1		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.658.250		411.087		37.541		7.841		5.760		13.601	37,5	36,23		13.601	9,58	0,51	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		4		4		1		1		2		50		2		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.500		3.498		3.570		2.124		29		2.154	50	60,33		2.154	10	11,64	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			134.750		27.124		25.201		4.917		4.331		9.247	50	36,69		9.247	3,33	6,86	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000		13.715		8.770		800		1.400		2.200	50	25,09		2.200	25	3,67	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		4		4		1		1		2		50		2		25		
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.445.000		366.750		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.120.980		189.283		91.348		38.968		17.314		56.282	14,52	61,61		56.282	2,9	5,02	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	155		31		31		5		4		9		29,03		9		5,81		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			975.000		155.492		80.910		38.968		17.314		56.282	29,03	69,56		56.282	5,81	5,77	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	155		31		31		5		4		9		29,03		9		5,81		
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			145.980		33.791		10.438		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**375.000**		**32.337**		**40.566**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	100		99,17		100		99,17		99,17		99,17		99,17		99,17		99,17		
		Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada	100		100		100		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)																			
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100		100		56,97		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	100		84,64		100		0		0		0		0		0		0		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			375.000		32.337		40.566		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya kapasitas PSKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20		3		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	260		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000		32.337		40.566		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20		3		3		0		0		0		0		0		0		
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	260		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**2.336.395**		**204.073**		**287.165**		**3.538**		**28.350**		**31.888**	**6,67**	**11,1**		**31.888**	**1,2**	**1,36**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		99,9		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	500		100		100		0		100		100		100		100		20		
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.799.344		154.784		238.665		3.538		28.350		31.888	7,5	13,36		31.888	1,33	1,77	
	Menigkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar sertta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	730		295		120		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		26		40		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		1		5		0		2		2		40		2		8		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		2		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		5		0		1		1		20		1		4		
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	25		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Orang)																			
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			386.844		95.217		49.986		2.550		-		2.550	0	5,1		2.550	0	0,66	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	730		295		120		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			12.500		-		2.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		5		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			715.000		57.326		84.998		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		26		40		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			50.000		-		5.000		170		-		170	0	3,4		170	0	0,34	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		5		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			475.000		-		81.182		-		28.350		28.350	0	34,92		28.350	0	5,97	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		50		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			50.000		922		5.000		-		-		-	40	0		-	8	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		1		5		0		2		2		40		2		8		
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			60.000		1.319		5.000		818		-		818	0	16,36		818	0	1,36	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		2		5		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			25.000		-		5.000		-		-		-	20	0		-	4	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		5		0		1		1		20		1		4		
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			537.051		49.289		48.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dI Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	980		80		60		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			537.051		49.289		48.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	980		80		60		0		0		0		0		0		0		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**2.250.000**		**382.582**		**196.455**		**-**		**2.787**		**2.787**	**0**	**1,42**		**2.787**	**0**	**0,12**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	75		0		60		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	4		3,22		2,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100		100		95		0		0		0		0		0		0		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.250.000		382.582		196.455		-		2.787		2.787	0	1,42		2.787	0	0,12	
	Meningkatnya pengelolaan data DTSEN	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175		0		25		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	500		100		320		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)																			
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			1.000.000		-		143.650		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175		0		25		0		0		0		0		0		0		
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125		0		0		0		0		0		0		0		0		
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			500.000		382.582		52.805		-		2.787		2.787	0	5,28		2.787	0	0,56	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	500		100		320		0		0		0		0		0		0		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**800.000**		**104.053**		**134.981**		**45.000**		-		**45.000**	**1,25**	**33,34**		**45.000**	**0,13**	**5,63**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial (Persentase)	100		100		100		100		0		0		0		0		0		
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100		100		100		2		0		0		0		0		0		
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			800.000		104.053		134.981		45.000		-		45.000	1,25	33,34		45.000	0,13	5,63	
	Meningkatnya Kemenuhan kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		80		2		0		2		2,5		2		0,4		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		30		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	250		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																			
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			700.000		104.053		124.981		45.000		-		45.000	2,5	36,01		45.000	0,4	6,43	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		80		2		0		2		2,5		2		0,4		
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			50.000		-		10.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		30		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**96.429.872**		**14.643.366**		**15.453.590**		**3.205.083**		**3.481.497**		**6.686.580**	**43,83**	**43,27**		**6.686.580**	**8,13**	**6,93**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.807.712**		**2.780.935**		**2.456.154**		**563.196**		**1.176.643**		**1.739.839**	**40,1**	**70,84**		**1.739.839**	**11,76**	**9,77**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		74,75		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		88,75		82,29		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	5,71	0	
	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		0		0		1		0		1		0		1		4,76		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		1		0		1		0		1		6,67		
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	4,76	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		0		0		1		0		1		0		1		4,76		
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	6,67	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		1		0		1		0		1		6,67		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.901.079		2.271.602		2.270.734		514.178		1.081.839		1.596.017	70,83	70,29		1.596.017	52,3	11,48	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		18		18		15		18		16,5		91,67		16,5		78,57		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0		3		0		3		0		3		75		
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.426.579		2.197.187		2.207.854		489.188		611.799		1.100.987	91,67	49,87		1.100.987	78,57	8,2	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		18		18		15		18		16,5		91,67		16,5		78,57		
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			454.500		74.415		62.880		24.990		470.040		495.030	50	787,26		495.030	3,33	108,92	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	75	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0		3		0		3		0		3		75		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.018.020		191.910		69.380		16.375		54.843		71.218	37,5	102,65		71.218	7,5	7	
	Terlaksananya pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		0		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.500		5.000		1.520		1.135		-		1.135	25	74,67		1.135	5	3,11	
	Tersedianya Komponen	Jumlah Paket Komponen	20		4		4		1		0		1		25		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																			
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			88.000		21.465		17.251		5.300		8.822		14.122	50	81,86		14.122	10	16,05	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			28.000		4.997		857		-		500		500	50	58,34		500	10	1,79	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			94.712		18.179		2.258		-		2.250		2.250	50	99,63		2.250	10	2,38	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		4.975		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			745.809		137.294		47.494		9.940		43.271		53.211	50	112,04		53.211	10	7,13	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000		1.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		1		0		1		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			95.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		3		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			465.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			120.000		1.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		1		0		1		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			967.822		90.604		20.050		7.188		176		7.364	25	36,73		7.364	5	0,76	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		0		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	60		12		12		3		3		6		50		6		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dan Listrik yang Disediakan (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		3		4		1		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.500		3.500		1.000		1.000		-		1.000	25	100		1.000	5	5,71	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		0		1		25		1		5		
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			192.322		14.704		16.550		5.088		176		5.264	50	31,81		5.264	10	2,74	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			128.000		19.900		2.500		1.100		-		1.100	25	44		1.100	5	0,86	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		3		4		1		1		1		25		1		5		
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			630.000		52.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.090.791		225.319		95.990		25.455		39.785		65.240	58,33	67,97		65.240	9,29	5,98	
	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		8		0		6		6		75		6		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		7		0		6		0		6		0		6		17,14		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		7		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		75.990		-		20.000		20.000	75	26,32		20.000	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		8		0		6		6		75		6		0		
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			735.791		170.528		-		25.240		-		25.240	0	0		25.240	17,14	3,43	
	Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	35		7		0		6		0		6		0		6		17,14		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																			
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000		5.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		7		0		0		0		0		0		0		
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000		49.791		20.000		215		19.785		20.000	100	100		20.000	20	8	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**100.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja (%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**3.297.000**		**285.392**		**139.110**		**128.635**		**270.340**		**398.975**	**50**	**286,81**		**398.975**	**2,14**	**12,1**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	35		0		20		12,57		12,57		12,57		62,85		12,57		35,91		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			3.001.000		285.392		139.110		128.635		270.340		398.975	50	286,81		398.975	3,75	13,29	
	Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	320		96		48		48		0		48		100		48		15		
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	80		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			2.206.000		285.392		139.110		128.635		270.340		398.975	100	286,81		398.975	15	18,09	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	320		96		48		48		0		48		100		48		15		
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			145.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	10		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	80		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pelayanan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			96.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengukuran produktifitas tenaga kerja tingkat daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			96.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**72.500.000**		**11.005.464**		**12.508.076**		**2.512.352**		**2.034.515**		**4.546.867**	**70,12**	**36,35**		**4.546.867**	**6,98**	**6,27**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya penempatan tenaga	Persentase pencari kerja	25		0		20		53		53		53		265		53		212		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	kerja	terdaftar yang ditempatkan (%)																			
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			69.000.000		10.987.429		12.505.556		2.512.352		2.034.255		4.546.607	111,9	36,36		4.546.607	6,03	6,59	
	Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	125		206		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	1300		206		210		235		0		235		111,9		235		18,08		
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			1.000.000		3.598.516		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	125		206		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			1.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			66.500.000		7.388.912		12.505.556		2.512.352		2.034.255		4.546.607	111,9	36,36		4.546.607	18,08	6,84	
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	1300		206		210		235		0		235		111,9		235		18,08		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			3.500.000		18.035		2.520		-		260		260	49,22	10,32		260	8,42	0,01	
	Terlaksananya pelayanan tenaga kerja melalui pengelolaan informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2630		1.531		450		314		129		443		98,44		443		16,84		
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	100		1		12		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			2.500.000		5.815		2.520		-		260		260	98,44	10,32		260	16,84	0,01	
	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2630		1.531		450		314		129		443		98,44		443		16,84		
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			1.000.000		12.220		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	100		1		12		0		0		0		0		0		0		
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**2.725.160**		**571.575**		**350.251**		**900**		**-**		**900**	**33,33**	**0,26**		**900**	**1,17**	**0,03**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan (%)	80		0		60,00		0		0		0		0		0		0		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pendataan pelaksanaan sarana hubungan industrial di perusahaan dalam skala menengah ke atas	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pengupahan (Laporan)																			
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			2.705.160		571.575		350.251		900		-		900	33,33	0,26		900	1,56	0,03	
	Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	75		25		3		1		1		2		66,67		2		2,67		
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	50		100		3		1		0		1		33,33		1		2		
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	17700		12.450		1400		0		0		0		0		0		0		
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000		15.005		1.650		-		-		-	66,67	0		-	2,67	0	
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	75		25		3		1		1		2		66,67		2		2,67		
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		5.540		2.055		900		-		900	33,33	43,8		900	2	4,5	
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	50		100		3		1		0		1		33,33		1		2		
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			2.670.160		551.030		346.546		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	17700		12.450		1400		0		0		0		0		0		0		
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**2.852.730**		**-**		**314.954**		**13.790**		**69.531**		**83.321**	**61,24**	**26,46**		**83.321**	**35,91**	**2,92**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**2.000.720**		**-**		**314.954**		**13.790**		**69.531**		**83.321**	**166,67**	**26,46**		**83.321**	**33,33**	**4,16**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	13		7,7		9		4,1		4,1		4,1		45,56		4,1		31,54		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66,4		66,79		66,00		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000		-		14.943		-		2.495		2.495	33,33	16,7		2.495	0	2,49	
	Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan PUG.	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0		0		3		0		1		1		33,33		1		0		
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	30		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		14.943		-		2.495		2.495	33,33	16,7		2.495	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0		0		3		0		1		1		33,33		1		0		
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	30		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			83.775		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, serta perlindungan hak-hak mereka.	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	150		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			83.775		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	150		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.816.945		-		300.011		13.790		67.036		80.826	300	26,94		80.826	100	4,45	
	Terlaksananya advokasi dan pendampingan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	3		0		1		1		3		3		300		3		100		
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			1.816.945		-		300.011		13.790		67.036		80.826	300	26,94		80.826	100	4,45	
	terlaksananya pendampingan	jumlah lembaga penyedia	3		0		1		1		3		3		300		3		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)																			
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**50.000**		-		-		-		-		-	**6**	**0**		-	**1,2**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya kesadaran dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	30		0		30		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	30		0		30		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	12	0		-	2,4	0	
	terlaksananya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	125		0		25		1		2		3		12		3		2,4		
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-		-	12	0		-	2,4	0	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	125		0		25		1		2		3		12		3		2,4		
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**50.000**		-		-		-		-		-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Persentase)	100		54,76		100		54,76		54,76		54,76		54,76		54,76		54,76		
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	50	0		-	50	0	
	meningkatnya kualitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten.	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	50	0		-	50	0	
	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**100.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**100**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	100	0	
	Tersedianya data yang akurat dan terpilah yang diolah dan disajikan untuk mendukung perumusan kebijakan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		0		0		1		1		0		1		100		
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	100	0	
	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		0		0		1		1		0		1		100		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**202.010**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**100**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62		0		59,50		0		0		0		0		0		0		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			202.010		-		-		-		-		-	0	0		-	100	0	
	Terakomodirnya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang	30		30		0		0		30		30		0		30		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)																			
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			202.010		-		-		-		-		-	0	0		-	100	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	30		30		0		0		30		30		0		30		100		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**450.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**16,67**	**0**		**-**	**3,33**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	30		30		30		0		0		0		0		0		0		
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	30		30		30		0		0		0		0		0		0		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-		-	33,33	0		-	6,67	0	
	Tersedianya layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		30		30		5		5		10		33,33		10		6,67		
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-		-	33,33	0		-	6,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		30		30		5		5		10		33,33		10		6,67		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**1.775.200**		**148.048**		**187.994**		**12.098**		**38.985**		**51.083**	**0**	**27,17**		**51.083**	**4,8**	**2,88**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**400.200**		-		**10.000**		**700**		**6.330**		**7.030**	**0**	**70,3**		**7.030**	**0**	**1,76**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	167		152,5		142,90		152,5		152,5		152,5		106,72		152,5		91,32		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			400.200		-		10.000		700		6.330		7.030	0	70,3		7.030	0	1,76	
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	14		0		6		0		0		0		0		0		0		
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			400.200		-		10.000		700		6.330		7.030	0	70,3		7.030	0	1,76	
	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	14		0		6		0		0		0		0		0		0		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**655.000**		**148.048**		**104.228**		**10.578**		**14.215**		**24.793**	**0**	**23,79**		**24.793**	**8,64**	**3,79**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	95		94,7		93,60		94,7		94,7		94,7		101,18		94,7		99,68		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			280.000		48.800		47.113		10.578		12.585		23.163	0	49,16		23.163	0	8,27	
	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			255.000		48.800		47.113		10.578		12.585		23.163	0	49,16		23.163	0	9,08	
	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			100.000		45.228		-		-		-		-	0	0		-	43,18	0	
	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Ideal Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	45		19,431		0		19,431		19,431		19,431		0		19,431		43,18		
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			100.000		45.228		-		-		-		-	0	0		-	43,18	0	
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	45		19,431		0		19,431		19,431		19,431		0		19,431		43,18		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			275.000		54.020		57.115		-		1.630		1.630	0	2,85		1.630	0	0,59	
	Jumlah Data Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok	5		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)																			
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			250.000		54.020		57.115		-		1.630		1.630	0	2,85		1.630	0	0,65	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**500.000**		**-**		**53.766**		**590**		**4.650**		**5.240**	**0**	**9,75**		**5.240**	**0**	**1,05**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,13		28,21		17,95		28,21		28,21		28,21		42,84		28,21		-349,9		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			400.000		-		53.766		590		4.650		5.240	0	9,75		5.240	0	1,31	
	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			400.000		-		53.766		590		4.650		5.240	0	9,75		5.240	0	1,31	
	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**220.000**		**-**		**20.000**		**230**		**13.790**		**14.020**	**0**	**70,1**		**14.020**	**0**	**6,37**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100		0		100,00		0		0		0		0		0		0		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			220.000		-		20.000		230		13.790		14.020	0	70,1		14.020	0	6,37	
	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			220.000		-		20.000		230		13.790		14.020	0	70,1		14.020	0	6,37	
	Tersedianya sarana pengujian	Jumlah sarana pengujian	5		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)																			
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**26.720.000**		**56.127**		**1.000.000**		**-**		**5.079**		**5.079**	**0**	**0,51**		**5.079**	**0**	**0,02**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		0		10		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	10		0		10		0		0		0		0		0		0		
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**26.470.000**		**56.127**		**1.000.000**		**-**		**5.079**		**5.079**	**0**	**0,51**		**5.079**	**0**	**0,02**	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			26.470.000		56.127		1.000.000		-		5.079		5.079	0	0,51		5.079	0	0,02	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	75		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		2		0		0		0		0		0		0		
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			136.025		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	75		0		2		0		0		0		0		0		0		
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			26.333.975		56.127		1.000.000		-		5.079		5.079	0	0,51		5.079	0	0,02	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		2		0		0		0		0		0		0		
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**11.055.000**		**2.786.100**		**2.307.355**		**68.616**		**306.652**		**375.269**	**121,8**	**16,26**		**375.269**	**3,58**	**3,39**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.700.000**		**225.723**		**210.225**		**850**		**-**		**850**	**0**	**0,4**		**850**	**0**	**0,05**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100		100		100,00		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Perda RPPLH yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			1.300.000		225.723		210.225		850		-		850	0	0,4		850	0	0,07	
	Persentase KLHS yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			500.000		225.723		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	2		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)																			
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			800.000		-		210.225		850		-		850	0	0,4		850	0	0,11	
	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**500.000**		**73.250**		**117.849**		**1.608**		-		**1.608**	**16,67**	**1,36**		**1.608**	**2,5**	**0,32**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)	80		81,66		78,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100		83,58		100,00		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Titik Pantau Aktif (%)	45		29		30,00		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			500.000		73.250		117.849		1.608		-		1.608	16,67	1,36		1.608	2,5	0,32	
	Persentase objek yang teridentivikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	5		2		1		0		0,5		0,5		50		0,5		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			150.000		70.331		105.501		1.608		-		1.608	50	1,52		1.608	10	1,07	
	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	5		2		1		0		0,5		0,5		50		0,5		10		
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			125.000		2.920		12.348		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		disusun (Dokumen)																			
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**250.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terbangun (%)	0,65		0		0,11		0		0		0		0		0		0		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah RTH yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1900		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1900		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**125.000**		-		**5.120**		-		**662**		**662**	**0**	**12,93**		**662**	**0**	**0,53**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100		100		100,00		0		0		0		0		0		0		
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			125.000		-		5.120		-		662		662	0	12,93		662	0	0,53	
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai persyaratan administrasi dan teknis	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	500		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	0		0		5		0		0		0		0		0		0		
2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	500		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			-		-		5.120		-		662		662	0	12,93		662	0	0	
	Terfasilitasinya Pemenuhan	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan	0		0		5		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)																			
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**175.000**		**21.610**		**20.780**		**220**		**2.067**		**2.287**	**53,33**	**11,01**		**2.287**	**8**	**1,31**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100		100		100,00		0		25		25		25		25		25		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			175.000		21.610		20.780		220		2.067		2.287	53,33	11,01		2.287	8	1,31	
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	25		5		5		0		4		4		80		4		16		
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	75		13		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	0		0		15		0		4		4		26,67		4		0		
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			125.000		4.888		8.040		-		-		-	80	0		-	16	0	
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	25		5		5		0		4		4		80		4		16		
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			50.000		16.722		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	75		13		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			-		-		12.740		220		2.067		2.287	26,67	17,95		2.287	0	0	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0		0		15		0		4		4		26,67		4		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	(Usaha/Kegiatan)																			
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**500.000**		**85.307**		**74.801**		**330**		**-**		**330**	**850**	**0,44**		**330**	**13,08**	**0,07**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100		0		100,00		0		100		100		100		100		100		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000		85.307		74.801		330		-		330	850	0,44		330	13,08	0,07	
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	65		16		1		0		17		17		1700		17		26,15		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	15		0		7		0		0		0		0		0		0		
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			250.000		85.307		54.801		330		-		330	1700	0,6		330	26,15	0,13	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	65		16		1		0		17		17		1700		17		26,15		
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			250.000		-		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	15		0		7		0		0		0		0		0		0		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**125.000**		**-**		**6.570**		**-**		**-**		**-**	**66,67**	**0**		**-**	**13,33**	**0**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100		100		100,00		0		65		65		65		65		65		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			125.000		-		6.570		-		-		-	66,67	0		-	13,33	0	
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	15		0		3		0		2		2		66,67		2		13,33		
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			125.000		-		6.570		-		-		-	66,67	0		-	13,33	0	
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	15		0		3		0		2		2		66,67		2		13,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kabupaten/Kota yang dikelola	ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)																			
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**7.680.000**		**2.380.211**		**1.872.010**		**65.608**		**303.923**		**369.531**	**4,25**	**19,74**		**369.531**	**1,02**	**4,81**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	75		70		63,00		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			7.680.000		2.380.211		1.872.010		65.608		303.923		369.531	4,25	19,74		369.531	1,02	4,81	
	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	4		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	62500		13.275		15000		0		3.821,3		3.821,3		25,48		3.821,3		6,11		
		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	0		0		10000		1,03		1,7		2,73		0,03		2,73		0		
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			100.000		-		400.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	4		0		2		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			6.745.000		2.199.293		960.413		61.470		204.504		265.974	25,48	27,69		265.974	6,11	3,94	
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	62500		13.275		15000		0		3.821,3		3.821,3		25,48		3.821,3		6,11		
2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			-		-		15.000		3.668		7.282		10.950	0,03	73		10.950	0	0	
	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	0		0		10000		1,03		1,7		2,73		0,03		2,73		0		
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan	5		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)																			
		Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	435		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			100.000		-		20.894		470		2.327		2.797	0	13,39		2.797	0	2,8	
	Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			55.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	435		0		0		0		0		0		0		0		0		
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	101		15		47		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	28		81		3		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			180.000		129.723		132.698		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	101		15		47		0		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			500.000		51.195		343.005		-		89.810		89.810	0	26,18		89.810	0	17,96	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	28		81		3		0		0		0		0		0		0		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**24.494.648**		**4.054.639**		**3.695.505**		**830.710**		**989.819**		**1.820.529**	**41,38**	**49,26**		**1.820.529**	**5,44**	**7,43**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.943.000**		**3.640.815**		**3.306.187**		**818.395**		**968.278**		**1.786.673**	**54,64**	**54,04**		**1.786.673**	**6,55**	**8,53**	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		96,68		82,44		96		96		96		116,45		96		112,94		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah	95		91		95		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Angka)																			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.000		16.992		4.780		-		4.456		4.456	50	93,22		4.456	6,67	5,24	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		5		4		1		1		2		50		2		13,33		
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			60.000		16.992		4.780		-		4.456		4.456	50	93,22		4.456	13,33	7,43	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		5		4		1		1		2		50		2		13,33		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.045.500		3.197.524		3.125.185		781.096		917.317		1.698.412	62,14	54,35		1.698.412	7,46	10,58	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210		28		35		26		26		26		74,29		26		12,38		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.595.500		3.128.174		3.039.505		768.396		893.327		1.661.722	74,29	54,67		1.661.722	12,38	10,66	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210		28		35		26		26		26		74,29		26		12,38		
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			425.000		69.350		85.680		12.700		23.990		36.690	50	42,82		36.690	10	8,63	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.020.000		161.352		42.988		9.161		13.201		22.361	50	52,02		22.361	10	1,11	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			47.500		5.000		1.481		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			235.000		36.636		5.703		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			62.500		16.172		2.872		190		200		390	50	13,58		390	10	0,62	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			230.000		19.407		6.803		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			64.000		6.273		1.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.381.000		77.865		24.629		8.971		13.001		21.971	50	89,21		21.971	10	1,59	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.050.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	55		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			110.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	55		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			210.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			170.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			777.000		146.883		75.880		15.795		15.317		31.112	50	41		31.112	8,33	4	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		4		1		1		2		50		2		3,33		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			22.000		3.000		1.000		-		1.000		1.000	50	100		1.000	10	4,55	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			385.000		58.252		70.000		12.995		14.117		27.112	50	38,73		27.112	10	7,04	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.000		17.381		4.880		2.800		200		3.000	50	61,48		3.000	10	1,88	
	Tersedianya Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.000		68.250		-		-		-		-	50	0		-	3,33	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		4		1		1		2		50		2		3,33		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			965.500		118.063		57.354		12.344		17.987		30.332	100	52,89		30.332	7,5	3,14	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		6		6		6		6		100		6		15		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		1		1		100		1		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			823.500		94.226		52.629		11.485		17.987		29.473	100	56		29.473	15	3,58	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		6		6		6		6		100		6		15		
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		23.837		4.725		859		-		859	100	18,18		859	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		1		1		100		1		0		
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			142.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**2.231.648**		**225.624**		**155.775**		**2.800**		**4.628**		**7.428**	**14,29**	**4,77**		**7.428**	**2,5**	**0,33**	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	72		72,09		65		77		80,15		80,15		123,31		80,15		111,32		
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)	100		99,4		100		99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		
		Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)	99,5		98,29		99,40		97,49		98,06		98,06		98,65		98,06		98,55		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.757.648		174.039		155.775		2.800		4.628		7.428	20	4,77		7.428	4	0,42	
	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	5		7.000		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil	5		69.212		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)																			
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		47		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	60		13.500		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	5		5		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			125.000		5.298		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	5		7.000		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			682.350		56.207		155.775		2.800		4.628		7.428	0	4,77		7.428	0	1,09	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5		69.212		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			274.600		24.701		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		47		12		3		3		6		50		6		10		
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			538.225		66.007		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	60		13.500		12		3		3		6		50		6		10		
2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk			137.473		21.827		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	5		5		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			132.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pendataan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,			132.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																				
	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			342.000		51.586		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		12		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4		50		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			174.000		4.786		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		12		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			168.000		46.800		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4		50		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**625.000**		**69.566**		**120.771**		**1.535**		**-**		**1.535**	**30**	**1,27**		**1.535**	**5**	**0,25**	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		99,91		99,91		99,91		99,91		99,91		99,91		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			231.636		16.267		16.623		1.535		-		1.535	33,33	9,23		1.535	6,67	0,66	
	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5		9.476		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	235		47		47		47		47		47		100		47		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		yang Ditingkatkan (Layanan)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		8		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			51.750		6.986		10.353		1.535		-		1.535	0	14,82		1.535	0	2,97	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5		9.476		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			129.161		7.951		2.895		-		-		-	100	0		-	20	0	
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	235		47		47		47		47		47		100		47		20		
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			50.725		1.331		3.375		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		8		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			393.364		53.300		104.148		-		-		-	25	0		-	3,33	0	
	Persentase jumlah penduduk yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		3		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	3		61		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			73.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			200.364		20.424		76.614		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		3		12		3		3		6		50		6		10		
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			120.000		32.875		27.535		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	3		61		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**545.000**		**92.365**		**78.370**		**7.980**		**16.913**		**24.893**	**66,67**	**31,76**		**24.893**	**8**	**4,57**	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase)	100		85,71		100		38,21		41,46		41,46		41,46		41,46		41,46		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian			150.000		37.503		23.463		-		4.943		4.943	100	21,07		4.943	20	3,3	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Database Kependudukan																				
	Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5		6		1		0		1		1		100		1		20		
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			150.000		37.503		23.463		-		4.943		4.943	100	21,07		4.943	20	3,3	
	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5		6		1		0		1		1		100		1		20		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			325.000		54.863		54.907		7.980		11.970		19.950	50	36,33		19.950	6,67	6,14	
	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		15		1		1		0		1		100		1		20		
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			90.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			130.000		54.863		54.907		7.980		11.970		19.950	100	36,33		19.950	20	15,35	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		15		1		1		0		1		100		1		20		
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			105.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			70.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SIAK	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi			70.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**150.000**		**26.269**		**34.403**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		100		100		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			150.000		26.269		34.403		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah dokumen Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		94		1		0		0		0		0		0		0		
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			70.000		26.269		34.403		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		94		1		0		0		0		0		0		0		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**12.743.000**		**1.444.655**		**2.569.818**		**114.167**		**411.387**		**525.554**	**27**	**20,45**		**525.554**	**5,06**	**4,12**	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**125.000**		**20.527**		**81.702**		**1.925**		**750**		**2.675**	**0**	**3,27**		**2.675**	**0**	**2,14**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100		100		100		7,69		0		0		0		0		0		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			125.000		20.527		81.702		1.925		750		2.675	0	3,27		2.675	0	2,14	
	Meningkatnya Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	20		8		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	195		8		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	195		47		39		0		0		0		0		0		0		
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			39.000		6.524		33.542		325		750		1.075	0	3,2		1.075	0	2,76	
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	20		8		5		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			45.000		7.736		28.160		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	195		8		5		0		0		0		0		0		0		
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			41.000		6.268		20.000		1.600		-		1.600	0	8		1.600	0	3,9	
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	195		47		39		0		0		0		0		0		0		
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**5.010.000**		**1.357.198**		**29.569**		**11.360**		**640**		**12.000**	**30**	**40,58**		**12.000**	**15**	**0,24**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100		100		100		3		0		0		0		0		0		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			5.010.000		1.357.198		29.569		11.360		640		12.000	30	40,58		12.000	15	0,24	
	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		10		10		3		0		3		30		3		15		
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			5.010.000		1.357.198		29.569		11.360		640		12.000	30	40,58		12.000	15	0,24	
	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		10		10		3		0		3		30		3		15		
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**4.783.000**		**55.246**		**1.918.333**		**5.430**		**219.855**		**225.285**	**34,04**	**11,74**		**225.285**	**4,9**	**4,71**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100		75.067		100		0		12,24		12,24		12,24		12,24		12,24		
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100		100		100		29,37		25,64		25,64		25,64		25,64		25,64		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4.783.000		55.246		1.918.333		5.430		219.855		225.285	34,04	11,74		225.285	4,9	4,71	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	156		47		47		2		8		10		21,28		10		6,41		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	235		47		47		6		9		15		31,91		15		6,38		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	235		47		47		39		0		39		82,98		39		16,6		
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	235		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	47		0		39		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			157.500		30.790		64.349		620		4.100		4.720	21,28	7,34		4.720	6,41	3	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	156		47		47		2		8		10		21,28		10		6,41		
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			54.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			132.000		11.978		24.464		3.380		5.305		8.685	31,91	35,5		8.685	6,38	6,58	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	235		47		47		6		9		15		31,91		15		6,38		
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			135.000		12.478		32.665		230		1.750		1.980	82,98	6,06		1.980	16,6	1,47	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	235		47		47		39		0		39		82,98		39		16,6		
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			304.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	235		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			4.000.000		-		1.796.855		1.200		208.700		209.900	0	11,68		209.900	0	5,25	
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	47		0		39		0		0		0		0		0		0		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**2.825.000**		**11.685**		**540.215**		**95.452**		**190.142**		**285.594**	**39,46**	**52,87**		**285.594**	**6,31**	**10,11**	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100		100		100		18,18		0		0		0		0		0		
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100		100		100		35,94		19,69		19,69		19,69		19,69		19,69		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.825.000		11.685		540.215		95.452		190.142		285.594	39,46	52,87		285.594	6,31	10,11	
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kamsyarakatan dan Adat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	55		11		11		3		2		5		45,45		5		9,09		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	195		39		39		5		5		10		25,64		10		5,13		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	195		39		39		5		5		10		25,64		10		5,13		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	270		0		54		13		20		33		61,11		33		12,22		
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			150.395		1.596		13.978		-		-		-	45,45	0		-	9,09	0	
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	55		11		11		3		2		5		45,45		5		9,09		
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			175.000		4.426		52.250		1.637		6.355		7.992	25,64	15,3		7.992	5,13	4,57	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	195		39		39		5		5		10		25,64		10		5,13		
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			150.000		5.663		13.987		1.310		1.430		2.740	25,64	19,59		2.740	5,13	1,83	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	195		39		39		5		5		10		25,64		10		5,13		
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			2.274.605		-		460.000		92.505		182.357		274.863	61,11	59,75		274.863	12,22	12,08	
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	270		0		54		13		20		33		61,11		33		12,22		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**31.222.454**		**5.208.982**		**4.027.705**		**241.830**		**1.475.012**		**1.716.841**	**57,17**	**42,63**		**1.716.841**	**15,59**	**5,5**	
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.211.453**		**2.986.933**		**2.813.473**		**241.830**		**1.308.317**		**1.550.147**	**41,81**	**55,1**		**1.550.147**	**9,07**	**9,01**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		0		81,00		83		83		83		102,47		83		97,65		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.120.592		2.671.186		2.619.873		200.023		1.276.751		1.476.774	58,33	56,37		1.476.774	15	10,46	
	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		21		22		21		23		22		100		22		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.701.792		2.637.586		2.551.473		180.403		1.261.451		1.441.854	100	56,51		1.441.854	20	10,52	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		21		22		21		23		22		100		22		20		
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			418.800		33.600		68.400		19.620		15.300		34.920	16,67	51,05		34.920	10	8,34	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.445.000		112.472		70.901		11.259		22.912		34.171	50	48,19		34.171	10	2,36	
	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kunjungan Tamu (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000		5.969		2.503		-		514		514	50	20,54		514	10	1,71	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000		13.905		10.180		1.779		2.902		4.681	50	45,98		4.681	10	3,34	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000		5.122		4.426		-		429		429	50	9,69		429	10	1,43	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			115.000		16.527		6.227		119		4.755		4.873	50	78,26		4.873	10	4,24	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.000		3.055		1.995		-		351		351	50	17,57		351	10	1,17	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.100.000		67.894		45.570		9.361		13.962		23.323	50	51,18		23.323	10	2,12	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.860		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			29.972		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.888		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			220.000		20.388		22.830		1.198		2.658		3.856	50	16,89		3.856	10	1,75	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		2.750		3.000		200		500		700	50	23,33		700	10	2,8	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.000		6.132		12.000		998		1.290		2.288	50	19,07		2.288	10	2,69	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.000		11.506		7.830		-		868		868	50	11,09		868	10	0,79	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.330.000		182.887		99.869		29.350		5.996		35.346	9,3	35,39		35.346	8	2,66	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		10		43		3		5		8		18,6		8		16		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0		0		0		0		0		
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.080.000		161.969		79.869		28.743		5.996		34.739	18,6	43,5		34.739	16	3,22	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		10		43		3		5		8		18,6		8		16		
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		20.000		607		-		607	0	3,04		607	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000		20.918		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0		0		0		0		0		
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**261.264**		**84.310**		-		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,36		2,45		2,42		0		0		0		0		0		0		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per	24.50-24.19		21.2		25.30-25.09		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		1000 WUS 15-19 tahun)																			
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			261.264		84.310		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terpetakannya Perkiraan Persebaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			261.264		84.310		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**9.938.817**		**2.137.738**		**519.432**		**-**		**166.695**		**166.695**	**99,93**	**32,09**		**166.695**	**36,09**	**1,68**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	70,3		69,3		69,90		74		74		74		105,87		74		105,26		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9		9,2		9,80		3,6		3,6		3,6		163,27		3,6		160		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			4.664.935		788.859		105.000		-		32.068		32.068	116,67	30,54		32.068	5	0,69	
	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	60		7		70		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	60		4		1		0		3		3		300		3		5		
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			2.015.000		296.657		105.000		-		32.068		32.068	50	30,54		32.068	10	1,59	
	Terkelolanya Operasional dan	Jumlah Laporan Hasil	60		12		12		3		3		6		50		6		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)																			
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			2.349.935		420.493		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	60		7		70		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			300.000		71.709		-		-		-		-	300	0		-	5	0	
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	60		4		1		0		3		3		300		3		5		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.988.400		748.480		35.250		-		-		-	100	0		-	100,62	0	
	Diberdayakannya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	322		324		324		0		324		324		100		324		100,62		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.988.400		748.480		35.250		-		-		-	100	0		-	100,62	0	
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	322		324		324		0		324		324		100		324		100,62		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2.297.365		406.085		379.182		-		134.627		134.627	49,58	35,5		134.627	28,72	5,86	
	Terpenuhinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	8000		1.821		1200		0		595		595		49,58		595		7,44		
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	12		0		0		0		6		6		0		6		50		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2.147.365		406.085		379.182		-		134.627		134.627	49,58	35,5		134.627	7,44	6,27	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	8000		1.821		1200		0		595		595		49,58		595		7,44		
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	50	0	
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	12		0		0		0		6		6		0		6		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			988.117		194.314		-		-		-		-	100	0		-	79,55	0	
	Terfasilitasinya Kampung Keluarga berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	44		35		35		0		35		35		100		35		79,55		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			988.117		194.314		-		-		-		-	100	0		-	79,55	0	
	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	44		35		35		0		35		35		100		35		79,55		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**3.810.919**		-		**694.800**		-		-		-	**40**	**0**		-	**2,22**	**0**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	17		16,7		13,00		11		11		11		84,62		11		64,71		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.477.919		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	terwujudnya keluarga yang berkualitas, berketahanan, dan sejahtera	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	98		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	98		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			950.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	98		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Keluarga/UPPKS)	Keluarga/UPPKS) (Laporan)																			
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			527.919		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	98		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.333.000		-		694.800		-		-		-	40	0		-	6,67	0	
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang didampingi	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0		0		10		0		4		4		40		4		0		
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	60		0		10		0		4		4		40		4		6,67		
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			-		-		28.200		-		-		-	40	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0		0		10		0		4		4		40		4		0		
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.333.000		-		666.600		-		-		-	40	0		-	6,67	0	
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	60		0		10		0		4		4		40		4		6,67		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**2.500.000**		**478.836**		**326.951**		**42.573**		**60.300**		**102.872**	**26,05**	**31,46**		**102.872**	**2,78**	**4,11**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**2.500.000**		**478.836**		**326.951**		**42.573**		**60.300**		**102.872**	**26,05**	**31,46**		**102.872**	**2,78**	**4,11**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)	0,42		0,54		0,33		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Kelengkapan Jalan	50		22		30,00		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)																			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.000.000		214.473		122.560		-		748		748	18,07	0,61		748	0	0,07	
	Ukuran untuk menilai kondisi teknis dan keselamatan kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	500		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	0		1.413		1000		0		404		404		40,4		404		0		
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0		1.300		1500		0		207		207		13,8		207		0		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.000.000		155.405		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	500		1		0		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-		-		69.492		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			-		21.568		17.268		-		248		248	40,4	1,44		248	0	0	
	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	0		1.413		1000		0		404		404		40,4		404		0		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-		37.500		35.800		-		500		500	13,8	1,4		500	0	0	
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0		1.300		1500		0		207		207		13,8		207		0		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.500.000		264.363		204.391		42.573		59.552		102.124	50	49,97		102.124	4,17	6,81	
	Jumlah laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		6		10		2		3		5		50		5		8,33		
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			1.250.000		264.363		204.391		42.573		59.552		102.124	50	49,97		102.124	8,33	8,17	
	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		6		10		2		3		5		50		5		8,33		
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan	Jumlah Perlengkapan Jalan	60		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)																			
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**39.755.070**		**6.943.570**		**10.871.949**		**1.059.790**		**1.846.627**		**2.906.417**	**2127,53**	**26,73**		**2.906.417**	**67,04**	**7,31**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.005.070**		**3.990.905**		**3.645.832**		**867.338**		**1.064.092**		**1.931.429**	**418,45**	**52,98**		**1.931.429**	**28,8**	**8,05**	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	97		99		97		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		74,95		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		91,25		81		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.951.866		3.497.110		3.476.837		839.345		1.023.127		1.862.472	123,33	53,57		1.862.472	20,65	9,33	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120		29		30		29		29		29		96,67		29		24,17		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	35		7		4		6		6		6		150		6		17,14		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.500.066		3.408.610		3.370.157		812.675		1.000.117		1.812.792	96,67	53,79		1.812.792	24,17	9,3	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120		29		30		29		29		29		96,67		29		24,17		
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			451.800		88.500		106.680		26.670		23.010		49.680	150	46,57		49.680	17,14	11	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	35		7		4		6		6		6		150		6		17,14		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.582.432		212.206		47.858		9.783		23.341		33.124	979,17	69,21		33.124	49,84	2,09	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	27		8		4		1		1		2		50		2		7,41		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		10		4		1		4		5		125		5		27,78		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16		23		4		4		3		7		175		7		43,75		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		4		4		4		8		200		8		40		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	120		100		4		49		104		153		3825		153		127,5		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	114		158		4		33		27		60		1500		60		52,63		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			63.720		8.824		1.500		390		433		823	50	54,87		823	7,41	1,29	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	27		8		4		1		1		2		50		2		7,41		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			168.480		32.647		7.770		406		2.095		2.501	125	32,19		2.501	27,78	1,48	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		10		4		1		4		5		125		5		27,78		
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			81.098		12.171		1.000		317		565		882	175	88,18		882	43,75	1,09	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16		23		4		4		3		7		175		7		43,75		
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			131.705		11.082		3.747		269		782		1.051	200	28,05		1.051	40	0,8	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		20		4		4		4		8		200		8		40		
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			48.880		8.206		2.500		1.225		784		2.009	3825	80,34		2.009	127,5	4,11	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	120		100		4		49		104		153		3825		153		127,5		
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.088.548		139.276		31.341		7.176		18.682		25.859	1500	82,51		25.859	52,63	2,38	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	114		158		4		33		27		60		1500		60		52,63		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			230.271		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			140.271		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		4		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			903.790		164.233		41.400		11.909		7.142		19.051	29,17	46,02		19.051	18,75	2,11	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		310		4		0		1		1		25		1		8,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		26.000		12		1		1		2		16,67		2		16,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		9		4		2		1		3		75		3		50		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		5		12		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.000		3.100		1.000		-		104		104	25	10,45		104	8,33	0,61	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		310		4		0		1		1		25		1		8,33		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			274.422		56.259		28.000		7.429		2.483		9.912	16,67	35,4		9.912	16,67	3,61	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		26.000		12		1		1		2		16,67		2		16,67		
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.368		17.124		12.400		4.480		4.555		9.035	75	72,86		9.035	50	9,68	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		9		4		2		1		3		75		3		50		
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			519.000		87.750		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		5		12		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.336.711		117.355		79.738		6.301		10.481		16.782	19,23	21,05		16.782	22,73	1,26	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		7		13		3		5		5		38,46		5		45,45		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.116.711		94.085		59.738		6.301		10.481		16.782	38,46	28,09		16.782	45,45	1,5	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		7		13		3		5		5		38,46		5		45,45		
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			220.000		23.270		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**4.250.000**		**798.407**		**540.000**		**129.872**		**77.658**		**207.530**	**8475,27**	**38,43**		**207.530**	**179,96**	**4,88**	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	88		91,25		76,00		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.250.000		798.407		540.000		129.872		77.658		207.530	8475,27	38,43		207.530	179,96	4,88	
	Jumlah informasi yang dipublikasikan, intensitas pemanfaatan media komunikasi publik, tingkat partisipasi dan kepuasan publik terhadap layanan informasi yang disediakan pemerintah daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2000		494		1		215		186		401		40100		401		20,05		
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	600		4.480		1		5		1		1		100		1		0,17		
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	85		82,76		100		0		153		153		153		153		180		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Persentase)																			
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	32		1		3		34		34		34		1133,33		34		106,25		
		Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	90		459		60		358		534		534		890		534		593,33		
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			387.000		573.950		87.760		56.112		6.025		62.137	40100	70,8		62.137	20,05	16,06	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2000		494		1		215		186		401		40100		401		20,05		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			80.000		19.215		5.927		1.000		2.691		3.691	100	62,29		3.691	0,17	4,61	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	600		4.480		1		5		1		1		100		1		0,17		
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			1.150.000		157.659		110.000		37.137		32.664		69.801	153	63,46		69.801	180	6,07	
	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	85		82,76		100		0		153		153		153		153		180		
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			2.585.500		24.500		333.564		34.874		34.764		69.638	1133,33	20,88		69.638	106,25	2,69	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	32		1		3		34		34		34		1133,33		34		106,25		
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			47.500		23.084		2.750		749		1.513		2.263	890	82,28		2.263	593,33	4,76	
	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	90		459		60		358		534		534		890		534		593,33		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**11.500.000**		**2.154.258**		**6.686.117**		**62.580**		**704.877**		**767.457**	**93,33**	**11,48**		**767.457**	**78,83**	**6,67**	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	3,49		3,5		3,30		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			225.000		36.000		47.000		-		-		-	0	0		-	200	0	
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan domain resmi (go.id), serta tingkat pemeliharaan dan keamanan domain/sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		12		0		0		2		2		0		2		200		
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			225.000		36.000		47.000		-		-		-	0	0		-	200	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		12		0		0		2		2		0		2		200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			11.275.000		2.118.258		6.639.117		62.580		704.877		767.457	93,33	11,56		767.457	38,44	6,81	
	Jumlah aplikasi layanan digital aktif, tingkat integrasi sistem dan capaian nilai indeks SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	9		10		2		1		1		2		100		2		22,22		
		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	58		30		30		54		54		54		180		54		93,1		
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	7		1		2		1		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			2.250.400		304.180		614.800		60.450		96.600		157.050	100	25,54		157.050	22,22	6,98	
	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	9		10		2		1		1		2		100		2		22,22		
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			8.972.100		1.811.103		6.021.317		970		607.647		608.617	180	10,11		608.617	93,1	6,78	
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	58		30		30		54		54		54		180		54		93,1		
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			52.500		2.975		3.000		1.160		630		1.790	0	59,67		1.790	0	3,41	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	7		1		2		1		0		0		0		0		0		
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**6.270.000**		**1.009.856**		**867.845**		**175.657**		**68.018**		**243.675**	**8**	**28,08**		**243.675**	**2**	**3,89**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**120.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	100		41,93		100		41,93		65		65		65		65		65		
		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	75		69,84		60		69,84		71,29		71,29		118,82		71,29		95,05		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100		100		100		0		100		100		100		100		100		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan di awasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	22		10		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30		12		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	22		10		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			70.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30		12		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**-**		**-**		**22.000**		**1.550**		**9.906**		**11.456**	**8**	**52,07**		**11.456**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		22.000		1.550		9.906		11.456	8	52,07		11.456	0	0	
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0		0		25		0		2		2		8		2		0		
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		22.000		1.550		9.906		11.456	8	52,07		11.456	0	0	
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0		0		25		0		2		2		8		2		0		
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**300.000**		**-**		**28.000**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	20		0		20		0		0		0		0		0		0		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000		-		28.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Koperasi yang diberikan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	45		0		30		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Orang)																			
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			300.000		-		28.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	45		0		30		0		0		0		0		0		0		
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**125.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	18,3		15		15,75		0		0		0		0		0		0		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Koperasi Berkualitas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	17		15		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	17		15		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**725.000**		**36.547**		**81.952**		**2.610**		**520**		**3.130**	**6,67**	**3,82**		**3.130**	**3,2**	**0,43**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	55		4,43		15		0		0		0		0		0		0		
		Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	10		3,53		6		0		2		2		33,33		2		20		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			725.000		36.547		81.952		2.610		520		3.130	6,67	3,82		3.130	3,2	0,43	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikr0	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	30		30		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	30		30		0		0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	675		99		0		0		0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	675		99		0		0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	840		119		20		0		0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			25.000		36.547		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	840		119		20		0		0		0		0		0		0		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	40		0		50		0		0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			250.000		-		34.040		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	40		0		50		0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		13		20		0		4		4		20		4		16		
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			200.000		-		47.912		2.610		520		3.130	20	6,53		3.130	16	1,57	
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		13		20		0		4		4		20		4		16		
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**5.000.000**		**973.309**		**735.893**		**171.497**		**57.591**		**229.088**	**20**	**31,13**		**229.088**	**4**	**4,58**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil (Persentase)	3		0,41		1,80		0,5		0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			5.000.000		973.309		735.893		171.497		57.591		229.088	20	31,13		229.088	4	4,58	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1750		471		350		70		0		70		20		70		4		
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			5.000.000		973.309		735.893		171.497		57.591		229.088	20	31,13		229.088	4	4,58	
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1750		471		350		70		0		70		20		70		4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya																				
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**18.815.969**		**3.072.615**		**3.060.035**		**647.181**		**760.500**		**1.407.681**	**42,23**	**46**		**1.407.681**	**15,89**	**7,48**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.760.969**		**3.029.299**		**2.889.135**		**634.940**		**756.173**		**1.391.113**	**54,81**	**48,15**		**1.391.113**	**15,15**	**8,3**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		98		95		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	399,1		72,65		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		91		80,76		0		0		0		0		0		0		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.189.969		2.546.394		2.541.455		591.530		691.272		1.282.801	67	50,48		1.282.801	9,17	8,45	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	140		6,25		25		20		22		21		84		21		15		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.782.869		2.516.394		2.460.035		573.110		673.332		1.246.441	84	50,67		1.246.441	15	8,43	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	140		6,25		25		20		22		21		84		21		15		
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			407.100		30.000		81.420		18.420		17.940		36.360	50	44,66		36.360	3,33	8,93	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			651.000		250.824		217.021		24.884		29.781		54.665	50	25,19		54.665	10	8,4	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000		4.993		5.000		-		802		802	50	16,04		802	10	3,21	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.000		98.840		25.000		-		15.552		15.552	50	62,21		15.552	10	20,46	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		9.985		7.000		-		3.218		3.218	50	45,96		3.218	10	12,87	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		22.234		20.021		1.040		1.560		2.600	50	12,99		2.600	10	3,47	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000		9.000		10.000		-		1.065		1.065	50	10,65		1.065	10	2,13	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			400.000		105.771		150.000		23.844		7.585		31.428	50	20,95		31.428	10	7,86	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			620.000		87.110		27.000		4.017		28.355		32.372	50	119,89		32.372	10	5,22	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000		2.500		2.000		500		400		900	50	45		900	10	9	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000		12.909		15.000		3.517		5.130		8.647	50	57,64		8.647	10	17,29	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000		13.951		10.000		-		1.550		1.550	50	15,5		1.550	10	4,43	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			525.000		57.750		-		-		21.275		21.275	50	0		21.275	10	4,05	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000		144.972		103.659		14.510		6.765		21.275	78,57	20,52		21.275	78,57	7,09	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	14		14		14		11		11		11		78,57		11		78,57		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Daerah yang terpelihara	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																			
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000		144.972		103.659		14.510		6.765		21.275	78,57	20,52		21.275	78,57	7,09	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		14		14		11		11		11		78,57		11		78,57		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**700.000**		-		**52.950**		**8.480**		-		**8.480**	**0**	**16,02**		**8.480**	**0**	**1,21**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		0		97		2,98		42,8		42,8		44,12		42,8		42,8		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			700.000		-		52.950		8.480		-		8.480	0	16,02		8.480	0	1,21	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			250.000		-		32.950		8.480		-		8.480	0	25,74		8.480	0	3,39	
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			450.000		-		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**355.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	15		0		7		0		2		2		28,57		2		13,33		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			355.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			305.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya strategi promosi	Jumlah dokumen strategi	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)																			
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**500.000**		**39.675**		**77.950**		**3.762**		**2.906**		**6.668**	**69,3**	**8,55**		**6.668**	**45,22**	**1,33**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	57		0		7		3,7		8		11,7		167,14		11,7		20,53		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			500.000		39.675		77.950		3.762		2.906		6.668	69,3	8,55		6.668	45,22	1,33	
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	17877		1.612		1200		598		1.117		1.715		142,92		1.715		9,59		
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	60		0		250		0		7		7		2,8		7		11,67		
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	125		25		230		10		133		143		62,17		143		114,4		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			250.000		37.550		40.000		1.250		2.766		4.016	142,92	10,04		4.016	9,59	1,61	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	17877		1.612		1200		598		1.117		1.715		142,92		1.715		9,59		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			50.000		-		15.000		-		140		140	2,8	0,93		140	11,67	0,28	
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	60		0		250		0		7		7		2,8		7		11,67		
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			200.000		2.125		22.950		2.512		-		2.512	62,17	10,94		2.512	114,4	1,26	
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah	125		25		230		10		133		143		62,17		143		114,4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)																			
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**400.000**		-		**30.000**		-		**1.420**		**1.420**	**4,25**	**4,73**		**1.420**	**0,55**	**0,36**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal (Persentase)	100		0		100		0		35		35		35		35		35		
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		0		100		0		1		1		1		1		1		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			400.000		-		30.000		-		1.420		1.420	4,25	4,73		1.420	0,55	0,36	
	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	250		0		20		0		1		1		5		1		0,4		
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1000		0		200		0		7		7		3,5		7		0,7		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			200.000		-		-		-		-		-	5	0		-	0,4	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	250		0		20		0		1		1		5		1		0,4		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			200.000		-		30.000		-		1.420		1.420	3,5	4,73		1.420	0,7	0,71	
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1000		0		200		0		7		7		3,5		7		0,7		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**100.000**		**3.642**		**10.000**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000		3.642		10.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2		1		2		0		0		0		0		0		0		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100.000		3.642		10.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2		1		2		0		0		0		0		0		0		
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**9.375.000**		**1.691.630**		**1.229.701**		**37.655**		**514.238**		**551.893**	**47,62**	**44,88**		**551.893**	**3,11**	**5,89**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**500.000**		-		**80.000**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4,62		3,64		3,76		0		0		0		0		0		0		
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	3,25		2,21		2,25		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			300.000		-		25.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan bagi Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	125		0		25		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			150.000		-		25.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	125		0		25		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota																				
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000		-		55.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	20		0		50		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			100.000		-		55.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	20		0		50		0		0		0		0		0		0		
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**8.000.000**		**1.516.630**		**1.024.701**		**37.655**		**389.436**		**427.091**	**58,33**	**41,68**		**427.091**	**2,59**	**5,34**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Olahraga
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)	5,35		4,1		4,16		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			375.000		436.972		225.000		-		1.040		1.040	33,33	0,46		1.040	2	0,28	
	Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan SD dan SMP	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	25		3		3		0		1		1		33,33		1		4		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			250.000		436.972		225.000		-		1.040		1.040	33,33	0,46		1.040	4	0,42	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	25		3		3		0		1		1		33,33		1		4		
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya event olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	kabupaten/kota dan kabupaten/kota																				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.750.000		5.425		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	1000		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	125		50		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	1000		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			375.000		5.425		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	125		50		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	kabupaten/kota	(Orang)																			
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			625.000		500.000		300.000		-		299.802		299.802	100	99,93		299.802	10	47,97	
	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			125.000		500.000		300.000		-		299.802		299.802	100	99,93		299.802	20	239,84	
	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.750.000		574.233		499.701		37.655		88.595		126.249	100	25,26		126.249	4	4,59	
	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			275.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			2.250.000		574.233		499.701		37.655		88.595		126.249	100	25,26		126.249	20	5,61	
	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**875.000**		**175.000**		**125.000**		**-**		**124.802**		**124.802**	**100**	**99,84**		**124.802**	**10**	**14,26**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25		25		25		0		0		0		0		0		0		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			875.000		175.000		125.000		-		124.802		124.802	100	99,84		124.802	10	14,26	
	Terlaksananya pembinaan organisasi pramuka	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	125		50		50		0		50		50		100		50		40		
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	35		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			250.000		175.000		125.000		-		124.802		124.802	100	99,84		124.802	40	49,92	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	125		50		50		0		50		50		100		50		40		
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Laporan)																			
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	35		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**500.000**		**-**		**74.500**		**3.880**		**4.425**		**8.305**	**11,75**	**11,15**		**8.305**	**23,89**	**1,66**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**500.000**		**-**		**74.500**		**3.880**		**4.425**		**8.305**	**11,75**	**11,15**		**8.305**	**23,89**	**1,66**	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,75		2,49		2,50		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			500.000		-		74.500		3.880		4.425		8.305	11,75	11,15		8.305	23,89	1,66	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100		0		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	60		0		70		0		13		13		18,57		13		21,67		
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2		0		6		0		1		1		16,67		1		50		
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			50.000		-		57.700		3.880		2.575		6.455	0	11,19		6.455	0	12,91	
	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100		0		50		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			75.000		-		8.100		-		-		-	18,57	0		-	21,67	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	60		0		70		0		13		13		18,57		13		21,67		
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			375.000		-		8.700		-		1.850		1.850	16,67	21,26		1.850	50	0,49	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2		0		6		0		1		1		16,67		1		50		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**250.000**		**-**		**25.500**		**-**		**9.090**		**9.090**	**100**	**35,65**		**9.090**	**100**	**3,64**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**250.000**		**-**		**25.500**		**-**		**9.090**		**9.090**	**100**	**35,65**		**9.090**	**100**	**3,64**	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	55,19		36,7		31,00		0		0		0		0		0		0		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			250.000		-		25.500		-		9.090		9.090	100	35,65		9.090	100	3,64	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	30		0		30		0		30		30		100		30		100		
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			250.000		-		25.500		-		9.090		9.090	100	35,65		9.090	100	3,64	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan	30		0		30		0		30		30		100		30		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Persandian Pemerintah Daerah	Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)																			
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**5.180.000**		**649.426**		**1.060.000**		**104.697**		**58.606**		**163.302**	**30**	**15,41**		**163.302**	**1,84**	**3,15**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**3.525.000**		**499.440**		**1.035.000**		**104.697**		**54.606**		**159.302**	**44,44**	**15,39**		**159.302**	**3,57**	**4,52**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	90		77,59		85		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.025.000		326.476		1.010.000		104.697		39.670		144.366	33,33	14,29		144.366	10	7,13	
	Terlestarikannya atraksi budaya daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		6		3		1		0		1		33,33		1		20		
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	250		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			1.525.000		326.476		1.010.000		104.697		39.670		144.366	33,33	14,29		144.366	20	9,47	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		6		3		1		0		1		33,33		1		20		
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	250		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			600.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			300.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			300.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			900.000		172.964		25.000		-		14.936		14.936	50	59,74		14.936	1,67	1,66	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terfasilitasinya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	500		100		25		0		25		25		100		25		5		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	5		1		40		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			375.000		72.440		25.000		-		14.936		14.936	100	59,74		14.936	5	3,98	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	500		100		25		0		25		25		100		25		5		
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			150.000		100.524		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	5		1		40		0		0		0		0		0		0		
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**875.000**		**149.985**		**25.000**		**-**		**4.000**		**4.000**	**16,67**	**16**		**4.000**	**3,33**	**0,46**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100		61,11		77,77		0		0		0		0		0		0		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			875.000		149.985		25.000		-		4.000		4.000	16,67	16		4.000	3,33	0,46	
	Terfasilitasinya pembinaan sanggar kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100		30		60		0		10		10		16,67		10		10		
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			350.000		149.985		25.000		-		4.000		4.000	16,67	16		4.000	10	1,14	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	100		30		60		0		10		10		16,67		10		10		
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																				
	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			275.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**380.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	75		0		60		0		0		0		0		0		0		
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			380.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terdokumentasikannya objek sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	90		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	90		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			70.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			190.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**400.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100		86,07		80		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	13		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2		0		3		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	7		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			65.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	13		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2		0		3		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pelindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	31		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			155.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	31		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**16.668.275**		**3.225.271**		**2.823.868**		**655.292**		**937.465**		**1.592.757**	**55,96**	**56,4**		**1.592.757**	**5,71**	**9,56**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.675.361**		**2.699.173**		**2.343.411**		**650.023**		**851.402**		**1.501.425**	**60,34**	**64,07**		**1.501.425**	**7,23**	**10,98**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		85,25		85,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		98		95,00		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	7,5	0	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Pengnggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0		1		1		2		0		2		10		
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	5	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	20		0		0		1		1		2		0		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																			
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.378.125		2.214.528		2.143.411		609.612		798.357		1.407.969	118,18	65,69		1.407.969	7,61	13,57	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	148		20		22		19		19		19		86,36		19		12,84		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.917.325		2.144.778		2.066.271		589.992		780.817		1.370.809	86,36	66,34		1.370.809	12,84	13,82	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	148		20		22		19		19		19		86,36		19		12,84		
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			435.800		69.750		77.140		19.620		17.540		37.160	150	48,17		37.160	10	8,53	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.163.236		207.391		73.644		10.680		6.795		17.475	41,67	23,73		17.475	8,33	1,5	
	Persentase Pemenuhan Kinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.000		5.000		3.137		400		550		950	50	30,28		950	10	1,36	
	Tersedianya Komponen	Jumlah Paket Komponen	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																			
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			210.000		107.991		13.628		2.000		1.651		3.651	50	26,79		3.651	10	1,74	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			76.392		17.207		10.558		1.500		2.036		3.536	50	33,49		3.536	10	4,63	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			125.000		18.750		10.500		2.160		998		3.158	50	30,08		3.158	10	2,53	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			28.000		585		1.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			653.844		57.859		34.321		4.620		1.560		6.180	50	18,01		6.180	10	0,95	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.029.000		140.436		69.934		17.709		17.170		34.879	75	49,87		34.879	5,83	3,39	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		2		1		1		2		100		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			26.000		1.800		2.400		600		600		1.200	150	50		1.200	10	4,62	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			573.000		59.915		59.374		15.459		14.282		29.741	50	50,09		29.741	10	5,19	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			115.000		10.471		8.160		1.650		2.288		3.938	100	48,26		3.938	3,33	3,42	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		2		1		1		2		100		2		3,33		
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			315.000		68.250		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.055.000		136.819		56.422		12.022		29.081		41.102	29,17	72,85		41.102	5,83	3,9	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		5		0		1		0		0,5		0		0,5		1,67		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		6		0		1		0,5		8,33		0,5		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		0,5		50		0,5		10		
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			825.000		100.452		-		12.022		-		12.022	0	0		12.022	1,67	1,46	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		5		0		1		0		0,5		0		0,5		1,67		
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		42.456		-		25.430		25.430	8,33	59,9		25.430	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		6		0		1		0,5		8,33		0,5		0		
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			230.000		36.367		13.966		-		3.651		3.651	50	26,14		3.651	10	1,59	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		0,5		50		0,5		10		
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**2.914.789**		**526.098**		**480.457**		**5.269**		**86.063**		**91.332**	**40,63**	**19,01**		**91.332**	**4,27**	**3,13**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	18,32		100		10,20		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.601.945		473.908		375.158		5.269		47.158		52.427	41,67	13,97		52.427	2,83	2,01	
	Jumlah Perpustakaan yang Dikelola	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	75		11		8		1		1		2		25		2		2,67		
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	90		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	10000		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	40		32		8		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			199.450		34.678		75.463		1.640		1.060		2.700	25	3,58		2.700	2,67	1,35	
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	75		11		8		1		1		2		25		2		2,67		
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.272.995		423.769		269.912		3.629		46.098		49.727	100	18,42		49.727	20	3,91	
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			64.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	90		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			166.719		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan	Jumlah tenaga perpustakaan	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)																			
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	10000		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			98.781		15.461		29.784		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	40		32		8		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			600.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			312.844		52.190		105.299		-		38.905		38.905	37,5	36,95		38.905	10	12,44	
	Persentase Peningkatan Penduduk yang Teredukasi Gemar membaca	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	15		11		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	15		3		8		0		3		3		37,5		3		20		
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			77.844		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	15		11		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			235.000		52.190		105.299		-		38.905		38.905	37,5	36,95		38.905	20	16,56	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	15		3		8		0		3		3		37,5		3		20		
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**78.125**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (%)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			78.125		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota yang Dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			60.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
	Jumlah masyarakat yang beran dalam Penyimpanan, perawatan , pelestarian dan pemeliharaan naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			18.125		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**483.627**		**61.310**		**73.681**		**3.149**		**17.073**		**20.222**	**52**	**27,45**		**20.222**	**3,07**	**4,18**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**305.449**		**42.118**		**62.761**		**3.149**		**17.073**		**20.222**	**86,67**	**32,22**		**20.222**	**4,61**	**6,62**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	100		68		83,33		0		0		0		0		0		0		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			175.000		13.284		32.397		-		3.740		3.740	30	11,54		3.740	3,33	2,14	
	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemiliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	30		21		2		0		1		1		50		1		3,33		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	30		22		10		0		1		1		10		1		3,33		
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			99.000		9.833		14.486		-		2.338		2.338	50	16,14		2.338	3,33	2,36	
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	30		21		2		0		1		1		50		1		3,33		
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			76.000		3.451		17.911		-		1.402		1.402	10	7,83		1.402	3,33	1,84	
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	30		22		10		0		1		1		10		1		3,33		
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat			130.449		28.834		30.364		3.149		13.334		16.483	200	54,28		16.483	5,88	12,64	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kabupaten/Kota																				
	Jumlah Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	17		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	17		73		1		1		1		2		200		2		11,76		
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	17		0		0		0		0		0		0		0		0		
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			80.449		28.834		30.364		3.149		13.334		16.483	200	54,28		16.483	11,76	20,49	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	17		73		1		1		1		2		200		2		11,76		
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**178.178**		**19.192**		**10.920**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	70		100		30		0		0		0		0		0		0		
		Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)	100		100		60		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			73.000		7.920		3.581		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupate/Kota yang dilindungi dan diselamatkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	25		5		1		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			73.000		7.920		3.581		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	25		5		1		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			105.178		11.272		7.339		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan/kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	15		4		1		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			105.178		11.272		7.339		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan	Jumlah Daftar Arsip yang	15		4		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)																			
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**3.350.000**		**698.734**		**538.164**		**111.279**		**147.024**		**258.303**	**25**	**48**		**258.303**	**6,67**	**7,71**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**750.000**		**254.218**		**217.062**		**-**		**40.465**		**40.465**	**0**	**18,64**		**40.465**	**0**	**5,4**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.353		3.509,6		3313		0		0		0		0		0		0		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			750.000		153.726		161.758		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Penumbuhan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			750.000		153.726		161.758		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			-		100.492		55.304		-		40.465		40.465	0	73,17		40.465	0	0	
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0		3		12		0		0		0		0		0		0		
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		100.492		55.304		-		40.465		40.465	0	73,17		40.465	0	0	
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0		3		12		0		0		0		0		0		0		
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**350.000**		**26.036**		**21.102**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	37,54		19,6		33,54		19,6		19,6		19,6		58,44		19,6		52,21		
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			350.000		26.036		21.102		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Penumbuhan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Perikanan serta Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			350.000		26.036		21.102		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.250.000**		**418.481**		**300.000**		**111.279**		**106.559**		**217.838**	**100**	**72,61**		**217.838**	**20**	**9,68**	UPTD BBI Pakan Salasa
	Meningkatnya produksi perikanan budidava														100				20		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			2.250.000		418.481		300.000		111.279		106.559		217.838	100	72,61		217.838	20	9,68	
	Tercapainya Peningkatan Produksi	Jumlah Sarana Pembudidayaan	10		2		2		2		2		2		100		2		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Benih dan Produksi Ikan Konsumsi dengan Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan serta Pelestarian Perairan Umum	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)																			
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.250.000		418.481		300.000		111.279		106.559		217.838	100	72,61		217.838	20	9,68	
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10		2		2		2		2		2		100		2		20		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**48.815.000**		**7.879.684**		**3.783.665**		**914.894**		**985.575**		**1.900.469**	**31,25**	**50,23**		**1.900.469**	**2,55**	**3,89**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.000.000**		**3.655.704**		**3.263.665**		**797.684**		**934.360**		**1.732.044**	**34,44**	**53,07**		**1.732.044**	**5,17**	**8,25**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		78,25		81		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		95		95		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,55		75		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.325.000		3.091.289		3.044.265		765.418		893.308		1.658.725	75	54,49		1.658.725	10	9,57	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25		25		25		25		100		25		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Laporan)																			
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.500.000		2.926.289		2.876.265		721.758		858.778		1.580.535	100	54,95		1.580.535	20	9,58	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25		25		25		25		100		25		20		
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			800.000		165.000		168.000		43.660		34.530		78.190	50	46,54		78.190	10	9,77	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.193.500		152.906		98.500		5.619		12.925		18.544	29,17	18,83		18.544	5,83	1,55	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		3		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			43.500		3.426		2.250		-		720		720	50	32		720	10	1,66	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.000		19.055		14.500		-		776		776	25	5,35		776	5	0,62	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			37.500		7.110		4.750		-		988		988	25	20,8		988	5	2,63	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			117.500		17.087		12.000		-		2.338		2.338	25	19,49		2.338	5	1,99	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		3		4		0		1		1		25		1		5		
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			45.000		-		5.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			825.000		106.228		60.000		5.619		8.103		13.722	50	22,87		13.722	10	1,66	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			325.000		28.829		3.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		2		4		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000		28.829		3.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		2		4		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.281.500		209.625		44.672		6.132		7.516		13.648	31,25	30,55		13.648	6,25	1,07	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		2		0		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000		4.000		3.200		1.000		-		1.000	50	31,25		1.000	10	5	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		2		0		2		50		2		10		
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			221.500		32.920		35.472		5.132		6.601		11.733	50	33,08		11.733	10	5,3	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000		9.955		6.000		-		915		915	25	15,25		915	5	2,29	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.000.000		162.750		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			825.000		173.056		73.228		20.514		20.612		41.126	33,33	56,16		41.126	6,67	4,98	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		2		2		2		66,67		2		13,33		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		0		0		0		0		0		
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			625.000		113.257		69.500		18.574		20.457		39.031	66,67	56,16		39.031	13,33	6,24	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		2		2		2		66,67		2		13,33		
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000		59.799		3.728		1.940		155		2.095	0	56,2		2.095	0	1,05	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		0		0		0		0		0		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**25.000.000**		**3.774.245**		**190.000**		**17.212**		**31.296**		**48.508**	**33,33**	**25,53**		**48.508**	**0,67**	**0,19**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	20		12,57		14		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	10		17,42		5,2		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya daya tarik destinasi wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	375		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			300.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			450.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	375		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.500.000		140.081		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya kawasan strategis pariwisata	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	375		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			750.000		140.081		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.050.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			450.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	375		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			20.000.000		3.634.164		190.000		17.212		31.296		48.508	33,33	25,53		48.508	1,67	0,24	
	Terkelolanya destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	20		3		3		1		1		2		66,67		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			750.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			800.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang,	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pemantapan, Revitalisasi)	Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)																			
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			17.150.000		3.565.038		190.000		17.212		31.296		48.508	66,67	25,53		48.508	10	0,28	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	20		3		3		1		1		2		66,67		2		10		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			450.000		69.126		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota			600.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**1.765.000**		**162.242**		**230.000**		**29.499**		**9.820**		**39.319**	**66,67**	**17,1**		**39.319**	**1,6**	**2,23**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya (Persentase)	95		73,33		80		0		0		0		0		0		0		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.765.000		162.242		230.000		29.499		9.820		39.319	66,67	17,1		39.319	1,6	2,23	
	Terlaksananya pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	25		5		3		1		1		2		66,67		2		8		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)																			
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			135.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			1.515.000		162.242		230.000		29.499		9.820		39.319	66,67	17,1		39.319	8	2,6	
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	25		5		3		1		1		2		66,67		2		8		
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			40.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**400.000**		**-**		**75.000**		**70.500**		**-**		**70.500**	**0**	**94**		**70.500**	**0**	**17,63**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	20		14,28		12,69		0		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya sarana dan prasarana ruang kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			300.000		-		75.000		70.500		-		70.500	0	94		70.500	0	23,5	
	Terfasilitasinya pengembangan produk pelaku ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	5		0		3		1		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Laporan)																			
		Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif			75.000		-		75.000		70.500		-		70.500	0	94		70.500	0	94	
	Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	5		0		3		1		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**650.000**		**287.493**		**25.000**		-		**10.099**		**10.099**	**12,5**	**40,39**		**10.099**	**1**	**1,55**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100		63,49		63,49		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			450.000		197.565		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	150		100		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	150		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)																			
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			120.000		197.565		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	150		100		50		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	150		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			200.000		89.928		25.000		-		10.099		10.099	37,5	40,39		10.099	6	5,05	
	Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		100		40		0		15		15		37,5		15		6		
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			200.000		89.928		25.000		-		10.099		10.099	37,5	40,39		10.099	6	5,05	
	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		100		40		0		15		15		37,5		15		6		
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**83.735.288**		**14.834.738**		**14.233.867**		**2.174.555**		**2.832.975**		**5.007.530**	**29,61**	**35,18**		**5.007.530**	**4,51**	**5,98**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**70.400.000**		**12.934.704**		**12.150.697**		**2.063.828**		**2.543.709**		**4.607.537**	**49,81**	**37,92**		**4.607.537**	**9,3**	**6,54**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		72,55		74,63		0		0		0		0		0		0		
		Proporsi Jumlah Industri Kecil	85		91		85		91		85		85		100		85		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dan Menengah (IKM) (%)																			
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		95		95		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			63.685.430		11.859.175		11.763.201		2.003.779		2.379.645		4.383.424	58,66	37,26		4.383.424	11,73	6,88	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	505		99		101		68		68		68		67,33		68		13,47		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			62.275.330		11.591.855		11.330.061		1.927.504		2.335.675		4.263.179	67,33	37,63		4.263.179	13,47	6,85	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	505		99		101		68		68		68		67,33		68		13,47		
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.410.100		267.320		433.140		76.275		43.970		120.245	50	27,76		120.245	10	8,53	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.817.821		298.732		153.960		16.728		86.270		102.997	54,17	66,9		102.997	10,83	5,67	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		3		4		100		4		20		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		2		3		75		3		15		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			125.000		24.998		8.000		1.983		4.350		6.333	50	79,16		6.333	10	5,07	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			644.521		137.658		51.900		-		36.708		36.708	50	70,73		36.708	10	5,7	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000		33.928		10.000		1.940		8.057		9.997	100	99,97		9.997	20	10	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		3		4		100		4		20		
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			108.966		15.837		8.000		2.225		3.837		6.062	75	75,78		6.062	15	5,56	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	20		4		4		1		2		3		75		3		15		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.975		4.995		4.995		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			814.359		81.318		71.065		10.580		33.318		43.897	50	61,77		43.897	10	5,39	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			144.678		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			144.678		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.325.000		332.379		95.000		13.628		30.089		43.717	50	46,02		43.717	6,67	1,88	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		1		5		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		5.000		5.000		2.000		1.000		3.000	50	60		3.000	10	12	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			620.000		107.404		90.000		11.628		29.089		40.717	50	45,24		40.717	10	6,57	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		1		5		6		50		6		10		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.680.000		219.975		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.427.072		444.417		138.536		29.693		47.706		77.398	51,69	55,87		77.398	10,34	3,19	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	560		112		112		8		15		23		20,54		23		4,11		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	275		55		55		6		13		19		34,55		19		6,91		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.495.000		273.135		108.536		20.893		36.481		57.373	20,54	52,86		57.373	4,11	3,84	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	560		112		112		8		15		23		20,54		23		4,11		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya (Unit)																			
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			151.577		30.166		15.000		3.600		8.290		11.890	34,55	79,27		11.890	6,91	7,84	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	275		55		55		6		13		19		34,55		19		6,91		
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			780.495		141.116		15.000		5.200		2.935		8.135	100	54,23		8.135	20	1,04	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**5.307.246**		**843.430**		**999.901**		**8.553**		**58.847**		**67.400**	**0**	**6,74**		**67.400**	**0**	**1,27**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Total Produksi Ternak Besar (Ekor)	20.138		17.457		17995		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	4.944		3.680,51		4344		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Telur (Ton)	408,54		370,024		377,42		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Padi (Ton)	96.689		86.483,73		89491		0		0		0		0		0		0		
		Total Produksi Durian (Ton)	56.704		3.517,1		41010		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	6.406		2.209,9		6006		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	2.510		2.462,9		2100		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	81.915		70.038,83		77179		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.044.511		129.993		477.636		-		10.346		10.346	0	2,17		10.346	0	0,99	
	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	20		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	52.5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			794.511		129.993		477.636		-		10.346		10.346	0	2,17		10.346	0	1,3	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	20		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	52.5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			2.837.735		621.707		388.265		8.553		47.195		55.748	0	14,36		55.748	0	1,96	
	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	10		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			685.000		88.520		96.265		-		4.621		4.621	0	4,8		4.621	0	0,67	
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	10		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			1.902.735		506.620		259.000		8.553		42.344		50.897	0	19,65		50.897	0	2,67	
	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			250.000		26.567		33.000		-		230		230	0	0,7		230	0	0,09	
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.425.000		91.730		134.000		-		1.306		1.306	0	0,97		1.306	0	0,09	
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	75		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.425.000		91.730		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	75		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			-		-		134.000		-		1.306		1.306	0	0,97		1.306	0	0	
	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**3.584.920**		**414.467**		**527.522**		**40.062**		**130.916**		**170.978**	**50**	**32,41**		**170.978**	**10**	**4,77**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Prodktivitas Padi (Ton/Ha)	5,2		4,95		4,4		0		0		0		0		0		0		
		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Persentase)	100		0		40		0		0		0		0		0		0		
		Prodktivitas Jagung (Ton/Ha)	6,4		6,28		5,7		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			2.088.080		414.467		305.522		8.727		40.168		48.895	0	16		48.895	0	2,34	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	2500		300		100		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			256.830		90.974		76.058		1.637		32.748		34.385	0	45,21		34.385	0	13,39	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			1.831.250		323.493		229.464		7.090		7.420		14.510	0	6,32		14.510	0	0,79	
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	2500		300		100		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			1.496.840		-		222.000		31.335		90.748		122.083	100	54,99		122.083	20	8,16	
	Persentase pembangunan prasarana pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5		0		1		1		1		1		100		1		20		
3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak			1.250.000		-		182.000		21.560		74.733		96.293	100	52,91		96.293	20	7,7	
	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			246.840		-		40.000		9.775		16.015		25.790	100	64,48		25.790	20	10,45	
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5		0		1		1		1		1		100		1		20		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**150.000**		-		**71.735**		**2.670**		**46.458**		**49.128**	**0**	**68,49**		**49.128**	**0**	**32,75**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	65		41,7		42		41,7		4,17		4,17		9,93		4,17		6,42		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			-		-		71.735		2.670		46.458		49.128	0	68,49		49.128	0	0	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		71.735		2.670		46.458		49.128	0	68,49		49.128	0	0	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase jumlah usaha hewan dan produk hewan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**300.000**		**13.350**		**20.000**		**-**		**1.050**		**1.050**	**0**	**5,25**		**1.050**	**0**	**0,35**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			300.000		13.350		20.000		-		1.050		1.050	0	5,25		1.050	0	0,35	
	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	625		10		20		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	250		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman			225.000		13.350		20.000		-		1.050		1.050	0	5,25		1.050	0	0,47	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																				
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	625		10		20		0		0		0		0		0		0		
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	250		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**130.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			130.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			130.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	15		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**2.588.122**		**470.648**		**201.012**		**8.952**		-		**8.952**	**0**	**4,45**		**8.952**	**0**	**0,35**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.588.122		470.648		201.012		8.952		-		8.952	0	4,45		8.952	0	0,35	
	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	217		7		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10044		1.771		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	10		2		7		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.100.000		348.835		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	217		7		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)																			
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			372.363		43.606		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10044		1.771		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			315.760		18.687		201.012		8.952		-		8.952	0	4,45		8.952	0	2,84	
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			750.000		59.520		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	10		2		7		0		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**350.000**		**-**		**98.000**		**4.980**		**10.356**		**15.336**	**25**	**15,65**		**15.336**	**10**	**4,38**	UPTD Puskeswan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		98.000		4.980		10.356		15.336	0	15,65		15.336	0	0	
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			-		-		98.000		4.980		10.356		15.336	0	15,65		15.336	0	0	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner														50				10		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			350.000		-		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Vaksinasi PMK, Vaksinasi Jembrana, Pelayanan Administrasi, Vaksinasi Rabies	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	15		0		3		3		0		1,5		50		1,5		10		
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			350.000		-		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	15		0		3		3		0		1,5		50		1,5		10		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**925.000**		**158.140**		**165.000**		**45.510**		**41.640**		**87.150**	**0**	**52,82**		**87.150**	**0**	**9,42**	UPTD Balai Benih
	Meningkatnya distribusi dan														0				0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	kualitas sarana pertanian																				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	2500		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	2500		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			875.000		158.140		165.000		45.510		41.640		87.150	0	52,82		87.150	0	9,96	
	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			669.402		124.315		145.000		45.510		40.896		86.406	0	59,59		86.406	0	12,91	
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			205.598		33.825		20.000		-		744		744	0	3,72		744	0	0,36	
	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**14.261.435**		**662.329**		**1.139.327**		**271.403**		**269.636**		**541.040**	**53,24**	**47,49**		**541.040**	**17,92**	**3,79**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**65.500**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			30.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang dikendalikan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya			30.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**7.501.935**		**-**		**6.150**		**79.071**		**70.484**		**149.555**	**0**	**2431,79**		**149.555**	**50**	**1,99**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	50		9,48		15		0		0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			7.501.935		-		6.150		79.071		70.484		149.555	0	2431,79		149.555	50	1,99	
	Jumlah Sarana Distribusi Perdaganganyang dikelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4		4		1		1		0		0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		1		0		1		1		1		0		1		100		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.651.935		-		6.150		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4		4		1		1		0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.850.000		-		-		79.071		70.484		149.555	0	0		149.555	100	3,88	
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		1		0		1		1		1		0		1		100		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**2.994.000**		**608.860**		**442.862**		**187.622**		**13.974**		**201.596**	**50**	**45,52**		**201.596**	**30**	**6,73**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	94		94,63		94		94		94		94		100		47		50		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			20.000		4.276		41.750		-		2.421		2.421	50	5,8		2.421	25	12,1	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	4		1		4		1		1		2		50		2		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			10.000		4.276		41.750		-		2.421		2.421	50	5,8		2.421	50	24,21	
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4		1		4		1		1		2		50		2		50		
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			10.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			2.959.000		604.584		401.112		187.622		11.553		199.175	100	49,66		199.175	50	6,73	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		5.238		1		1		1		1		100		1		100		
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2.957.000		604.584		401.112		187.622		11.553		199.175	100	49,66		199.175	100	6,74	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		5.238		1		1		1		1		100		1		100		
	Jumlah Laporan Sub KegiatanPemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		4		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		4		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pupuk dan Pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan	4		4		4		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	bersubsisi yang tersalurkan	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)																			
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4		4		4		0		0		0		0		0		0		
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**2.140.000**		**20.878**		**190.000**		**-**		**15.546**		**15.546**	**22,71**	**8,18**		**15.546**	**0,72**	**0,73**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			2.140.000		20.878		190.000		-		15.546		15.546	22,71	8,18		15.546	0,72	0,73	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	7400		652		700		0		159		159		22,71		159		2,15		
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			1.896.000		20.878		190.000		-		15.546		15.546	22,71	8,18		15.546	2,15	0,82	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	7400		652		700		0		159		159		22,71		159		2,15		
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal			124.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	8		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**1.560.000**		**32.592**		**50.315**		**4.711**		**20.077**		**24.788**	**100**	**49,27**		**24.788**	**8,33**	**1,59**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	50		30		25		10		10		10		40		10		20		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			1.560.000		32.592		50.315		4.711		20.077		24.788	100	49,27		24.788	8,33	1,59	
	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi	605		15		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	(lokal)	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)																			
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	150		15		25		10		15		25		100		25		16,67		
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			1.460.000		16.296		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	605		15		0		0		0		0		0		0		0		
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			100.000		16.296		50.315		4.711		20.077		24.788	100	49,27		24.788	16,67	24,79	
	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	150		15		25		10		15		25		100		25		16,67		
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**-**		**-**		**450.000**		**-**		**149.555**		**149.555**	**100**	**33,23**		**149.555**	**0**	**0**	UPTD Pasar
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-		450.000		-		149.555		149.555	100	33,23		149.555	0	0	
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0		0		1				1		1		100		1		0		
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-		450.000		-		149.555		149.555	100	33,23		149.555	0	0	
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0		0		1				1		1		100		1		0		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**28.029.962**		**4.437.187**		**4.215.044**		**985.455**		**1.150.392**		**2.135.847**	**72,17**	**50,67**		**2.135.847**	**26,81**	**7,62**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.727.962**		**3.949.382**		**3.715.044**		**850.112**		**1.045.460**		**1.895.572**	**79,94**	**51,02**		**1.895.572**	**31,67**	**9,14**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		84		85		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	37,5	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0		1		1		2		0		2		50		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4		4		0		1		1		1		0		1		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																			
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	50	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		0		1		1		2		0		2		50		
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	25	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0		1		1		1		0		1		25		
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.731.195		3.459.819		3.463.216		788.981		974.816		1.763.798	248,08	50,93		1.763.798	29,62	9,95	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130		26		26		25		25		25		96,15		25		19,23		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10		10		1		2		2		4		400		4		40		
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.231.195		3.363.939		3.379.216		770.301		949.696		1.719.998	96,15	50,9		1.719.998	19,23	9,98	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130		26		26		25		25		25		96,15		25		19,23		
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			500.000		95.880		84.000		18.680		25.120		43.800	400	52,14		43.800	40	8,76	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10		10		1		2		2		4		400		4		40		
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			871.767		209.606		101.117		37.748		34.905		72.653	75	71,85		72.653	50	8,33	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		4		1		1		1		2		200		2		50		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000		4.955		300		-		300		300	50	100		300	50	1,2	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4		4		4		1		1		2		50		2		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																			
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000		43.151		16.000		2.650		6.709		9.359	50	58,49		9.359	50	18,72	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		9.999		7.000		500		-		500	50	7,14		500	50	2	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		24.968		8.000		-		3.322		3.322	50	41,53		3.322	50	4,43	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		6.521		3.000		-		1.881		1.881	200	62,69		1.881	50	7,52	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		4		1		1		1		2		200		2		50		
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			671.767		120.012		66.817		34.598		22.693		57.291	50	85,74		57.291	50	8,53	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		4		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase barang milik daerah yang tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.250.000		148.175		68.000		12.196		11.754		23.950	25	35,22		23.950	16,67	1,92	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		4		1		1		2		50		2		16,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		1		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		5.500		3.000		1.500		500		2.000	50	66,67		2.000	50	8	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		1		1		2		50		2		50		
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			275.000		47.048		65.000		10.696		11.254		21.950	50	33,77		21.950	16,67	7,98	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		4		1		1		2		50		2		16,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000		7.878		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		1		4		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			900.000		87.750		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			625.000		131.781		82.711		11.186		23.985		35.171	76,47	42,52		35.171	34,62	5,63	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		16		17		3		6		9		52,94		9		69,23		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		1		1		2		100		2		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			475.000		97.770		63.438		10.186		23.985		34.171	52,94	53,87		34.171	69,23	7,19	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		16		17		3		6		9		52,94		9		69,23		
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		34.011		19.274		1.000		-		1.000	100	5,19		1.000	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		1		1		2		100		2		0		
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**6.982.000**		**471.632**		**460.000**		**135.343**		**104.932**		**240.275**	**100**	**52,23**		**240.275**	**25**	**3,44**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sentra industri yang dibina dan dikembangkan (Persentase)	66,67		100		41,67		16,67		0		16,67		40		16,67		25		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			6.982.000		471.632		460.000		135.343		104.932		240.275	100	52,23		240.275	25	3,44	
	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang Dibangun dan Dikembangkan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100		1		100		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			112.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1.930.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			4.700.000		471.632		460.000		135.343		104.932		240.275	100	52,23		240.275	100	5,11	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100		1		100		
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**50.000**		**16.173**		**40.000**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		16.173		40.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		16.173		40.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**270.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas (Persentase)	50		7,21		10,00		0		0		0		0		0		0		
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			270.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	JumlahPelaku Industri yang menyampaikan data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	1		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)																			
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			245.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1		0		4		0		0		0		0		0		0		
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.650.000**		**-**		**26.365**		**3.500**		**6.305**		**9.805**	**21,67**	**37,19**		**9.805**	**5,42**	**0,59**	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**1.650.000**		**-**		**26.365**		**3.500**		**6.305**		**9.805**	**21,67**	**37,19**		**9.805**	**5,42**	**0,59**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menigkatnya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya (Persentase)	12,5		0		12,5		0		0		0		0		0		0		
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			1.650.000		-		26.365		3.500		6.305		9.805	21,67	37,19		9.805	5,42	0,59	
	terciptanya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		0		120		0		26		26		21,67		26		10,83		
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			390.000		-		26.365		3.500		6.305		9.805	21,67	37,19		9.805	10,83	2,51	
	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		0		120		0		26		26		21,67		26		10,83		
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			1.260.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**271.435.241**		**43.975.261**		**34.575.749**		**9.351.650**		**8.354.026**		**17.705.676**	**45,42**	**51,21**		**17.705.676**	**8,62**	**6,52**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440.000**		**58.923**		**93.682**		**16.501**		**13.236**		**29.737**	**75**	**31,74**		**29.737**	**15**	**6,76**	Bagian Pemerintahan Umum
	Meningkatnya layanan														75				15		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	administrasi perangkat daerah																				
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		23.534		63.878		11.709		8.188		19.897	50	31,15		19.897	10	10,47	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		23.534		63.878		11.709		8.188		19.897	50	31,15		19.897	10	10,47	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		35.389		29.804		4.792		5.048		9.840	100	33,02		9.840	20	3,94	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		35.389		29.804		4.792		5.048		9.840	100	33,02		9.840	20	3,94	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.000.000**		**169.789**		**90.818**		**20.280**		**40.853**		**61.133**	**35**	**67,31**		**61.133**	**7**	**6,11**	Bagian Pemerintahan Umum
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	500		100		100		25		25		50		50		50		10		
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Indeks)	3		2,988		2,93		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			900.000		169.789		87.524		20.280		40.394		60.674	33,33	69,32		60.674	6,67	6,74	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	15		3		3		3		0		3		100		3		20		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			150.000		12.836		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			150.000		6.489		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			600.000		150.464		87.524		20.280		40.394		60.674	100	69,32		60.674	20	10,11	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	15		3		3		3		0		3		100		3		20		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			100.000		-		3.294		-		459		459	40	13,93		459	8	0,46	
	Terlaksananya Fasilitasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	75		0		15		5		1		6		40		6		8		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Koordinasi Kerja Sama Daerah	Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)																			
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			100.000		-		3.294		-		459		459	40	13,93		459	8	0,46	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	75		0		15		5		1		6		40		6		8		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440.000**		**37.969**		**30.001**		**4.461**		**5.232**		**9.693**	**50**	**32,31**		**9.693**	**10**	**2,2**	Bagian Hukum
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														50				10		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		13.837		10.000		2.261		2.132		4.393	50	43,93		4.393	10	2,31	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		13.837		10.000		2.261		2.132		4.393	50	43,93		4.393	10	2,31	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		24.132		20.001		2.200		3.100		5.300	50	26,5		5.300	10	2,12	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		1		2		1		1		1		50		1		10		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		24.132		20.001		2.200		3.100		5.300	50	26,5		5.300	10	2,12	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		1		2		1		1		1		50		1		10		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.351.116**		**110.664**		**149.499**		**1.150**		**51.248**		**52.398**	**0**	**35,05**		**52.398**	**0**	**3,88**	Bagian Hukum
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.351.116		110.664		149.499		1.150		51.248		52.398	0	35,05		52.398	0	3,88	
	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	12		1		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			576.514		31.956		13.247		1.150		1.248		2.398	0	18,11		2.398	0	0,42	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			516.602		21.809		121.087		-		50.000		50.000	0	41,29		50.000	0	9,68	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	12		1		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			258.000		56.900		15.165		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Informasi Hukum																				
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440.000**		**31.549**		**50.000**		**16.647**		**10.847**		**27.495**	**75**	**54,99**		**27.495**	**15**	**6,25**	Bagian Kesra
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														75				15		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		8.951		30.000		15.107		8.147		23.255	50	77,52		23.255	10	12,24	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		8.951		30.000		15.107		8.147		23.255	50	77,52		23.255	10	12,24	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		22.598		20.000		1.540		2.700		4.240	100	21,2		4.240	20	1,7	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		22.598		20.000		1.540		2.700		4.240	100	21,2		4.240	20	1,7	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**60.596.333**		**9.065.395**		**7.873.999**		**1.875.601**		**1.037.770**		**2.913.371**	**4,76**	**37**		**2.913.371**	**0,83**	**4,81**	Bagian Kesra
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)	98,9		89,01		91,57		80,66		80,66		80,66		88,09		80,66		81,56		
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			60.596.333		9.065.395		7.873.999		1.875.601		1.037.770		2.913.371	4,76	37		2.913.371	0,83	4,81	
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	40		7		7		0		1		1		14,29		1		2,5		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	15		3		3		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)																			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			48.096.333		6.763.203		6.719.373		1.875.601		1.037.770		2.913.371	14,29	43,36		2.913.371	2,5	6,06	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	40		7		7		0		1		1		14,29		1		2,5		
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			250.000		28.978		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			12.250.000		2.273.214		1.154.626		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.740.000**		**953.039**		**337.500**		**75.309**		**58.454**		**133.764**	**60**	**39,63**		**133.764**	**14**	**1,98**	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														60				14		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			900.000		-		20.000		19.999		-		19.999	50	99,99		19.999	10	2,22	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			900.000		-		20.000		19.999		-		19.999	50	99,99		19.999	10	2,22	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			700.000		60.007		30.000		3.550		18.498		22.048	100	73,49		22.048	30	3,15	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		3		3		3		3		3		100		3		30		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			700.000		60.007		30.000		3.550		18.498		22.048	100	73,49		22.048	30	3,15	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		3		3		3		3		3		100		3		30		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			5.140.000		893.033		287.500		51.761		39.956		91.717	50	31,9		91.717	10	1,78	
	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			1.300.000		375.884		91.700		45.857		32.206		78.063	50	85,13		78.063	10	6	
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			380.000		58.140		10.000		1.500		2.500		4.000	50	40		4.000	10	1,05	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			3.460.000		459.009		185.800		4.404		5.250		9.654	50	5,2		9.654	10	0,28	
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440.000**		**44.549**		**40.000**		**2.321**		**1.170**		**3.491**	**75**	**8,73**		**3.491**	**30**	**0,79**	Bagian Perekonomian dan SDA
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														75				30		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		19.781		20.000		2.321		1.170		3.491	50	17,45		3.491	10	1,84	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		19.781		20.000		2.321		1.170		3.491	50	17,45		3.491	10	1,84	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		24.768		20.000		-		-		-	100	0		-	50	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100		0,5		50		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		24.768		20.000		-		-		-	100	0		-	50	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100		0,5		50		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**310.000**		**65.282**		**22.000**		**3.060**		**2.960**		**6.020**	**33,33**	**27,36**		**6.020**	**6,67**	**1,94**	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			160.000		55.232		7.500		3.060		-		3.060	33,33	40,8		3.060	6,67	1,91	
	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			60.000		16.355		2.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			50.000		24.843		2.500		595		-		595	0	23,8		595	0	1,19	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			50.000		14.034		2.500		2.465		-		2.465	100	98,6		2.465	20	4,93	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		1		1		0		1		1		100		1		20		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			150.000		10.050		14.500		-		2.960		2.960	33,33	20,41		2.960	6,67	1,97	
	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		0		1		0		1		1		100		1		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			50.000		10.050		2.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			50.000		-		7.500		-		2.960		2.960	100	39,47		2.960	20	5,92	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		0		1		0		1		1		100		1		20		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			50.000		-		4.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**620.000**		**29.940**		**40.000**		**3.126**		**4.165**		**7.291**	**56,25**	**18,23**		**7.291**	**11,19**	**1,18**	Bagian Administrasi Pembangunan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														56,25				11,19		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			180.000		4.641		-		-		-		-	37,5	0		-	7,38	0	
	Terlaksananya pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		7		4		1		0		1		25		1		4,76		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			95.000		4.641		-		-		-		-	25	0		-	4,76	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		7		4		1		0		1		25		1		4,76		
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			85.000		-		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		6.310		20.000		-		780		780	50	3,9		780	10	0,41	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		6.310		20.000		-		780		780	50	3,9		780	10	0,41	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		18.989		20.000		3.126		3.385		6.511	100	32,56		6.511	20	2,6	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		2		100		2		20		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		18.989		20.000		3.126		3.385		6.511	100	32,56		6.511	20	2,6	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		2		100		2		20		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**175.000**		**13.763**		**9.500**		**270**		**1.197**		**1.467**	**16,67**	**15,44**		**1.467**	**3,33**	**0,84**	Bagian Administrasi Pembangunan
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	500		100		100		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			175.000		13.763		9.500		270		1.197		1.467	16,67	15,44		1.467	3,33	0,84	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			55.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			60.000		5.951		6.458		270		-		270	0	4,18		270	0	0,45	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			60.000		7.812		3.042		-		1.197		1.197	50	39,34		1.197	10	1,99	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil	60		12		12		3		3		6		50		6		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)																			
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440.000**		**34.094**		**40.000**		-		**10.600**		**10.600**	**75**	**26,5**		**10.600**	**15**	**2,41**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														75				15		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		19.389		20.000		-		2.596		2.596	50	12,98		2.596	10	1,37	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		19.389		20.000		-		2.596		2.596	50	12,98		2.596	10	1,37	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		14.705		20.000		-		8.004		8.004	100	40,02		8.004	20	3,2	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		2		100		2		20		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		14.705		20.000		-		8.004		8.004	100	40,02		8.004	20	3,2	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2		2		100		2		20		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.000.000**		**223.909**		**14.500**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4		3		3,00		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.000.000		223.909		14.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	65		13		5		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			250.000		147.557		8.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	15		3		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			600.000		70.699		5.370		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			150.000		5.654		630		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	65		13		5		0		0		0		0		0		0		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.303.593**		**110.255**		**49.500**		**6.977**		**11.827**		**18.804**	**42**	**37,99**		**18.804**	**8,8**	**1,44**	Bagian Organisasi
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	40		32,6		32,00		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.000		9.706		20.000		3.362		4.433		7.795	50	38,97		7.795	10	4,1	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.000		9.706		20.000		3.362		4.433		7.795	50	38,97		7.795	10	4,1	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000		34.517		20.000		2.835		7.394		10.229	50	51,15		10.229	10	4,09	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		1		2		1		1		1		50		1		10		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000		34.517		20.000		2.835		7.394		10.229	50	51,15		10.229	10	4,09	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		1		2		1		1		1		50		1		10		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			863.593		66.032		9.500		780		-		780	36,67	8,21		780	8	0,09	
	Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	20		3		4		2		0		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	25		3		5		1		0		1		20		1		4		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	20		2		5		2		0		2		40		2		10		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			175.024		13.609		2.785		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	20		3		4		2		0		2		50		2		10		
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			276.714		41.121		4.937		-		-		-	20	0		-	4	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	25		3		5		1		0		1		20		1		4		
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			411.855		11.302		1.778		780		-		780	40	43,87		780	10	0,19	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	20		2		5		2		0		2		40		2		10		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**152.424.199**		**25.824.450**		**20.529.964**		**6.044.165**		**5.938.353**		**11.982.519**	**46,56**	**58,37**		**11.982.519**	**7,52**	**7,86**	Bagian Umum

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														46,56				7,52		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			65.676.199		11.856.479		11.762.622		3.136.752		3.794.361		6.931.113	83,01	58,92		6.931.113	14,25	10,55	
	Terlaksananya pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	520		101		102		101		101		101		99,02		101		19,42		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			63.906.199		11.489.104		11.445.852		3.035.682		3.705.371		6.741.053	99,02	58,9		6.741.053	19,42	10,55	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	520		101		102		101		101		101		99,02		101		19,42		
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.670.000		367.375		316.770		101.070		88.990		190.060	50	60		190.060	3,33	11,38	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100.000		-		-		-		-		-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.800.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	520		0		102		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.800.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	520		0		102		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.460.000		2.339.512		1.846.536		737.235		864.155		1.601.390	50	86,72		1.601.390	10	11,07	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			920.000		119.875		146.150		33.977		49.059		83.036	50	56,82		83.036	10	9,03	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			650.000		100.091		99.999		-		29.536		29.536	50	29,54		29.536	10	4,54	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			960.000		180.621		150.455		41.086		61.782		102.868	50	68,37		102.868	10	10,72	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.000.000		159.649		150.000		21.021		76.967		97.988	50	65,33		97.988	10	9,8	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			830.000		126.818		62.049		19.001		11.086		30.086	50	48,49		30.086	10	3,62	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.100.000		609.435		484.580		312.250		198.727		510.977	50	105,45		510.977	10	12,46	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.000.000		1.043.024		753.303		309.901		436.998		746.899	50	99,15		746.899	10	12,45	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.515.000		4.292.409		686.715		8.075		303.121		311.196	6	45,32		311.196	0	1,78	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		2		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		25		8		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		15		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		20		1		5		6		30		6		0		
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.700.000		2.609.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6		2		3		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Unit)																			
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.900.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.915.000		278.971		419.189		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		25		8		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		1.403.938		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		15		3		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		267.526		8.075		303.121		311.196	30	116,32		311.196	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		20		1		5		6		30		6		0		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.748.000		4.387.585		4.206.817		1.863.238		187.924		2.051.163	50	48,76		2.051.163	7,5	6,08	
	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			148.000		19.952		19.000		3.000		5.500		8.500	50	44,74		8.500	10	5,74	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.900.000		374.568		743.579		156.642		137.534		294.176	50	39,56		294.176	10	10,14	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.700.000		2.850.740		3.444.238		1.703.597		44.890		1.748.487	50	50,77		1.748.487	10	8,88	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.000.000		1.142.325		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.325.000		2.892.695		1.971.505		243.096		788.791		1.031.887	34,58	52,34		1.031.887	6,92	5,63	
	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas	225		45		45		27		27		27		60		27		12		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		0		20		2		2		4		20		4		4		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		3		0		1		1		33,33		1		6,67		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		2		0		1		0,5		25		0,5		5		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7.500.000		1.459.493		1.064.888		148.071		376.615		524.687	60	49,27		524.687	12	7	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	225		45		45		27		27		27		60		27		12		
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.000		-		155.250		95.024		19.456		114.480	20	73,74		114.480	4	91,58	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		0		20		2		2		4		20		4		4		
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.400.000		1.258.061		369.067		-		186.309		186.309	33,33	50,48		186.309	6,67	2,22	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		3		0		1		1		33,33		1		6,67		
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.300.000		175.141		382.300		-		206.411		206.411	25	53,99		206.411	5	8,97	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		2		0		1		0,5		25		0,5		5		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			900.000		55.770		55.770		55.770		-		55.770	200	100		55.770	10	6,2	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			900.000		55.770		55.770		55.770		-		55.770	200	100		55.770	10	6,2	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.575.000**		**7.201.690**		**5.204.786**		**1.281.781**		**1.166.113**		**2.447.894**	**57,78**	**47,03**		**2.447.894**	**9,75**	**5,62**	KDH/WKDH
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah														57,78				9,75		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12.335.000		2.440.325		1.725.736		347.036		559.860		906.896	50	52,55		906.896	10	7,35	
	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Tangga yang Disediakan (Paket)																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			610.000		54.902		47.815		-		1.366		1.366	50	2,86		1.366	10	0,22	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			530.000		107.278		99.995		-		25.634		25.634	50	25,64		25.634	10	4,84	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			455.000		33.938		14.800		150		-		150	50	1,01		150	10	0,03	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			990.000		266.452		149.013		43.462		47.978		91.440	50	61,36		91.440	10	9,24	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			450.000		24.149		49.000		2.600		-		2.600	50	5,31		2.600	10	0,58	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.300.000		643.253		498.615		52.756		75.466		128.222	50	25,72		128.222	10	3,89	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.000.000		1.310.353		866.498		248.068		409.415		657.483	50	75,88		657.483	10	10,96	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.000.000		242.519		61.790		17.050		-		17.050	15	27,59		17.050	0	0,28	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		20		20		3		0		3		15		3		0		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		242.519		61.790		17.050		-		17.050	15	27,59		17.050	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		20		20		3		0		3		15		3		0		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.460.000		272.430		407.070		66.127		76.211		142.338	50	34,97		142.338	10	5,79	
	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			110.000		8.500		6.150		-		2.000		2.000	50	32,52		2.000	10	1,82	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.450.000		148.974		250.000		32.416		31.243		63.659	50	25,46		63.659	10	4,39	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			900.000		114.956		150.920		33.711		42.968		76.679	50	50,81		76.679	10	8,52	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.800.000		458.186		420.233		75.606		56.160		131.766	100	31,36		131.766	5	3,47	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		4		4		4		4		100		4		10		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		8		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.700.000		430.469		420.233		75.606		56.160		131.766	100	31,36		131.766	10	3,56	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		4		4		4		4		100		4		10		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			100.000		27.717		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		8		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			5.780.000		1.322.100		987.872		147.020		161.886		308.906	81,25	31,27		308.906	16,25	5,34	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		0,5		2		2		2		2		100		2		20		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	100		24		20		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	40		4		8		1		1		2		25		2		5		
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		2		2		2		2		4		200		4		40		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			830.000		219.826		166.000		47.020		47.020		94.040	100	56,65		94.040	20	11,33	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		0,5		2		2		2		2		100		2		20		
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.500.000		657.993		339.524		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	100		24		20		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			450.000		44.285		90.000		-		14.866		14.866	25	16,52		14.866	5	3,3	
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	40		4		8		1		1		2		25		2		5		
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.000.000		399.996		392.348		100.000		100.000		200.000	200	50,98		200.000	40	10	
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		2		2		2		2		4		200		4		40		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			13.200.000		2.466.130		1.602.087		628.943		311.996		940.939	50	58,73		940.939	10	7,13	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			7.100.000		1.563.992		911.656		425.130		133.736		558.866	50	61,3		558.866	10	7,87	
	Tersedianya Kebutuhan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Rumah Tangga Kepala Daerah	Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)																			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			6.100.000		902.138		690.431		203.813		178.260		382.073	50	55,34		382.073	10	6,26	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**140.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		87		81,00		80		81		81		100		81		95,29		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		71,3		75,75		0		76,43		76,43		100,9		76,43		89,92		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	31		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			140.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	31		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**134.886.522**		**26.841.867**		**22.157.864**		**4.279.194**		**6.169.132**		**10.448.326**	**73,33**	**47,15**		**10.448.326**	**5,73**	**7,75**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**83.420.422**		**15.172.637**		**14.855.275**		**3.316.503**		**3.788.243**		**7.104.746**	**63,55**	**47,83**		**7.104.746**	**8,07**	**8,52**	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		91,25		81,00		95		74,25		84,625		104,48		84,625		99,56		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,25		75,00		87,31		87,31		87,31		116,41		87,31		102,72		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Pennganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			66.029.246		12.009.588		12.208.224		2.924.311		3.090.870		6.015.180	124	49,27		6.015.180	12,3	9,11	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	290		50		50		49		49		49		98		49		16,9		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	20		4		0		1		1		2		0		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																			
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			65.280.846		11.895.866		12.046.164		2.924.311		3.038.025		5.962.335	98	49,5		5.962.335	16,9	9,13	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	290		50		50		49		49		49		98		49		16,9		
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			713.400		113.722		162.060		-		52.845		52.845	150	32,61		52.845	10	7,41	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		6		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		20.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		6		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.900.929		654.820		932.754		52.800		435.502		488.302	50	52,35		488.302	10	12,52	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			258.205		43.632		36.057		-		1.960		1.960	50	5,44		1.960	10	0,76	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			229.997		56.814		38.300		-		30.901		30.901	50	80,68		30.901	10	13,44	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			240.000		42.580		179.340		-		151.630		151.630	50	84,55		151.630	10	63,18	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.140.000		175.591		272.176		-		126.509		126.509	50	46,48		126.509	10	11,1	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			652.727		170.090		163.635		52.800		10.187		62.987	50	38,49		62.987	10	9,65	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			630.000		95.212		109.995		-		97.186		97.186	50	88,36		97.186	10	15,43	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750.000		70.902		133.251		-		17.128		17.128	50	12,85		17.128	10	2,28	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.706.609		211.560		274.290		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		4		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			311.610		107.430		97.750		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		4		3		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			669.999		104.130		176.540		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35		4		4		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			625.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			728.638		632.970		123.348		-		26.181		26.181	75	21,23		26.181	10	3,59	
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		4.993		5.000		-		1.000		1.000	50	20		1.000	10	4	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			463.638		53.538		92.728		-		17.406		17.406	150	18,77		17.406	10	3,75	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			235.000		22.851		25.620		-		7.775		7.775	50	30,35		7.775	10	3,31	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.000		551.588		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.280.000		390.901		398.328		-		117.320		117.320	66,67	29,45		117.320	14,44	5,15	
	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		2		1		1		1		50		1		20		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		1,5		6		6		6		6		100		6		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		2		4		2		2		2		50		2		3,33		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.000.000		173.310		180.296		-		76.300		76.300	50	42,32		76.300	20	7,63	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5		1		2		1		1		1		50		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya (Unit)																			
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.030.000		173.738		178.404		-		34.130		34.130	100	19,13		34.130	20	3,31	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		1,5		6		6		6		6		100		6		20		
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000		43.852		39.628		-		6.890		6.890	50	17,39		6.890	3,33	2,76	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		2		4		2		2		2		50		2		3,33		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			1.875.000		414.418		375.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	30		6		5		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	125		25		25		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.625.000		364.418		325.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	30		6		5		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			250.000		50.000		50.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	125		25		25		0		0		0		0		0		0		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			2.875.000		858.380		523.330		339.393		118.370		457.763	300	87,47		457.763	9,6	15,92	
	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	125		4		4		6		6		12		300		12		9,6		
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.875.000		858.380		523.330		339.393		118.370		457.763	300	87,47		457.763	9,6	15,92	
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	125		4		4		6		6		12		300		12		9,6		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**51.466.100**		**11.669.230**		**7.302.590**		**962.691**		**2.380.889**		**3.343.580**	**84,65**	**45,79**		**3.343.580**	**4,08**	**6,5**	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		100		100		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		
		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		100		100		12,5		25		37,5		37,5		37,5		37,5		
		Persentase Ranperda Yang Ditetapkan (Persentase)	100		85,71		100		12,5		25		37,5		37,5		37,5		37,5		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			9.148.013		4.494.674		1.110.705		-		599.966		599.966	25	54,02		599.966	4	6,56	
	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	15		0		6		1		2		3		50		3		20		
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil	3		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			230.000		2.804.823		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			6.000.000		1.689.851		1.110.705		-		599.966		599.966	50	54,02		599.966	20	10	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	15		0		6		1		2		3		50		3		20		
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			890.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	25		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			300.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			1.728.013		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			7.175.000		1.728.982		1.469.976		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1.250.000		267.456		309.232		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan	Jumlah Dokumen Hasil	10		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)																			
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			3.800.000		1.261.849		947.180		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			375.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	10		0		4		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1.250.000		199.677		213.564		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.150.000		328.850		468.202		-		260.140		260.140	35	55,56		260.140	6,38	8,26	
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	20		0		0		0		1		1		0		1		5		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	16		0		0		1		1		2		0		2		12,5		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	5		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	28		4		4		0		1		1		25		1		3,57		
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			175.000		24.360		22.260		-		520		520	50	2,34		520	10	0,3	
	Terlaksananya Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)																			
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			175.000		27.824		22.260		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	5	0	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	20		0		0		0		1		1		0		1		5		
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			175.000		9.444		22.204		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			175.000		-		-		-		-		-	0	0		-	12,5	0	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	16		0		0		1		1		2		0		2		12,5		
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1.000.000		78.542		197.136		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	5		4		4		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1.200.000		188.680		204.342		-		259.620		259.620	25	127,05		259.620	3,57	21,64	
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	28		4		4		0		1		1		25		1		3,57		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			10.900.000		1.233.029		1.336.128		36.000		332.480		368.480	50	27,58		368.480	5,71	3,38	
	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	15		0		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	30		6		6		6		6		6		100		6		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		DPRD (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			1.540.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			6.000.000		902.029		930.128		-		254.480		254.480	50	27,36		254.480	10	4,24	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			270.000		-		54.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	15		0		3		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.440.000		216.000		252.000		36.000		63.000		99.000	100	39,29		99.000	20	6,88	
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	30		6		6		6		6		6		100		6		20		
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			600.000		115.000		100.000		-		15.000		15.000	50	15		15.000	10	2,5	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3.750.000		517.550		588.895		-		-		-	416,67	0		-	10	0	
	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	20		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	125		4		3		25		25		25		833,33		25		20		
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	20		0		4		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			3.250.000		517.550		588.895		-		-		-	833,33	0		-	20	0	
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	125		4		3		25		25		25		833,33		25		20		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			1.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			1.109.012		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pembahasan Kerja	Jumlah Dokumen Rekomendasi	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	sama Daerah	Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			859.012		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			14.234.075		3.366.146		2.328.684		926.691		1.188.303		2.114.994	175	90,82		2.114.994	4	14,86	
	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	120		4		4		6		6		12		300		12		10		
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			10.761.061		3.114.879		2.014.550		799.939		1.078.636		1.878.574	300	93,25		1.878.574	10	17,46	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	120		4		4		6		6		12		300		12		10		
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			1.050.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		0		0		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1.081.976		251.267		314.134		126.752		109.668		236.420	50	75,26		236.420	10	21,85	
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			1.266.038		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	40		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.01	**PERENCANAAN**			**28.118.626**		**4.546.847**		**4.836.562**		**1.136.316**		**1.001.018**		**2.137.334**	**59,63**	**44,19**		**2.137.334**	**9,99**	**7,6**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**22.768.626**		**3.777.440**		**4.121.379**		**1.024.096**		**909.478**		**1.933.574**	**57,35**	**46,92**		**1.933.574**	**10,47**	**8,49**	Badan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	KABUPATEN/KOTA																				Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		82		81,00		93		91		91		112,35		91		107,06		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		76		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		75,8		75,75		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000		7.824		-		-		-		-	25	0		-	2,38	0	
	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		7		4		1		0		1		25		1		4,76		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000		7.824		-		-		-		-	25	0		-	4,76	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21		7		4		1		0		1		25		1		4,76		
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.768.347		3.283.927		3.268.377		958.055		735.428		1.693.483	75	51,81		1.693.483	10	9,02	
	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25		25		25		25		100		25		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.177.422		3.190.527		3.168.177		932.765		708.703		1.641.468	100	51,81		1.641.468	20	9,03	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25		25		25		25		100		25		20		
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			540.925		93.400		100.200		25.290		26.725		52.015	50	51,91		52.015	10	9,62	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.655.056		147.603		124.924		30.709		55.113		85.821	50	68,7		85.821	10	5,19	
	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			40.000		6.846		4.030		240		2.059		2.299	50	57,05		2.299	10	5,75	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			135.000		17.061		30.010		-		6.696		6.696	50	22,31		6.696	10	4,96	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			70.000		7.295		8.017		75		2.226		2.301	50	28,7		2.301	10	3,29	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			125.056		16.947		14.065		8.520		4.822		13.341	50	94,85		13.341	10	10,67	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			35.000		3.225		4.050		-		2.700		2.700	50	66,67		2.700	10	7,71	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.250.000		96.229		64.752		21.874		36.610		58.484	50	90,32		58.484	10	4,68	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			345.056		63.638		122.595		-		88.989		88.989	53,33	72,59		88.989	11,76	25,79	
	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	51		0		5		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		3		5		0		8		8		160		8		47,06		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			110.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.296		-		22.680		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	51		0		5		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000		60.148		99.915		-		88.989		88.989	160	89,06		88.989	47,06	59,33	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		3		5		0		8		8		160		8		47,06		
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.760		3.490		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345.000		36.877		45.471		9.191		6.003		15.194	50	33,41		15.194	10	4,4	
	Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000		1.850		3.000		500		-		500	50	16,67		500	10	2,5	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			200.000		22.917		22.401		4.026		3.973		7.999	50	35,71		7.999	10	4	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.000		12.110		20.070		4.665		2.030		6.695	50	33,36		6.695	10	5,36	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.530.167		237.570		560.011		26.141		23.946		50.087	95	8,94		50.087	18,82	3,27	
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51		9		10		9		9		9		90		9		17,65		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			865.000		129.965		111.412		13.710		21.496		35.205	90	31,6		35.205	17,65	4,07	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51		9		10		9		9		9		90		9		17,65		
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			665.167		107.605		448.599		12.432		2.450		14.882	100	3,32		14.882	20	2,24	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.950.000**		**447.923**		**407.183**		**105.898**		**44.713**		**150.611**	**53,33**	**36,99**		**150.611**	**6,7**	**5,11**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi proses dan isi (Persentase)	96		0		93,06		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.437.705		434.284		288.314		97.073		38.879		135.952	58,33	47,15		135.952	8,1	5,58	
	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		2		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	9		2		1		1		0		1		100		1		11,11		
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	20		2		2		1		0		1		50		1		5		
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	8		2		1		1		0		1		100		1		12,5		
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	35		7		7		7		0		7		100		7		20		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	21		6		4		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			650.000		-		13.905		1.400		-		1.400	0	10,07		1.400	0	0,22	
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka	6		2		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Rancangan Teknokratik) (Dokumen)																			
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			310.000		22.241		34.243		23.708		-		23.708	100	69,24		23.708	11,11	7,65	
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	9		2		1		1		0		1		100		1		11,11		
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			-		-		13.474		1.406		-		1.406	50	10,43		1.406	5	0	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	20		2		2		1		0		1		50		1		5		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			250.000		47.910		65.114		46.024		11.544		57.568	100	88,41		57.568	12,5	23,03	
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	8		2		1		1		0		1		100		1		12,5		
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			245.000		20.994		24.804		21.830		-		21.830	100	88,01		21.830	20	8,91	
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	35		7		7		7		0		7		100		7		20		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			982.705		343.139		136.774		2.705		27.335		30.040	0	21,96		30.040	0	3,06	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	21		6		4		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			278.895		7.074		91.022		3.625		-		3.625	50	3,98		3.625	2	1,3	
	Tersusunnya analisis data dan informasi yang terakomodir di dalam Sistem Informasi berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	25		1		1		0		1		1		100		1		4		
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	150		30		30		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			128.895		2.696		6.988		-		-		-	100	0		-	4	0	
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	25		1		1		0		1		1		100		1		4		
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			150.000		4.378		84.034		3.625		-		3.625	0	4,31		3.625	0	2,42	
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	150		30		30		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			233.400		6.565		27.847		5.200		5.834		11.034	41,67	39,62		11.034	7,18	4,73	
	Tersedianya laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	11		3		2		0		1		1		50		1		9,09		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Laporan)																			
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	19		4		3		0		1		1		33,33		1		5,26		
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			117.800		3.223		16.677		2.250		870		3.120	50	18,71		3.120	9,09	2,65	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	11		3		2		0		1		1		50		1		9,09		
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			115.600		3.342		11.170		2.950		4.964		7.914	33,33	70,85		7.914	5,26	6,85	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	19		4		3		0		1		1		33,33		1		5,26		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.400.000**		**321.484**		**308.000**		**6.322**		**46.827**		**53.149**	**65,28**	**17,26**		**53.149**	**11,27**	**2,21**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	95		0		90,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			779.296		79.460		100.000		2.812		16.270		19.082	41,67	19,08		19.082	7,87	2,45	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		1		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi	165		4		30		15		15		30		100		30		18,18		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	300		4		60		15		15		30		50		30		10		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	105		4		20		5		5		10		50		10		9,52		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	105		4		20		5		5		10		50		10		9,52		
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			232.892		26.522		25.944		-		5.831		5.831	0	22,48		5.831	0	2,5	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		1		2		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			73.040		6.944		4.170		-		-		-	100	0		-	18,18	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	165		4		30		15		15		30		100		30		18,18		
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			99.395		12.773		11.204		-		975		975	50	8,7		975	10	0,98	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	300		4		60		15		15		30		50		30		10		
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			203.366		19.101		41.406		1.406		7.680		9.086	0	21,94		9.086	0	4,47	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	21		2		4		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	(RPJPD. RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)																			
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			49.450		4.575		5.175		-		-		-	50	0		-	9,52	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	105		4		20		5		5		10		50		10		9,52		
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			121.153		9.545		12.102		1.406		1.784		3.190	50	26,36		3.190	9,52	2,63	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	105		4		20		5		5		10		50		10		9,52		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			824.079		66.924		118.000		2.205		9.216		11.421	50	9,68		11.421	9,42	1,39	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		6		6		150		6		28,57		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	44		5		8		4		0		4		50		4		9,09		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	80		4		16		4		0		4		25		4		5		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	22		4		4		2		0		2		50		2		9,09		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	42		4		8		2		0		2		25		2		4,76		
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			228.991		27.974		35.367		900		9.216		10.116	150	28,6		10.116	28,57	4,42	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		6		6		150		6		28,57		
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			57.745		2.560		7.578		-		-		-	50	0		-	9,09	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	44		5		8		4		0		4		50		4		9,09		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			211.786		10.044		27.162		1.305		-		1.305	25	4,8		1.305	5	0,62	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	80		4		16		4		0		4		25		4		5		
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			103.180		10.120		32.380		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			74.135		5.840		7.923		-		-		-	50	0		-	9,09	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	22		4		4		2		0		2		50		2		9,09		
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			148.242		10.386		7.590		-		-		-	25	0		-	4,76	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	42		4		8		2		0		2		25		2		4,76		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			796.625		175.101		90.000		1.305		21.341		22.646	104,17	25,16		22.646	16,52	2,84	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		4		4		100		4		19,05		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	22		4		4		2		2		4		100		4		18,18		
		Jumlah Laporan Hasil	42		4		8		2		6		8		100		8		19,05		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)																			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		2		0		4		4		200		4		19,05		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	21		4		4		2		2		4		100		4		19,05		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	42		4		8		2		0		2		25		2		4,76		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			216.289		32.248		29.989		-		15.422		15.422	100	51,43		15.422	19,05	7,13	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		4		0		4		4		100		4		19,05		
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			37.430		3.805		3.748		-		-		-	100	0		-	18,18	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	22		4		4		2		2		4		100		4		18,18		
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			171.782		18.060		19.724		1.305		-		1.305	100	6,62		1.305	19,05	0,76	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	42		4		8		2		6		8		100		8		19,05		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			207.034		105.901		20.249		-		5.919		5.919	200	29,23		5.919	19,05	2,86	
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	21		2		2		0		4		4		200		4		19,05		
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			37.410		3.616		3.954		-		-		-	100	0		-	19,05	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	21		4		4		2		2		4		100		4		19,05		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)																			
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			126.680		11.472		12.336		-		-		-	25	0		-	4,76	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	42		4		8		2		0		2		25		2		4,76		
5.02	**KEUANGAN**			**756.515.974**		**117.330.585**		**113.713.451**		**14.847.661**		**23.933.704**		**38.781.365**	**36,29**	**34,1**		**38.781.365**	**13,17**	**5,13**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**179.937.454**		**24.728.953**		**22.165.047**		**3.711.830**		**5.638.919**		**9.350.749**	**51,3**	**42,19**		**9.350.749**	**7,01**	**5,2**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		75,8		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		99		81		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		96		95		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10,24	0	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		0		2		2		4		0		4		13,33		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	70		5		0		1		4		5		0		5		7,14		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	13,33	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		0		2		2		4		0		4		13,33		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	7,14	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	70		5		0		1		4		5		0		5		7,14		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			173.767.794		22.308.090		21.448.929		3.637.347		5.255.721		8.893.068	100	41,46		8.893.068	6,36	5,12	
	Persentase Ketersediaan Jasa dan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	245		242		46		46		46		46		100		46		18,78		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		3		1		4		100		4		6,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000		20		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			170.376.894		22.123.530		21.041.769		3.527.217		5.150.611		8.677.828	100	41,24		8.677.828	18,78	5,09	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	245		242		46		46		46		46		100		46		18,78		
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.240.900		184.560		407.160		110.130		105.110		215.240	100	52,86		215.240	6,67	6,64	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	60		12		4		3		1		4		100		4		6,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)																			
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000		20		0		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		13.500		-		950		950	100	7,04		950	0	0	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		2		1		1		2		100		2		0		
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		13.500		-		950		950	100	7,04		950	0	0	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		2		1		1		2		100		2		0		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.636.028		615.691		173.859		35.355		187.443		222.799	40	128,15		222.799	7,08	8,45	
	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		4		4		0		1		1		25		1		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000		4.900		2.572		-		1.000		1.000	25	38,88		1.000	5	4	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.030.796		263.278		57.005		2.410		32.454		34.864	50	61,16		34.864	10	3,38	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			120.000		44.462		15.765		4.641		3.304		7.945	50	50,4		7.945	10	6,62	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		18.011		4.000		-		1.220		1.220	25	30,5		1.220	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	0		4		4		0		1		1		25		1		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.460.232		285.041		94.517		28.304		149.466		177.770	50	188,08		177.770	3,33	12,17	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.110.545		956.781		99.625		15.940		72.759		88.699	31,25	89,03		88.699	6,25	7,99	
	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.500		5.200		2.000		-		1.000		1.000	25	50		1.000	5	3,64	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			425.000		67.239		75.575		14.090		15.986		30.077	50	39,8		30.077	10	7,08	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			133.045		20.808		22.050		1.850		55.773		57.623	50	261,33		57.623	10	43,31	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			525.000		863.535		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.273.087		848.390		429.134		23.187		122.046		145.233	48,15	33,84		145.233	6,67	6,39	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		9		2		2		4		44,44		4		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160		20		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		129.154		22.687		47.155		69.842	44,44	54,08		69.842	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		9		2		2		4		44,44		4		0		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.148.087		218.355		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160		20		0		0		0		0		0		0		0		
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			850.000		580.419		249.980		500		27.391		27.891	50	11,16		27.891	10	3,28	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			275.000		49.616		50.000		-		47.500		47.500	50	95		47.500	10	17,27	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**570.000.000**		**91.075.384**		**88.094.062**		**10.901.644**		**16.857.398**		**27.759.042**	**32,19**	**31,51**		**27.759.042**	**19,79**	**4,87**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40		24,52		14,6		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	61		81,43		60,80		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30		46,32		42,56		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2,38		-117,65		2,45		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.159.969		881.022		901.984		147.014		269.852		416.865	37,14	46,22		416.865	20,71	8,08	
	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33		0		0		33		0		16,5		0		16,5		50		
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0		33		33		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0		33		33		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		1		0		1		50		1		10		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		1		1		2		100		2		20		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	20		5		5		2		1		3		60		3		15		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			585.652		119.257		106.852		-		70.200		70.200	50	65,7		70.200	50	11,99	
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			599.407		86.074		107.640		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			59.210		-		-		5.876		-		5.876	0	0		5.876	50	9,92	
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33		0		0		33		0		16,5		0		16,5		50		
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			59.060		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			-		8.381		23.740		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0		33		33		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			-		9.454		24.490		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0		33		33		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1.440.843		222.978		221.545		63.047		43.541		106.588	50	48,11		106.588	10	7,4	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		1		0		1		50		1		10		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.292.228		238.023		219.561		75.400		58.109		133.509	100	60,81		133.509	20	10,33	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		1		1		2		100		2		20		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			1.123.569		196.856		198.156		2.691		98.001		100.692	60	50,81		100.692	15	8,96	
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	20		5		5		2		1		3		60		3		15		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			572.926		127.002		158.000		8.663		40.147		48.810	50,56	30,89		48.810	69,44	8,52	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12		2		2		0		1		1		50		1		8,33		
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12		4		4		0		1		1		25		1		8,33		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60		150		150		30		85		115		76,67		115		191,67		
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			118.445		23.120		30.000		-		5.786		5.786	50	19,29		5.786	8,33	4,88	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12		2		2		0		1		1		50		1		8,33		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			65.960		22.727		13.741		-		359		359	25	2,61		359	8,33	0,54	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12		4		4		0		1		1		25		1		8,33		
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			388.521		81.156		114.259		8.663		34.002		42.665	76,67	37,34		42.665	191,67	10,98	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60		150		150		30		85		115		76,67		115		191,67		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			992.745		234.544		200.000		110.882		42.072		152.954	21,43	76,48		152.954	2,86	15,41	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	60		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	20		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	20		3		2		1		1		2		100		2		10		
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		2		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			51.750		10.180		11.550		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	60		4		4		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			114.375		44.241		34.500		23.774		-		23.774	0	68,91		23.774	0	20,79	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	20		2		2		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			108.825		21.625		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			271.500		54.205		98.850		78.284		12.982		91.266	100	92,33		91.266	10	33,62	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	20		3		2		1		1		2		100		2		10		
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			180.825		52.922		55.100		8.825		29.090		37.915	50	68,81		37.915	10	20,97	
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		1		1		50		1		10		
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			204.720		39.362		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		2		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			60.750		12.008		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			563.274.360		89.832.816		86.834.078		10.635.086		16.505.328		27.140.413	25	31,26		27.140.413	1,33	4,82	
	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	75		7		4		1		1		2		50		2		2,67		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	4		2		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			533.274.360		89.679.960		85.934.078		10.635.086		16.505.328		27.140.413	50	31,58		27.140.413	2,67	5,09	
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	75		7		4		1		1		2		50		2		2,67		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			30.000.000		152.856		900.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	4		2		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3.285.024**		**1.020.162**		**3.054.342**		**138.988**		**1.366.202**		**1.505.189**	**37,5**	**49,28**		**1.505.189**	**15,75**	**45,82**	Badan Pengelolaan

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Keuangan Daerah
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6,75		4		6,7		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.285.024		1.020.162		3.054.342		138.988		1.366.202		1.505.189	37,5	49,28		1.505.189	15,75	45,82	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola dengan baik	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		1		0		1		1		100		1		25		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	100		2		2		0		1		1		50		1		1		
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	100		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		1		1		50		1		25		
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		2		0		1		1		50		1		25		
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			36.666		2.252		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			37.656		7.080		12.500		-		7.900		7.900	50	63,2		7.900	50	20,98	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1		1		50		1		50		
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			42.419		9.181		7.516		-		3.272		3.272	0	43,53		3.272	0	7,71	
	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			2.535.448		919.109		2.661.644		121.258		1.298.779		1.420.036	100	53,35		1.420.036	25	56,01	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		1		0		1		1		100		1		25		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			334.526		19.908		281.236		-		24.379		24.379	50	8,67		24.379	1	7,29	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	100		2		2		0		1		1		50		1		1		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			174.468		6.450		32.500		-		20.187		20.187	0	62,11		20.187	0	11,57	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	100		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)																			
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			31.910		3.321		38.946		-		10.956		10.956	50	28,13		10.956	25	34,33	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		1		1		50		1		25		
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			91.931		52.861		20.000		17.730		730		18.460	50	92,3		18.460	25	20,08	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		2		0		1		1		50		1		25		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**3.293.496**		**506.086**		**400.000**		**95.200**		**71.185**		**166.385**	**16,67**	**41,6**		**166.385**	**7,92**	**5,05**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	33,92		13,81		22,20		0		8,43		8,43		37,97		8,43		24,85		
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100		100		100		0		45		45		45		45		45		
		Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100		85		100		0		45		45		45		45		45		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.293.496		506.086		400.000		95.200		71.185		166.385	16,67	41,6		166.385	7,92	5,05	
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah dan Retribusi.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4		3		3		0		1		1		33,33		1		25		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	4		2		9000		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		2		2		0		1		1		50		1		8,33		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	20		12		12		1		5		6		50		6		30		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			40.387		7.754		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			943.023		156.829		12.878		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12		4		4		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			709.580		87.360		145.374		42.350		26.718		69.068	33,33	47,51		69.068	25	9,73	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4		3		3		0		1		1		33,33		1		25		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			113.459		17.685		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			417.500		14.292		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	4		2		9000		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			630.374		111.833		120.664		19.237		3.033		22.269	50	18,46		22.269	8,33	3,53	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		2		2		0		1		1		50		1		8,33		
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			91.500		23.207		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			347.674		87.127		121.084		33.613		41.434		75.048	50	61,98		75.048	30	21,59	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	20		12		12		1		5		6		50		6		30		
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**146.747.393**		**24.990.729**		**41.365.109**		**8.918.142**		**10.043.412**		**18.961.555**	**38,27**	**45,84**		**18.961.555**	**6,27**	**12,92**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**142.670.393**		**24.445.388**		**33.640.153**		**7.687.076**		**8.132.633**		**15.819.708**	**62,25**	**47,03**		**15.819.708**	**10,56**	**11,09**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,1		81		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		88,5		81		86		0		86		106,17		86		101,18		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah	95		95		95		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Angka)																			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			139.100.393		22.499.934		33.413.707		7.677.076		8.080.629		15.757.705	103,59	47,16		15.757.705	19,73	11,33	
	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1745		514		327		514		514		514		157,19		514		29,46		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			138.515.393		22.406.094		33.237.987		7.649.236		8.037.469		15.686.705	157,19	47,2		15.686.705	29,46	11,32	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1745		514		327		514		514		514		157,19		514		29,46		
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			585.000		93.840		175.720		27.840		43.160		71.000	50	40,41		71.000	10	12,14	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.945.000		140.981		100.717		1.838		23.330		25.168	50	24,99		25.168	10	1,29	
	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000		5.505		4.481		-		1.155		1.155	50	25,78		1.155	10	3,85	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.000		20.593		13.605		-		5.809		5.809	50	42,7		5.809	10	3,63	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			55.000		8.998		5.594		871		2.751		3.622	50	64,75		3.622	10	6,59	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			150.000		23.493		14.927		245		5.190		5.435	50	36,41		5.435	10	3,62	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000		10.100		4.995		722		2.435		3.157	50	63,2		3.157	10	6,31	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.500.000		72.292		57.115		-		5.990		5.990	50	10,49		5.990	10	0,4	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250.000		38.850		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000		38.850		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			575.000		1.641.974		36.701		3.309		5.411		8.719	50	23,76		8.719	10	1,52	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		3		3		6		0		6		10		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000		3.000		1.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155.000		24.432		26.871		2.850		4.537		7.387	50	27,49		7.387	10	4,77	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		11.043		8.330		459		873		1.332	50	15,99		1.332	10	1,78	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			315.000		1.603.500		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		3		3		6		0		6		10		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			750.000		123.649		89.028		4.853		23.263		28.116	107,14	31,58		28.116	10	3,75	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		7		8		8		8		114,29		8		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		1		1		100		1		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000		102.741		67.208		4.853		19.914		24.767	114,29	36,85		24.767	20	4,95	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		7		8		8		8		114,29		8		20		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		20.908		21.820		-		3.349		3.349	100	15,35		3.349	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		1		1		1		100		1		0		
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**4.077.000**		**545.341**		**7.724.956**		**1.231.067**		**1.910.780**		**3.141.846**	**14,29**	**40,67**		**3.141.846**	**2,22**	**77,06**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,3		5,39		3,90		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98,5		93		96,50		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100		98,5		100		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.827.000		182.958		7.465.827		1.227.667		1.899.337		3.127.003	0	41,88		3.127.003	0	171,16	
	Persentase perencanaan & pengadaan pegawai yang sesuai	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana	5		1		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dengan ANJAB & ABK	Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1.377.000		161.879		205.592		-		37.087		37.087	0	18,04		37.087	0	2,69	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			100.000		5.409		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			100.000		3.050		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			100.000		12.620		7.260.235		1.227.667		1.862.250		3.089.916	0	42,56		3.089.916	0	3089,92	
	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			900.000		220.598		172.903		3.400		10.183		13.583	0	7,86		13.583	0	1,51	
	Persentase Pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan	5		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Pangkat ASN (Dokumen)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			275.000		38.527		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			575.000		182.071		172.903		3.400		10.183		13.583	0	7,86		13.583	0	2,36	
	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			805.000		93.088		48.419		-		-		-	66,67	0		-	13,33	0	
	Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	15		3		3		3		3		6		200		6		40		
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	50		10		10		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			440.000		28.149		48.419		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			200.000		60.250		-		-		-		-	200	0		-	40	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	15		3		3		3		3		6		200		6		40		
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			165.000		4.689		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	50		10		10		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			545.000		48.698		37.807		-		1.260		1.260	0	3,33		1.260	0	0,23	
	Persentase Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan indikator kinerja individu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	500		60		100		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	15		3		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			65.000		7.778		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			100.000		8.664		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	500		60		100		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			150.000		12.956		37.807		-		1.260		1.260	0	3,33		1.260	0	0,84	
	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	15		3		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			80.000		13.865		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			100.000		5.435		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**1.619.000**		**196.675**		**256.044**		**163.060**		**8.110**		**171.170**	**0**	**66,85**		**171.170**	**0**	**10,57**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**1.619.000**		**196.675**		**256.044**		**163.060**		**8.110**		**171.170**	**0**	**66,85**		**171.170**	**0**	**10,57**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	74		59		63,00		0		0		0		0		0		0		
		Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)	8,5		7		6,50		0		0		0		0		0		0		
		Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Data ASN yang telah mengikuti Kompetensi teknis, fungsional, Struktural dan Pemerintahan manajerial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan			250.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																				
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.369.000		196.675		256.044		163.060		8.110		171.170	0	66,85		171.170	0	12,5	
	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1.369.000		196.675		256.044		163.060		8.110		171.170	0	66,85		171.170	0	12,5	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2.350.000**		**31.194**		**222.500**		**675**		**40.959**		**41.634**	**0**	**18,71**		**41.634**	**0**	**1,77**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.850.000**		**31.194**		**222.500**		**675**		**40.959**		**41.634**	**0**	**18,71**		**41.634**	**0**	**2,25**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	50		0		45		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya pelaksanaan penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			380.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			125.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			255.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			765.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			255.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			255.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			255.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			580.000		31.194		222.500		675		40.959		41.634	0	18,71		41.634	0	7,18	
	Meningkatnya Inovasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5		3		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5		1		5		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			340.000		18.567		192.732		675		40.959		41.634	0	21,6		41.634	0	12,25	
	Terlaksananya Diseminasi	Jumlah Laporan Hasil	5		3		4		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)																			
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			240.000		12.627		29.768		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5		1		5		0		0		0		0		0		0		
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**500.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	75		0		75		0		0		0		0		0		0		
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pemamfaatan hasil riset dan inovasi yang dalam pembangunan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			500.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**120.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	
5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**120.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)	92		0		0		0		0		0		0		0		0		
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kerjasama terkait daerah perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	25		0		1		0		0		0		0		0		0		
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			120.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	25		0		1		0		0		0		0		0		0		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**30.535.000**		**4.983.371**		**4.762.057**		**1.316.922**		**1.302.699**		**2.619.621**	**68,75**	**55,01**		**2.619.621**	**12,2**	**8,58**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.035.000**		**4.518.061**		**4.241.982**		**1.234.632**		**1.232.583**		**2.467.215**	**53,47**	**58,16**		**2.467.215**	**12,58**	**8,8**	Inspektorat
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		94		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		89,7		81,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		75,75		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	2,86	0	
	Terpenuhi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	35		7		0		1		1		2		0		2		5,71		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																			
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		5		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.500		-		-		-		-		-	0	0		-	5,71	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35		7		0		1		1		2		0		2		5,71		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.163.500		4.119.932		4.036.297		1.184.769		1.184.023		2.368.792	125	58,69		2.368.792	10	9,8	
	Terpenuhinya kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	155		31		31		31		31		31		100		31		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.641.000		4.051.412		3.945.057		1.162.679		1.161.733		2.324.412	100	58,92		2.324.412	20	9,83	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	155		31		31		31		31		31		100		31		20		
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			510.000		68.520		91.240		22.090		22.290		44.380	150	48,64		44.380	10	8,7	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.500		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			940.000		-		786		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	106		0		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	101		0		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			650.000		-		500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan	106		0		2		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)																			
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			290.000		-		286		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	101		0		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.204.000		162.916		75.580		11.723		31.642		43.364	50	57,38		43.364	10	3,6	
	Terpenuhinya kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			28.000		4.078		3.006		150		40		190	50	6,32		190	10	0,68	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			165.000		37.649		15.250		-		2.316		2.316	50	15,19		2.316	10	1,4	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		5.411		4.831		40		283		323	50	6,69		323	10	1,29	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			96.000		12.845		5.050		-		1.958		1.958	50	38,78		1.958	10	2,04	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			35.000		7.754		2.475		133		1.171		1.304	50	52,68		1.304	10	3,73	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			855.000		95.180		44.968		11.400		25.873		37.273	50	82,89		37.273	10	4,36	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			240.000		-		15.592		15.340		-		15.340	71,43	98,39		15.340	41,67	6,39	
	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	38		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		7		5		0		5		71,43		5		125		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	38		0		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000		-		15.592		15.340		-		15.340	71,43	98,39		15.340	125	20,45	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		7		5		0		5		71,43		5		125		
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			130.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235.000		53.023		17.724		1.385		2.637		4.022	37,5	22,69		4.022	7,5	1,71	
	Ketersediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		3.000		2.500		-		33		33	50	1,32		33	10	0,22	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.000		8.773		10.004		-		1.804		1.804	50	18,03		1.804	10	2	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000		9.750		5.220		1.385		800		2.185	50	41,86		2.185	10	8,74	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			105.000		31.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.227.500		182.190		96.003		21.415		14.282		35.697	68,75	37,18		35.697	13	2,91	
	Terpeliaharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		6		8		3		3		3		37,5		3		6		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.077.500		154.422		76.004		21.415		14.177		35.592	37,5	46,83		35.592	6	3,3	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		6		8		3		3		3		37,5		3		6		
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150.000		27.768		19.999		-		105		105	100	0,53		105	20	0,07	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**1.500.000**		**355.445**		**282.952**		**74.900**		**59.552**		**134.452**	**121,53**	**47,52**		**134.452**	**13,85**	**8,96**	Inspektorat
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	83		83		81,00		0		0		0		0		0		0		
		Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	88		88,28		86,00		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.200.000		298.836		232.923		67.030		49.922		116.952	112,04	50,21		116.952	12,1	9,75	
	Teselenggaranya Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	20		5		3		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	75		16		9		11		18		29		322,22		29		38,67		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	75		11		6		4		2		6		100		6		8		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	50		16		6		0		4		4		66,67		4		8		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	40		5		6		3		5		8		133,33		8		20		
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	60		12		12		2		4		6		50		6		10		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			250.000		31.090		30.107		3.410		-		3.410	0	11,33		3.410	0	1,36	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	20		5		3		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			250.000		89.130		50.154		22.150		10.452		32.602	322,22	65		32.602	38,67	13,04	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	75		16		9		11		18		29		322,22		29		38,67		
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			140.000		40.200		30.107		14.400		3.750		18.150	100	60,28		18.150	8	12,96	
	Terlaksananya Reviu Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	75		11		6		4		2		6		100		6		8		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kinerja	Laporan Kinerja (Laporan)																			
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			140.000		18.120		30.107		-		6.470		6.470	66,67	21,49		6.470	8	4,62	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	50		16		6		0		4		4		66,67		4		8		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			150.000		49.169		32.312		13.520		8.500		22.020	133,33	68,15		22.020	20	14,68	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	40		5		6		3		5		8		133,33		8		20		
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			60.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	10		0		0		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			210.000		71.127		60.134		13.550		20.750		34.300	50	57,04		34.300	10	16,33	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	60		12		12		2		4		6		50		6		10		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			300.000		56.609		50.029		7.870		9.630		17.500	150	34,98		17.500	20	5,83	
	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	15		2		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15		13		2		1		5		6		300		6		40		
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			150.000		-		14.997		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	15		2		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			150.000		56.609		35.032		7.870		9.630		17.500	300	49,95		17.500	40	11,67	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15		13		2		1		5		6		300		6		40		
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1.000.000**		**109.865**		**237.122**		**7.390**		**10.564**		**17.954**	**41,67**	**7,57**		**17.954**	**8,33**	**1,8**	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3		1		3		1		1		1		33,33		1		33,33		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			175.000		10.066		20.023		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10		3		2		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10		0		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			100.000		10.066		10.001		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10		3		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			75.000		-		10.022		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10		0		2		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			825.000		99.799		217.099		7.390		10.564		17.954	62,5	8,27		17.954	12,5	2,18	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Dilakukannya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	150		30		30		0		30		30		100		30		20		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	150		30		30		0		30		30		100		30		20		
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	20		5		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	150		30		30		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			300.000		32.523		150.178		5.120		324		5.444	100	3,63		5.444	20	1,81	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	150		30		30		0		30		30		100		30		20		
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			150.000		17.564		33.751		-		7.310		7.310	100	21,66		7.310	20	4,87	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	150		30		30		0		30		30		100		30		20		
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			225.000		28.488		18.232		2.270		2.930		5.200	50	28,52		5.200	10	2,31	
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	20		5		4		0		2		2		50		2		10		
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			150.000		21.224		14.937		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	150		30		30		0		0		0		0		0		0		
7.01	**KECAMATAN**			**103.146.616**		**18.077.001**		**16.239.241**		**3.807.869**		**4.105.834**		**7.913.702**	**59,87**	**48,73**		**7.913.702**	**9,93**	**7,67**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.744.905**		**2.038.643**		**1.942.935**		**471.084**		**473.050**		**944.134**	**40,48**	**48,59**		**944.134**	**7,74**	**6,4**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		71,3		72,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		87		82,00		89		86		86		104,88		86		101,18		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		-		-		-		-	37,5	0		-	7,5	0	
	Terpenuhinya Kinerja perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	20		0		4		1		0		1		25		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Perangkat Daerah (Dokumen)																			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	25	0		-	5	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		0		1		25		1		5		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.225.525		1.845.208		1.845.935		449.666		454.782		904.448	83,33	49		904.448	9,09	6,84	
	Terpemenuhinya Kinerja pelayanan keuangan perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		19		19		19		19		19		100		19		17,27		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		3		3		6		150		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.050.125		1.815.208		1.798.735		438.986		441.602		880.588	100	48,96		880.588	17,27	6,75	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		19		19		19		19		19		100		19		17,27		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			150.400		30.000		47.200		10.680		13.180		23.860	150	50,55		23.860	10	15,86	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			604.600		93.844		44.500		8.901		11.518		20.419	45,83	45,89		20.419	10,42	3,38	
	Terpemenuhinya Kinerja pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16		4		4		1		1		2		50		2		12,5		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan	20		4		8		1		1		2		25		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.500		1.500		1.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.250		17.499		3.500		-		1.500		1.500	50	42,86		1.500	10	1,61	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			33.250		5.000		5.000		101		130		231	50	4,62		231	10	0,69	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.100		11.999		3.000		1.550		1.450		3.000	50	100		3.000	12,5	4,68	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16		4		4		1		1		2		50		2		12,5		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			23.500		-		2.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			380.000		57.845		30.000		7.250		8.438		15.688	25	52,29		15.688	10	4,13	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		8		1		1		2		25		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			216.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			112.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			43.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			46.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		0		1		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Unit)																			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.780		25.537		20.500		5.015		2.157		7.172	50	34,98		7.172	10	4,63	
	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.350		2.850		500		300		150		450	50	90		450	10	2,93	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.750		12.687		15.000		2.775		1.927		4.702	50	31,34		4.702	10	5,9	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.680		10.000		5.000		1.940		80		2.020	50	40,4		2.020	10	3,38	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			494.000		74.054		32.000		7.502		4.593		12.095	33,33	37,8		12.095	10	2,45	
	terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		4		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		5		5		5		5		100		5		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		53.084		30.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		4		4		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			127.000		-		-		7.502		4.593		12.095	100	0		12.095	20	9,52	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		5		5		5		5		100		5		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Operasional atau Lapangan																				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			367.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		20.970		2.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**22.665**		**3.000**		**-**		**250**		**250**	**50**	**8,33**		**250**	**10**	**0,5**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		22.665		3.000		-		250		250	50	8,33		250	10	0,5	
	Terciptanya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		22.665		3.000		-		250		250	50	8,33		250	10	0,5	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**300.000**		**26.490**		**15.000**		**-**		**-**		**-**	**50**	**0**		**-**	**10**	**0**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			300.000		26.490		15.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terkoordinirnya Kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			300.000		26.490		15.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**11.250**		**5.000**		**-**		**200**		**200**	**50**	**4**		**200**	**10**	**0,4**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		11.250		5.000		-		200		200	50	4		200	10	0,4	
	Selesainya masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		11.250		5.000		-		200		200	50	4		200	10	0,4	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**335.000**		**216.261**		**68.000**		**7.880**		**7.900**		**15.780**	**41,67**	**23,21**		**15.780**	**8,33**	**4,71**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			335.000		216.261		68.000		7.880		7.900		15.780	41,67	23,21		15.780	8,33	4,71	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		2		500		125		0		125		25		125		5		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		4		500		125		125		250		50		250		10		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			110.000		51.719		20.000		-		400		400	25	2		400	5	0,36	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		2		500		125		0		125		25		125		5		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			115.000		113.592		18.000		7.880		-		7.880	50	43,78		7.880	10	6,85	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		4		500		125		125		250		50		250		10		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			110.000		50.950		30.000		-		7.500		7.500	50	25		7.500	10	6,82	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**320.000**		**45.225**		**41.800**		**21.450**		**14.318**		**35.768**	**57,14**	**85,57**		**35.768**	**17,14**	**11,18**	Kecamatan Sangir
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan			320.000		45.225		41.800		21.450		14.318		35.768	57,14	85,57		35.768	17,14	11,18	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pemerintahan Desa																				
	pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		7		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		7		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		7		1		1		2		28,57		2		28,57		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			60.000		7.500		500		-		50		50	50	10		50	10	0,08	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		7		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			55.000		11.250		500		-		50		50	50	10		50	10	0,09	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		7		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000		-		500		-		-		-	28,57	0		-	28,57	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		7		1		1		2		28,57		2		28,57		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			155.000		26.475		40.300		21.450		14.218		35.668	100	88,51		35.668	20	23,01	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.809.375**		**2.889.034**		**2.812.135**		**602.863**		**752.120**		**1.354.982**	**64,56**	**48,18**		**1.354.982**	**9,01**	**8,57**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		95		82,00		98		98		98		119,51		98		115,29		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		64,3		74,20		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		5.000		-		275		-		275	0	0		275	10	0,55	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		5.000		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Daerah																				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		-		275		-		275	0	0		275	10	1,1	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.981.375		2.749.114		2.719.035		585.475		732.237		1.317.712	122,92	48,46		1.317.712	14,2	9,42	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		24		23		23		23		95,83		23		18,4		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.729.975		2.719.114		2.682.035		577.755		726.877		1.304.632	95,83	48,64		1.304.632	18,4	9,5	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		24		23		23		23		95,83		23		18,4		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			251.400		30.000		37.000		7.720		5.360		13.080	150	35,35		13.080	10	5,2	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			614.000		68.758		40.297		5.303		10.648		15.951	50	39,58		15.951	10	2,6	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.000		2.790		1.760		-		488		488	50	27,73		488	10	2,03	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		11.246		10.000		1.714		3.287		5.001	50	50,01		5.001	10	6,67	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000		2.327		3.000		420		199		619	50	20,63		619	10	3,1	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.000		9.995		6.000		350		3.073		3.423	50	57,05		3.423	10	5,7	
	Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		1.120		-		-		-		-	0	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		0		1		1		2		0		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			410.000		41.280		19.537		2.819		3.601		6.420	50	32,86		6.420	10	1,57	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			356.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			129.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			207.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			430.000		66.162		22.526		2.706		3.822		6.528	50	28,98		6.528	12,5	1,52	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		12		12		3		3		6		50		6		30		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		12		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		3.020		2.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000		11.942		15.000		2.531		2.977		5.508	50	36,72		5.508	30	7,34	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		12		12		3		3		6		50		6		30		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000		3.950		5.526		175		845		1.020	50	18,46		1.020	10	4,08	
	Tersedianya Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			315.000		47.250		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		12		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			378.000		-		30.278		9.104		5.412		14.516	64,29	47,94		14.516	6,43	3,84	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		7		2		7		4,5		64,29		4,5		12,86		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			301.000		-		30.278		9.104		5.412		14.516	64,29	47,94		14.516	12,86	4,82	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		7		2		7		4,5		64,29		4,5		12,86		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			77.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**21.806**		**2.400**		-		-		-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		100		100		0		25		25		25		25		25		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		21.806		2.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		21.806		2.400		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**350.000**		**28.670**		**10.000**		-		**480**		**480**	**50**	**4,8**		**480**	**5**	**0,14**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		0		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			350.000		28.670		10.000		-		480		480	50	4,8		480	5	0,14	
	Meningkatnya pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan	20		3		2		0		1		1		50		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			350.000		28.670		10.000		-		480		480	50	4,8		480	5	0,14	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		2		0		1		1		50		1		5		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**4.050**		-		-		-		-	**0**	**0**		-	**5**	**0**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		0		50		50		50		50		50		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		4.050		-		-		-		-	0	0		-	5	0	
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		4.050		-		-		-		-	0	0		-	5	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**158.493**		**138.750**		-		**14.373**		**14.373**	**0,67**	**10,36**		**14.373**	**0,27**	**2,87**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		75		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			500.000		158.493		138.750		-		14.373		14.373	0,67	10,36		14.373	0,27	2,87	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150		2		50		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	125		5		50		0		1		1		2		1		0,8		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		0		0		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			200.000		61.363		25.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	150		2		50		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			150.000		52.770		83.750		-		14.373		14.373	2	17,16		14.373	0,8	9,58	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	125		5		50		0		1		1		2		1		0,8		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			150.000		44.360		30.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**385.000**		**30.115**		**39.500**		**30.922**		**-**		**30.922**	**0**	**78,28**		**30.922**	**2,5**	**8,03**	Kecamatan Sungai Pagu
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			385.000		30.115		39.500		30.922		-		30.922	0	78,28		30.922	2,5	8,03	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		0		1		1		1		0		1		5		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	11		0		11		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1		1		1		1		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			50.000		3.748		-		-		-		-	0	0		-	5	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		0		0		1		1		0		1		5		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			50.000		4.490		-		937		-		937	0	0		937	5	1,87	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		0		1		1		1		0		1		5		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			110.000		-		4.500		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	11		0		11		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan			175.000		21.877		35.000		29.984		-		29.984	0	85,67		29.984	0	17,13	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pembangunan Desa																				
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1		1		1		1		0		0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.819.197**		**2.775.354**		**2.434.234**		**604.002**		**732.156**		**1.336.158**	**74,12**	**54,89**		**1.336.158**	**9,29**	**9,02**	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		25		25		25		26,32		25		26,32		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		76,7		74,20		25		25		25		33,69		25		29,41		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		92		81,00		93		80		80		98,77		80		94,12		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.000		-		2.510		275		745		1.020	37,5	40,64		1.020	7,5	3,92	
	Terpenuhinya Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000		-		1.510		-		745		745	25	49,34		745	5	5,73	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		0		1		1		25		1		5		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000		-		1.000		275		-		275	50	27,5		275	10	2,12	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.910.943		2.354.365		2.356.786		585.475		695.733		1.281.208	86,36	54,36		1.281.208	9,44	9,92	
	Terpenuhinya Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120		21		22		24		24		24		109,09		24		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		1		1		0		1		100		1		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.647.943		2.324.365		2.297.786		577.755		676.893		1.254.648	109,09	54,6		1.254.648	20	9,92	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120		21		22		24		24		24		109,09		24		20		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			250.000		30.000		57.000		7.720		18.840		26.560	50	46,6		26.560	3,33	10,62	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		4		1		1		2		50		2		3,33		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.000		-		2.000		-		-		-	100	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		1		1		0		1		100		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			967.022		153.679		20.938		5.303		7.214		12.517	75	59,78		12.517	10	1,29	
	Terpenuhinya Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		1		0		2		2		200		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			45.000		5.263		2.000		-		1.190		1.190	200	59,5		1.190	10	2,64	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		1		0		2		2		200		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.000		26.501		6.000		1.714		1.369		3.083	50	51,38		3.083	10	4,06	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.490		5.290		1.989		420		912		1.332	50	66,94		1.332	10	3,29	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			57.000		12.441		2.000		350		769		1.119	50	55,95		1.119	10	1,96	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			35.000		6.495		4.005		-		1.970		1.970	50	49,2		1.970	10	5,63	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			713.532		97.688		4.944		2.819		1.004		3.823	50	77,33		3.823	10	0,54	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			122.787		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			25.787		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Unit)																			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			47.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			421.000		85.750		22.000		3.846		5.480		9.325	50	42,39		9.325	7,5	2,22	
	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		10		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000		2.000		2.000		-		400		400	50	20		400	10	2	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.000		13.765		19.000		3.671		4.830		8.500	50	44,74		8.500	10	8,1	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			86.000		6.985		1.000		175		250		425	50	42,5		425	10	0,49	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.000		63.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		10		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			371.446		181.561		32.000		9.104		22.984		32.088	200	100,27		32.088	20,56	8,64	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		1,25		1		1		6		3,5		350		3,5		11,67		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		1		0,5		50		0,5		50		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			302.100		74.885		30.000		9.104		21.094		30.198	350	100,66		30.198	11,67	10	
	Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	30		1,25		1		1		6		3,5		350		3,5		11,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			54.345		106.676		2.000		-		1.890		1.890	50	94,5		1.890	50	3,48	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		1		0,5		50		0,5		50		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**6.293**		**2.000**		**-**		**235**		**235**	**200**	**11,75**		**235**	**26,67**	**0,47**	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		6.293		2.000		-		235		235	200	11,75		235	26,67	0,47	
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		8		8		8		16		200		16		26,67		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		6.293		2.000		-		235		235	200	11,75		235	26,67	0,47	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		8		8		8		16		200		16		26,67		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**300.000**		**45.158**		**10.000**		**-**		**4.000**		**4.000**	**33,33**	**40**		**4.000**	**5**	**1,33**	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			300.000		45.158		10.000		-		4.000		4.000	33,33	40		4.000	5	1,33	
	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		3		0		1		1		33,33		1		5		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			300.000		45.158		10.000		-		4.000		4.000	33,33	40		4.000	5	1,33	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		3		0		1		1		33,33		1		5		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**4.403**		**2.000**		**-**		**498**		**498**	**1250**	**24,9**		**498**	**10**	**1**	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		4.403		2.000		-		498		498	1250	24,9		498	10	1	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terselesaikannya Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	500		4		4		1		49		50		1250		50		10		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		4.403		2.000		-		498		498	1250	24,9		498	10	1	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	500		4		4		1		49		50		1250		50		10		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**159.456**		**119.960**		**2.750**		**15.841**		**18.591**	**13,18**	**15,5**		**18.591**	**4,29**	**3,72**	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			500.000		159.456		119.960		2.750		15.841		18.591	13,18	15,5		18.591	4,29	3,72	
	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	500		2		500		1		0		1		0,2		1		0,2		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500		5		500		0		30		30		6		30		6		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		1		3		4		33,33		4		6,67		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			150.000		86.561		22.495		-		-		-	0,2	0		-	0,2	0	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	500		2		500		1		0		1		0,2		1		0,2		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			250.000		28.268		20.000		-		4.181		4.181	6	20,91		4.181	6	1,67	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500		5		500		0		30		30		6		30		6		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			100.000		44.627		77.465		2.750		11.660		14.410	33,33	18,6		14.410	6,67	14,41	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		12		1		3		4		33,33		4		6,67		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**309.000**		**34.437**		**48.842**		**30.922**		**3.013**		**33.935**	**81,25**	**69,48**		**33.935**	**13,75**	**10,98**	Kecamatan Koto

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Parik Gadang Diateh
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			309.000		34.437		48.842		30.922		3.013		33.935	81,25	69,48		33.935	13,75	10,98	
	Terfasilitasinya Nagari yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		1		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		8		0		2		2		25		2		25		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			50.000		4.471		2.000		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			60.000		4.479		2.000		937		-		937	200	46,87		937	10	1,56	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		1		1		1		2		200		2		10		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			73.000		-		9.780		-		3.013		3.013	25	30,81		3.013	25	4,13	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		8		0		2		2		25		2		25		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			126.000		25.487		35.062		29.984		-		29.984	100	85,52		29.984	20	23,8	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.510.200**		**1.970.438**		**1.767.936**		**465.042**		**468.476**		**933.517**	**46,02**	**52,8**		**933.517**	**9,32**	**9,82**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,1		73,24		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		89,77		81		89		89		89		109,88		89		104,71		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		7.080		-		-		-	50	0		-	10	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		3.240		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		3.840		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.431.500		1.647.244		1.633.761		455.460		450.067		905.527	66,18	55,43		905.527	8,82	12,18	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85		15		17		14		14		14		82,35		14		16,47		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.166.500		1.619.104		1.586.561		438.754		434.187		872.941	82,35	55,02		872.941	16,47	12,18	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85		15		17		14		14		14		82,35		14		16,47		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			240.000		28.140		47.200		16.706		15.880		32.586	50	69,04		32.586	10	13,58	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			710.000		85.244		78.463		6.133		12.776		18.910	50	24,1		18.910	10	2,66	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000		2.980		866		-		200		200	50	23,09		200	10	0,8	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		24.990		11.070		-		7.494		7.494	50	67,7		7.494	10	9,99	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		4.003		3.980		-		1.800		1.800	50	45,23		1.800	10	7,2	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.000		6.007		4.505		-		760		760	50	16,87		760	10	1,27	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		2.995		900		-		322		322	50	35,83		322	10	1,29	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000		44.269		57.142		6.133		2.200		8.333	50	14,58		8.333	10	1,67	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			710.200		163.482		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		5		6		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		4		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			35.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000		23.566		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		5		6		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			575.200		139.915		-		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		4		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.500		15.040		13.550		3.448		2.112		5.560	50	41,03		5.560	10	5,12	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		1		5		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000		2.000		2.000		-		500		500	50	25		500	10	5	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.500		6.409		8.400		1.694		1.612		3.306	50	39,36		3.306	10	5,21	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		1		5		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000		6.631		3.150		1.754		-		1.754	50	55,68		1.754	10	5,01	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.000		59.429		35.082		-		3.520		3.520	50	10,03		3.520	25	0,7	
	Terlaksananya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		7		7		7		7		100		3,5		50		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		3		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000		47.729		28.834		-		3.520		3.520	100	12,21		3.520	50	1,17	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		7		7		7		7		100		3,5		50		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000		11.700		6.248		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		3		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**2.650**		**975**		**-**		**-**		**-**	**150**	**0**		**-**	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		0		100		100		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh			50.000		2.650		975		-		-		-	150	0		-	10	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																				
	Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		2.650		975		-		-		-	150	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.000**		**34.845**		**3.075**		**-**		**280**		**280**	**50**	**9,11**		**280**	**10**	**0,1**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			275.000		34.845		3.075		-		280		280	50	9,11		280	10	0,1	
	Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			275.000		34.845		3.075		-		280		280	50	9,11		280	10	0,1	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**5.786**		**675**		**-**		**-**		**-**	**50**	**0**		**-**	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		5.786		675		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		5.786		675		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**122.276**		**103.500**		**8.539**		**23.248**		**31.787**	**86,67**	**30,71**		**31.787**	**4,8**	**6,36**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala			500.000		122.276		103.500		8.539		23.248		31.787	86,67	30,71		31.787	4,8	6,36	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Daerah																				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1250		10		50		10		5		15		30		15		1,2		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1250		25		50		20		20		40		80		40		3,2		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			175.000		66.783		18.810		-		245		245	30	1,3		245	1,2	0,14	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1250		10		50		10		5		15		30		15		1,2		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			175.000		17.734		26.550		3.368		1.900		5.268	80	19,84		5.268	3,2	3,01	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1250		25		50		20		20		40		80		40		3,2		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			150.000		37.758		58.140		5.171		21.103		26.274	150	45,19		26.274	10	17,52	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		4		4		3		3		6		150		6		10		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**266.500**		**26.390**		**34.490**		**14.358**		**2.555**		**16.913**	**73,33**	**49,04**		**16.913**	**12,5**	**6,35**	Kecamatan Sangir Jujuan
	Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		0		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			266.500		26.390		34.490		14.358		2.555		16.913	73,33	49,04		16.913	12,5	6,35	
	Terlaksananya Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		5		5		1		2		3		60		3		15		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		5		5		1		2		3		60		3		15		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	5		1		1		1		0		1		100		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Desa (Dokumen)																			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			75.000		5.058		1.800		-		1.607		1.607	60	89,28		1.607	15	2,14	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		5		5		1		2		3		60		3		15		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			25.000		3.107		1.800		-		948		948	60	52,65		948	15	3,79	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		5		5		1		2		3		60		3		15		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			116.500		18.226		30.890		14.358		-		14.358	100	46,48		14.358	20	12,32	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.405.100**		**2.213.421**		**2.015.471**		**504.782**		**405.807**		**910.589**	**49,31**	**45,18**		**910.589**	**8,25**	**6,79**	Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		74		73,24		81		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		85		81,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		92		95,00		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		3.500		540		-		540	50	15,43		540	10	1,08	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		1.750		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		1.750		540		-		540	50	30,86		540	10	2,16	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.617.500		1.918.813		1.901.422		483.902		366.703		850.605	62,75	44,74		850.605	11,67	7,32	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		20		17		15		15		15		88,24		15		15		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	20		0		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.442.500		1.888.813		1.863.821		476.202		357.893		834.095	88,24	44,75		834.095	15	7,29	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		20		17		15		15		15		88,24		15		15		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			150.000		30.000		35.851		7.700		8.810		16.510	50	46,05		16.510	10	11,01	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		1.750		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			647.500		107.513		46.274		6.742		16.560		23.302	50	50,36		23.302	10	3,6	
	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.500		235		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000		12.338		7.000		-		3.605		3.605	50	51,5		3.605	10	6,01	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000		4.555		1.520		-		1.140		1.140	50	75		1.140	10	4,56	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000		7.408		6.000		1.052		2.385		3.437	50	57,29		3.437	10	6,87	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		3.206		2.250		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu (Laporan)																			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			475.000		79.772		29.504		5.690		9.430		15.120	50	51,25		15.120	10	3,18	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			270.100		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	337		0		120		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.040		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			130.040		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	337		0		120		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.020		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295.000		67.528		11.780		1.876		2.485		4.360	37,5	37,02		4.360	7,5	1,48	
	Persentase Jasa Pendukung yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.500		1.840		1.500		-		790		790	50	52,67		790	10	6,32	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32.500		4.058		5.130		814		787		1.600	50	31,2		1.600	10	4,92	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000		9.130		5.150		1.062		908		1.970	50	38,25		1.970	10	4,93	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.000		52.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			525.000		119.568		52.495		11.722		20.059		31.781	100	60,54		31.781	10	6,05	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		5		5		5		100		5		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			275.000		58.445		52.495		11.722		20.059		31.781	100	60,54		31.781	20	11,56	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		5		5		5		100		5		20		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000		61.123		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**7.000**		**4.050**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	500		100		100,00		25		25		25		25		25		5		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		7.000		4.050		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		7.000		4.050		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**300.000**		**23.683**		**9.900**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			300.000		23.683		9.900		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Persentase Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			300.000		23.683		9.900		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		-		**2.700**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Sangir

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
																					Batang Hari
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		-		2.700		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Persentase Penyelesaian Masalah-masalah terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		-		2.700		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**110.239**		**105.900**		**3.735**		**4.064**		**7.799**	**22,27**	**7,36**		**7.799**	**4,45**	**1,56**	Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			500.000		110.239		105.900		3.735		4.064		7.799	22,27	7,36		7.799	4,45	1,56	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		470		500		1		0		1		0,2		1		0,04		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		440		500		83		0		83		16,6		83		3,32		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		7		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			250.000		49.219		38.175		-		-		-	0,2	0		-	0,04	0	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		470		500		1		0		1		0,2		1		0,04		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			150.000		17.399		6.750		3.735		-		3.735	16,6	55,33		3.735	3,32	2,49	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		440		500		83		0		83		16,6		83		3,32		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			100.000		43.620		60.975		-		4.064		4.064	50	6,67		4.064	10	4,06	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		7		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**284.500**		**28.449**		**47.800**		**24.375**		**3.250**		**27.625**	**100**	**57,79**		**27.625**	**40**	**9,71**	Kecamatan Sangir Batang Hari
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		25		25		25		25		25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			284.500		28.449		47.800		24.375		3.250		27.625	100	57,79		27.625	40	9,71	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		1,75		7		7		7		7		100		7		20		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	35		1,75		7		7		7		7		100		7		20		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		7		0		7		7		100		7		100		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			50.000		2.800		3.150		-		1.150		1.150	100	36,51		1.150	20	2,3	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		1,75		7		7		7		7		100		7		20		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			50.000		5.765		3.150		-		1.500		1.500	100	47,62		1.500	20	3	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	35		1,75		7		7		7		7		100		7		20		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			44.500		-		3.750		-		-		-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		7		0		7		7		100		7		100		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			140.000		19.884		37.750		24.375		600		24.975	100	66,16		24.975	20	17,84	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		1		1		100		1		20		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.844.339**		**2.684.121**		**2.483.997**		**598.929**		**735.651**		**1.334.580**	**45,31**	**53,73**		**1.334.580**	**11,67**	**8,99**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		73,55		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	95		89		91,00		90		90		90		98,9		90		94,74		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		(Angka)																			
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		61		95,00		0		1		1		1,05		1		1,05		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		2.595		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terpenuhinya kinerja perencanaan, penganggaran da evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		1.360		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		1.235		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.830.339		2.389.694		2.388.670		586.523		735.651		1.322.174	50	55,35		1.322.174	10	10,31	
	Terpenuhinya kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		21		22		22		22		22		100		22		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.555.339		2.359.694		2.331.479		578.003		735.651		1.313.654	100	56,34		1.313.654	20	10,46	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		21		22		22		22		22		100		22		20		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			250.000		30.000		52.862		8.520		-		8.520	50	16,12		8.520	10	3,41	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		4.329		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		1		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			764.500		77.896		36.317		3.590		-		3.590	45,83	9,88		3.590	9,17	0,47	
	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)																			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.500		2.994		2.298		380		-		380	50	16,54		380	10	1,95	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.000		18.326		15.000		2.500		-		2.500	50	16,67		2.500	10	2	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			29.500		4.360		6.500		-		-		-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		25		1		5		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.000		8.510		8.500		710		-		710	50	8,35		710	10	1,18	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		-		1.050		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			505.500		43.707		2.969		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			360.000		-		-		3.310		-		3.310	0	0		3.310	25	0,92	
	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		1		0		1		0		1		100		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.000		-		-		3.310		-		3.310	0	0		3.310	100	9,46	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		1		0		1		0		1		100		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.500		71.612		17.577		2.196		-		2.196	50	12,49		2.196	7,5	1,16	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000		2.500		2.000		500		-		500	50	25		500	10	4,17	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			37.500		6.902		8.010		1.696		-		1.696	50	21,17		1.696	10	4,52	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		4		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000		9.710		7.567		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			105.000		52.500		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650.000		144.919		38.838		3.310		-		3.310	25	8,52		3.310	5	0,51	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			320.000		48.636		32.878		3.310		-		3.310	50	10,07		3.310	10	1,03	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			330.000		96.283		5.960		-		-		-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**3.800**		**3.569**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		100		100		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		3.800		3.569		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		0		6		6		50		6		10		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		3.800		3.569		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		0		6		6		50		6		10		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**325.000**		**19.240**		**11.507**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		0		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			325.000		19.240		11.507		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terkoordinirnya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			325.000		19.240		11.507		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**2.760**		**2.700**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		0		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		2.760		2.700		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		0		2		2		50		2		10		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		2.760		2.700		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	20		3		4		0		2		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)																			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**158.917**		**101.805**		**6.379**		-		**6.379**	**30,56**	**6,27**		**6.379**	**5**	**1,28**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		50		50		50		50		50		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			500.000		158.917		101.805		6.379		-		6.379	30,56	6,27		6.379	5	1,28	
	Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		3		400		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		5		300		0		125		125		41,67		125		5		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		56		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			350.000		87.270		26.680		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		3		400		0		0		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			75.000		22.009		15.125		-		-		-	41,67	0		-	5	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		5		300		0		125		125		41,67		125		5		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			75.000		49.638		60.000		6.379		-		6.379	50	10,63		6.379	10	8,51	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		56		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**280.000**		**23.722**		**49.900**		**35.925**		-		**35.925**	**50**	**71,99**		**35.925**	**10**	**12,83**	Kecamatan Pauh Duo
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		25		50		50		50		50		50		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			280.000		23.722		49.900		35.925		-		35.925	50	71,99		35.925	10	12,83	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		4		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			53.000		3.239		1.125		1.125		-		1.125	50	100		1.125	10	2,12	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			50.000		-		1.125		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		5		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000		-		7.650		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		4		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			127.000		20.484		40.000		34.800		-		34.800	100	87		34.800	20	27,4	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.694.000**		**1.827.727**		**1.622.436**		**337.349**		**404.069**		**741.418**	**55,46**	**45,7**		**741.418**	**9,65**	**6,34**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	90		93,5		89,19		96		0		0		0		0		0		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		92		95,00		0		0		0		0		0		0		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		60,8		75,75		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		-		4.000		190		-		190	50	4,75		190	10	0,38	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		-		2.000		190		-		190	50	9,5		190	10	0,76	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		2.000		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.234.000		1.512.725		1.513.866		322.090		371.000		693.091	76,19	45,78		693.091	14,95	7,51	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		12		14		11		11		11		78,57		11		14,86		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.059.000		1.485.515		1.469.486		314.190		362.090		676.281	78,57	46,02		676.281	14,86	7,47	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		12		14		11		11		11		78,57		11		14,86		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			150.000		27.210		42.380		6.570		8.910		15.480	50	36,53		15.480	10	10,32	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		2.000		1.330		-		1.330	100	66,5		1.330	20	5,32	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			797.500		130.257		60.640		13.459		26.376		39.835	50	65,69		39.835	10	4,99	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000		3.990		1.500		-		5.400		5.400	50	360		5.400	10	27	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		15.000		8.000		-		5.411		5.411	50	67,64		5.411	10	7,21	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Disediakan (Paket)																			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000		3.983		1.750		60		760		820	50	46,86		820	10	4,1	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.000		10.972		5.000		300		900		1.200	50	24		1.200	10	2	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.500		4.497		1.125		715		409		1.124	50	99,94		1.124	10	5	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.000		91.816		43.265		12.383		13.496		25.879	50	59,82		25.879	10	4,31	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			840.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			145.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			390.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			225.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.500		75.517		6.010		1.610		810		2.420	50	40,27		2.420	10	0,87	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		2.500		1.500		500		500		1.000	50	66,67		1.000	10	6,67	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000		2.732		1.840		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.500		7.285		2.670		1.110		310		1.420	50	53,18		1.420	10	3,79	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.000		63.000		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495.000		109.228		37.920		-		5.883		5.883	57,14	15,51		5.883	18,93	1,19	
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		7		2		7		4,5		64,29		4,5		12,86		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		2		1		1		1		50		1		25		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			325.000		-		33.000		-		1.000		1.000	64,29	3,03		1.000	12,86	0,31	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		7		2		7		4,5		64,29		4,5		12,86		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			170.000		109.228		4.920		-		4.883		4.883	50	99,24		4.883	25	2,87	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		2		1		1		1		50		1		25		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.000**		**1.728**		**1.800**		-		-		-	**50**	**0**		-	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100		0		100		100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000		1.728		1.800		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		8		12		3		3		6		50		6		10		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000		1.728		1.800		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Meningkatnya Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	60		8		12		3		3		6		50		6		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)																			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**300.000**		**44.314**		**14.050**		**1.570**		**4.524**		**6.094**	**50**	**43,37**		**6.094**	**10**	**2,03**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100		0		100		100		25		25		25		25		25		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			300.000		44.314		14.050		1.570		4.524		6.094	50	43,37		6.094	10	2,03	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			300.000		44.314		14.050		1.570		4.524		6.094	50	43,37		6.094	10	2,03	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		3		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.000**		**2.231**		**1.800**		**-**		**-**		**-**	**50**	**0**		**-**	**10**	**0**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100		4		100		100		25		25		25		25		25		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		2.231		1.800		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		2.231		1.800		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**500.000**		**221.719**		**118.250**		**5.764**		**34.426**		**40.190**	**60,42**	**33,99**		**40.190**	**9,44**	**8,04**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100		100		100		100		25		25		25		25		25		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			500.000		221.719		118.250		5.764		34.426		40.190	60,42	33,99		40.190	9,44	8,04	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		2		400		125		0		125		31,25		125		5		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan	2500		5		300		125		125		250		83,33		250		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)																			
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		11		12		4		4		8		66,67		8		13,33		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			350.000		119.046		39.000		2.068		-		2.068	31,25	5,3		2.068	5	0,59	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2500		2		400		125		0		125		31,25		125		5		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			75.000		24.153		17.000		2.196		-		2.196	83,33	12,92		2.196	10	2,93	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		5		300		125		125		250		83,33		250		10		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			75.000		78.520		62.250		1.500		34.426		35.926	66,67	57,71		35.926	13,33	47,9	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		11		12		4		4		8		66,67		8		13,33		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**289.500**		**23.743**		**35.400**		**29.250**		**1.050**		**30.300**	**62,5**	**85,59**		**30.300**	**22,5**	**10,47**	Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100		4		100		100		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			289.500		23.743		35.400		29.250		1.050		30.300	62,5	85,59		30.300	22,5	10,47	
	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		4		1		1		2		50		2		50		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			50.000		2.152		1.800		-		1.050		1.050	50	58,33		1.050	10	2,1	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			50.000		2.074		1.800		-		-		-	50	0		-	10	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			49.500		-		1.800		-		-		-	50	0		-	50	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		4		1		1		2		50		2		50		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			140.000		19.517		30.000		29.250		-		29.250	100	97,5		29.250	20	20,89	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	5		1		1		1		0		1		100		1		20		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**38.456.595**		**3.706.690**		**4.270.838**		**457.787**		**502.065**		**959.852**	**57,91**	**22,47**		**959.852**	**8,02**	**2,5**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.440.500**		**1.556.769**		**1.626.167**		**310.333**		**413.108**		**723.440**	**70**	**44,49**		**723.440**	**9,33**	**8,57**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85		72,35		75,75		0		0		0		0		0		0		
		Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85		0		81,00		93		93		93		114,81		93		109,41		
		Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95		0		95,00		0		0		0		0		0		0		
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.766.500		1.285.882		1.455.712		303.046		384.784		687.830	66,67	47,25		687.830	13,33	10,17	
	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		13		12		10		10		10		83,33		10		16,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.766.500		1.239.082		1.332.792		290.566		359.764		650.330	83,33	48,79		650.330	16,67	9,61	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		13		12		10		10		10		83,33		10		16,67		
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		46.800		122.920		12.480		25.020		37.500	50	30,51		37.500	10	0	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.025.000		82.493		89.623		1.150		2.815		3.965	44,44	4,42		3.965	8,89	0,39	
	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Fasilitasi	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Kunjungan Tamu (Laporan)																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000		1.785		1.001		-		-		-	16,67	0		-	10	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		12		1		1		2		16,67		2		10		
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			190.000		38.075		22.342		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			175.000		5.449		2.698		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000		12.766		6.500		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000		8.192		4.500		-		-		-	50	0		-	3,33	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		4		4		1		1		2		50		2		3,33		
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.000		16.226		52.582		1.150		2.815		3.965	50	7,54		3.965	10	0,72	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000		26.962		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000		26.962		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		1		0		0		0		0		0		0		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454.000		71.544		14.510		1.425		2.132		3.556	50	24,51		3.556	10	0,78	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		6.000		2.890		-		500		500	50	17,3		500	10	3,33	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.000		7.024		9.700		1.425		1.530		2.954	50	30,45		2.954	10	2,95	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000		6.020		1.920		-		102		102	50	5,31		102	10	0,68	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			324.000		52.500		-		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		12		4		1		1		2		50		2		10		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150.000		89.887		66.322		4.712		23.378		28.090	225	42,35		28.090	20	18,73	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		1		1		4		4		4		400		4		20		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0		1		0,5		50		0,5		0		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150.000		44.944		46.322		4.712		7.100		11.812	400	25,5		11.812	20	7,87	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		1		1		4		4		4		400		4		20		
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		44.944		20.000		-		16.277		16.277	50	81,39		16.277	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0		1		0,5		50		0,5		0		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3.500.000**		**945.624**		**980.207**		**19.505**		**84.325**		**103.829**	**45,83**	**10,59**		**103.829**	**7,78**	**2,97**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.500.000		945.624		980.207		19.505		84.325		103.829	45,83	10,59		103.829	7,78	2,97	
	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	2500		750		1000		25		225		250		25		250		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)																			
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	350		0		0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Paskibraka (Orang)	375		158		75		25		25		50		66,67		50		13,33		
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			275.000		94.551		62.900		9.752		21.295		31.048	25	49,36		31.048	10	11,29	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	2500		750		1000		25		225		250		25		250		10		
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			100.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	350		0		0		0		0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			3.125.000		851.072		917.307		9.752		63.029		72.782	66,67	7,93		72.782	13,33	2,33	
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	375		158		75		25		25		50		66,67		50		13,33		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**23.865.095**		**962.023**		**958.522**		-		**1.976**		**1.976**	**1**	**0,21**		**1.976**	**0,4**	**0,01**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100		100		100		0		1		1		1		1		1		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			23.865.095		962.023		958.522		-		1.976		1.976	1	0,21		1.976	0,4	0,01	
	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	500		9		200		0		2		2		1		2		0,4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
	Kebangsaan	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)																			
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			23.865.095		962.023		958.522		-		1.976		1.976	1	0,21		1.976	0,4	0,01	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	500		9		200		0		2		2		1		2		0,4		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**75.000**		**-**		**4.150**		**-**		**-**		**-**	**20**	**0**		**-**	**1,23**	**0**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100		100		100		0		50		50		50		50		50		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			75.000		-		4.150		-		-		-	20	0		-	1,23	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	405		0		25		0		5		5		20		5		1,23		
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			75.000		-		4.150		-		-		-	20	0		-	1,23	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	405		0		25		0		5		5		20		5		1,23		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**175.000**		**28.318**		**5.190**		**-**		**-**		**-**	**50**	**0**		**-**	**10**	**0**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100		100		100		0		50		50		50		50		50		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			175.000		28.318		5.190		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		400		100		0		50		50		50		50		10		
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			175.000		28.318		5.190		-		-		-	50	0		-	10	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		400		100		0		50		50		50		50		10		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**2.401.000**		**213.956**		**696.602**		**127.950**		**2.656**		**130.606**	**3,38**	**18,75**		**130.606**	**1,55**	**5,44**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100		100		100		25		25		50		50		50		50		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.401.000		213.956		696.602		127.950		2.656		130.606	3,38	18,75		130.606	1,55	5,44	
	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	17400		350		8000		250		20		270		3,38		270		1,55		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2.401.000		213.956		696.602		127.950		2.656		130.606	3,38	18,75		130.606	1,55	5,44	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	17400		350		8000		250		20		270		3,38		270		1,55		
	JUMLAH			**5.428.131.159**		**765.488.631**		**793.191.700**		**145.664.928**		**140.057.853**		**285.722.780**				**285.722.780**			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 9/6 x 100		11=9		12=11/4*100		13
			K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															174,52	36,02			22,84	5,26	
Predikat kinerja															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja (%)															26,28				22,01		
Predikat kinerja															Sangat Rendah				Sangat Rendah		

Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program RKPD Kabupaten Solok Selatan hingga Triwulan II:

a. Faktor Pendukung

1. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah serta penyediaan dukungan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, koperasi dan UMKM.
4. Tersedianya regulasi, dokumen perencanaan, pedoman teknis, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan oleh capaian indikator pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan inovasi perangkat daerah.
6. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program, kebijakan, serta pendanaan yang membantu percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
7. Penambahan Anggaran yang telah ditindaklanjuti melalui pergeseran APBD

b. Faktor Penghambat

1. Realisasi fisik dan keuangan pada sebagian program masih rendah akibat proses pengadaan barang dan jasa, persiapan administrasi, serta tahapan pelaksanaan kegiatan yang belum selesai pada Triwulan II.
2. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menyebabkan beberapa kegiatan prioritas belum dapat diakomodasi secara optimal sesuai target perencanaan.
3. Masih terdapat ketidaksesuaian antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada APBD.
4. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta distribusi tenaga teknis pada beberapa sektor pelayanan publik.
5. Kondisi geografis wilayah, aksesibilitas antarwilayah, serta jangkauan pelayanan yang cukup luas sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Rendahnya kesadaran atau partisipasi sebagian masyarakat pada beberapa program pembangunan, termasuk legalitas usaha, kewirausahaan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat.
7. Beberapa indikator kinerja bersifat outcome dan baru dapat diukur secara optimal pada akhir tahun setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

c. Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran melalui penguatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala pada seluruh perangkat daerah.
2. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi kegiatan, serta pelaksanaan pekerjaan fisik agar target kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai sesuai jadwal.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

4. Mengoptimalkan pendampingan, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kelompok sasaran program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja maupun alokasi anggaran pada APBD Perubahan terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat tercapai hingga akhir tahun.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur, kualitas tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengendalian pembangunan.
7. Memfokuskan sumber daya dan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator makro daerah dan sasaran RKPD Tahun 2026.

2.2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/kondisi seharusnya atau perbandingan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat atau perbandingan capaian kondisi daerah dibanding dengan daerah sekitarnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan didasari pada kriteria; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak

Berdasarkan hal tersebut permasalahan dikedepakan untuk diidentifikasi dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan daerah dimasa datang. Berdasarkan hal tersebut perumusan permasalahan harus dilakukan secara akurat dengan mempertimbangkan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu dan kebijakan pembangunan global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta potensi daerah yang menjadi modal dasar Pembangunan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka permasalahan Pembangunan Daerah terkait dengan Kondisi Umum Daerah dapat diidentifikasi dari beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 2.29. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

No	Isu Strategis	Rumusan Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat	1) Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan serta kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. 2) Rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan 3) Relatif tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas ke sarana pendidikan. 4) Rendahnya minat baca penduduk 5) Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan.

No	Isu Strategis	Rumusan Permasalahan	Akar Masalah
			6) Belum selarasnya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
		2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 2) Relatif tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas ke sarana pelayanan kesehatan. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatan. 4) Masih rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pola pangan gizi seimbang dalam kehidupan masyarakat 5) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat (air minum, sanitasi, perumahan layak huni, dan persampahan. 6) Masih terdapatnya penduduk yang memiliki jaminan perlindungan sosial.
		3. Rendahnya daya saing tenaga kerja	1) Belum sinerginya pengembangan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. 2) Terbatasnya angkatan kerja memperoleh pelatihan dan mengakses teknologi terbaru. 3) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pelatihan. 4) Budaya merantau masyarakat minangkabau yang menyebabkan sebagian besar penduduk berpendidikan dan mempunyai keahlian cenderung untuk merantau ke daerah lain.
2	Tata Kelola Pemerintahan belum oltimal dan effektif	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan belum optimal	1) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas ASN serta penempatan yang belum sesuai dengan talenta dan kompetensi. 2) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN. 3) Belum optimalnya koordinasi, sinergi serta terkoneksinya pelayanan publik antar perangkat daerah. 4) Belum optimalnya pengelolaan tata kelola pemerintah berdasarkan sistem merit. 5) Belum maksimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemeritahan. 6) Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 7) Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur pemerintahan terhadap pencapaian kinerja.
		2. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah	1) Belum optimalnya identifikasi, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rentribusi. 3) Semakin menyempitnya celah fiskal daerah seiiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur spesisfik penggunaan dana transfer. 4) Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan daerah. 5) Belum sinerginya pendanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, daerah dan nagari), dunia usaha dan masyarakat.

No	Isu Strategis	Rumusan Permasalahan	Akar Masalah
3	Daya Saing dan daya tahan perekonomian rendah	1. Rendahnya daya saing perekonomian	1. Rendahnya investasi dalam sektor ekonomi produktif 2) Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. 3) Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja 4) Tingginya alih fungsi lahan produktif. 5) Rendahnya nilai tambah produk 6) Belum sinerginya kebijakan pengelolaaan sumber daya alam dengan pengembangan hilirisasi produk dan pemasaran produk. 7) Rendahnay pertumbuhan dan kontribusi sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah 8) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta hilirisasi pengelolaan sumber daya alam. 9) Rendahnya daya saing produk-produk yang dihasilkan baik dari sisi kualitas, kemasan maupun nilai ekonomis 10) Terbatasnya wilayah pemasaran produk dan sebagian besar pemasaran produk khusus UMKM masih bersifat tradisional (pasar, toko, supermarket) belum menggunakan teknologi digital. 11) Belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi baik pertanian, perkebunan, peternakan dan industri. 12) Belum optimalnya pariwisata daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. 13) Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur pendukung pengembangan sektor ekonomi dan aksesibilitas.
		2. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	1) Kepemilikan sumber daya ekonomi sebagian besar dimiliki oleh dunia usaha dan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi. 2) Pola aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah yang didapatkan relatif rendah. 3) Daya saing sumber daya manusia penduduk minkin relatif rendah 4) Besarnya jumlah penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau hampir miskin. 5) Belum berkembangya kewirausahaan karena terkendala oleh SDM dan permodalan terutama penduduk miskin dan hampir miskin
4.	Menurunnya Ketahanan Sosial Budaya	1. Degradasi tatanan dan peningkatan permasalahan sosial budaya	1) Efek globalisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan masuknya budaya asing melalui berbagai media informasi, termasuk lewat dunia digital dan media televisi, yang kurang sesuai dan bahkan dapat merusak sendi sendi falsafah luhur ajaran agama, adat dan budaya. 2) Melemahnya nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan budi pekerti seiring dengan memudarnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya. 3) Meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran norma terutama terkait dengan kasus-kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi,

No	Isu Strategis	Rumusan Permasalahan	Akar Masalah
			KDRT, perceraian dan lainnya 4) Menurunnya fungsi dan kewibawaaan kelembagaan adat dan ninik mamak, serta kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan adat tidak tertata secara sistematis. 5) Belum optimalnya perlindungan dan penerapan pengarustamaan gender (pemenuhan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya) dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.
5	Ketersediaaan Infrastruktur Dasar dan Wilayah masih terbatas	1. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	1) Kondisi geografis, topografis daerah yang bergelombang dan berbukit dengan sebagian kawasan perumahan yang tersebar menyebabkan penyediaan infrastruktur membutuhkan penganggaran yang besar serta teknologi yang tinggi. 2) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar terutama terkait dengan akses sanitasi aman, air minum aman perpipaan, rumah tidak layak huni serta infrastruktur kewilayahan, terutama, terkait aksesibilitas dan transportasi, sarana dan prasarana mitigasi dan penangangan bencana 3) Tingginya penurunan kualitas infrastruktur yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan, serta akibat iklim dan bencana 4) Kebijakan pembangunan infrastruktur yang sering mengutamakan pemerataan sehingga pembangunan bertahap-tahap sehingga manfaat yang didapat tidak maksimal. 5) Belum maksimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan
		2. Penurunan kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatnya aktivitas perekonomian dan pembangunan yang kurang mempertimbangkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup seperti, aktivitas pertambangan di sepanjang wilayah aliran sungai, penebangan hutan untuk aktivitas perkebunan dan pembangunan, pembakaran lahan, hingga kepemilikan instalasi pengolahan limbah bagi usaha tertentu. 2) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan daerah ditambah meningkatnya aktivitas ekonomi dan rumah tangga yang mengakibatkan peningkatan volume sampah dan limbah. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menjaga kualitas lingkungan hidup seperti meningkatnya aktivitas buang sampah sembarangan, dan rendahnya pengolahan limbah rumah tangga dan sanitasi masyarakat. 4) Bencana alam yang sering terjadi seperti banjir dan longsor yang mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan hidup

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran faktor-faktor perubahan kondisi makro ekonomi dan kerangka pendanaan yang mempengaruhi dan menjadi dasar terjadinya perubahan dari RKPD Tahun 2026. Perubahan kerangka ekonomi dan pendanaan ini didasari dari realisasi pencapaian kondisi makro dan keuangan tahun 2025 dan proyeksi hingga tahun berjalan tahun 2026.

Untuk indikator makro ekonomi terdiri dari beberapa indikator makro yang mengambarkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta indek pembangunan manusia. Sedangkan untuk keuangan daerah menggambarkan kemampuan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun sebelumnya (realisasi tahun 2025) serta dinamika perekonomian global, nasional, maupun regional yang berkembang berjalan sepanjang tahun anggaran 2026.

Penyesuaian kerangka ekonomi makro ini menjadi basis fundamental dalam merumuskan kembali kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar sasarannya lebih realistis, efektif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara optimal.

Secara umum, arah kebijakan ekonomi dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi daerah yang inklusif. Upaya ini diwujudkan melalui akselerasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi terbaru perkembangan ekonomi, target indikator makro Kabupaten Solok Selatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disepakati untuk dipertahankan sesuai dengan target RKPD Awal 2026. Keputusan mempertahankan target ini diambil guna menjaga konsistensi arah pembangunan jangka menengah (RPJMD) sekaligus memastikan seluruh program strategis tetap berjalan pada koridor pencapaian yang optimis namun terukur.

Berikut adalah narasi capaian dan target dari 6 (enam) indikator utama kerangka ekonomi daerah:

1. **Pertumbuhan Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren pemulihan yang positif, meskipun mengalami perlambatan, di mana realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,65%. Namun menghadapi tahun 2026, stabilitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor jasa dan meningkatnya pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah maka target Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan sebesar 5,56%, yang berarti tetap atau konsisten dengan target pada RKPD Tahun 2026
2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.** PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencerminkan tingkat produktivitas dan gambaran umum pendapatan rata-rata masyarakat. Realisasi PDRB per kapita pada tahun 2025 mencapai Rp 40,99 juta/tahun. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, target PDRB per kapita ditetapkan

sebesar Rp 46,14 juta/tahun. Target ini tetap konsisten dengan target RKPD Tahun 2026.

3. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).** Salah satu capaian progresif Kabupaten Solok Selatan tercermin pada sektor ketenagakerjaan, di mana realisasi Tingkat Pengangguran pada tahun 2025 mampu ditekan hingga menyentuh angka 2,13%. Capaian ini sudah lebih rendah daripada target RKPD Tahun 2025 yaitu 2,22%. Mempertimbangkan fluktuasi angkatan kerja baru, pada Perubahan RKPD Tahun 2026, dengan menyesuaikan proyeksi Provinsi Sumatera Barat target Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebesar 2,07% lebih rendah dari target RKPD Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 2,22% (status target meningkat).
4. **Tingkat Kemiskinan.** Penanggulangan kemiskinan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama intervensi pembangunan. Realisasi tingkat kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,00% Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, target kemiskinan ditargetkan konsisten dengan RKPD Tahun 2026 yaitu sebesar 5,29%.
5. **Indeks Gini (Gini Ratio).** Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Realisasi Indeks Gini pada tahun 2025 berada pada angka yang cukup baik, yaitu 0,256 poin. Namun demikian, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipacu lebih tinggi, Indeks Gini pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 0,312 poin. Kondisi ini tidak terlepas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan di dorong oleh investasi dan usaha menengah dan besar.
6. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM).** Peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Solok Selatan terus memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Realisasi IPM pada tahun 2025 telah mencapai angka 74,01 poin. Kondisi ini didorong oleh peningkatan aspek pemenuhan layanan dasar baik dari sisi kelayakan hidup, akses pendidikan, maupun derajat kesehatan. Dengan kondisi tersebut IPM pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ditargetkan mengalami peningkatan hingga menjadi 74,12 poin.

Tabel 3.1. Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026

No	Indikator	REALISASI 2025	2026			Keterangan Target (Tetap/Naik/ Turun) dari RKPD Awal
			RPJMD	RKPD Awal	RKPD Perubahan	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,65	5,56	5,56	5,56	Tetap
2	PDRB per kapita ADHB (Rp juta/tahun)	40,99	46,16	46,14	46,14	Tetap
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,13	2,22	2,22	2,07	Naik
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,29	5,29	5,29	Tetap
5	Indek Gini (indek)	0,256	0,310	0,310	0,310	tetap
6	Indek Pembangunan Manusia (Indek)	74,01	74,11	74,11	74,12	Naik

Sumber: BPS. RPJMD Kab Solok Selatan 2025-2029, RKPD 2026 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Pada tahun 2026, Kabupaten Solok Selatan dihadapkan kepada tantangan dimana perekonomian tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan fondasi perekonomian daerah memiliki daya tahan peningkatan dengan didukung oleh produktivitas, nilai tambah, pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah, serta keberlanjutan kinerja ekonomi daerah.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok Selatan ke depannya diarahkan pada **Peningkatan produktivitas, hilirisasi dan daya saing ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**, melalui:

1. Penyediaan dan penyempurnaan regulasi
2. Optimalisasi pengelolaan potensi SDA
3. Pengembangan dan diversifikasi produk
4. Penguatan daya saing produk unggulan daerah
5. Penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM dan koperasi
6. Pengembangan pariwisata terintegrasi
7. Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran
8. Pengembangan SDM pelaku ekonomi
9. Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi.
10. Peningkatan dan perbaikan iklim investasi
11. Penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
12. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisector
13. Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan

3.2. PERUBAHAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus. Berdasarkan hal tersebut unsur pertama yang yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yag merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam memproyeksi perencanaan belanja daerah hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah memproyeksikan kemampuan keuangan daerah baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah. Dalam memproyeksikan hal tersebut harus dilakukan berdasarkan perkiraaan yang terukur secara rasional yang didasari perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pencapaian pendapatan tahun berjalan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah mempunyai dasar hukum penerimaannya serta kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan realisasi APBD Tahun 2025, perkembangan realisasi keuangan tahun 2026; perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat Dan Provinsi Sumatera Barat yang

sebahagian sudah ditindaklanjuti melalui APBD Tahun 2026 dan pergeseran APBD tahun 2026 serta kondisi perekonomian daerah pada tahun 2026, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 diproyeksikan target pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

3.2.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama dari pembiyaaan pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembagunan daerah atau sebaliknya. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan dilakukan berdasarkan pada:

1. Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 yang dapat digunakan pada Tahun 2026 yang didasarkan pada Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 33.A/T/LHP/DJPKN-V/PDG/PPD.01/05/2026 dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) tahun 2025.
2. Perubahan pendapatan dana transfer ke daerah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026. Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum. dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara. dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 2026, Nomor 400.10.11/4615/SJ, tentang Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Aspresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Berdasarkan penyesuaian tersebut, total target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 104.929.623.365,- (turun 11,59%) dari alokasi RKPD Murni sebesar 905.314.336.120,- menjadi Rp 800.384.712.755,-

Rincian proyeksi pendapatan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.232.166.134,- atau mengalami peningkatan sebesar 7,29% yaitu dari Rp. 112.928.255.649,- menjadi Rp. 121.160.421.783,-. Rincian kelompok PAD meliputi:

a. Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp.31.154.847.054,- (meningkat 32,19%)
b. Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp.72.662.398.283,- (tidak ada perubahan).
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditetapkan sebesar Rp. 3.275.945.081,- (tidak ada perubahan).
d. Lain-Lain PAD yang Sah ditetapkan sebesar Rp. 14.067.231.365,- (meningkat sebesar 4,81%)).

2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari yang ditargetkan awal pada RKPD Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 113.161.789.499 atau mengalami penurunan sebesar 14,28%, yaitu dari Rp.792.386.080.471,- menjadi Rp. 679.224.290.972,-. Rincian kelompok Perubahan Pendapatan Transfer meliputi:
    1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    Mengalami penurunan sebesar Rp. 103.414.946.650,- (turun 13,83%), dari target awal RKPD murni yaitu sebesar Rp. 747.702.380.650,- menjadi Rp.644.287.434.000,-. Penurunan ini merupakan penyesuaian terhadap PMK No. 29 Tahun 2026, KMK No. 59 Tahun 2026, Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 2026, Nomor 400.10.11/4615/SJ, tentang Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Aspresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera
    2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    Mengalami penurunan sebesar Rp. 9.746.842.849,- (turun 21,81%), dari target awal sebesar Rp. 44.683.699.821,- menjadi Rp. 34.936.856.972,-. Penyesuaian ini menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dialokasikan (Rp.0), sama halnya dengan perencanaan pada RKPD Murni 2026.

3.2.2. Pembiayaan Daerah.

Surplus pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.714.559.037, (meningkat 143,35%) yaitu dari 19.332.955.696,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 47.047.514.733,-. Secara rinci, perkembangan pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp.48.047.514.733,-, meningkat 136,31% dari target RKPD Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar Rp.20.332.955.696. Peningkatan ini merupakan penyesuaian terhadap realisasi SILPA Tahun 2025 berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 33.A/T/LHP/DJPKN-V/PDG/PPD.01/05/2026 dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) tahun 2025.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 direncanakan tidak mengalami perubahan dari proyeksi RKPD tahun 2026 Induk maupun APBD Murni), yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-.

3.2.3. Belanja Daerah.

Secara umum, kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan program-program prioritas daerah, menyesuaikan realokasi anggaran operasional, meningkatkan belanja

modal infastruktur, serta menyelaraskan peningkatan Pendapatan Transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Antar Daerah.

Total proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diestimasikan sebesar Rp. 847.432.227.488,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 77.215.064.328,- (8,35%) dari yang ditargetkan pada RKPD tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 924.647.291.816,-

Secara rinci, perkembangan dan arah kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   Alokasi Belanja Operasi pada Perubahan RKPD 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 639.720.574.155,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 38.377.081.101,- (turun 5,66%) dari pagu RKPD tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 678.097.655.256. Rincian perubahan belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
   - Belanja Pegawai: Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 39.091.187.503 (turun 9,11%), dari Rp. 429.004.520.346,- pada RKPD tahun 2026 menjadi Rp. 389.913.332.843,- pada Perubahan RKPD.
   - Belanja Barang dan Jasa: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.561.608.403,- (naik 1,08%), dari Rp. 236.892.549.932,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 239.454.158.336,- pada Perubahan RKPD.
   - Belanja Hibah: Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 1.867.202.000,- (turun 15,62%), dari Rp. 11.956.384.976,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 10.089.182.976,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
   - Belanja Bantuan Sosial: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.700.000,- (naik 8,07%), dari Rp. 244.200.000,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 263.900.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2. Belanja Modal
   Alokasi Belanja Modal pada Perubahan RKPD 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 113.364.217.129,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 30.001.885.151,- (20,93%) dari pagu RKPD tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 143.366.102.280. Rincian perubahan belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:
   - Belanja Modal Tanah: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.255.156.768,- (naik 67,75%), dari Rp. 1.852.625.000,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 3.107.781.768,,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.578.086.374,- (98,63%), dari Rp. 13.766.405.266 ,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 27.344.491.640,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
   - Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 18.297.976.742,- (turun 41,75%), dari Rp. 43.828.159.610,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 25.530.182.868,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
   - Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 28.387.539.247,- (turun 34,63%), dari Rp. 81.976.282.000,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 53.588.742.753,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
   - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.430.387.696,- (73,63%), dari Rp. 1.942.630.404,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 3.373.018.100,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
   - Belanja Modal Aset Lainnya: Mengalami peningkatan sebesar Rp. 420.000.000,-, dari Rp. 0,- pada RKPD Tahun 2026.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp.900.000.000,-, atau mengalami penyesuaian sebsar Rp.100.000.000,- (turun 10%) dari anggaran pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

4. Belanja Transfer Keuangan

   Belanja Transfer Keuangan diproyeksikan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 8.736.098.076,-(turun 8,55%), dari semula Rp. 102.183.534.280,- pada RKPD Murni menjadi Rp.93.447.436.204,- pada Perubahan RKPD. Penyesuaian ini terdiri dari:

   - Belanja Bagi Hasil: Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 3.709.090,- (turun 0,15%) dari Rp. 2.338.464.180,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 2.334.755.090,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026
   - Belanja Bantuan Keuangan: Mengalami penyesuaian sebesar Rp. 8.732.388.986,- (turun 8,75%) dari Rp. 99.845.070.100,- pada RKPD Tahun 2026 menjadi Rp. 91.112.681.114,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Gambaran Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026

KODE	URAIAN	2025		TAHUN 2026		PERUBAHAN TAHUN 2026	Penambahan/ Pengurangan dari RKPD 2026
		TARGET	REALISASI	RKPD 2026	APBD 2026		
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**120.843.655.335**	**115.720.637.333**	**112.928.255.649**	**112.928.255.649**	**121.160.421.783**	**8.232.166.134**
4.1.01	Pajak Daerah	26.808.113.517	31.154.847.054	23.568.712.075	23.568.712.075	31.154.847.054	7.586.134.979
4.1.02	Retribusi Daerah	76.337.266.238	67.222.613.833	72.662.398.283	72.662.398.283	72.662.398.283	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.275.945.081	3.275.945.081	3.275.945.081	3.275.945.081	3.275.945.081	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.422.330.499	14.067.231.365	13.421.200.210	13.421.200.210	14.067.231.365	646.031.155
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**721.813.072.082**	**721.995.444.744**	**792.386.080.471**	**616.518.709.972**	**679.224.290.972**	**-113.161.789.499**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**665.840.034.000**	**666.277.102.553**	**747.702.380.650**	**581.581.853.000**	**644.287.434.000**	**-103.414.946.650**
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	52.692.333.000	49.291.175.100	52.176.949.650	23.416.172.000	38.091.990.000	-14.084.959.650
	Dana Alokasi Umum	348.474.993.000	360.664.762.556	348.474.993.000	392.843.377.000	437.143.140.000	88.668.147.000
	Dana Alokasi Umum Diperuntukkan	74.027.766.000	70.610.501.134	132.841.952.000	10.812.951.000	10.812.951.000	-122.029.001.000
	Dana Alokasi Khusus	140.249.948.000	136.329.034.539	163.813.492.000	117.637.816.000	118.367.816.000	-45.445.676.000
	Dana Insentif Daerah	7.294.478.000	7.294.478.000	7.294.478.000		3.000.000.000	-4.294.478.000
	Dana Desa	43.100.516.000	42.087.151.224	43.100.516.000	36.871.537.000	36.871.537.000	-6.228.979.000
							-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**55.973.038.082**	**55.718.342.191**	**44.683.699.821**	**34.936.856.972**	**34.936.856.972**	**-9.746.842.849**
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	55.973.038.082	55.718.342.191	44.683.699.821	34.936.856.972	34.936.856.972	-9.746.842.849
	Bantuan Keuangan						-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**4.963.909.350**	**-**			-
	Jumlah Pendapatan	**842.656.727.417**	**842.679.991.427**	**905.314.336.120**	**729.446.965.621**	**800.384.712.755**	**-104.929.623.365**
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**667.010.290.375**	**630.414.207.327**	**678.097.655.256**	**625.181.466.771**	**639.720.574.155**	**-38.377.081.101**
5.1.01	Belanja Pegawai	406.037.511.438	394.858.882.902	429.004.520.346	398.495.471.450	389.913.332.843	-39.091.187.503
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.710.735.961	225.420.668.559	236.892.549.932	216.613.410.345	239.454.158.336	2.561.608.403
5.1.05	Belanja Hibah	10.043.742.976	9.933.464.186	11.956.384.976	9.865.384.976	10.089.182.976	-1.867.202.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	218.300.000	201.191.680	244.200.000	207.200.000	263.900.000	19.700.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**104.191.110.665**	**96.537.070.376**	**143.366.102.280**	**63.695.852.708**	**113.364.217.129**	**-30.001.885.151**

KODE	URAIAN	2025		TAHUN 2026		PERUBAHAN TAHUN 2026	Penambahan/ Pengurangan dari RKPD 2026
		TARGET	REALISASI	RKPD 2026	APBD 2026		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	324.169.456	27.723.456	1.852.625.000	1.358.825.000	3.107.781.768	1.255.156.768
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.317.079.722	16.717.305.980	13.766.405.266	15.727.027.579	27.344.491.640	13.578.086.374
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.432.739.054	49.710.887.687	43.828.159.610	14.510.301.200	25.530.182.868	-18.297.976.742
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.953.787.885	26.969.542.405	81.976.282.000	30.357.068.525	53.588.742.753	-28.387.539.247
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.163.334.548	3.111.610.848	1.942.630.404	1.742.630.404	3.373.018.100	1.430.387.696
	Belanja Modal Aset Lainnya					420.000.000	420.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**250.000.000**	**151.901.784**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**900.000.000**	**-100.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	250.000.000	151.901.784	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	-100.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**93.276.363.522**	**89.640.305.809**	**102.183.534.280**	**85.884.078.250**	**93.447.436.204**	**-8.736.098.076**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.862.712.022	610.019.087	2.338.464.180	2.534.755.236	2.334.755.090	-3.709.090
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	90.413.651.500	89.030.286.722	99.845.070.100	83.349.323.014	91.112.681.114	-8.732.388.986
	Jumlah Belanja	**864.727.764.562**	**816.743.485.295**	**924.647.291.816**	**775.761.397.729**	**847.432.227.488**	**-77.215.064.328**
	Total Surplus/(Defisit)	**-22.071.037.145**	**25.936.506.132**	**- 19.332.955.696**	**-46.314.432.108**	**-47.047.514.733**	**-27.714.559.038**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**22.071.037.145**	**22.110.996.033**	**20.332.955.696**	**47.314.432.108**	**48.047.514.733**	**27.714.559.037**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.071.037.145	22.110.996.033	20.332.955.696	47.314.432.108	48.047.514.733	27.714.559.037
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	-	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	**22.071.037.145**	**22.110.996.033**	**19.332.955.696**	**46.314.432.108**	**47.047.514.733**	**27.714.559.037**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	**0**	**48.047.502.164**	**0**	**0**	**0**	**-0**
	TOTAL APBD	**864.727.764.562**	**816.743.485.295**	**925.647.291.816**	**776.761.397.729**	**848.432.227.488**	**-77.215.064.328**

Sumber : Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) tahun 2025 dan Hasil Analisis TAPD 2026

Berdasarkan hal diatas secara umum Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut

A. Pendapatan Daerah

1) Penguatan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi terutama terkait dengan digitalisasi objek pendapatan daerah dan kemudahan serta peningkatan layanan
2) Peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui 0ptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi dan pembaruan data objek pajak dan wajib pajak, baik penerimaan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang berasal dari opsen pajak.
3) Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum, tarif dan mekanisme prosedur penerimaan pendapatan daerah.
4) Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap efektifitas pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melunasi kewajibannya.
5) Memberikan reward dan punishment terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku
6) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak dan retribusi daerah, terutama dari pengelolaan kekayaan alam dan pendapatan lain yang sah
7) Mengoptimalisasi pengunaaan aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
8) Meningkatkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil dan BUMD dalam pelayanan guna pencapaian pendapatan daerah.
9) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.

B. Belanja Daerah

1) Pemenuhan belanja wajib mengikat, operasional rutin dan kegiatan dialokasikan secara proporsional dan cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditunda seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran, serta belanja bagi hasil dan belanja transfer ke pihak ketiga, dan belanja modal, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
2) Untuk belanja daerah yang terikat pengunaanya seperti DAK, BOS, BKK, dll dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3) Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian, target kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan, dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan pemberlakuan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

4) Pemenuhan belanja daerah transfer keuangan yang bersifat mengikat dan ditentukan penggunaannya *(earkmar*k) dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani dan mendukung pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
5) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah dan Alokasi belanja lainnya yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penggunaanya tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan pencapaian Standar Pelayaan Minimal (SPM)
6) Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dan provinsi setiap tahunnya serta pemenuhan belanja yang sifatnya *mandatory* sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
7) Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaanya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan

C. Pembiayaan Daerah

Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, serta melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun 2026, serta mengoptimal penggunaan dan kemamfaatan penyertaan modal pemerintah, baik untuk penunjang pendapatan daerah maupun menunjang kemampuan perusahaan daerah dalam peningkatan layanannya.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi rumusan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN); Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2026 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2026 Triwulan II terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.

4.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional.

Gambar 4.1.
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber : RKP 2026

Tema tersebut didukung melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional dan 5 (lima) arahan direktif presiden. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 memastikan keberlanjutan Pembangunan sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden RI yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan, melalui (i)

penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

a. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan

Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui (i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.

b. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan

1) Ekonomi Syariah

Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah.

2) Ekonomi Digital

Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

3) Ekonomi Biru

Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.

c. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

Memperluas pelaksanaan transformasi ekonomi hijau yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan

Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas, arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
b. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.
c. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
d. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
e. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

a. Pendidikan Berkualitas yang Merata
   Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.
b. Kesehatan untuk Semua
   Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
c. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
   Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.
d. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan

produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga.

e. Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat
Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

b. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.

b. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.

c. Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

d. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional
   Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.
b. Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani
   Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.
c. Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
   Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
d. Tata Kelola BUMN yang Baik
   Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN.
e. Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal
   Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
f. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil
   Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di atas, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
b. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Selain itu terdapat 5 (lima)Program Strategis Nasional (Pro SN) yang merupakan program Direktif Presiden sebagai berikut :

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah tetuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah **"Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan"**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang menjadi kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026-2030. Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran daerah dimana sasaran tersebut menjadi prioiritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada periode 2026-2030. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Bagian Barat	berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur
Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
		Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **"Gerak Cepat Sumbar Unggul : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Pembangunan Sumber daya manusia dengan mewujudkan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan; penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta tidak mampu; pemerataan akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivits pelayanan Kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular serta penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Mesjid serta pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **"Gerak Cepat Sumbar Sejahtera : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengalokasikan anggaran 10% APBD pada sektor untuk peningkatan produksi, pertanian hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani; pendayagunaan perhutanan sosial, untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan; mengutamakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (circular economy)

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **"Gerak Cepat Sumbar Berdaya : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi

makro dan pengangguran dengan mengaktivasi pusat kreatifitas Nagari (Nagari Crative Hub), untuk mendorong inovasi dan wira usaha di Nagari melalui Internet Gratis, Aktivasi Medan Nan bapaneh, Suduik UMKM dan Teras Nagari; mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat pada nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata; menyediakan sarana dan prasarana aktivitas generasi muda melalui organisasi kepemudaan; serta menfasilitasi dan mendorong Bum-Nag menjadi penggerak ekonomi nagari.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **"Gerak Cepat Sumbar Maju : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat; mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor; memfasilitasi pengembangan UMKM dan sentra produksi berbasis digital; akselerasi capaian program Milinial dan Women Entreprenur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan fasilitasi sertifikasi kompetensi/ keahlian

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Gerak Cepat Sumbar Kuat : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan melakukan percepatan Penyelesaian dan Pembangunan Infrastruktur Strategis; pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Percepatan Rehab dan Rekon Infrastruktur Pasca Bencana serta mewujudkan Nagari/Desa tangguh bencana.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **"Gerak Cepat Sumbar Harmonis : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Perhatian terhadap karakter generasi muda dengan melakukan pencegahan Penyakit Masyarakat berbasis Keluarga, Kaum dan Nagari; menjadikan Kawasan Mesjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi sebagai pusat pembinaan ABS-SBK; perkuatan Pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal; meningkatkan ketahanan keluarga, Perempuan dan perlindungan anak pendampingan dan fasilitasi pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya serta penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK, Pengembangan Ekonomi Syariah : Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **"Gerak Cepat Sumbar Kreatif : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan melakkan pengembangan Destinasi Wisata berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE (Clean/Bersih, Health/Sehat, Safety/Aman dan Enviroment/ Keberlanjutan Lingkungan); penguatan Potensi Wisata Halal; digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan; penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sertifikasi kompetensi serta menjadikan Sumbar sebagai Pusat MICE wilayah barat Indonesia.

Tujuan dan sasaran Misi Delapan, **"Gerak Cepat Sumbar Responsif : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif"** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan melakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan berbasis aspirasi; menjadi Birokrasi Terbuka dan Tempat Pembelajaran Bagi Mahasiswa/Siswa (Program Magang dan Menyediakan Co-working Space) serta konsultasi di semua perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:

"Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Arah pembangunan Sumatera Barat difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan dunia kerja, serta kesehatan yang menekankan upaya promotif dan preventif di samping kuratif. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar target statistik, tetapi juga membentuk masyarakat yang tangguh, sehat, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam menghadapi perubahan global.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
b. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
c. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
d. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
e. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialistik seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
f. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkotika/psikotropika.
h. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan melalui transformasi pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pasar. Upaya ini ditempuh dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi, serta penerapan prinsip ekonomi hijau. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, dan masyarakat adat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
b. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
c. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
d. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
e. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
g. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
h. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan,

gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

3. Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Pembangunan nagari dilakukan secara integratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Nagari diarahkan menjadi "basis kemajuan" yang mandiri secara ekonomi, kuat kelembagaannya, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Pembangunan desa/nagari diposisikan setara dengan pembangunan kota, dimana kota sebagai pusat jasa dan teknologi, sedangkan nagari sebagai pusat produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Sehingga pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif "desa maju" atau "desa mandiri".

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
b. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
c. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
d. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
e. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.
f. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
g. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasi, demgan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.
h. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan

berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mentransformasi struktur ekonomi menjadi lebih produktif, berorientasi ekspor, berbasis inovasi, serta mampu menyerap tenaga kerja luas. Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan barat Sumatera, perannya dalam rantai pasok nasional dan regional akan semakin kuat. Transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas, dengan pemerintah provinsi berperan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
b. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
c. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
d. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
e. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
f. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
g. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri

dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.

h. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau “Minang Halal Hub” di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.

5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat mitigasi bencana, mendorong efisiensi energi, serta menjamin akses yang adil bagi seluruh wilayah dengan prinsip no one left behind. Infrastruktur diposisikan sebagai instrumen transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis melalui pembangunan yang inklusif, tangguh bencana, serta ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur akan menjadi fondasi Sumatera Barat yang maju, aman, dan berdaya saing global.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.
b. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
c. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
d. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
e. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
f. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.

g. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
h. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lain Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

Pembangunan diarahkan pada penguatan kembali nilai budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga harmoni masyarakat, sekaligus memperkokoh peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan sosial. Pembangunan Sumatera Barat bukan hanya fisik dan ekonomi, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan jiwa masyarakatnya. Melalui kolaborasi semua elemen, Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan bermartabat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026, difokuskan pada :

a. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
b. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
c. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program “Masjid Ramah Anak dan Remaja” serta “Surau Digital” akan menjadi inovasi ke depan.
d. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program “Sekolah Orang Tua,” konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
e. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
f. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.

g. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
h. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

7. Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk menjadi motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini menekankan integrasi dengan UMKM, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi berperan sebagai katalisator transformasi, sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan memperkuat identitas Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan nasional dan global.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
b. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisataan Berbasis Kompetensi dan Keramahtamahan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program “Hospitality for Nagari Tourism” akan dilaksanakan di desa wisata.
c. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.
d. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
e. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
f. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain

grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.

g. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
h. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.
b. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.
c. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan Public Service Super App yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.
d. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
e. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, whistleblower system, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama

dengan KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.

f. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
g. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan data-driven planning, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
h. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum tergali, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.
i. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.
j. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
k. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara Kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.
l. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Solok Selatan, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 dan proyeksi kinerja pembangunan tahun 2025, kerangka ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP serta RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026,

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi makro daerah serta pencapaian kinerja daerah tahun 2024 dan proyeksi pencapaian kinerja daerah tahun 2025 terhadap pencapaian RPJMD tahun 2025-2029 terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara lain:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ketahanan Sosial Budaya**

   Permasalahan utama dari Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Solok Selatan adalah:
   1. Rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat
   2. Rendahnya literasi digital masyarakat
   3. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
   4. Rendahnya daya saing tenaga kerja
   5. Menurunnya penerapan nilai-nilai luhur adat, budaya dan agama.
   6. Penurunan karakter terutama generasi muda sebagai penerus kepemimpinan
   7. Belum maksimal perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
2. **Optimalisasi Pembangunan dan Nilai Tambah Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

   Permasalahan utama sebagai berikut:
   1. Pertumbuhan ekonomi rendah
   2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
   3. Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi masih rendah
   4. Perekonomian masih ditopang oleh pengelolaan SDA serta belum terciptanya ekosistem hilirisasi pengelolaan sumber daya
   5. Rendahnya daya saing produk
   6. Sektor pariwisata belum berkembang optimal
   7. Inovasi dan ekonomi digital belum berkembang optimal
   8. Investasi sektor ekonomi rendah
3. **Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah**

   Permasalahan utama sebagai berikut:
   1. Ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang masih rendah
   2. Ketimpangan pembangunan antar wilayah
   3. Penyebaran kawasan pertumbuhan dan pemukiman yang tidak dan terencana
   4. Penurunan kualitas lingkungan hidup
   5. Potensi bencana tinggi
   6. Pembiayaan pembangunan terbatas
4. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**

   Permasalahan utama sebagai berikut:
   1. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
   2. Penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas yang rendah
   3. Ketersediaan dan kompetensi aparatur rendah
   4. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi pada aktivitas dan pelayanan pemerintah
   5. Perubahan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui RKPD Tahun 2026, tema pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun adalah: **"Perkuatan Fondasi Sektor Unggulan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema di atas maka prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 adalah:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif**

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan kompetitif di Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah guna mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan

budaya secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki integritas, etos kerja tinggi, serta daya saing yang relevan dengan kebutuhan era digital dan industri 4.0 menuju 5.0.

Tabel 4.2. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif Tahun 2026

Uraian	Indikator	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
PRIORITAS 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF					
Tujuan. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indek**	74,11	74,11	74,12
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka Rata –Rata Lama Sekolah	Tahun	8,9	8,9	8,90
	2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,33	13,33
	3. Angka Partisipasi Penduduk usia 7-12 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz	Persen	18,46	18,46	18,46
Sasaran 2. Meningkatnya derajat kesehatan	4. Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,20	73,20	73,21
Sasaran 3. Meningkatnya daya saing penduduk	5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,12	77,12	77,12
	6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)	Rp. milyar	82,84	82,84	82,84

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang teintegrasi dengan pendidikan berkarakter, melalui:
   a. Peningkatan akses layanan pendidikan
   b. Peningkatan mutu pembelajaran
   c. Peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
   d. Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan keagamaan
   e. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai dan berbasis teknologi
   f. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor
   g. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal
2. Peningkatan kualitas kesehatan dan akses layanan kesehatan Inklusif, melalui:
   a. Penguatan dan optimalisasi upaya promotif dan preventif
   b. Mengoptimalkan layanan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC)
   c. Pengembangan kemitraan multisektor
   d. Penerapan pola konsumsi pangan sehat dan bergizi
   e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta perluasan dan optimalisasi penciptaan lapangan kerja, melalui :
   a. Pengembangan sektor-sektor strategis
   b. Peningkatan SDM tenaga kerja

c. Pengembangan dan penumbuhan wirausaha
d. Kolaborasi dan sinergi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi
e. Fasilitasi penempatan tenaga kerja

2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah

Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah di Kabupaten Solok Selatan merupakan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan sektor unggulan berbasis potensi daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing Solok Selatan di tingkat regional maupun nasional.

Tabel 4.3. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah Tahun 2026

Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
PRIORITAS 2. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH					
Tujuan. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,56	5,56	5,56
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,22	2,22	2,07
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,29	5,29	5,29
	Indeks Gini	Indeks	0,310	0,310	0,310
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum)	Persen	5,13	5,13	5,13
	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,35	3,35	3,35
	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,43	3,43	3,43

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Adapun kebijakan pada prioritas peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah difokuskan pada peningkatan produktifitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan sumber daya alam, melalui:

a. Penyediaan dan penyempurnaan regulasi
b. Peningkatan investasi ekonomi
c. Optimalisasi pengelolaan potensi SDA
d. Pengembangan dan diversifikasi produk
e. Penguatan daya saing produk unggulan daerah
f. Penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM dan koperasi
g. Pengembangan pariwisata terintegrasi
h. Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran
i. Pengembangan SDM pelaku ekonomi
j. Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi.
k. Peningkatan dan perbaikan iklim investasi
l. Penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
m. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor
n. Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani di Kabupaten Solok Selatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya menjamin efektivitas birokrasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Tabel 4.4. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
PRIORITAS 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI					
Tujuan. Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**75,83**	**75,83**	**75,83**
Sasaran 1. Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani	1. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,846	57,846	57,846
	2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	2,92	2,92	2,92
	3. Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio	22,2	22,2	22,2
	4. Nilai SAKIP	Nilai	69,2	69,2	69,2
	5. Indeks Transformasi Digital	Indeks	53	53	53,0
	6. Survey Penilaian Integritas	Persen	80.60	80.60	80.60
	7. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	8. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,05	4,05	4,05

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, efektif dan adaptif sebagai berikut:

a. Pemenuhan dan penguatan regulasi dan kebijakan yang selaras serta transparan
b. Pengembangan layanan publik yang prima dan responsif
c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan yang terintegrasi.
d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional.
e. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset serta kemandirian fiskal daerah
f. Penguatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah
g. Penguatan penyelenggaraan kinerja pemerintah yang akuntabel dan inovatif
h. Peningkatan kerja sama pemerintah dengan stakeholder
i. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintahan

4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana

Pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup, dan mitigasi bencana di Kabupaten Solok Selatan merupakan strategi terpadu dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana. Upaya ini menjadi krusial mengingat kondisi geografis Solok Selatan yang rawan bencana serta memiliki kekayaan alam dan potensi kawasan pertumbuhan yang perlu dikelola secara bijak.

Tabel 4.5. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana Tahun 2026

Uraian	Indikator	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
PRIORITAS 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA					
Tujuan. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Persen**	**71,71**	**71,71**	**71,71**
	Indeks Risiko Bencana	**Persen**	**123,16**	**123,16**	**123,16**
Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan	1. Indek Infrastruktur Wilayah	Indeks	63,31	63,31	63,31
	2. Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	77,31	77,31	77,31
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	3. Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	79,17	79,17	79,17
	4. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,43	0,43	0,43

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui :
   a. Pengembangan dan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan
   b. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat
   c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang mempunyai daya ungkit terhadap ekonomi daerah.
   d. Peningkatan kolaborasi pembangunan multi pihak pemerintah-pemerintah, pemerintah-dunia usaha, pemerintah-organisasi rantau.
   e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui program pemberdayaan.
   f. Membangun infrastruktur hijau yang ramah lingkungan
2. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
   a. Penguatan dan pemanfaatan ketahanan ekologi daerah
   b. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup
   c. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan penanganan bencana
   d. Optimalisasi penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam pengelolaan persampahan
   e. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana
   f. Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pengembangan kawasan tangguh bencana, tanggap bencana terhadap perubahan iklim)
   g. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

5. Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya

Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya di Kabupaten Solok Selatan merupakan upaya strategis untuk memperkuat jati diri masyarakat, memperkokoh harmoni sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Ketahanan sosial dan

budaya menjadi sangat penting di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan tantangan sosial yang kian kompleks.

Tabel 4.6. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya Tahun 2026

Uraian	Indikator	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
PRIORITAS 5. PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA					
Tujuan. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	**Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah**	**Indeks**	**67,43**	**69,05**	**67,43**
Sasaran 1. Meningkatnya ketahanan budaya daerah	1. Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	78,15	78,15	78,15
Sasaran 2. Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat	2. Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,3	63,3	63,3
	3. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	52,00	52,00	52,00
	4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		55,00	55,00	55,00
	5. Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,803	0,804	0,803
	6. Indek Perlindungan Anak	Indeks	62,00	69,936	62,00
	7. Indeks Pemuda Hebat	Rasio	78,66	78,66	78,66

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan peningkatan ketahanan sosial dan budaya pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Penguatan ketahanan budaya daerah, melalui:
   a. Pemberdayaan dan penguatan lembaga budaya daerah
   b. Pelestarian serta pengelolaan warisan budaya dan kearifan lokal
   c. Pengembangan seni kreatif berbasis kearifan lokal
   d. Sinergitas keterlibatan aktif multisektor dalam pelestarian dan literasi budaya
   e. Penguatan seni budaya daerah dalam kurikulum muatan lokal
2. Penguatan ketahanan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui:
   a. Penguatan peran keluarga dalam ketahanan sosial.
   b. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas.
   c. Penguatan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial.
   d. Penguatan mitigasi konflik sosial.
   e. Penguatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
   f. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran kunatitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di berbagai sektor. Keberadaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi instrumen dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah, menjadi bahan evaluasi kinerja dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan kinerja tahunan daerah harus terintegrasi dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD, sertah harus disinergikan dengan kinerja penyelenggaraan provinsi dan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2026 pemerintah daerah menyempurnakan target kinerja pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
I	**ASPEK ADMINISTRASI, GEOGRAFI, DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,23	86,23	86,23
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/ perkapita	454,20	454,2	455
3	Kapasitas Air baku (terpasang)	m3/detik	0,35	0,35	0,35
4	Indeks Kualiltas Lingkungan Hidup	Indeks	79,17	79,17	79,17
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,02	122,02	122,02
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,76	1,76	1,76
7	Rasio Penduduk (sex ratio)	Persen	103,06	103,06	103,06
8	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	61,55	61,55	61,55
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,56	5,56	5,56
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,29	5,29	5,29
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	10.676	10.676	10.676
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta	11.582	11.582	11.582
5	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	46,14	46,14	46,14
6	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	24,94	24,94	24,94
7	Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB)	Rp Juta	81,4	81,4	81,4
8	Tingkat Pengangguran	Persen	2,22	2,22	**2,07**
9	Indeks Gini	Indeks	0,310	0,31	0,310
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,11	74,11	**74,12**
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,12	73,12	**73,21**
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,90	8,9	8,90
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,33	13,33
14	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	10,12	10,12	10,12
15	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	73,32	73,32	73,32
16	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen	26,7	26,7	26,7
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,72	69,72	69,72
18	Indeks Literasi Digital	Indeks	65,60	65,6	65,60
19	Persentase Nagari yang telah menerapkan moderasi agama	Persen	35,9	35,9	35,9
20	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,67	0,67	0,67
21	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Indeks	67,43	69,05	67,43
22	Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	78,15	78,15	78,15
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62.00	70,12	**69,936**
24	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,30	63,3	63,30
25	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,804	0,804	0,804
26	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,07	96,07	96,07
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	52	52	52
28	Indeks Pemuda Hebat	Indeks	78,66	78,66	78,66
29	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	52	94	52
30	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/provinsi (Unit)	Unit Layanan	-	-	1
31	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)	Orang	-	-	313
III	**ASPEK DAYA SAING**				
1	Angka Ketergantungan	per 100 penduduk	46,78	46,78	46,78
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,35	5,35	5,35
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,99	0,99	0,99
4	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	Orang	507	507	507
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)	Persen	1,49	1,49	1,49
6	Proporsi jumlah UKM	Persen	1,51	1,51	1,51

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
7	Proposi jumlah IKM	Persen	3,51	3,51	3,51
8	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,15	3,15	3,15
9	Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	1,16	1,16	1,16
10	Rasio Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	22,10	22,1	22,10
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,12	77,12	77,12
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67,02	67,02	67,02
13	Rasio Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	26,56	26,56	26,56
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	50,84	50,84	50,84
15	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	1,12	1,12	1,12
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,38	28,38	28,38
17	Rasio Ekspor Barang dan Jasa	Persen	1,91	1,91	1,91
18	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	71,71	71,71	71,71
19	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	63,31	63,31	63,31
20	Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	77,31	77,31	77,31
21	Rasio Konektivitas	Rasio	0,60	0,6	0,60
22	Jumlah Kawasan kumuh	Kawasan	13	13	13
23	Persentase Desa Mandiri	Persen	7,30	7,3	7,30
24	Rasio Pajak terhadap PDRB	Persen	0,23	0,23	0,23
25	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	1,93	1,93	1,93
26	Koefisien Harga tahunan (Barang Pangan)	Persen	8,55	8,55	8,55
27	Rasio Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB	Persen	13,09	13,09	13,09
28	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp/orang	260.447	260.447	260.447
29	Rasio Total Kredit terhadap PDRB	Persen	16,52	16,52	16,52
30	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	Persen	0,793	0,793	0,793
IV	**ASPEK LAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,83	75,83	75,83
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	2,920	2,92	2,920
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,80	72,8	72,80
4	Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	53	53	53
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,06	4,06	4,06
6	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	80,60	80,6	80,60
7	Rasio Kemandirian Fiskal	Nilai	17,00	17	17,00
8	Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	WTP
9	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persen	81	81	81
10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persen	3.76	3.76	3,76
11	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada/ Pilwana)	Persen	90	90	90
12	Angka Kriminalitas	per 10,000 penduduk	8,90	8,9	8,90
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	55,00	55	55,00
14	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	92,12	92,12	92,12
15	Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
16	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,43	3,43	3,43
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,85	57,85	57,85
V	**KINERJA KUNCI URUSAN PEMERINTAHAN**				
A	**Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				
1.	**Pendidikan**				
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	100	100	100
	Persentase anak usia 5-6 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Usia Dini	Persen	66,45	66,45	66,45
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	37,47	37,47	37,47
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Literasi (SD/SMP)	Persen	78,64	78,64	78,64
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Numerasi (SD/SMP)	Persen	75,83	75,83	75,83
	Skor Literasi SD/MI	Nilai	68,65	68,65	68,65
	Skor Literasi SMP/MTs	Nilai	74,79	74,79	74,79

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	Skor Numerasi SD/MI	Nilai	61,26	61,26	61,26
	Skor Numerasi SMP/MTs	Nilai	64,99	64,99	64,99
2.	**Kesehatan**				
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 penduduk	94,00	94	94,00
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 penduduk	11,63	11,63	11,63
	Angka Kematian Bayi (AKBA)	per 1.000 penduduk	13,80	13,8	13,80
	Prevalensi Stunting	Persen	11,55	11,55	11,55
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	70,60	70,6	70,60
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	97,00	97	97,00
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional	Persen	99,10	99,1	99,90
	Angka Kesakitan Penduduk	Persen	18	18	18
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,32	0,32	0,32
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,089	0,089	0,089
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,00	89	89,00
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Persen	60,46	60,46	60,46
	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Wilayah Bidang Perkerjaan Umum	Persen	51,55	51,55	51,55
	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Dasar Bidang Perkejaan Umum	Persen	66,41	66,41	66,41
	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan	Persen	30,50	30,5	30,50
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	86,60	86,6	86,60
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	8,43	8,43	8,43
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (sanitasi layak)	Persen	63	63	63
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	Persen	55,00	55	55,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	28,09	28,09	28,09
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	92,80	92,8	92,80
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	54,50	54,5	54,50
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	29,00	29	29,00
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100	100,00
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,57	2,57	2,57
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau,dan Berkelanjutan	Persen	51,07	51,07	51,07
	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	42,86	42,86	42,86
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	52,00	52	52,00
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Persen	100	100	100
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100
	Rata-Rata Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	13,64	13,64	13,64
	Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	92	92	92
	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,43	0,43	0,43
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,25	0,25	0,25
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100
6	**Urusan Sosial**				
	Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai	42,64	42,64	42,64
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Nilai	62,37	62,37	62,37
	Indeks Peranan Sosial	Nilai	53,68	53,68	53,68
	Indeks Kebutuhan Dasar	Nilai	61	61	61
	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Nilai	44	44	44
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				
1	**Urusan Ketenagakerjaan**				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	0	100
	Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas (Sektor pertanian, industri pengolahan, akomodasi makan minum dan jasa lainnya)	Rp. Juta	24,41	24,41	24,41
	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	38,07	38,07	38,07
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	30,86	30,86	30,86

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	Persen	39,63	39,63	39,63
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	20,00	20	20,00
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat**				
	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	53,78	53,78	53,78
	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Nilai	77,2	77,2	77,2
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	9,10	9,1	9,10
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Persen	8,34	8,34	8,34
3	**Urusan Pangan**				
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	Persen	6,70	6,7	6,70
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	142,9	142,9	142,9
4	**Urusan Pertanahan**				
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Nilai	0,72	0,72	0,72
	Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	100,00	100	100,00
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100,00	100	100,00
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100,00	100	100,00
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam Indeks penanaman modal	Persen	100,00	100	100,00
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100,00	100	100,00
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100,00	100	100,00
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100	100,00
5	**Urusan Lingkungan Hidup**				
	Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai	79,24	79,24	79,24
	Indeks kualitas air (IKA)	Nilai	76,3	76,3	76,3
	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Nilai	83,92	83,92	83,92
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	29,65	29,65	**37,20**
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	32,81	32,81	**41,81**
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	62,46	62,46	62,46
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	82,25	82,25	82,25
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	18,5	18,5	18,5
	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,40	99,4	99,40
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang m emiliki KIA	Persen	68,00	68	68,00
	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100	100,00
	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100,00	100	100,00
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,81	0,81	0,81

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif	Persen	80,50	80,5	80,50
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100	100,00
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	51,28	51,28	51,28
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
	Indeks Kualitas Keluarga	Nilai	78,23	78,23	78,23
	TFR (Indeks Kelahiran Total)	Persen	2,42	2,42	2,42
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,90	69,9	69,90
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,80	9,8	9,80
9	**Urusan Perhubungan**				
	Kinerja lalu lintas	Nilai	0,33	0,33	0,33
10	**Urusan Komunikasi dan Informasi**				
	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	Nilai	3,3	3,3	3,3
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,08	3,08	3,30
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100	100,00
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	90,90	90,9	90,90
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100	100,00
	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks			1,6
11	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**				
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Persen	1,80	1,8	1,80
	Rasio koperasi berkualitas	Persen	15,75	15,75	15,75
	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	15,00	15	15,00
12	**Urusan Penanaman Modal**				
	Pertumbuhan Investasi	Persen	25	50	25
13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,76	3,76	3,76
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	2,25	2,25	2,25
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	2,00	2	2,00
14	**Urusan Statistik**				
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,50	2,50	2,50
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100
15	**Urusan Persandian**				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	31	31	31
16	**Urusan Kebudayaan**				
	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	Persen	80,50	80,5	80,50
	Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi	Persen	72,72	72,72	72,72
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional	Persen	60,00	60	60,00
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100	100,00
17	**Urusan Perpustakaan**				
	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Persen	72,00	72	72,00
18	**Urusan Kearsipan**				
	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	75,00	75	75,00
III	**Urusan Pilihan**				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
	Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan (ADHK)	Persen	5,40	5,4	5,40
	Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persen	0,30	0,3	0,30

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
2	**Urusan Pariwisata**				
	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum	Persen	8,70	8,7	8,70
	Pertumbuhan PDRB sektor sektor jasa lainnya	Persen	8,75	8,75	8,75
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	5,17		5,17
3	**Urusan Pertanian**				
	Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian	Persen	5,70	5,7	5,70
	Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	45,85	45,85	45,85
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Persen	4,40	4,4	4,40
	Persentase Penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani	Persen	100	100	100
5	**Urusan Perdagangan**				
	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	5,79	5,79	5,79
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	94,00	94	94,00
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	76,50	76,5	76,50
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	28,26	28,26	28,26
6	**Urusan Perindutrian**				
	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,91	1,91	1,91
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	17,5	17,5	17,5
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	94	94	94
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Persen	100	100	100
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100
7	**Urusan Transmigrasi**				
	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandirian	Persen	12,50	12,5	12,50
IV	**Fungsi Penunjang**				
1	**Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**				
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	69,20	69,2	69,20
	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	70,00	70	70,00
	lndeks Kematangan Organisasi	Nilai	32,00	32	32,00
	Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Quran	Persen	18,46	18,46	18,46
	Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	30,00	30	30,00
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5	0,5	0,5
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,00	7	7,00
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	25,70	25,7	25,70

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	40,00	40	40,00
2	**Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**				
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	90,00	90	90,00
	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan	Persen	100	100	100
3	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**				
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	91,55	91,55	91,55
	Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah	Persen	73,00	73	73,00
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**				
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB	Persen	0,39	0,39	0,39
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	42,56	42,56	42,56
	Rasio PAD	Persen	22,20	22,2	22,20
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89,73	89,73	89,73
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,04	0,04	0,04
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	0,87	0,87	0,87
	Manajemen Aset	Persen	4	4	4
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,45	2,45	2,45
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100,00	100	100,00
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian**				
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82,37	82,37	82,37
	Indeks merit system ASN	Nilai	265	265	265
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	100
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	20,23	20,23	20,23
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	28,45	28,45	28,45
6	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan**				
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	80	80	80
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	28,45	28,45	28,45
7	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**				
	Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	45	45	45
	Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah	Nilai	57,846	57,846	57,846
8	**Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan**				
	Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan	Persen	43,19	43,19	43,19
9	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)**				
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengemdalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Nilai	3	3	3
	Capaian Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja	Persen	67,7	67,7	67,7
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	III	III	III
10	**Unsur Kewilayahan (Kecamatan)**				
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	100
	Persentase kegiatan pemberdayaan yang	Persen	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			RPJMD	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
	dilaksanakan				
	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	100	100
	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahaan desa yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
11	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)**				
	Persentase penyelesaian konflik	Persen	100	100	100
	Persentase partisipasi masyarakat dalam lembaga sosial politik	Persen	30	30	30

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

4.5. SINERGITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelarasan kinerja makro, tema, prioritas pembangunan daerah bertujuan agar setiap program dan prioritas yang ditetapkan dapat saling mendukung dan bersinergi serta saling melengkapi karena dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat keterbatasan terutama terkait dengan kewenangan dan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyelarasan kinerja makro, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dapat digambarkan oleh beberapa tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Sinkronisasi Target Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator	PROVINSI SUMATERA BARAT	Target Imperatif dari Provinsi	SOLOK SELATAN	
				RKPD Awal	RKPD Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,56	5,56	5,56
2	PDRB per kapita ADHB (Rp juta/tahun)	69,59	46,14	46,14	46,14
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,39	2,07	2,22	2,07
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,92	5,29	5,29	5,29
5	Indek Gini (indek)	0,281	0,31	0,31	0,31
6	Indek Pembangunan Manusia (Indek)	77,48	74,12	74,11	74,12

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029 dan Hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2026

Tabel 4.9. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Nasional Tahun 2026

Tema/Prioritas Sumatera Barat		Tema/Prioritas Solok Selatan		Tema/Prioritas Nasional
Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	←	**Perkuatan Fondasi Sektor Unggulan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**	→	**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**
1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan 3. Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas 7. Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	PP1	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, produktif dan Kompetitif	PN4	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
	PP2; PP3; PP4 ;PP7	2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	PN2; PN3; PN5; PN6	
	PP3; PP8	3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	PN7	
	PP3; PP4; PP5	4. Pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	PN2; PN3; PN6	
	PP6	5. Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya	PN1; PN8	

Secara lebih konret, sinergitas program yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 dalam mendukung Program Prioritas Nasional yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.10. Dukungan Program Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				
		8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
		2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	142.90	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	84.00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
		Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	17.95	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100.00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3313	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	33.54	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	77179	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah Produksi Padi (Ton)	89491	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	2100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	6006	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	4344	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Telur (Ton)	377.42	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Total Produksi Durian (Ton)	41010	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Total Produksi Ternak Besar (Ekor)	17995	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	42	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	76.00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	3.30	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	31.00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.50	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				
		1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi (Persentase)	55	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	28.09	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Air Minum aman perpipaan (Persentase)	30.50	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase)	8,43	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	45	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)	69	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		Meningkatnya aksesibillitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	54.50	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	7	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	42.86	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	71.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	52.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)	0.33	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	30.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			(Persentase)		Praja dan Pemadam Kebakaran
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime) (Persentase)	92	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	20	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	20	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan (%)	60.00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	20	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	15	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	6	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
		Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil (Persentase)	1.80	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	97	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	7	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5.2	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat hunian akomodasi (%)	14	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya (Persentase)	80	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	12.69	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	63.49	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	99.58	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	66.45	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99.98	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	37.47	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
		Meningkatnya kualitas kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	75.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	0.55	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Indeks)	90.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Indeks)	85.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	10.20	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.93	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Hukum
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
			Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)	91.57	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0.31	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
			Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	99.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	20.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan	63.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			perizinan (Persentase)		
		1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Persentase)	79.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)	4.16	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66.00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrphensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59.50	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
		Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	56.97	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	2.00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	60	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	95	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	25.30-25.09	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.42	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69.90	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9.80	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	13.00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persentase)	3.76	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan (%)	2.25	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)	4.16	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
		3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	15	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	94	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal	25	3.31.2.17.3.30.01.0000 -

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		produk dalam negeri	yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sentra industri yang dibina dan dikembangkan (Persentase)	41.67	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	9.17	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas (Persentase)	10.00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
		2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		Meningkatnya Penguatan SDM Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya (Persentase)	12.5	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
		2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	65	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)	99.40	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	10.20	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	83.33	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
		Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	30	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)	60	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.93	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Hukum
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
			Persentase rumah tafiz aktif (Persentase)	91.57	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian dan SDA
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Administrasi Pembangunan
			Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3.00	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
			Persentase Peningkatan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
		5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	93.06	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Perekonomian dan SDA (Persentase)		Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	90.00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	33,83	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42.56	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2.45	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	60.80	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6.7	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawasan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	13.05	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3.90	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96.50	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
		Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	63.00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)	6.50	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)	0	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	86.00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	81.00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN			

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan
		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan
		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
		2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	85	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	77.77	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Titik Pantau Aktif (%)	30.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)	78.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	63.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan

Secara lebih konret, sinergitas program yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 dalam mendukung Program Prioritas Sumatera Barat yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.11. Dukungan Program Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Terhadap Prioritas Sumatera Barat

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas				
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	99.58	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	66.45	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99.98	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	37.47	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
		Meningkatnya kualitas kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	75.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	0.55	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Indeks)	90.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Indeks)	85.00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
		2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	10.20	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.93	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Hukum
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
			Persentase rumah tahfiz aktif (Persentase)	91.57	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0.31	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
			Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	99.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	20.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan (Persentase)	63.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Persentase)	79.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi	Persentase Atlet yang Masuk	4.16	3.26.2.22.2.19.01.0000 -

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		olahraga	Pelatda (Provinsi) (Persentase)		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan				
		2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	142.90	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	84.00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
		Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	17.95	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100.00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3313	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	33.54	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	77179	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Padi (Ton)	89491	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	2100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	6006	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	4344	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Telur (Ton)	377.42	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Total Produksi Durian (Ton)	41010	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Total Produksi Ternak Besar (Ekor)	17995	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	42	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan				
		2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		Menigkatnya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya (Persentase)	12.5	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Dana Desa (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan
		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
4	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat				
		3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	15	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	94	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	25	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	97	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	7	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana				
		1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi (Persentase)	55	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	28.09	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Air Minum aman perpipaan (Persentase)	30.50	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase)	8,43	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	45	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)	69	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	54.50	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	7	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	42.86	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	71.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	52.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)	0.33	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	30.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Titik Pantau Aktif (%)	30.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)	78.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
			Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
		Meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	63.00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
		1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime) (Persentase)	92	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	kebudayaan, kesbang, kb, perempuan			
		2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	25.30-25.09	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.42	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69.90	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9.80	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	13.00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	66.00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59.50	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	85	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	77.77	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			(Persentase)		dan Politik
		8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
		Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	56.97	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	2.00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	60	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	95	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Persentase)	100	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7	Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM				
		3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5.2	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat hunian akomodasi (%)	14	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya (Persentase)	80	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	12.69	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	63.49	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	20	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	15	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	6	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
		Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil (Persentase)	1.80	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sentra industri yang dibina dan dikembangkan (Persentase)	41.67	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	9.17	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas (Persentase)	10.00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	20	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	20	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan (%)	60.00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persentase)	3.76	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan (%)	2.25	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					dan Olahraga
		2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif				
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.93	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Hukum
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
			Persentase rumah tafiz aktif (Persentase)	91.57	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian dan SDA
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Administrasi Pembangunan
			Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3.00	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
			Persentase Peningkatan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
		5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	93.06	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	90.00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	33,83	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42.56	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase laporan keuangan	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 -

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			tepat waktu (Persentase)		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2.45	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	60.80	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6.7	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawasan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	13.05	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3.90	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96.50	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
		Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	63.00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)	6.50	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	86.00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	81.00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan
		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan
		2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	65	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)	99.40	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan

NO	PRIORITAS PROVINSI	DUKUNGAN PROGRAM/OUTCOME TERHADAP PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Catatan Sipil
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	76.00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	3.30	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.50	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	31.00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	83.33	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
		Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	30	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)	60	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berpijak pada evaluasi pembangunan tahunan dan proyeksi keuangan Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka disusun matrik perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026. Matrik perubahan rencana kerja program, kegiatan da sub kegiatan tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok selatan Tahun 2025-2029 dan disajikan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memuat Sinkronisasi Perencanaan dengan Prioritas Daerah dan Nasional dan merupakan hasil yang ditampilkan dalam aplikasi SIPD, selanjutnya dapat dilihat lebih lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. SOLOK SELATAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**				**217.799.369.565**	**195.330.459.412**	**208.580.854.469**	**- 9.218.515.096**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**217.799.369.565**	**195.330.459.412**	**208.580.854.469**	**- 9.218.515.096**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**217.799.369.565**	**195.330.459.412**	**208.580.854.469**	**- 9.218.515.096**						
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Peragkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinntahan Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu**	**100 100 Persen Persen 100 Persen 96 86 75.05 Persen Persen Persen**	**100 100 Persen Persen 100 Persen 96 86 75.05 Persen Persen Persen**	**190.997.574.965**	**181.092.624.712**	**193.104.264.769**	**2.106.689.804**					**Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Dinas Pendidikan dan Guru ASN Dinas Pendidikan ASN Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***190.793.832.465***	***181.002.635.712***	***193.104.264.769***	***2.310.432.304***						
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	189.799.660.085	180.792.927.632	192.804.567.689	3.004.907.604						
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1801 Orang/bulan	1772 Orang/bulan	189.345.500.085	180.500.047.632	192.511.687.689	3.166.187.604	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	454.160.000	292.880.000	292.880.000	- 161.280.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan	100 Persen	100 Persen	489.544.380	158.998.830	158.998.830	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah	kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah						330.545.550					
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	14.887.000	7.220.000	7.220.000	-7.667.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	30.000.000	25.000.000	25.000.000	-5.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	9.957.000	8.000.000	8.000.000	-1.957.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	34.998.300	19.999.980	19.999.980	-14.998.320	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	9.990.000	4.995.000	4.995.000	-4.995.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	314.736.950	93.783.850	93.783.850	-220.953.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	-		DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	74.975.130	-	-	- 74.975.130	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	242.220.000	-	-	- 242.220.000						
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	6 Unit	42.272.000	-	-	- 42.272.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	199.948.000	-	-	- 199.948.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	137.490.000	35.699.250	35.699.250	- 101.790.750						
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	12.500.000	5.000.000	5.000.000	- 7.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	23.199.250	23.199.250	- 76.800.750	Kab. Solok Selatan, Semua	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	-		DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	24.990.000	7.500.000	7.500.000	- 17.490.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	328.660.500	104.999.000	104.999.000	- 223.661.500						
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	25 Unit	25 Unit	174.992.500	89.989.000	89.989.000	- 85.003.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	8 Unit	124.918.000	15.010.000	15.010.000	- 109.908.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**26.491.824.600**	**13.927.864.700**	**15.166.619.700**	**- 11.325.204.900**						
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	***Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS)*** ***Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD*** ***Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar***			***26.491.824.600***	***13.927.864.700***	***15.166.619.700***	***- 11.325.204.900***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	11.755.293.600	4.665.245.700	5.808.539.700	-5.946.753.900					
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	153.784.000	-	-	-153.784.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	4 Unit	1 Unit	1.177.134.000	100.000.000	100.000.000	-1.077.134.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	100 Paket	100 Paket	579.014.000	-	-	-579.014.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	75 Peserta Didik	78 Peserta Didik	263.460.000	47.999.900	324.119.450	60.659.450	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	25 Orang	25 Orang	22.899.900	10.050.000	10.050.000	-12.849.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	275 Orang	275 Orang	959.999.800	33.630.000	647.658.000	-312.341.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	28.084.800	8.510.000	8.510.000	-19.574.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	137 Satuan Pendidikan	140 Satuan Pendidikan	24.495.000	9.000.000	9.000.000	-15.495.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	150 Orang	150 Orang	36.144.900	20.935.000	20.935.000	-15.209.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	150 Orang	150 Orang	40.000.000	13.940.000	13.940.000	-26.060.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah*	15 Konten Digital	15 Konten Digital	38.289.800	12.230.000	12.230.000	-26.059.800	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			dikembangkan							Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	137 Orang	137 Orang	34.999.900	15.400.000	15.400.000	-19.599.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	12 Dokumen	12 Dokumen	17.110.000	12.000.000	103.206.000	86.096.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	23.415.000	13.515.000	13.515.000	-9.900.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	50 Komunitas	50 Komunitas	31.350.000	17.880.000	17.880.000	-13.470.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah Penyediaan infrastruktur TIK*					88.487.450	88.487.450					
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	10 Kegiatan	10 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*	1000 Buku	1000 Buku	101.500.000	-	-	-101.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	350 Paket	350 Paket	93.809.900	-	-	-93.809.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	3 Ruang	3 Ruang	755.740.000	-	-	-755.740.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	4 Unit	4 Unit	175.386.000	-	-	-175.386.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	60 Orang	60 Orang	49.999.800	47.399.800	123.799.800	73.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	137 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	3.176.815.900	2.622.593.000	2.747.068.000	-429.747.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											KINERJA			
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	3 Ruang	3 Ruang	1.954.584.000	-	-	- 1.954.584.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	4225 Peserta Didik	4225 Peserta Didik	1.572.144.900	1.660.163.000	1.532.741.000	- 39.403.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	5 Paket	5 Paket	425.132.000	-	-	- 425.132.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	7.120.532.000	2.863.188.000	2.870.519.000	- 4.250.013.000						
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	1 Ruang	1 Ruang	601.358.000	-	-	- 601.358.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	3 Unit	0 Unit	309.341.000	100.026.000		- 309.341.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	2 Ruang	1.385.814.000	-	-	- 1.385.814.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Ruang	1 Ruang	233.642.000	-	-	- 233.642.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Unit	2 Unit	66.600.000	-	-	- 66.600.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	250 Paket	250 Paket	68.220.000	-	-	- 68.220.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	4368 Peserta Didik	4368 Peserta Didik	1.736.692.000	1.748.292.000	1.593.692.000	- 143.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	287.040.000	261.457.000	398.707.000	111.667.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia*	25 Orang	25 Orang	16.380.000	9.400.000	9.400.000	- 6.980.000	Kab. Solok Selatan, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*							Kecamatan, Semua Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	250 Orang	250 Orang	84.240.000	48.215.000	71.201.000	-13.039.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	27.300.000	17.820.000	17.820.000	-9.480.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	37 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	19.930.000	7.100.000	7.100.000	-12.830.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	108 Orang	108 Orang	18.660.000	7.692.000	7.692.000	-10.968.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	108 Orang	108 Orang	45.000.000	12.060.000	12.060.000	-32.940.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	15 Konten Digital	15 Konten Digital	35.000.000	5.190.000	5.190.000	-29.810.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	37 Orang	37 Orang	20.000.000	4.860.000	4.860.000	-15.140.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	12 Dokumen	12 Dokumen	24.950.000	6.480.000	49.221.000	24.271.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	5 Dokumen	5 Dokumen	24.930.000	4.860.000	4.860.000	-20.070.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	48 Komunitas	48 Komunitas	32.220.000	23.220.000	23.220.000	-9.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	10 Kegiatan	10 Kegiatan	29.766.000	6.886.000	6.886.000	-22.880.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	714.004.000	582.520.000	539.400.000	-174.604.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER			
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	3 Ruang	3 Ruang	482.873.000	-	-	-482.873.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	50 Orang	39.560.000	9.910.000	112.010.000	72.450.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*	370 Buku	370 Buku	75.000.000	7.200.000	7.200.000	-67.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	250 Paket	250 Paket	129.990.000	-	-	-129.990.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	2 Ruang	533.092.000	-	-	-533.092.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	3 Paket	3 Paket	78.930.000	-	-	-78.930.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	75 Persen	75 Persen	5.353.037.000	4.311.218.000	4.393.060.000	-959.977.000					
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	2 Unit	2 Unit	376.429.000	-	-	-376.429.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	100 Paket	100 Paket	104.825.000	-	-	-104.825.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	8 Paket	8 Paket	69.770.000	-	-	-69.770.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	5200 Peserta Didik	5200 Peserta Didik	1.594.140.000	1.679.695.000	1.678.960.000	84.820.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia*	10 Orang	10 Orang	11.693.000	-	-	-11.693.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
			pada PAUD							Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	150 Orang	150 Orang	39.603.000	-	-	-39.603.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	107.391.000	56.910.000	59.164.000	-48.227.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	14.730.000	26.140.000	34.663.000	19.933.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	328 Orang	328 Orang	20.260.000	-	-	-20.260.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	50 Orang	50 Orang	19.960.000	-	-	-19.960.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	10 Konten Digital	10 Konten Digital	16.360.000	-	-	-16.360.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	50 Orang	17.860.000	17.560.000	17.560.000	-300.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	6 Dokumen	6 Dokumen	16.423.000	18.433.000	64.880.000	48.457.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	4 Dokumen	4 Dokumen	12.840.000	19.840.000	18.463.000	5.623.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	10 Komunitas	10 Komunitas	10.320.000	34.140.000	34.140.000	23.820.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	1 Ruang	1 Ruang	575.304.000	-	-	-575.304.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	10 Peserta didik	10 Peserta didik	17.625.000	-	-	-17.625.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	*Jumlah Peserta Bimbingan*	30 Orang	30 Orang	16.960.000	-	-	-	Kab. Solok	DAU YANG	-	-		DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*						16.960.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	164 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	2.310.544.000	2.458.500.000	2.485.230.000	174.686.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD AFIRMASI	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama sekolah	100 Persen 9,15 Persen	100 Persen 9,15 Persen	2.262.962.000	2.088.213.000	2.094.501.000	-168.461.000					
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	30 Orang	30 Orang	25.123.000	-	-	-25.123.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	24.593.000	-	-	-24.593.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	19.480.000	12.340.000	11.863.000	-7.617.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	40 Orang	40 Orang	12.730.000	-	-	-12.730.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	25 Orang	25 Orang	14.560.000	-	-	-14.560.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	36 Orang	36 Orang	11.960.000	12.760.000	12.760.000	800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	6 Dokumen	6 Dokumen	19.593.000	16.633.000	12.435.000	-7.158.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	6 Dokumen	6 Dokumen	24.823.000	14.440.000	14.003.000	-10.820.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	12 Komunitas	12 Komunitas	20.160.000	20.940.000	20.940.000	780.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang*	60 Orang	60 Orang	22.440.000	-	-	-22.440.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			dilaksanakan											
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	12 Peserta Didik	12 Peserta Didik	2.067.500.000	2.011.100.000	2.022.500.000	-45.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS AFIRMASI	-	-		DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, SD dan SMP) Persetase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD/SMP)**	**39,11 100 39,11 Persen Persen Persen**	**39,11 100 39,11 Persen Persen Persen**	**209.970.000**	**209.970.000**	**209.970.000**	**-**						
		[Meningkatnya kualitas kurikulum]	***Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal***			***209.970.000***	***209.970.000***	***209.970.000***	**-**						
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)	39,11 Persen	39,11 Persen	209.970.000	209.970.000	209.970.000	-						
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia*	2500 Buku	100 Buku	135.000.000	135.000.000	135.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*	90 Orang	90 Orang	74.970.000	74.970.000	74.970.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**-**						
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	***Indek Pemerataan Guru*** ***Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI*** ***Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs***			***100.000.000***	***100.000.000***	***100.000.000***	**-**						
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio murid dan Guru	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-						
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0001	**UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh**				**2.599.340.000**	**2.586.163.300**	**2.687.303.300**	**87.963.300**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**2.599.340.000**	**2.586.163.300**	**2.687.303.300**	**87.963.300**						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		DENGAN PELAYANAN DASAR												
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2.599.340.000**	**2.586.163.300**	**2.687.303.300**	**87.963.300**					
5.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**2.599.340.000**	**2.586.163.300**	**2.687.303.300**	**87.963.300**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***2.599.340.000***	***2.586.163.300***	***2.687.303.300***	***87.963.300***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	2.599.340.000	2.586.163.300	2.687.303.300	87.963.300					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	2.599.340.000	2.586.163.300	2.687.303.300	87.963.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0002	**UPTD Kecamatan Sungai Pagu**				**2.488.980.000**	**2.475.803.300**	**2.432.563.300**	**- 56.416.700**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.488.980.000**	**2.475.803.300**	**2.432.563.300**	**- 56.416.700**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2.488.980.000**	**2.475.803.300**	**2.432.563.300**	**- 56.416.700**					
6.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**2.488.980.000**	**2.475.803.300**	**2.432.563.300**	**- 56.416.700**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***2.488.980.000***	***2.475.803.300***	***2.432.563.300***	***- 56.416.700***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	2.488.980.000	2.475.803.300	2.432.563.300	- 56.416.700					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	2.488.980.000	2.475.803.300	2.432.563.300	- 56.416.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0003	**UPTD Kecamatan Pauh Duo**				**1.373.200.000**	**1.360.023.300**	**1.364.723.300**	**- 8.476.700**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.373.200.000**	**1.360.023.300**	**1.364.723.300**	**- 8.476.700**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.373.200.000**	**1.360.023.300**	**1.364.723.300**	**- 8.476.700**					
7.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**1.373.200.000**	**1.360.023.300**	**1.364.723.300**	**- 8.476.700**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***1.373.200.000***	***1.360.023.300***	***1.364.723.300***	***- 8.476.700***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	1.373.200.000	1.360.023.300	1.364.723.300	- 8.476.700					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	1.373.200.000	1.360.023.300	1.364.723.300	- 8.476.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0004	**UPTD Kecamatan Sangir**				**5.793.460.000**	**4.536.283.300**	**4.507.143.300**	**- 1.286.316.700**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.793.460.000**	**4.536.283.300**	**4.507.143.300**	**- 1.286.316.700**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**5.793.460.000**	**4.536.283.300**	**4.507.143.300**	**- 1.286.316.700**					
8.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**5.793.460.000**	**4.536.283.300**	**4.507.143.300**	**- 1.286.316.700**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***5.793.460.000***	***4.536.283.300***	***4.507.143.300***	***- 1.286.316.700***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	5.793.460.000	4.536.283.300	4.507.143.300	- 1.286.316.700					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	5.793.460.000	4.536.283.300	4.507.143.300	- 1.286.316.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0005	**UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo**				**1.202.120.000**	**1.188.943.300**	**1.219.023.300**	**16.903.300**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.202.120.000**	**1.188.943.300**	**1.219.023.300**	**16.903.300**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.202.120.000**	**1.188.943.300**	**1.219.023.300**	**16.903.300**					
9.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**1.202.120.000**	**1.188.943.300**	**1.219.023.300**	**16.903.300**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***1.202.120.000***	***1.188.943.300***	***1.219.023.300***	***16.903.300***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	1.202.120.000	1.188.943.300	1.219.023.300	16.903.300					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.202.120.000	1.188.943.300	1.219.023.300	16.903.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0006	**UPTD Kecamatan Sangir Jujuan**				**1.240.660.000**	**1.227.483.300**	**1.143.823.300**	**- 96.836.700**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.240.660.000**	**1.227.483.300**	**1.143.823.300**	**- 96.836.700**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.240.660.000**	**1.227.483.300**	**1.143.823.300**	**- 96.836.700**					
10.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**1.240.660.000**	**1.227.483.300**	**1.143.823.300**	**- 96.836.700**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***1.240.660.000***	***1.227.483.300***	***1.143.823.300***	***- 96.836.700***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	1.240.660.000	1.227.483.300	1.143.823.300	- 96.836.700					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.240.660.000	1.227.483.300	1.143.823.300	- 96.836.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
	1.01.2.19.0.00.01.0007	**UPTD Kecamatan Sangir Batang Hari**				**2.118.628.000**	**2.105.451.300**	**2.367.683.300**	**249.055.300**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.118.628.000**	**2.105.451.300**	**2.367.683.300**	**249.055.300**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2.118.628.000**	**2.105.451.300**	**2.367.683.300**	**249.055.300**					
11.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**2.118.628.000**	**2.105.451.300**	**2.367.683.300**	**249.055.300**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***2.118.628.000***	***2.105.451.300***	***2.367.683.300***	***249.055.300***					
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	2.118.628.000	2.105.451.300	2.367.683.300	249.055.300					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	2.118.628.000	2.105.451.300	2.367.683.300	249.055.300	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0008	**SMPN 1**				**610.160.000**	**610.160.000**	**615.960.000**	**5.800.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**610.160.000**	**610.160.000**	**615.960.000**	**5.800.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**610.160.000**	**610.160.000**	**615.960.000**	**5.800.000**					
12.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**610.160.000**	**610.160.000**	**615.960.000**	**5.800.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***610.160.000***	***610.160.000***	***615.960.000***	***5.800.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	610.160.000	610.160.000	615.960.000	5.800.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	532 Satuan Pendidikan	532 Satuan Pendidikan	610.160.000	610.160.000	615.960.000	5.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0009	**SMPN 2**				**144.055.000**	**144.055.000**	**165.880.000**	**21.825.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**144.055.000**	**144.055.000**	**165.880.000**	**21.825.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**144.055.000**	**144.055.000**	**165.880.000**	**21.825.000**					
13.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**144.055.000**	**144.055.000**	**165.880.000**	**21.825.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***144.055.000***	***144.055.000***	***165.880.000***	***21.825.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	144.055.000	144.055.000	165.880.000	21.825.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	123 Satuan Pendidikan	123 Satuan Pendidikan	144.055.000	144.055.000	165.880.000	21.825.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0010	**SMPN 3**				**508.252.000**	**508.252.000**	**503.440.000**	**- 4.812.000**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**508.252.000**	**508.252.000**	**503.440.000**	**- 4.812.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**508.252.000**	**508.252.000**	**503.440.000**	**- 4.812.000**						
14.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**508.252.000**	**508.252.000**	**503.440.000**	**- 4.812.000**						
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***508.252.000***	***508.252.000***	***503.440.000***	***- 4.812.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	508.252.000	508.252.000	503.440.000	- 4.812.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	508.252.000	508.252.000	503.440.000	- 4.812.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0011	**SMPN 4**				**553.320.000**	**553.320.000**	**561.440.000**	**8.120.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**553.320.000**	**553.320.000**	**561.440.000**	**8.120.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**553.320.000**	**553.320.000**	**561.440.000**	**8.120.000**						
15.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**553.320.000**	**553.320.000**	**561.440.000**	**8.120.000**						
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***553.320.000***	***553.320.000***	***561.440.000***	***8.120.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	553.320.000	553.320.000	561.440.000	8.120.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	477 Satuan Pendidikan	477 Satuan Pendidikan	553.320.000	553.320.000	561.440.000	8.120.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0012	**SMPN 5**				**113.680.000**	**113.680.000**	**153.120.000**	**39.440.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**113.680.000**	**113.680.000**	**153.120.000**	**39.440.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**113.680.000**	**113.680.000**	**153.120.000**	**39.440.000**						
16.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**113.680.000**	**113.680.000**	**153.120.000**	**39.440.000**						
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***113.680.000***	***113.680.000***	***153.120.000***	***39.440.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	113.680.000	113.680.000	153.120.000	39.440.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	113.680.000	113.680.000	153.120.000	39.440.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0013	**SMPN 6**				**199.520.000**	**199.520.000**	**207.640.000**	**8.120.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**199.520.000**	**199.520.000**	**207.640.000**	**8.120.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**199.520.000**	**199.520.000**	**207.640.000**	**8.120.000**						
17.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**199.520.000**	**199.520.000**	**207.640.000**	**8.120.000**						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***199.520.000***	***199.520.000***	***207.640.000***	***8.120.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	199.520.000	199.520.000	207.640.000	8.120.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	199.520.000	199.520.000	207.640.000	8.120.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0014	**SMPN 7**				**99.760.000**	**99.760.000**	**78.880.000**	**- 20.880.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**99.760.000**	**99.760.000**	**78.880.000**	**- 20.880.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**99.760.000**	**99.760.000**	**78.880.000**	**- 20.880.000**					
18.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**99.760.000**	**99.760.000**	**78.880.000**	**- 20.880.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***99.760.000***	***99.760.000***	***78.880.000***	***- 20.880.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	99.760.000	99.760.000	78.880.000	- 20.880.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	99.760.000	99.760.000	78.880.000	- 20.880.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0015	**SMPN 8**				**247.080.000**	**247.080.000**	**255.200.000**	**8.120.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**247.080.000**	**247.080.000**	**255.200.000**	**8.120.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**247.080.000**	**247.080.000**	**255.200.000**	**8.120.000**					
19.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**247.080.000**	**247.080.000**	**255.200.000**	**8.120.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***247.080.000***	***247.080.000***	***255.200.000***	***8.120.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	247.080.000	247.080.000	255.200.000	8.120.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	213 Satuan Pendidikan	213 Satuan Pendidikan	247.080.000	247.080.000	255.200.000	8.120.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0016	**SMPN 9**				**83.520.000**	**83.520.000**	**78.880.000**	**- 4.640.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**83.520.000**	**83.520.000**	**78.880.000**	**- 4.640.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**83.520.000**	**83.520.000**	**78.880.000**	**- 4.640.000**					
20.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**83.520.000**	**83.520.000**	**78.880.000**	**- 4.640.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***83.520.000***	***83.520.000***	***78.880.000***	***- 4.640.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	83.520.000	83.520.000	78.880.000	- 4.640.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	83.520.000	83.520.000	78.880.000	- 4.640.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	1.01.2.19.0.00.01.0017	**SMPN 10**				**180.960.000**	**180.960.000**	**153.120.000**	**- 27.840.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**180.960.000**	**180.960.000**	**153.120.000**	**- 27.840.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**180.960.000**	**180.960.000**	**153.120.000**	**- 27.840.000**					
21.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**180.960.000**	**180.960.000**	**153.120.000**	**- 27.840.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***180.960.000***	***180.960.000***	***153.120.000***	***- 27.840.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	180.960.000	180.960.000	153.120.000	- 27.840.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	156 Satuan Pendidikan	156 Satuan Pendidikan	180.960.000	180.960.000	153.120.000	- 27.840.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0018	**SMPN 11**				**281.880.000**	**281.880.000**	**280.720.000**	**- 1.160.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**281.880.000**	**281.880.000**	**280.720.000**	**- 1.160.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**281.880.000**	**281.880.000**	**280.720.000**	**- 1.160.000**					
22.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**281.880.000**	**281.880.000**	**280.720.000**	**- 1.160.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***281.880.000***	***281.880.000***	***280.720.000***	***- 1.160.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	281.880.000	281.880.000	280.720.000	- 1.160.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	243 Satuan Pendidikan	243 Satuan Pendidikan	281.880.000	281.880.000	280.720.000	- 1.160.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0019	**SMPN 12**				**266.800.000**	**266.800.000**	**242.440.000**	**- 24.360.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**266.800.000**	**266.800.000**	**242.440.000**	**- 24.360.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**266.800.000**	**266.800.000**	**242.440.000**	**- 24.360.000**					
23.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**266.800.000**	**266.800.000**	**242.440.000**	**- 24.360.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***266.800.000***	***266.800.000***	***242.440.000***	***- 24.360.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	266.800.000	266.800.000	242.440.000	- 24.360.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	230 Satuan Pendidikan	230 Satuan Pendidikan	266.800.000	266.800.000	242.440.000	- 24.360.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0020	**SMPN 13**				**156.600.000**	**156.600.000**	**187.920.000**	**31.320.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**156.600.000**	**156.600.000**	**187.920.000**	**31.320.000**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**156.600.000**	**156.600.000**	**187.920.000**	**31.320.000**					
24.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**156.600.000**	**156.600.000**	**187.920.000**	**31.320.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***156.600.000***	***156.600.000***	***187.920.000***	***31.320.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	156.600.000	156.600.000	187.920.000	31.320.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	156.600.000	156.600.000	187.920.000	31.320.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0021	**SMPN 14**				**382.800.000**	**382.800.000**	**397.880.000**	**15.080.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**382.800.000**	**382.800.000**	**397.880.000**	**15.080.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**382.800.000**	**382.800.000**	**397.880.000**	**15.080.000**					
25.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**382.800.000**	**382.800.000**	**397.880.000**	**15.080.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***382.800.000***	***382.800.000***	***397.880.000***	***15.080.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	382.800.000	382.800.000	397.880.000	15.080.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	382.800.000	382.800.000	397.880.000	15.080.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0022	**SMPN 15**				**78.880.000**	**78.880.000**	**82.360.000**	**3.480.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**78.880.000**	**78.880.000**	**82.360.000**	**3.480.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**78.880.000**	**78.880.000**	**82.360.000**	**3.480.000**					
26.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**78.880.000**	**78.880.000**	**82.360.000**	**3.480.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***78.880.000***	***78.880.000***	***82.360.000***	***3.480.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	78.880.000	78.880.000	82.360.000	3.480.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	78.880.000	78.880.000	82.360.000	3.480.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0023	**SMPN 16**				**122.960.000**	**122.960.000**	**109.040.000**	**- 13.920.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**122.960.000**	**122.960.000**	**109.040.000**	**- 13.920.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**122.960.000**	**122.960.000**	**109.040.000**	**- 13.920.000**					
27.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**122.960.000**	**122.960.000**	**109.040.000**	**- 13.920.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***122.960.000***	***122.960.000***	***109.040.000***	***- 13.920.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Persentase Warga Usia 13-15	100 Persen	100 Persen	122.960.000	122.960.000	109.040.000	-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		Menengah Pertama	Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar						13.920.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	106 Satuan Pendidikan	106 Satuan Pendidikan	122.960.000	122.960.000	109.040.000	- 13.920.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0024	**SMPN 17**				**85.840.000**	**85.840.000**	**110.200.000**	**24.360.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**85.840.000**	**85.840.000**	**110.200.000**	**24.360.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**85.840.000**	**85.840.000**	**110.200.000**	**24.360.000**					
28.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-	**85.840.000**	**85.840.000**	**110.200.000**	**24.360.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-			***85.840.000***	***85.840.000***	***110.200.000***	***24.360.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	85.840.000	85.840.000	110.200.000	24.360.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	85.840.000	85.840.000	110.200.000	24.360.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0025	**SMPN 18**				**80.040.000**	**80.040.000**	**104.600.000**	**24.560.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**80.040.000**	**80.040.000**	**104.600.000**	**24.560.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**80.040.000**	**80.040.000**	**104.600.000**	**24.560.000**					
29.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-	**80.040.000**	**80.040.000**	**104.600.000**	**24.560.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-			***80.040.000***	***80.040.000***	***104.600.000***	***24.560.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	80.040.000	80.040.000	104.600.000	24.560.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	80.040.000	80.040.000	104.600.000	24.560.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0026	**SMPN 19**				**85.840.000**	**85.840.000**	**93.960.000**	**8.120.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**85.840.000**	**85.840.000**	**93.960.000**	**8.120.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**85.840.000**	**85.840.000**	**93.960.000**	**8.120.000**					
30.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-	**85.840.000**	**85.840.000**	**93.960.000**	**8.120.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-			***85.840.000***	***85.840.000***	***93.960.000***	***8.120.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	85.840.000	85.840.000	93.960.000	8.120.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	85.840.000	85.840.000	93.960.000	8.120.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.	**SMPN 20**				**250.560.000**	**250.560.000**	**230.840.000**	**- 19.720.000**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	0027													
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**250.560.000**	**250.560.000**	**230.840.000**	**- 19.720.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**250.560.000**	**250.560.000**	**230.840.000**	**- 19.720.000**					
31.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**250.560.000**	**250.560.000**	**230.840.000**	**- 19.720.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***250.560.000***	***250.560.000***	***230.840.000***	***- 19.720.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	250.560.000	250.560.000	230.840.000	- 19.720.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	250.560.000	250.560.000	230.840.000	- 19.720.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0028	**SMPN 21**				**78.880.000**	**78.880.000**	**75.400.000**	**- 3.480.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**78.880.000**	**78.880.000**	**75.400.000**	**- 3.480.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**78.880.000**	**78.880.000**	**75.400.000**	**- 3.480.000**					
32.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**78.880.000**	**78.880.000**	**75.400.000**	**- 3.480.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***78.880.000***	***78.880.000***	***75.400.000***	***- 3.480.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	78.880.000	78.880.000	75.400.000	- 3.480.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	78.880.000	78.880.000	75.400.000	- 3.480.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0030	**SMPN 23**				**87.000.000**	**87.000.000**	**67.280.000**	**- 19.720.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**87.000.000**	**87.000.000**	**67.280.000**	**- 19.720.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**87.000.000**	**87.000.000**	**67.280.000**	**- 19.720.000**					
33.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**87.000.000**	**87.000.000**	**67.280.000**	**- 19.720.000**					
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***87.000.000***	***87.000.000***	***67.280.000***	***- 19.720.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	87.000.000	87.000.000	67.280.000	- 19.720.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	87.000.000	87.000.000	67.280.000	- 19.720.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0031	**SMPN 24**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
34.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**-**	**-**	**-**	**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
		PENDIDIKAN													
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***69.600.000***	***69.600.000***	***104.600.000***	***35.000.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	69.600.000	69.600.000	104.600.000	35.000.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	69.600.000	69.600.000	104.600.000	35.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0032	**SMPN 25**				**106.720.000**	**106.720.000**	**100.920.000**	**- 5.800.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**106.720.000**	**106.720.000**	**100.920.000**	**- 5.800.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**106.720.000**	**106.720.000**	**100.920.000**	**- 5.800.000**						
35.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**106.720.000**	**106.720.000**	**100.920.000**	**- 5.800.000**						
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***106.720.000***	***106.720.000***	***100.920.000***	***- 5.800.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen	106.720.000	106.720.000	100.920.000	- 5.800.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	106.720.000	106.720.000	100.920.000	- 5.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0033	**SMPN 26**				**74.240.000**	**74.240.000**	**82.360.000**	**8.120.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**74.240.000**	**74.240.000**	**82.360.000**	**8.120.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**74.240.000**	**74.240.000**	**82.360.000**	**8.120.000**						
36.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**74.240.000**	**74.240.000**	**82.360.000**	**8.120.000**					**-**	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***74.240.000***	***74.240.000***	***82.360.000***	***8.120.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	74.240.000	74.240.000	82.360.000	8.120.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	64 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	74.240.000	74.240.000	82.360.000	8.120.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0034	**SMPN 27**				**82.360.000**	**82.360.000**	**91.640.000**	**9.280.000**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**82.360.000**	**82.360.000**	**91.640.000**	**9.280.000**						
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**82.360.000**	**82.360.000**	**91.640.000**	**9.280.000**						
37.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**82.360.000**	**82.360.000**	**91.640.000**	**9.280.000**					**-**	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***82.360.000***	***82.360.000***	***91.640.000***	***9.280.000***						
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	82.360.000	82.360.000	91.640.000	9.280.000						
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	71 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan	82.360.000	82.360.000	91.640.000	9.280.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-		DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
										Semua Kel/Desa				
	1.01.2.19.0.00.01.0035	**SMPN 28**				**154.280.000**	**154.280.000**	**178.640.000**	**24.360.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**154.280.000**	**154.280.000**	**178.640.000**	**24.360.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**154.280.000**	**154.280.000**	**178.640.000**	**24.360.000**					
38.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**154.280.000**	**154.280.000**	**178.640.000**	**24.360.000**					**-**
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***154.280.000***	***154.280.000***	***178.640.000***	***24.360.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	154.280.000	154.280.000	178.640.000	24.360.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	154.280.000	154.280.000	178.640.000	24.360.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0036	**SMPN 29**				**199.520.000**	**199.520.000**	**230.840.000**	**31.320.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**199.520.000**	**199.520.000**	**230.840.000**	**31.320.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**199.520.000**	**199.520.000**	**230.840.000**	**31.320.000**					
39.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**199.520.000**	**199.520.000**	**230.840.000**	**31.320.000**					**-**
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***199.520.000***	***199.520.000***	***230.840.000***	***31.320.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	199.520.000	199.520.000	230.840.000	31.320.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	-	-	199.520.000	199.520.000	230.840.000	31.320.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0037	**SMPN 30**				**64.960.000**	**64.960.000**	**83.520.000**	**18.560.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**64.960.000**	**64.960.000**	**83.520.000**	**18.560.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**64.960.000**	**64.960.000**	**83.520.000**	**18.560.000**					
40.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**64.960.000**	**64.960.000**	**83.520.000**	**18.560.000**					**-**
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***64.960.000***	***64.960.000***	***83.520.000***	***18.560.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	64.960.000	64.960.000	83.520.000	18.560.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	64.960.000	64.960.000	83.520.000	18.560.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0038	**SMPN 31**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					
41.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**-**	**-**	**-**	**69.600.000**	**69.600.000**	**104.600.000**	**35.000.000**					**-**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		PENDIDIKAN												
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***69.600.000***	***69.600.000***	***104.600.000***	***35.000.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	69.600.000	69.600.000	104.600.000	35.000.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	69.600.000	69.600.000	104.600.000	35.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0039	**SMPN 32**				**148.480.000**	**148.480.000**	**178.640.000**	**30.160.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**148.480.000**	**148.480.000**	**178.640.000**	**30.160.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**148.480.000**	**148.480.000**	**178.640.000**	**30.160.000**					
42.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**148.480.000**	**148.480.000**	**178.640.000**	**30.160.000**				**-**	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***148.480.000***	***148.480.000***	***178.640.000***	***30.160.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	148.480.000	148.480.000	178.640.000	30.160.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	128 Satuan Pendidikan	128 Satuan Pendidikan	148.480.000	148.480.000	178.640.000	30.160.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.2.19.0.00.01.0043	**SMPN 36**				**94.980.000**	**94.980.000**	**89.320.000**	**- 5.660.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**94.980.000**	**94.980.000**	**89.320.000**	**- 5.660.000**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**94.980.000**	**94.980.000**	**89.320.000**	**- 5.660.000**					
43.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**94.980.000**	**94.980.000**	**89.320.000**	**- 5.660.000**				**-**	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**-**			***94.980.000***	***94.980.000***	***89.320.000***	***- 5.660.000***					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	94.980.000	94.980.000	89.320.000	- 5.660.000					
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	94.980.000	94.980.000	89.320.000	- 5.660.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**				**115.747.305.373**	**84.521.325.714**	**96.950.448.881**	**- 18.796.856.492**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**115.747.305.373**	**84.521.325.714**	**96.950.448.881**	**- 18.796.856.492**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**115.747.305.373**	**84.521.325.714**	**96.950.448.881**	**- 18.796.856.492**					
44.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Peragkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Peragkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat**	**81.00 75.75 95.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95.00**	**81.00 75.75 95.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95.00**	**65.646.251.241**	**54.621.335.514**	**59.183.514.681**	**- 6.462.736.560**					**ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Dinas Kesehatan**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Daerah Nilai IKM Peragkat Daerah	**81.00 Nilai Nilai**	**81.00 Nilai Nilai**									
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	85.298.408	100.000.000	6.394.899.000	6.309.600.592					
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	10 Unit	-	-	6.055.000.000	6.055.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	216.490.000	415.716.000	915.716.000	699.226.000					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	75.000.000	302.766.000	302.766.000	227.766.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***65.571.251.241***	***54.318.569.514***	***52.825.748.681***	***-12.745.502.560***					
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	64.932.219.176	53.873.549.514	51.383.252.681	-13.548.966.495					
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	668 Orang/bulan	669 Orang/bulan	64.316.439.176	53.507.669.514	50.639.292.681	-13.677.146.495	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	615.780.000	365.880.000	743.960.000	128.180.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat	100 persen	100 persen	316.743.657	140.070.000	402.587.000	85.843.343					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			waktu											
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	7.500.000	5.000.000	5.000.000	-2.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	50.000.000	10.750.000	237.187.000	187.187.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	20.000.000	3.000.000	7.500.000	-12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	35.123.000	18.820.000	18.820.000	-16.303.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.500.000	500.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	201.620.657	100.000.000	133.580.000	-68.040.657	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	85.298.408	100.000.000	6.394.899.000	6.309.600.592						
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	1 Unit	85.298.408	100.000.000	339.899.000	254.600.592	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 persen	100 persen	95.500.000	92.000.000	87.060.000	-8.440.000						
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.560.000	560.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	85.000.000	79.500.000	-5.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	7.500.000	4.000.000	4.000.000	-3.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	216.490.000	415.716.000	915.716.000	699.226.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	2 Unit	39.190.000	42.950.000	42.950.000	3.760.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	102.300.000	70.000.000	570.000.000	467.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Indeks Keluarga Sehat**	**0.31 99.00 Indeks Persen 99.00 0.31 Persen Nilai**	**0.31 99.00 Indeks Persen 99.00 0.31 Persen Nilai**	**49.000.996.132**	**28.887.701.200**	**36.754.645.200**	**- 12.246.350.932**					**Masyarakat Puskesmas dan RSUD**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	***Indeks Keluarga Sehat Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan***			***49.000.996.132***	***28.887.701.200***	***36.754.645.200***	***-12.246.350.932***						
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	100 persen 100 Persen 1 Unit 200 Unit	100 persen 100 Persen 1 Unit 200 Unit	24.615.653.232	3.101.803.520	8.258.605.733	- 16.357.047.499						
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	1 Unit	17.173.039.650	-	-	- 17.173.039.650	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	4 Unit	4 Unit	1.878.100.000	-	-	- 1.878.100.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	8 Unit	8 Unit	250.000.000	250.000.000	1.983.802.213	1.733.802.213	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	10 Unit	10 Unit	44.701.582	-	-	- 44.701.582	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	10 Unit	1 Unit	302.096.000	191.974.000	191.974.000	- 110.122.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	1 Unit	1 Unit	-	-	2.900.000.000	2.900.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan*	1 Paket	1 Paket	4.844.608.000	2.563.774.436	3.086.774.436	- 1.757.833.564	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
		Fasilitas Kesehatan	*Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*							Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	8 Paket	4 Paket	123.108.000	96.055.084	96.055.084	-27.052.916	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	24.343.112.900	25.607.706.680	28.317.848.467	3.974.735.567						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4330 Orang	2494 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4304 Orang	703 Orang	83.300.000	133.800.000	133.800.000	50.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	954 Orang	954 Orang	5.000.000	396.755.200	396.755.200	391.755.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	18903 Orang	2963 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	21678 Orang	7692 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	79835 Orang	79835 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4675 Orang	2316 Orang	12.680.000	5.000.000	5.000.000	- 7.680.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	23000 Orang	23000 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2100 Orang	2200 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan*	260 Orang	420 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							Semua Kel/Desa	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2567 Orang	507 Orang	5.000.000	540.300.000	579.850.000	574.850.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	3505 Orang	112 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	0 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	405 Dokumen	405 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	4 Dokumen	20 Dokumen	22.600.000	3.500.000	3.500.000	-19.100.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	4 Dokumen	1 Dokumen	36.467.000	486.497.000	486.497.000	450.030.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	6 Dokumen	4 Dokumen	231.192.000	144.672.000	144.672.000	-86.520.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	12 bulan Dokumen	4 Dokumen	30.500.000	3.500.000	21.000.000	-9.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	100 Orang	420 Orang	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan*	14 Orang	55 Orang	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pelayanan Kesehatan							Kecamatan, Semua Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	4 Dokumen	8 Dokumen	248.008.000	3.500.000	3.500.000	-244.508.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	4 Dokumen	63.577 Dokumen	22.912.171.900	23.261.655.200	25.188.655.200	2.276.483.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	12 Paket	12 Paket	9.500.000	120.685.000	120.685.000	111.185.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	4 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	12 Dokumen	2 Dokumen	330.183.000	155.000.000	863.916.787	533.733.787	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	12 Laporan	0 Laporan	3.500.000	3.500.000	20.675.000	17.175.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	12 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	0 Orang	0 Orang	2.000.000	39.704.480	39.704.480	37.704.480	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	347.011.000	245.637.800	245.637.800	-101.373.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 persen	100 persen	24.730.000	40.633.000	40.633.000	15.903.000						
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	8 Dokumen	24.730.000	40.633.000	40.633.000	15.903.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	17.500.000	137.558.000	137.558.000	120.058.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota											
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	10 Unit	10 Unit	14.000.000	134.058.000	134.058.000	120.058.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
46.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**20 Persen**	**20 Persen**	**591.270.000**	**832.371.000**	**832.371.000**	**241.101.000**					**Tenaga Kesehatan**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP san UKM manusia di wilayah kabupaten/kota	100 persen	100 persen	3.500.000	192.732.000	192.732.000	189.232.000						
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	-	1 Dokumen	-	189.232.000	189.232.000	189.232.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	***Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan***			***591.270.000***	***643.139.000***	***643.139.000***	***51.869.000***						
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-						
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	12 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan	Persentase perencanaan	100 persen	100 persen	3.500.000	192.732.000	192.732.000	189.232.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP san UKM manusia di wilayah kabupaten/kota											
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	10 Dokumen	10 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	100 persen	100 persen	584.270.000	636.139.000	636.139.000	51.869.000						
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	30 Orang	258 Orang	584.270.000	636.139.000	636.139.000	51.869.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
47.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan**	**63 Persen**	**63 Persen**	**447.268.000**	**162.618.000**	**162.618.000**	**- 284.650.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan***			***447.268.000***	***162.618.000***	***162.618.000***	***- 284.650.000***						
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 persen	100 persen	97.737.000	2.500.000	2.500.000	- 95.237.000						
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	4 Dokumen	81 Dokumen	97.737.000	2.500.000	2.500.000	- 95.237.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	undefined undefined	undefined undefined	108.740.950	78.964.000	78.964.000	- 29.776.950						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	125 Dokumen	50 Dokumen	108.740.950	78.964.000	78.964.000	- 29.776.950	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 persen	100 persen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-					
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	421 Dokumen	421 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 persen	100 persen	237.290.050	77.654.000	77.654.000	- 159.636.050					
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	12 Unit	66 Unit	237.290.050	77.654.000	77.654.000	- 159.636.050	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
48.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**61.520.000**	**17.300.000**	**17.300.000**	**- 44.220.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat***			***61.520.000***	***17.300.000***	***17.300.000***	***- 44.220.000***						
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	100 persen	100 persen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Kabupaten/ Kota											
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-						
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	5 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	54.520.000	10.300.000	10.300.000	- 44.220.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4 Dokumen	54.520.000	10.300.000	10.300.000	- 44.220.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh**				**1.884.113.000**	**2.008.257.144**	**2.075.478.264**	**191.365.264**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.884.113.000**	**2.008.257.144**	**2.075.478.264**	**191.365.264**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.884.113.000**	**2.008.257.144**	**2.075.478.264**	**191.365.264**						
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.880.663.000**	**1.940.781.144**	**2.008.002.264**	**127.339.264**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***1.880.663.000***	***1.940.781.144***	***2.008.002.264***	***127.339.264***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.880.663.000	1.940.781.144	2.008.002.264	127.339.264						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	646 Orang	279 Orang	48.020.000	3.807.000	3.807.000	-44.213.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3024 Orang	870 Orang	25.500.000	10.880.000	10.880.000	-14.620.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	53 Orang	67 Orang	11.250.000	1.680.000	1.680.000	-9.570.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	587 Orang	19 Orang	4.050.000	6.400.000	6.400.000	2.350.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	12 Dokumen	4 Dokumen	129.175.000	128.062.000	128.062.000	-1.113.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	-	-	-4.500.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	2 Dokumen	4 Dokumen	6.900.000	2.560.000	2.560.000	-4.340.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	12 Dokumen	4 Dokumen	7.465.000	6.240.000	6.240.000	-1.225.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2038 Orang	67 Orang	3.000.000	320.000	320.000	-2.680.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	3 Dokumen	4 Dokumen	41.200.000	24.640.000	24.640.000	-16.560.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.525.258.000	1.712.512.144	1.779.733.264	254.475.264	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	3 Orang	3 Orang	600.000	-	-	-600.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
										Diateh, Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	2 Dokumen	2 Dokumen	18.960.000	-	-	- 18.960.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	2 Dokumen	4 Dokumen	4.600.000	960.000	960.000	- 3.640.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	-	-	- 12.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	38.185.000	42.720.000	42.720.000	4.535.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
50.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**3.450.000**	**67.476.000**	**67.476.000**	**64.026.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50.436.000	50.436.000	50.436.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan*	-	18 Dokumen	-	50.436.000	50.436.000	50.436.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pemberdayaan Masyarakat							Diateh, Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA		manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***3.450.000***	***17.040.000***	***17.040.000***	***13.590.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	3.450.000	17.040.000	17.040.000	13.590.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	2 Dokumen	4 Dokumen	3.450.000	17.040.000	17.040.000	13.590.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPT. Puskesmas Sungai Pagu**				**2.308.954.400**	**2.346.732.618**	**2.346.732.618**	**37.778.218**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.308.954.400**	**2.346.732.618**	**2.346.732.618**	**37.778.218**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.308.954.400**	**2.346.732.618**	**2.346.732.618**	**37.778.218**						
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**2.303.864.400**	**2.297.194.618**	**2.297.194.618**	**- 6.669.782**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***2.303.864.400***	***2.297.194.618***	***2.297.194.618***	***- 6.669.782***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	2.303.864.400	2.297.194.618	2.297.194.618	- 6.669.782						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	745 Orang	377 Orang	48.000.000	6.600.000	6.600.000	- 41.400.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4993 Orang	935 Orang	23.100.000	6.080.000	6.080.000	- 17.020.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	25 Orang	82 Orang	11.250.000	960.000	960.000	-10.290.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	15 Orang	12 Orang	6.750.000	8.000.000	8.000.000	1.250.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	4 Dokumen	202.700.000	111.940.000	111.940.000	-90.760.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000	-	-	-1.800.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4 Dokumen	4.125.000	3.520.000	3.520.000	-605.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	4 Dokumen	5.425.000	6.952.000	6.952.000	1.527.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	100 Orang	82 Orang	5.850.000	2.080.000	2.080.000	-3.770.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	4 Dokumen	32.750.000	32.480.000	32.480.000	-270.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	1.896.764.400	2.063.382.618	2.063.382.618	166.618.218	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	5 Orang	0 Orang	750.000	-	-	-750.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	-	-	-12.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu	*Jumlah dokumen hasil*	10	4 Dokumen	1.600.000	640.000	640.000	-	Kab. Solok	SISA LEBIH	Memperkuat pembangunan	Peningkatan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		dan Anak	*pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Dokumen					960.000	Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000	-	-	- 4.800.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	46.200.000	54.560.000	54.560.000	8.360.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
52.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**5.090.000**	**49.538.000**	**49.538.000**	**44.448.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	22.010.000	22.010.000	22.010.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	4 Dokumen	-	22.010.000	22.010.000	22.010.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***5.090.000***	***27.528.000***	***27.528.000***	***22.438.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	5.090.000	27.528.000	27.528.000	22.438.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	2 Dokumen	4 Dokumen	5.090.000	27.528.000	27.528.000	22.438.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPT. Puskesmas Pauh Duo**				**1.397.709.000**	**1.390.913.769**	**1.390.913.769**	**- 6.795.231**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.397.709.000**	**1.390.913.769**	**1.390.913.769**	**- 6.795.231**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.397.709.000**	**1.390.913.769**	**1.390.913.769**	**- 6.795.231**					
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.392.485.000**	**1.348.137.769**	**1.348.137.769**	**- 44.347.231**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***1.392.485.000***	***1.348.137.769***	***1.348.137.769***	***- 44.347.231***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.392.485.000	1.348.137.769	1.348.137.769	- 44.347.231						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	321 Orang	288 Orang	16.200.000	4.000.000	4.000.000	- 12.200.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3454 Orang	928 Orang	20.250.000	10.720.000	10.720.000	- 9.530.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	55 Orang	50 Orang	9.000.000	2.400.000	2.400.000	- 6.600.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	401 Orang	7 Orang	4.800.000	2.080.000	2.080.000	- 2.720.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	3 Dokumen	4 Dokumen	111.150.000	91.724.000	91.724.000	-19.426.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	0 0	4 0	2.250.000	-	-	-2.250.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	2 Dokumen	4 Dokumen	5.700.000	1.200.000	1.200.000	-4.500.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	2 Dokumen	4 Dokumen	5.815.000	3.280.000	3.280.000	-2.535.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	55 Orang	50 Orang	2.400.000	160.000	160.000	-2.240.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	5 Dokumen	4 Dokumen	36.510.000	13.360.000	13.360.000	-23.150.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	1.127.770.000	1.168.013.769	1.168.013.769	40.243.769	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	30 Orang	0 Orang	750.000	-	-	-750.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	2 Dokumen	4 Dokumen	5.790.000	-	-	-5.790.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	2 Dokumen	4 Dokumen	2.025.000	160.000	160.000	-1.865.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	4 Dokumen	4 Dokumen	3.900.000	-	-	-3.900.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	3 Dokumen	4 Dokumen	38.175.000	51.040.000	51.040.000	12.865.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
54.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**5.224.000**	**42.776.000**	**42.776.000**	**37.552.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	27.216.000	27.216.000	27.216.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	4 Dokumen	-	27.216.000	27.216.000	27.216.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***5.224.000***	***15.560.000***	***15.560.000***	***10.336.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	5.224.000	15.560.000	15.560.000	10.336.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	2 Dokumen	4 Dokumen	5.224.000	15.560.000	15.560.000	10.336.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPT. Puskesmas Sangir**				**3.167.061.000**	**3.047.571.000**	**3.092.099.640**	**- 74.961.360**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.167.061.000**	**3.047.571.000**	**3.092.099.640**	**- 74.961.360**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.167.061.000**	**3.047.571.000**	**3.092.099.640**	**- 74.961.360**						
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**3.160.561.000**	**2.990.171.000**	**3.034.699.640**	**- 125.861.360**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***3.160.561.000***	***2.990.171.000***	***3.034.699.640***	***- 125.861.360***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	3.160.561.000	2.990.171.000	3.034.699.640	- 125.861.360						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	77 Orang	763 Orang	34.650.000	7.000.000	7.000.000	-27.650.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	330 Orang	2575 Orang	24.750.000	8.480.000	8.480.000	-16.270.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	74 Orang	115 Orang	33.300.000	7.680.000	7.680.000	-25.620.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	35 Orang	15 Orang	5.250.000	6.400.000	6.400.000	1.150.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	4 Dokumen	4 Dokumen	127.350.000	124.310.000	124.310.000	-3.040.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	48 Dokumen	4 Dokumen	10.800.000	-	-	-10.800.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	2 Dokumen	4 Dokumen	6.600.000	4.800.000	4.800.000	-1.800.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	3 Dokumen	4 Dokumen	9.050.000	14.320.000	14.320.000	5.270.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	15 Orang	115 Orang	4.500.000	1.600.000	1.600.000	-2.900.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	4 Dokumen	4 Dokumen	45.500.000	30.400.000	30.400.000	-15.100.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	2.794.251.000	2.745.821.000	2.790.349.640	-3.901.360	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan*	5 Orang	0 Orang	750.000	-	-	-750.000	Kab. Solok Selatan, Sangir,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			kesehatan malaria							Semua Kel/Desa	PUSKESMAS	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	14 Dokumen	4 Dokumen	14.700.000	-	-	- 14.700.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	12 Dokumen	4 Dokumen	3.360.000	1.680.000	1.680.000	- 1.680.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	35 Dokumen	4 Dokumen	5.250.000	-	-	- 5.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	5 Dokumen	4 Dokumen	40.500.000	37.680.000	37.680.000	- 2.820.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
56.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**6.500.000**	**57.400.000**	**57.400.000**	**50.900.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	25.640.000	25.640.000	25.640.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,*	-	4 Dokumen	-	25.640.000	25.640.000	25.640.000	Kab. Solok Selatan, Sangir,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	Penguatan tata kelola		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	*Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*							Semua Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		pemerintahan yang baik dan melayani		
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***6.500.000***	***31.760.000***	***31.760.000***	***25.260.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	6.500.000	31.760.000	31.760.000	25.260.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	2 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000	31.760.000	31.760.000	25.260.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0006	**UPT. Puskesmas Sangir Jujuan**				**1.465.807.000**	**1.430.908.656**	**1.498.129.776**	**32.322.776**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.465.807.000**	**1.430.908.656**	**1.498.129.776**	**32.322.776**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.465.807.000**	**1.430.908.656**	**1.498.129.776**	**32.322.776**						
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.465.807.000**	**1.406.025.656**	**1.473.246.776**	**7.439.776**					**Masyarakat**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.465.807.000	1.406.025.656	1.473.246.776	7.439.776						
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	150 Orang	7 Orang	5.100.000	2.400.000	2.400.000	-2.700.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	4 Dokumen	1.920.000	640.000	640.000	-1.280.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	**-**			***1.458.787.000***	***1.402.985.656***	***1.470.206.776***	***11.419.776***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		masyarakat]												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.465.807.000	1.406.025.656	1.473.246.776	7.439.776					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	34 Orang	302 Orang	13.575.000	7.400.000	7.400.000	-6.175.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1340 Orang	695 Orang	10.080.000	3.360.000	3.360.000	-6.720.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	41 Orang	35 Orang	10.880.000	1.200.000	1.200.000	-9.680.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	4 Dokumen	94.554.000	85.194.000	85.194.000	-9.360.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4 Dokumen	6.400.000	4.480.000	4.480.000	-1.920.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	4 Dokumen	17.955.000	4.275.000	4.275.000	-13.680.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
										Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1165 Orang	35 Orang	2.240.000	1.120.000	1.120.000	-1.120.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	4 Dokumen	25.900.000	12.435.000	12.435.000	-13.465.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Bidar Alam	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	1.238.753.000	1.257.761.656	1.324.982.776	86.229.776	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	38.450.000	25.760.000	25.760.000	-12.690.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
58.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.883.000**	**24.883.000**	**24.883.000**					**-**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	19.233.000	19.233.000	19.233.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan*	-	4 Dokumen	-	19.233.000	19.233.000	19.233.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pemberdayaan Masyarakat							Kel/Desa	SEBELUMNYA		manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			**-**	***5.650.000***	***5.650.000***	***5.650.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	5.650.000	5.650.000	5.650.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4 Dokumen	-	5.650.000	5.650.000	5.650.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0008	**UPT. Puskesmas Sangir Balai Janggo**				**1.349.521.600**	**1.506.394.602**	**1.521.380.202**	**171.858.602**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.349.521.600**	**1.506.394.602**	**1.521.380.202**	**171.858.602**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.349.521.600**	**1.506.394.602**	**1.521.380.202**	**171.858.602**						
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.345.711.600**	**1.501.354.602**	**1.516.340.202**	**170.628.602**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***1.345.711.600***	***1.501.354.602***	***1.516.340.202***	***170.628.602***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.345.711.600	1.501.354.602	1.516.340.202	170.628.602						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	248 Orang	289 Orang	21.000.000	5.840.000	5.840.000	-15.160.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	105 Orang	925 Orang	7.875.000	4.400.000	4.400.000	-3.475.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai*	136 Orang	40 Orang	10.200.000	2.320.000	2.320.000	-7.880.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Standar									prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	20 Orang	8 Orang	4.500.000	1.680.000	1.680.000	-2.820.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	4 Dokumen	89.291.000	67.054.000	67.054.000	-22.237.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	48 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000	-	-	-6.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	2 Dokumen	4 Dokumen	4.650.000	6.240.000	6.240.000	1.590.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	4 Dokumen	2.685.000	7.040.000	7.040.000	4.355.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	24 Orang	40 Orang	1.800.000	720.000	720.000	-1.080.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	14 Dokumen	4 Dokumen	24.285.000	19.840.000	19.840.000	-4.445.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	1.117.250.600	1.321.580.602	1.336.566.202	219.315.602	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	6 Laporan	0 Laporan	450.000	-	-	-450.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	4 Orang	0 Orang	300.000	-	-	-300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4 Dokumen	5.325.000	-	-	-5.325.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	4 Dokumen	2.250.000	640.000	640.000	-1.610.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	56 Dokumen	4 Dokumen	4.200.000	-	-	-4.200.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	43.650.000	64.000.000	64.000.000	20.350.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
60.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**3.810.000**	**5.040.000**	**5.040.000**	**1.230.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.840.000	3.840.000	3.840.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	4 Dokumen	-	3.840.000	3.840.000	3.840.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***3.810.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***- 2.610.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	3.810.000	1.200.000	1.200.000	-2.610.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan*	26 Dokumen	4 Dokumen	3.810.000	1.200.000	1.200.000	-2.610.000	Kab. Solok Selatan, Sangir	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*							Balai Janggo, Semua Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.0.00.0.00.01.0009	**UPT. Puskesmas Sangir Batang Hari**				**1.197.812.000**	**1.368.892.417**	**1.421.127.937**	**223.315.937**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.197.812.000**	**1.368.892.417**	**1.421.127.937**	**223.315.937**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.197.812.000**	**1.368.892.417**	**1.421.127.937**	**223.315.937**						
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.168.045.000**	**1.289.592.417**	**1.341.827.937**	**173.782.937**					**-**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***1.168.045.000***	***1.289.592.417***	***1.341.827.937***	***173.782.937***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	1.168.045.000	1.289.592.417	1.341.827.937	173.782.937						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	263 Orang	140 Orang	39.750.000	15.020.000	15.020.000	-24.730.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	8332 Orang	555 Orang	7.500.000	800.000	800.000	-6.700.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	30 Orang	30 Orang	7.200.000	960.000	960.000	-6.240.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan*	252 Orang	11 Orang	1.800.000	800.000	800.000	-1.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Sesuai Standar							Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	4 Dokumen	4 Dokumen	150.640.000	197.720.000	197.720.000	47.080.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	0 0	4 0	1.800.000	-	-	- 1.800.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	2 Dokumen	4 Dokumen	3.750.000	10.400.000	10.400.000	6.650.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	3 Dokumen	4 Dokumen	2.100.000	2.720.000	2.720.000	620.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	30 Orang	30 Orang	900.000	480.000	480.000	- 420.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												disabilitas.		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	3 Dokumen	4 Dokumen	16.950.000	14.336.000	14.336.000	-2.614.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	867.300.000	1.016.836.417	1.069.071.937	201.771.937	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	0 Orang	0 Orang	600.000	-	-	-600.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4 Dokumen	41.355.000	-	-	-41.355.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	4 Dokumen	750.000	240.000	240.000	-510.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	4 Dokumen	3.600.000	-	-	-3.600.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	22.050.000	29.280.000	29.280.000	7.230.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
62.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**29.767.000**	**79.300.000**	**79.300.000**	**49.533.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	39.280.000	39.280.000	39.280.000						
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	4 Dokumen	-	39.280.000	39.280.000	39.280.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**			***29.767.000***	***40.020.000***	***40.020.000***	***10.253.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	29.767.000	40.020.000	40.020.000	10.253.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	3 Dokumen	4 Dokumen	29.767.000	40.020.000	40.020.000	10.253.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0010	**UPT. Puskesmas Lubuk Ulang Aling**				**664.676.000**	**712.785.700**	**734.193.700**	**69.517.700**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**664.676.000**	**712.785.700**	**734.193.700**	**69.517.700**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**664.676.000**	**712.785.700**	**734.193.700**	**69.517.700**						
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**664.376.000**	**680.265.700**	**701.673.700**	**37.297.700**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**			***664.376.000***	***680.265.700***	***701.673.700***	***37.297.700***					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	664.376.000	680.265.700	701.673.700	37.297.700					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	29 Orang	56 Orang	9.756.000	2.640.000	2.640.000	-7.116.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	83 Orang	209 Orang	10.275.000	3.360.000	3.360.000	-6.915.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	40 Orang	1 Orang	3.150.000	800.000	800.000	-2.350.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	32 Orang	1 Orang	2.450.000	2.000.000	2.000.000	-450.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	100 Dokumen	1 Dokumen	51.905.000	50.865.000	50.865.000	-1.040.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil*	10	4 Dokumen	750.000	-	-	-	Kab. Solok	DAK NON FISIK-	Memperkuat pembangunan	Peningkatan		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kerja dan Olahraga	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Dokumen					750.000	Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DANA BOK-BOK PUSKESMAS	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	9 Dokumen	4 Dokumen	3.450.000	2.080.000	2.080.000	-1.370.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	56 Dokumen	4 Dokumen	4.730.000	3.520.000	3.520.000	-1.210.000	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	15 Orang	1 Orang	5.175.000	1.440.000	1.440.000	-3.735.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	23 Dokumen	4 Dokumen	43.420.000	24.160.000	24.160.000	-19.260.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	3 Dokumen	1 Dokumen	493.815.000	564.840.700	586.248.700	92.433.700	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	0 Orang	1.500.000	-	-	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	20 Dokumen	4 Dokumen	7.850.000	-	-	-7.850.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	32 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000	400.000	400.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	23 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	-	-	-3.750.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	24.160.000	24.160.000	4.160.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
64.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**300.000**	**32.520.000**	**32.520.000**	**32.220.000**					**Masyarakat**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan,	-	-	-	-	17.040.000	17.040.000	17.040.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	4 Dokumen	-	17.040.000	17.040.000	17.040.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	-			***300.000***	***15.480.000***	***15.480.000***	***15.180.000***						
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	300.000	15.480.000	15.480.000	15.180.000						
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	4 Dokumen	1 Dokumen	300.000	15.480.000	15.480.000	15.180.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0014	**RUMAH SAKIT BATANG SANGIR**				**17.873.000.000**	**12.268.836.970**	**12.782.360.400**	**- 5.090.639.600**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**17.873.000.000**	**12.268.836.970**	**12.782.360.400**	**- 5.090.639.600**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**17.873.000.000**	**12.268.836.970**	**12.782.360.400**	**- 5.090.639.600**						
65.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan**	**0.31 99.00 Indeks Persen**	**0.31 99.00 Indeks Persen**	**17.873.000.000**	**12.268.836.970**	**12.782.360.400**	**- 5.090.639.600**					**Masyarakat**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Batang Sangir	1 unit	1 unit	7.373.000.000	7.241.844.800	6.715.968.230	- 657.031.770						
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	1 Unit	7.373.000.000	7.241.844.800	6.715.968.230	- 657.031.770	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	-			***10.500.000.000***	***5.026.992.170***	***6.066.392.170***	***- 4.433.607.830***						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	0 orang 100 persen	0 orang 100 persen	10.500.000.000	5.026.992.170	6.066.392.170	- 4.433.607.830						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisas Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	135 orang 14598 orang 19 orang 1 dokumen 279 orang 407 orang 4 dokumen 672 orang 67 orang 870 orang 96 orang	135 orang 14598 orang 19 orang 1 dokumen 279 orang 407 orang 4 dokumen 672 orang 67 orang 870 orang 96 orang									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase pencapaian SPM Kesehatan umlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan											
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000.000	5.026.992.170	6.066.392.170	-4.433.607.830	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0016	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**				**55.530.221.267**	**60.106.603.907**	**59.797.161.074**	**4.266.939.807**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**55.530.221.267**	**60.106.603.907**	**59.797.161.074**	**4.266.939.807**						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**55.530.221.267**	**60.106.603.907**	**59.797.161.074**	**4.266.939.807**						
66.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**55.530.221.267**	**60.106.603.907**	**59.797.161.074**	**4.266.939.807**					**Masyarakat RSUD Solok Selatan**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	-			***55.530.221.267***	***60.106.603.907***	***59.797.161.074***	***4.266.939.807***						
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	100 persen	100 persen	3.501.260.360	5.077.643.000	4.768.200.167	1.266.939.807						
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	1 Unit	3.501.260.360	5.077.643.000	4.768.200.167	1.266.939.807	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	52.028.960.907	55.028.960.907	55.028.960.907	3.000.000.000						
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	1 Dokumen	52.028.960.907	55.028.960.907	55.028.960.907	3.000.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.03.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan**				**108.201.244.904**	**43.804.984.098**	**76.809.316.941**	**- 31.391.927.963**					
	1	**NON URUSAN**				**948.314.900**	**-**	**-**	**- 948.314.900**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**105.221.365.304**	**42.804.984.098**	**75.309.316.941**	**- 29.912.048.363**					
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**948.314.900**	**-**	**-**	**- 948.314.900**					
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**105.221.365.304**	**42.804.984.098**	**75.309.316.941**	**- 29.912.048.363**					
67.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.335.771.420**	**7.637.574.073**	**8.303.672.869**	**- 2.032.098.551**					**ASN**
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***10.335.771.420***	***7.637.574.073***	***8.303.672.869***	***- 2.032.098.551***					
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	39.999.600	7.000.000	7.000.000	- 32.999.600					
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	19.999.900	3.500.000	3.500.000	- 16.499.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	19.999.700	3.500.000	3.500.000	- 16.499.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Presentase tertib administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	8.529.460.520	6.323.392.098	5.974.455.894	- 2.555.004.626					
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.024.140.620	6.141.072.098	5.792.135.894	- 2.232.004.726	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	mitigasi bencana		
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	495.320.000	-	-	-495.320.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	-	179.920.000	179.920.000	179.920.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	9.999.900	-	-	-9.999.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000	-	-	-50.000.000						
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	10 Orang	10 Orang	50.000.000	-	-	-50.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	684.981.300	190.413.520	290.448.520	-394.532.780					
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	9.999.300	9.999.300	9.999.300	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	50.000.000	46.668.000	46.668.000	-3.332.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.003.000	15.003.000	15.003.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	35.000.000	16.500.000	16.500.000	-18.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	-	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	19.995.000	-	-	-19.995.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan,		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	554.984.000	99.993.220	200.028.220	-354.955.780	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan	100 Persen	100 Persen	494.250.000	52.950.000	52.950.000	-441.300.000						
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-8.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	36.750.000	36.750.000	36.750.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	24.500.000	14.200.000	14.200.000	-10.300.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	300 Laporan	300 Laporan	423.000.000	-	-	-423.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	100 Persen	537.080.000	1.063.818.455	1.978.818.455	1.441.738.455					
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	8 Unit	337.080.000	1.043.818.455	1.958.818.455	1.621.738.455	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	200.000.000	20.000.000	20.000.000	-180.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
68.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi** **Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten**	**32,25 55 %** **%** **32,25 55 Ha** **Ha**	**32,25 55 %** **%** **32,25 55 Ha** **Ha**	**3.370.290.000**	**1.825.000.000**	**1.854.965.000**	**- 1.515.325.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	***Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi*** ***Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas***			***3.370.290.000***	***1.825.000.000***	***1.854.965.000***	***- 1.515.325.000***						
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM 3 KM	2 KM 3 KM	1.683.810.000	1.225.000.000	1.124.965.000	-558.845.000					
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	*Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara*	3 KM	3 KM	750.000.000	500.000.000	399.965.000	-350.035.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	mitigasi bencana		
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	2 KM	0 KM	618.630.000	-	-	-618.630.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan*	3 KM	3 KM	215.180.000	725.000.000	725.000.000	509.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	-100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Panjang Irigasi Permukaan yang ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 Dokumen 2,5 KM 3 KM 5 Bendung	1 Dokumen 2,5 KM 3 KM 5 Bendung	1.686.480.000	600.000.000	730.000.000	-956.480.000						
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	3 KM	3 KM	619.580.000	100.000.000	100.000.000	-519.580.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang*	3 KM	0 KM	116.900.000	-	-	-116.900.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DAU YANG DITENTUKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Direhabilitasi							Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	*Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun*	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	-	130.000.000	-70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara*	3 UNIT	3 UNIT	750.000.000	500.000.000	500.000.000	-250.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
69.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan (Akses air minum aman perpipaan)**	**30,50 Persen**	**30,50 Persen**	**1.231.815.000**	**3.694.388.325**	**3.351.390.245**	**2.119.575.245**					**Masyarakat**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Detik 5 Liter/Detik	3 Liter/Detik 5 Liter/Detik	1.231.815.000	3.694.388.325	3.351.390.245	2.119.575.245						
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	1.116.850.000	1.187.198.325	896.384.361	-220.465.639	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	***Akses Air Minum aman perpipaan***			***114.965.000***	***2.507.190.000***	***2.455.005.884***	***2.340.040.884***						
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Detik 5 Liter/Detik	3 Liter/Detik 5 Liter/Detik	1.231.815.000	3.694.388.325	3.351.390.245	2.119.575.245						
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan*	3	20	114.965.000	2.507.190.000	2.455.005.884	2.340.040.884	Kab. Solok	DAK FISIK-BIDANG	Melanjutkan pengembangan	-		DINAS PEKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*	Liter/Detik	Liter/Detik					Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	AIR MINUM-AFIRMASI	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
70.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman)**	**8,43 Persen**	**8,43 Persen**	**7.435.354.000**	**463.550.000**	**463.550.000**	**- 6.971.804.000**					**Masyarakat**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1 Dokumen 5 Unit	1 Dokumen 5 Unit	7.435.354.000	463.550.000	463.550.000	- 6.971.804.000						
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi*	5 Unit	2 Unit	7.318.674.000	256.060.000	256.060.000	- 7.062.614.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	***Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman)***			***116.680.000***	***207.490.000***	***207.490.000***	***90.810.000***						
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1 Dokumen 5 Unit	1 Dokumen 5 Unit	7.435.354.000	463.550.000	463.550.000	- 6.971.804.000						
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	116.680.000	207.490.000	207.490.000	90.810.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
71.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**45 Persen**	**45 Persen**	**2.681.410.000**	**400.000.000**	**1.850.000.000**	**- 831.410.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas sistem	***Persentase Cakupan***			***2.681.410.000***	***400.000.000***	***1.850.000.000***	***- 831.410.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		drainase perkotaan]	***Drainase dalam Kondisi Baik***											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.681.410.000	400.000.000	1.850.000.000	- 831.410.000					
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*	2500 M	1000 M	513.020.000	400.000.000	350.000.000	- 163.020.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara*	2000 Meter	2000 Meter	150.000.000	-	-	- 150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	*Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan*	4 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	10.170.000	-	-	- 10.170.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	2.008.220.000	-	1.500.000.000	- 508.220.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
72.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**undefined**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**112.780.000**	**-**	**-**	**- 112.780.000**					**Masyarakat**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	112.780.000	-	-	- 112.780.000						
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar*	20 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	112.780.000	-	-	- 112.780.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		
73.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik**	**69 Persen**	**69 Persen**	**4.921.503.184**	**3.423.790.000**	**11.933.519.098**	**7.012.015.914**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	***Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik***			***4.921.503.184***	***3.423.790.000***	***11.933.519.098***	***7.012.015.914***						
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	4.921.503.184	3.423.790.000	11.933.519.098	7.012.015.914						
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	3 Dokumen	4.371.513.384	3.352.160.000	11.861.889.098	7.490.375.714	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	1 Dokumen	1 Dokumen	549.989.800	71.630.000	71.630.000	- 478.359.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
74.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan**	**54,50 %**	**54,50 %**	**75.145.428.000**	**24.481.511.800**	**46.728.710.308**	**- 28.416.717.692**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman]	***Tingkat Kemantapan Jalan***			***75.145.428.000***	***24.481.511.800***	***46.728.710.308***	***- 28.416.717.692***						
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	10 Jembatan 1 Dokumen 20 Jembatan	10 Jembatan 1 Dokumen 20 Jembatan	75.145.428.000	24.481.511.800	46.728.710.308	- 28.416.717.692						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Jumlah Jembatan yang Dibangun Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang Jalan yang Direkonstruksi	33,17 KM 4 Jembatan	33,17 KM 4 Jembatan									
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000	499.999.800	699.999.800	-1.300.000.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	50 KM	0 KM	650.000.000	-	-	-650.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	35 KM	35 KM	3.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	-800.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*	20 Meter	0 Meter	213.020.000	-	-	-213.020.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	33,17 KM	33,17 KM	61.446.908.000	19.923.952.000	37.880.465.008	-23.566.442.992	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PKB DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												koperasi.		
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	10 Jembatan	10 Jembatan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*	222 Meter	222 Meter	6.835.500.000	857.560.000	4.948.245.500	-1.887.254.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
75.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**7 Persen**	**7 Persen**	**41.860.700**	**-**	**-**	**- 41.860.700**					**Masyarakat**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen data dan ifomasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakam	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	25.000.000	-	-	- 25.000.000						
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	-	-	- 25.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	***Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli***			***16.860.700***	***-***	***-***	***- 16.860.700***						
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	16.860.700	-	-	- 16.860.700						
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	16.860.700	-	-	- 16.860.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
76.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di**	**100 Persen**	**100 Persen**	**893.467.900**	**879.169.900**	**823.509.421**	**- 69.958.479**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Daerah Kabupaten											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	832.099.900	879.169.900	823.509.421	- 8.590.479					
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	38.700.000	21.770.000	21.770.000	- 16.930.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	***Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten***			***854.767.900***	***857.399.900***	***801.739.421***	***- 53.028.479***					
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	832.099.900	879.169.900	823.509.421	- 8.590.479					
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	757.399.900	857.399.900	801.739.421	44.339.521	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000	-	-	- 36.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	61.368.000	-	-	- 61.368.000						
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*	10 Layanan	10 Layanan	58.368.000	-	-	- 58.368.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												produksi melalui peran aktif koperasi.			
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	-	-	- 3.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.031.564.700**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**	**- 531.564.700**						
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**2.031.564.700**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**	**- 531.564.700**						
77.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.100.000**	**-**	**-**	**- 17.100.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	***Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi***			***17.100.000***	**-**	**-**	**- *17.100.000***						
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan	100 Persen	100 Persen	17.100.000	-	-	- 17.100.000						
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	10 Berita Acara	10 Berita Acara	17.100.000	-	-	- 17.100.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
78.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.014.464.700**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**	**- 514.464.700**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	***Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan***			***2.014.464.700***	***1.000.000.000***	***1.500.000.000***	***- 514.464.700***						
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.014.464.700	1.000.000.000	1.500.000.000	- 514.464.700						
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah*	2 Dokumen	2 Dokumen	14.464.700	-	-	- 14.464.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	lingkungan hidup dan mitigasi bencana		
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	- 500.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.04.2.11.2.15.01.0000	**Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan**				**18.481.391.271**	**16.900.772.101**	**19.244.440.362,97**	**763.049.092**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.336.501.971**	**14.266.465.751**	**15.570.734.012,97**	**234.232.042**						
	1	**NON URUSAN**				**193.740.000**	**-**	**-**	**- 193.740.000**						
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**15.336.501.971**	**14.266.465.751**	**15.570.734.012,97**	**234.232.042**						
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**193.740.000**	**-**	**-**	**- 193.740.000**						
79.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 100 Persen persen 100 Persen**	**100 100 Persen persen 100 Persen**	**8.947.241.971**	**7.687.772.101**	**6.909.440.363**	**- 2.037.801.608**					**administrasi umum perangkat daerah ASN**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	163.750.000	100.887.000	100.887.000	- 62.863.000						
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	- 2.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah***			***8.942.241.971***	***7.684.772.101***	***6.906.440.363***	***- 2.035.801.608***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai Inovasi Perangkat Daerah											
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kinerja pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	8.379.491.971	7.387.772.101	6.609.440.363	-1.770.051.608					
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	8.185.751.971	7.231.772.101	6.453.440.363	-1.732.311.608	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	-	156.000.000	156.000.000	156.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	193.740.000	-	-	-193.740.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	163.750.000	100.887.000	100.887.000	-62.863.000					
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	6.000.000	2.000.000	2.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	22.500.000	14.700.000	14.700.000	-7.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	hidup dan mitigasi bencana		PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	12.000.000	5.687.000	5.687.000	-6.313.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	11.250.000	5.000.000	5.000.000	-6.250.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	107.000.000	70.500.000	70.500.000	-36.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	100 Persen	84.000.000	56.113.000	56.113.000	-27.887.000						
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	3.000.000	3.000.000	-6.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	42.813.000	42.813.000	-17.187.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	10.300.000	10.300.000	-4.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	320.000.000	143.000.000	143.000.000	-177.000.000						
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	0 Unit	0 Unit	265.000.000	128.000.000	128.000.000	-137.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	55.000.000	15.000.000	15.000.000	-40.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
80.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/kota Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000**	**124.810.000**	**149.810.000**	**- 190.000**					**Masyarakat korban bencana Masyarakat Solok Selatan**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-						
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi*	3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												produksi melalui peran aktif koperasi.			
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	***Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*** ***Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni***			***145.500.000***	***120.310.000***	***145.310.000***	***- 190.000***					
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				28.500.000	27.450.000	52.450.000	23.950.000					
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	*Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih*	3 Orang	3 Orang	28.500.000	27.450.000	52.450.000	23.950.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	3 Unit	3 Unit	114.000.000	89.860.000	89.860.000	-24.140.000						
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	60.000.000	42.074.000	42.074.000	-17.926.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	54.000.000	47.786.000	47.786.000	-6.214.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100 Persen	100 Persen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-						
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang*	3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Pembangunan Infrastruktur kawasan		DINAS PERUMAHAN KAWASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah							Semua Kel/Desa		yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
81.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha Kabupaten/Kota yang ditangani**	**42.86 42,86 Persen Persen**	**42.86 42,86 Persen Persen**	**30.000.000**	**28.364.000**	**28.364.000**	**- 1.636.000**					**Masyarakat Solok Selatan**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani***			***30.000.000***	***28.364.000***	***28.364.000***	***- 1.636.000***						
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	42,860 Persen	42,860 Persen	30.000.000	28.364.000	28.364.000	- 1.636.000						
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	30.000.000	28.364.000	28.364.000	- 1.636.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
82.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**71 52 Persen Persen**	**71 52 Persen Persen**	**6.403.000.000**	**6.425.519.650**	**8.483.119.649,97**	**2.080.119.650**					**Masyarakat Solok Selatan**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	***Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik*** ***Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)***			***6.403.000.000***	***6.425.519.650***	***8.483.119.649,97***	***2.080.119.650***						
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit	500 Unit	6.403.000.000	6.425.519.650	8.483.119.649,97	2.080.119.650						
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*	7 Lokasi	7 Lokasi	6.403.000.000	6.425.519.650	8.483.119.649,97	2.080.119.650	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.951.149.300**	**2.634.306.350**	**3.673.706.350**	**722.557.050**					
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**2.506.500.000**	**2.307.355.050**	**3.346.755.050**	**840.255.050**					
83.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**220.000.000**	**210.225.000**	**210.225.000**	**- 9.775.000**					
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	***Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti***			***220.000.000***	***210.225.000***	***210.225.000***	***- 9.775.000***					
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	210.225.000	210.225.000	- 9.775.000					
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	210.225.000	210.225.000	- 9.775.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
84.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**IKA IKL IKU**	**76.13 83,.92 79.24 indeks indeks indeks**	**76.13 83,.92 79.24 indeks indeks indeks**	**70.000.000**	**117.849.000**	**117.849.000**	**47.849.000**					**Wilayah Kabupaten Solok Selatan**	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	***Jumlah Titik Pantau Aktif Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu***			***70.000.000***	***117.849.000***	***117.849.000***	***47.849.000***						
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen	100 Persen	70.000.000	117.849.000	117.849.000	47.849.000					
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	105.501.000	105.501.000	50.501.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	12.348.000	12.348.000	- 2.652.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	lingkungan hidup dan mitigasi bencana		HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
85.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang terkelola usaha dan/atau perusahaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.000.000**	**5.120.000**	**5.120.000**	**- 9.880.000**					**usaha/kegiatan**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai persyaratan administrasi dan teknis	5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.000	5.120.000	5.120.000	- 9.880.000						
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	*Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)*	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	5.120.000	5.120.000	- 9.880.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
86.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**33.500.000**	**20.780.000**	**20.780.000**	**- 12.720.000**					**usaha/kegiatan**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Kegiatan	5 Kegiatan	33.500.000	20.780.000	20.780.000	- 12.720.000						
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	15 Usaha/Kegiatan	15 Usaha/Kegiatan	19.000.000	12.740.000	12.740.000	- 6.260.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	***Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH***			***14.500.000***	***8.040.000***	***8.040.000***	***- 6.460.000***						
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Kegiatan	5 Kegiatan	33.500.000	20.780.000	20.780.000	- 12.720.000						
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	5 Dokumen	5 Dokumen	14.500.000	8.040.000	8.040.000	- 6.460.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	lingkungan hidup dan mitigasi bencana		HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
87.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**80 Persen**	**80 Persen**	**90.000.000**	**74.801.000**	**74.801.000**	**- 15.199.000**					**Masyarakat Solok Selatan**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	***Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya***			***90.000.000***	***74.801.000***	***74.801.000***	***- 15.199.000***						
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	90.000.000	74.801.000	74.801.000	- 15.199.000						
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000	54.801.000	54.801.000	4.801.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	7 Orang	7 Orang	40.000.000	20.000.000	20.000.000	- 20.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
88.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tindak lanjut aduan masyarakat/penegakan hukum lingkungan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.000.000**	**6.570.000**	**6.570.000**	**- 8.430.000**					**Masyarakat Solok Selatan**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	***Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup***			***15.000.000***	***6.570.000***	***6.570.000***	***- 8.430.000***						
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000	6.570.000	6.570.000	- 8.430.000						
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola*	3 Pengaduan	3 Pengaduan	15.000.000	6.570.000	6.570.000	- 8.430.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
89.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan Layanan Persampahan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**2.063.000.000**	**1.872.010.050**	**2.911.410.050**	**848.410.050**					**Masyarakat Solok Selatan**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan	30 Persen	30 Persen	2.063.000.000	1.872.010.050	2.911.410.050	848.410.050						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	65 Persen	65 Persen									
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	*Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali*	10000 Ton	10000 Ton	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
		[Meningkatkan tata kelola persampahan]	***Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)***			***2.048.000.000***	***1.857.010.050***	***2.896.410.050***	***848.410.050***					
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	30 Persen 65 Persen	30 Persen 65 Persen	2.063.000.000	1.872.010.050	2.911.410.050	848.410.050					
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	47 Kelompok	47 Kelompok	150.000.000	132.697.900	132.697.900	-17.302.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	3 Unit	3 Unit	468.566.900	343.004.900	1.113.004.900	644.438.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan*	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	400.000.000	550.000.000	150.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.765.850	20.894.000	20.894.000	-2.871.850	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester,*	15000 Ton	15000 Ton	1.005.667.250	960.413.250	1.079.813.250	74.146.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		perundangan	*Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*										bencana		
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**444.649.300**	**326.951.300**	**326.951.300**	**- 117.698.000**					
90.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas VC Rasio**	**0.51 undefined 0,06 rasio rasio 0.51 undefined 0.06 undefined undefined undefined**	**0.51 undefined 0,06 rasio rasio 0.51 undefined 0.06 undefined undefined undefined**	**444.649.300**	**326.951.300**	**326.951.300**	**- 117.698.000**					**Masyarakat Solok Selatan**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan yang telah diuji	100 Persen	100 Persen	141.992.300	122.560.300	122.560.300	- 19.432.000						
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1 Orang	1 Orang	69.492.300	69.492.300	69.492.300	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*	1000 Unit	1000 Unit	35.000.000	17.268.000	17.268.000	- 17.732.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1500 Dokumen	1500 Dokumen	37.500.000	35.800.000	35.800.000	- 1.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	***Indeks Kinerja Lalu Lintas Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal***			***302.657.000***	***204.391.000***	***204.391.000***	***- 98.266.000***						
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan MRLL yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	302.657.000	204.391.000	204.391.000	- 98.266.000						
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk*	10 Laporan	10 Laporan	302.657.000	204.391.000	204.391.000	- 98.266.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pembangunan Infrastruktur kawasan		DINAS PERUMAHAN KAWASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Jalan Kabupaten/Kota							Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA	dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERHUBUNGAN
	1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**				**7.876.709.521**	**6.196.100.668**	**5.806.588.890**	**- 2.070.120.631**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.850.139.521**	**6.196.100.668**	**5.806.588.890**	**- 2.043.550.631**						
	1	**NON URUSAN**				**26.570.000**	**-**	**-**	**- 26.570.000**						
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7.850.139.521**	**6.196.100.668**	**5.806.588.890**	**- 2.043.550.631**						
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**26.570.000**	**-**	**-**	**- 26.570.000**						
91.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Nilai IKM Peragkat Daerah** **Nilai Inovasi Perangkat Daerah** **Nilai IKM Peragkat Daerah** **Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Nilai Inovasi Perangkat Daerah** **Nilai Inovasi Perangkat Daerah** **Nilai IKM Peragkat Daerah** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75** **81** **95 Persen** **Persen** **Persen** **81** **75** **95 Persen** **Persen** **Persen** **95** **75** **81 Persen** **Persen** **Persen** **95** **81** **75 Persen** **Persen** **Persen**	**75** **81** **95 Persen** **Persen** **Persen** **81** **75** **95 Persen** **Persen** **Persen** **95** **75** **81 Persen** **Persen** **Persen** **95** **81** **75 Persen** **Persen** **Persen**	**6.847.896.621**	**5.445.122.668**	**5.002.609.890**	**- 1.845.286.731**					**ASN Kantor Satpol PP & Damkar Seluruh ASN Seluruh ASN dan TKD**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***6.847.896.621***	***5.445.122.668***	***5.002.609.890***	***- 1.845.286.731***						
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.533.740.621	5.245.122.668	4.711.350.890	- 1.822.389.731						
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6.473.740.621	5.176.722.668	4.642.950.890	- 1.830.789.731	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	68.400.000	68.400.000	8.400.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	113.207.000	79.820.000	83.714.200	-29.492.800					
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.001.000	3.481.000	5.001.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	18.050.000	14.025.000	14.025.000	-4.025.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.401.000	5.401.000	7.701.000	2.300.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	17.745.000	12.891.000	12.943.200	-4.801.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	67.010.000	44.022.000	44.044.000	-22.966.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	26.570.000	17.940.000	91.291.000	64.721.000						
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	-	17.940.000	91.291.000	91.291.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	26.570.000	-	-	-26.570.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	29.890.000	26.090.000	32.065.000	2.175.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.200.000	200.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	16.000.000	15.000.000	18.045.000	2.045.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	11.890.000	9.090.000	11.820.000	-70.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	144.489.000	76.150.000	84.188.800	-60.300.200						
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	15 Unit	123.107.000	65.308.000	73.346.800	-49.760.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	1 Unit	21.382.000	10.842.000	10.842.000	-10.540.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
92.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penegakan Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100 100 persen Persen 100 Persen**	**100 100 persen Persen 100 Persen**	**501.526.900**	**341.532.000**	**337.032.000**	**- 164.494.900**					**Masyarakat Seluruh ASN dan TKD**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah yang tertangani	100 Persen	100 Persen	370.465.000	257.138.100	257.138.100	-113.326.900						
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	43.600.000	17.650.000	17.650.000	-25.950.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat]	***Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase gangguan Trantibum yang dapat***			***457.926.900***	***323.882.000***	***319.382.000***	***- 138.544.900***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
			diselesaikan ***Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*** ***Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya***												
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah yang tertangani	100 Persen	100 Persen	370.465.000	257.138.100	257.138.100	-113.326.900						
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	1 Dokumen	27.148.000	6.606.000	6.606.000	-20.542.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000	11.250.000	11.250.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	*Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja*	7 Orang	7 Orang	34.500.000	12.500.000	12.500.000	-22.000.000	-	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	4 laporan	4 laporan	253.967.000	209.132.100	209.132.100	-44.834.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 Persen	100 Persen	66.049.900	45.040.900	45.040.900	-21.009.000						
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	4 Laporan	4 Laporan	52.112.000	31.103.000	31.103.000	-21.009.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala*	4 Laporan	4 Laporan	13.937.900	13.937.900	13.937.900	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Daerah								PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	penyeludupan.		
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	100 Persen	65.012.000	39.353.000	34.853.000	-30.159.000					
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*	4 Dokumen	1 Dokumen	65.012.000	39.353.000	34.853.000	-30.159.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
93.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime)**	**100 92 Persen Persen**	**100 92 Persen Persen**	**527.286.000**	**409.446.000**	**466.947.000**	**- 60.339.000**					**Masyarakat**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	capaian waktu tanggap (respone time)	92 Persen	92 Persen	527.286.000	409.446.000	466.947.000	-60.339.000						
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal*	4 Dokumen	4 Dokumen	57.341.000	57.341.000	45.272.000	-12.069.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran]	***Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*** ***Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran*** ***Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime)***			***469.945.000***	***352.105.000***	***421.675.000***	***- 48.270.000***						
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	capaian waktu tanggap (respone time)	92 Persen	92 Persen	527.286.000	409.446.000	466.947.000	-60.339.000						
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000	269.160.000	349.980.000	-20.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan	12 Laporan	119.945.000	82.945.000	71.695.000	-48.250.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											DAERAH/BUMD			
	1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**5.142.224.020**	**3.493.600.278**	**3.588.071.560**	**- 1.554.152.460**					
	1	**NON URUSAN**				**110.000.000**	**-**	**-**	**- 110.000.000**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.032.224.020**	**3.493.600.278**	**3.588.071.560**	**- 1.444.152.460**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**110.000.000**	**-**	**-**	**- 110.000.000**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**5.032.224.020**	**3.493.600.278**	**3.588.071.560**	**- 1.444.152.460**					
94.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.645.767.061**	**2.793.600.278**	**2.728.036.530**	**- 917.730.531**					**ASN Barang Milik Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***3.645.767.061***	***2.793.600.278***	***2.728.036.530***	***- 917.730.531***						
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.955.559.654	2.619.920.278	2.512.176.530	-443.383.124						
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.887.665.654	2.565.200.278	2.443.676.530	-443.989.124	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	67.894.000	54.720.000	68.500.000	606.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	265.000.000	56.000.000	79.500.000	-185.500.000						
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	hidup dan mitigasi bencana		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	25.000.000	10.000.000	13.000.000	-12.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.000.000	7.000.000	11.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	20.000.000	8.000.000	8.000.000	-12.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	5.400.000	5.000.000	1.500.000	-3.900.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	194.600.000	25.000.000	45.000.000	-149.600.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	15.000.000	-	15.680.000	680.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu											
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	15.000.000	-	15.680.000	680.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	43.500.000	24.500.000	24.500.000	-19.000.000						
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000	2.000.000	2.000.000	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	21.500.000	21.500.000	-13.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	366.707.407	93.180.000	96.180.000	-270.527.407						
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	17 Unit	17 Unit	201.707.407	69.680.000	69.680.000	-132.027.407	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												produksi melalui peran aktif koperasi.			
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	110.000.000	-	-	- 110.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	10 Unit	25.000.000	3.500.000	6.500.000	- 18.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	30.000.000	20.000.000	20.000.000	- 10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
95.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**% masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana % Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya % penduduk terdampak bencana yang ditangani % masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana % penduduk terdampak bencana yang ditangani Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana % Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana % penduduk terdampak bencana yang ditangani % masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana**	**100 100 persen Persen 100 40 100 100 80 undefined Persen Persen Persen Persen 80 100 40 Persen Persen Persen 80 40 100 Persen Persen Persen**	**100 100 persen Persen 100 40 80 Persen Persen Persen 40 100 100 80 100 Persen Persen Persen Persen undefined 40 80 100 Persen Persen Persen**	**1.496.456.959**	**700.000.000**	**860.035.030**	**- 636.421.929**					**Masyarakat Solok Selatan Masyarakat Solok Selatan.**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			% Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penangananny Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana											
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana]	***Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana*** ***Persentase Penanganan Pasca Bencana*** ***Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana***			***1.496.456.959***	***700.000.000***	***860.035.030***	***- 636.421.929***					
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	40 Persen	40 Persen	80.000.000	58.203.530	46.098.530	-33.901.470					
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*	181525 Orang	181525 Orang	80.000.000	58.203.530	46.098.530	-33.901.470	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pesentase (%) penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	25 Persen	25 Persen	727.456.959	175.000.000	373.480.000	-353.976.959					
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*	2 Unit	2 Unit	77.456.959	-	-	-77.456.959	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	80 Orang	80 Orang	75.000.000	5.000.000	3.480.000	-71.520.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan	*Jumlah kawasan rawan*	1 Kawasan	1 Kawasan	134.766.000	150.000.000	150.000.000	15.234.000	Kab. Solok	BAGIAN LABA YANG	Melanjutkan pengembangan	Pembanguna		BADAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*							Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	n Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	35 Orang	35 Orang	70.000.000	5.000.000	5.000.000	-65.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	220.234.000	-	-	-220.234.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	13 laporan	13 laporan	85.000.000	5.000.000	205.000.000	120.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	1 Kawasan	1 Kawasan	65.000.000	10.000.000	10.000.000	-55.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) penduduk terdampak bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen	505.000.000	436.796.470	420.456.500	-84.543.500						
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	*Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas*	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	1.000.000	1.000.000	-6.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	lingkungan hidup dan mitigasi bencana		
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	324.796.470	314.907.500	64.907.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	25 Orang	25 Orang	20.000.000	10.000.000	5.715.000	-14.285.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	500 Orang	500 Orang	220.000.000	100.000.000	97.834.000	-122.166.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	1.000.000	1.000.000	-6.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) sistem dasar penanggulangan bencana yang ditata	100 Persen	100 Persen	184.000.000	30.000.000	20.000.000	-164.000.000						
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	159.000.000	20.000.000	20.000.000	-139.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												produksi melalui peran aktif koperasi.			
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	10.000.000	-	- 25.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**8.225.028.288**	**7.484.886.773**	**7.370.250.603**	**- 854.777.685**						
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.612.672.028**	**4.915.068.373**	**4.358.686.658**	**- 1.253.985.370**						
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**5.612.672.028**	**4.915.068.373**	**4.358.686.658**	**- 1.253.985.370**						
96.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**71.50 95 71.50 83 Nilai Nilai Nilai 83 71.50 95 Nilai Nilai Nilai 83 95 71.50 Nilai Nilai Nilai 95 83 71.50 Nilai Nilai Nilai**	**71.50 95 71.50 83 Nilai Nilai Nilai 83 71.50 95 Nilai Nilai Nilai 83 95 71.50 Nilai Nilai Nilai 95 83 71.50 Nilai Nilai Nilai**	**4.874.742.453**	**4.255.901.998**	**3.750.493.083**	**- 1.124.249.370**					**ASN DinsosPMD Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***4.874.742.453***	***4.255.901.998***	***3.750.493.083***	***- 1.124.249.370***						
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.464.231.353	4.058.186.918	3.485.017.083	- 979.214.270						
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.330.911.353	3.976.486.918	3.378.147.083	- 952.764.270	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	-		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												disabilitas.		
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	133.320.000	81.700.000	106.870.000	-26.450.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	164.748.100	68.826.330	96.714.550	-68.033.550						
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.037.000	4.419.000	4.419.000	-618.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	19.000.000	12.681.000	12.681.000	-6.319.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.677.000	4.677.000	4.677.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	19.569.000	7.342.000	7.342.000	-12.227.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	1.350.000	1.350.000	-4.650.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa		(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	110.465.100	38.357.330	66.245.550	-44.219.550	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	26.396.000	-	4.760.000	-21.636.000						
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	11.340.000	-	-	-11.340.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	2 Unit	15.056.000	-	4.760.000	-10.296.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	37.470.750	37.540.750	32.564.450	-4.906.300						
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000	3.570.000	3.570.000	70.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	25.200.750	25.200.750	20.224.450	-4.976.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	8.770.000	8.770.000	8.770.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	181.896.250	91.348.000	131.437.000	-50.459.250						
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	31 Unit	31 Unit	162.000.250	80.910.000	120.999.000	-41.001.250	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	19.896.000	10.438.000	10.438.000	-9.458.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
97.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**	**56.97 100 Persen Persen**	**56.97 100 Persen Persen**	**50.979.775**	**40.565.775**	**40.565.775**	**- 10.414.000**					**PSKS**	
		[Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial]	***Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS***			***50.979.775***	***40.565.775***	***40.565.775***	***- 10.414.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) ***Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial*** ***Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar*** ***Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial*** ***Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial***										
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas PSKS	100 Persen	100 Persen	50.979.775	40.565.775	40.565.775	- 10.414.000					
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Lembaga	3 Lembaga	50.979.775	40.565.775	40.565.775	- 10.414.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
98.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya undefined**	**100 Persen undefined undefined**	**100 Persen undefined undefined**	**331.969.200**	**287.165.000**	**250.980.000**	**- 80.989.200**					**Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA**	
		[Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial]	***Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya***			***331.969.200***	***287.165.000***	***250.980.000***	***- 80.989.200***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ***Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya***											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Menigkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar sertta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	283.469.200	238.665.000	203.480.000	-79.989.200					
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	120 Orang	100 Orang	49.984.000	49.985.800	45.944.800	-4.039.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	40 Orang	35 Orang	129.803.800	84.997.800	77.397.800	-52.406.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan*	5 Orang	5 Orang	4.999.900	4.999.900	4.999.900	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*	50 Orang	50 Orang	81.181.700	81.181.700	61.977.700	-19.204.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	4.999.900	4.999.900	3.539.900	-1.460.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	5.000.000	5.000.000	3.580.000	-1.420.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	4.999.900	4.999.900	3.539.900	-1.460.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dI Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	48.500.000	48.500.000	47.500.000	-1.000.000						
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	60 Orang	60 Orang	48.500.000	48.500.000	47.500.000	-1.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
99.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**2 100 95 Persen Persen Persen**	**2 100 95 Persen Persen Persen**	**219.999.700**	**196.454.700**	**185.937.900**	**- 34.061.800**					**Keluarga Miskin**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	***Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar***			***219.999.700***	***196.454.700***	***185.937.900***	***- 34.061.800***						
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan data DTSEN	100 Persen	100 Persen	219.999.700	196.454.700	185.937.900	- 34.061.800						
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	25 Orang	25 Orang	149.999.900	143.649.900	140.409.900	- 9.590.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*	320 Usulan	320 Usulan	69.999.800	52.804.800	45.528.000	- 24.471.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
100.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**134.980.900**	**134.980.900**	**130.709.900**	**- 4.271.000**					**Korban Bencana Alam dan Sosial**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Tanggap Darurat Bencana											
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	***Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana*** ***Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial*** ***Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya***			***134.980.900***	***134.980.900***	***130.709.900***	***- 4.271.000***					
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persened	100 Persened	134.980.900	134.980.900	130.709.900	- 4.271.000					
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	80 Orang	80 Orang	124.980.900	124.980.900	120.709.900	- 4.271.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	30 Orang	20 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.612.356.260**	**2.569.818.400**	**3.011.563.945**	**399.207.685**						
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**2.612.356.260**	**2.569.818.400**	**3.011.563.945**	**399.207.685**						
101.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**100 Persen**	**100 Persen**	**87.312.000**	**81.702.000**	**59.188.000**	**- 28.124.000**					**Desa/Nagari**	
		[Meningkatnya kualitas penataan desa]	***Persentase Fasilitasi Penataan Desa***			***87.312.000***	***81.702.000***	***59.188.000***	***- 28.124.000***						
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa	100 Persen	100 Persen	87.312.000	81.702.000	59.188.000	- 28.124.000						
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	*Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa*	5 Desa	5 Desa	39.152.000	33.542.000	24.134.000	- 15.018.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	produktif dan kompetitif		
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	5 Desa	5 Desa	28.160.000	28.160.000	18.975.000	- 9.185.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya*	39 Desa	39 Desa	20.000.000	20.000.000	16.079.000	- 3.921.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
102.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	**100 Persen**	**100 Persen**	**80.000.000**	**29.569.000**	**29.569.000**	**- 50.431.000**					**Desa/Nagari**	
		[Meningkatnya efektivitas kerja sama desa]	***Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa***			***80.000.000***	***29.569.000***	***29.569.000***	***- 50.431.000***						
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa	100 Persen	100 Persen	80.000.000	29.569.000	29.569.000	- 50.431.000						
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	10 Dokumen	10 Dokumen	80.000.000	29.569.000	29.569.000	- 50.431.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
103.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**100 undefined Persen Persen**	**100 undefined Persen Persen**	**1.912.677.600**	**1.918.332.600**	**1.907.596.600**	**- 5.081.000**					**Desa/Nagari**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa***			***1.912.677.600***	***1.918.332.600***	***1.907.596.600***	***- 5.081.000***						
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	100 Persen	1.912.677.600	1.918.332.600	1.907.596.600	- 5.081.000						
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*	47 Dokumen	47 Dokumen	71.819.600	64.348.600	64.348.600	- 7.471.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Desa							Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	47 Dokumen	47 Dokumen	28.204.000	24.464.000	22.323.000	-5.881.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	47 Dokumen	47 Dokumen	32.665.000	32.665.000	30.325.000	-2.340.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	39 Laporan	39 Laporan	1.779.989.000	1.796.855.000	1.790.600.000	10.611.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
104.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**532.366.660**	**540.214.800**	**1.015.210.345**	**482.843.685**					**Lembaga Kemasyarakatan**	
		[Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat*** ***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)***			***532.366.660***	***540.214.800***	***1.015.210.345***	***482.843.685***						
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa	100 Persen	100 Persen	532.366.660	540.214.800	1.015.210.345	482.843.685						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah Kabupaten/Kota												
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	11 Dokumen	11 Dokumen	30.500.000	13.978.100	13.978.100	- 16.521.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	39 Lembaga	39 Lembaga	21.866.900	52.249.940	56.659.740	34.792.840	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	39 Dokumen	39 Dokumen	20.000.000	13.987.000	9.573.000	- 10.427.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	54 Dokumen	54 Dokumen	459.999.760	459.999.760	934.999.505	474.999.745	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**15.187.086.142**	**14.412.873.527**	**16.082.078.559**	**894.992.417**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.137.086.142**	**14.386.508.527**	**16.055.713.559**	**918.627.417**						
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**15.137.086.142**	**14.386.508.527**	**16.055.713.559**	**918.627.417**						
105.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan operasional kantor** **Cakupan layanan operasional kantor** **Cakupan layanan operasional kantor**	**100 100 persen** **Persen 100 Persen**	**100 100 persen** **Persen 100 Persen**	**3.074.981.388**	**2.416.817.971**	**2.635.589.338**	**- 439.392.050**					**ASN**	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	139.541.125	69.990.000	232.906.735	93.365.610						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	8 Unit	8 Unit	134.541.125	49.990.000	212.906.735	78.365.610	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.940.440.263***	***2.366.827.971***	***2.422.682.603***	***- 517.757.660***					
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.759.620.763	2.270.733.527	2.193.252.159	-566.368.604					
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.657.210.763	2.207.853.527	2.020.372.159	-636.838.604	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	102.410.000	62.880.000	172.880.000	70.470.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	156.569.500	56.044.444	189.380.444	32.810.944					
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	1.520.000	1.520.000	-3.480.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	9.915.000	17.251.000	7.251.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	produktif dan kompetitif		
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	857.000	857.000	-4.143.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	2.258.444	2.258.444	-2.741.556	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	131.569.500	41.494.000	167.494.000	35.924.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	19.250.000	20.050.000	20.050.000	800.000						
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000	1.000.000	1.000.000	-2.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12.750.000	16.550.000	16.550.000	3.800.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	*Jumlah Laporan Penyediaan*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	2.500.000	2.500.000	-	Semua	DANA ALOKASI	Melanjutkan pengembangan	Peningkatan		DINAS TENAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Perlengkapan Kantor	*Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*						500.000	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	139.541.125	69.990.000	232.906.735	93.365.610					
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7 Unit	7 Unit	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja**	**65 Persen**	**65 Persen**	**200.000.000**	**139.110.000**	**579.110.000**	**379.110.000**					**Tenaga kerja**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	***Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi***			***200.000.000***	***139.110.000***	***579.110.000***	***379.110.000***						
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	160 orang 2.20 Persen 80 Orang	160 orang 2.20 Persen 80 Orang	200.000.000	139.110.000	579.110.000	379.110.000						
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	48 Orang	48 Orang	200.000.000	139.110.000	579.110.000	379.110.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
107.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**11.575.883.556**	**11.558.075.556**	**12.090.748.021**	**514.864.465**					**Tenaga kerja**	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	***Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan***			***11.575.883.556***	***11.558.075.556***	***12.090.748.021***	***514.864.465***						
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah	Jumlah penempatan tenaga	300 Orang	300 Orang	11.555.555.556	11.555.555.556	12.088.228.021	532.672.465						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kabupaten/Kota	kerja melalui layanan antar kerja											
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*	210 Orang	210 Orang	11.555.555.556	11.555.555.556	12.088.228.021	532.672.465	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan Tenaga Kerja melalui pengelolaan informasi pasar kerja	450 Orang	450 Orang	20.328.000	2.520.000	2.520.000	-17.808.000						
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*	450 Orang	450 Orang	5.816.000	2.520.000	2.520.000	-3.296.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	12 Orang	12 Orang	14.512.000	-	-	-14.512.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
108.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian hubungan industrial** **Persentase pencegahan dan tindak lanjut penyelesaian hubungan industrial**	**100** **100 persen %**	**100** **100 persen %**	**286.221.198**	**272.505.000**	**750.266.200**	**464.045.002**					**Tenaga kerja**	
		[Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi]	***Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan***			***286.221.198***	***272.505.000***	***750.266.200***	***464.045.002***						
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	286.221.198	272.505.000	750.266.200	464.045.002						
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	3 Perkara	3 Perkara	11.851.198	1.650.000	1.650.000	-10.201.198	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	3 Perkara	3 Perkara	5.570.000	2.055.000	2.055.000	-3.515.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	1400 Orang	1400 Orang	268.800.000	268.800.000	746.561.200	477.761.200	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**50.000.000**	**26.365.000**	**26.365.000**	**- 23.635.000**						
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**50.000.000**	**26.365.000**	**26.365.000**	**- 23.635.000**						
109.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**	**-**	**50.000.000**	**26.365.000**	**26.365.000**	**- 23.635.000**					**kawasan transmigrasi**	
		[Menigkatnya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman]	***Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya***			***50.000.000***	***26.365.000***	***26.365.000***	***- 23.635.000***						
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan pemukiman yg dikembangkan Target	8 Satuan Pemukiman	8 Satuan Pemukiman	50.000.000	26.365.000	26.365.000	-23.635.000						
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	120 Kepala Keluarga	120 Kepala Keluarga	50.000.000	26.365.000	26.365.000	-23.635.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**				**4.223.626.044**	**3.695.505.431**	**3.731.597.769**	**- 492.028.275**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.223.626.044**	**3.695.505.431**	**3.731.597.769**	**- 492.028.275**						
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.223.626.044**	**3.695.505.431**	**3.731.597.769**	**- 492.028.275**						
110.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**100 pesen 75,75 82,44 95 Nilai**	**100 pesen 75,75 81,00 95 Nilai**	**3.776.542.844**	**3.306.186.531**	**3.361.624.169**	**- 414.918.675**					**Organisasi Perangkat Daerah**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai IKM Perangkat Daerah **Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**Nilai** **Nilai undefined undefined**	**Nilai** **Nilai undefined undefined**									
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 pesen	100 pesen	117.621.000	57.354.000	66.589.000	-51.032.000					
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	14.798.000	4.725.000	4.725.000	-10.073.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***3.761.744.844***	***3.301.461.531***	***3.356.899.169***	***- 404.845.675***					
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	14.000.000	4.780.000	9.875.000	-4.125.000					
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	3 Laporan	14.000.000	4.780.000	9.875.000	-4.125.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 pesen	100 pesen	3.368.498.804	3.125.185.431	3.010.077.959	-358.420.845					
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.287.978.804	3.039.505.431	2.925.597.959	-362.380.845	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	80.520.000	85.680.000	84.480.000	3.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 pesen	100 pesen	190.363.540	42.987.600	54.202.210	-136.161.330					
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.228.000	1.481.000	1.481.000	-3.747.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	25.208.000	5.703.000	5.889.000	-19.319.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	8.017.000	2.872.000	2.872.000	-5.145.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	17.411.100	6.802.600	6.858.100	-10.553.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	6.750.000	1.500.000	1.500.000	-5.250.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	127.749.440	24.629.000	35.602.110	-92.147.330	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 pesen	100 pesen	-	-	150.000.000	150.000.000						
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	5 Unit	-	-	150.000.000	150.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 pesen	100 pesen	86.059.500	75.879.500	70.880.000	-15.179.500						
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	1.000.000	2.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	69.999.500	69.999.500	64.000.000	-5.999.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	14.060.000	4.880.000	4.880.000	-9.180.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 pesen	100 pesen	117.621.000	57.354.000	66.589.000	-51.032.000						
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	102.823.000	52.629.000	61.864.000	-40.959.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
111.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase rumah tangga yang memiliki KK, Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP, Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**65 100 99,40 pesen pesen pesen undefined undefined**	**99,40 65 100 pesen pesen pesen undefined undefined**	**232.858.700**	**155.775.300**	**136.430.000**	**- 96.428.700**					**Meningkatnya jumlah Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	***Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk***			***232.858.700***	***155.775.300***	***136.430.000***	***- 96.428.700***						
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 pesen	100 pesen	221.652.700	155.775.300	136.430.000	-85.222.700						
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*	1 Dokumen	0 Dokumen	10.990.700	-	-	-10.990.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*	1 Dokumen	1 Dokumen	166.940.000	155.775.300	136.430.000	-30.510.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	12 Laporan	0 Laporan	15.772.000	-	-	-15.772.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	12 Laporan	0 Laporan	16.410.000	-	-	- 16.410.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	*Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk*	1 Dokumen	0 Dokumen	11.540.000	-	-	- 11.540.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	100 pesen	100 pesen	11.206.000	-	-	- 11.206.000						
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	1 Laporan	0 Laporan	11.206.000	-	-	- 11.206.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
112.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100 persen** **100 pesen**	**100 persen** **100 pesen**	**76.771.200**	**120.771.300**	**120.771.300**	**44.000.100**					**Meningkatnya jumlah Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	***Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan*** ***Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan*** ***Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan*** ***Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan***			***76.771.200***	***120.771.300***	***120.771.300***	***44.000.100***						
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100 persen	100 persen	16.622.700	16.622.900	18.836.900	2.214.200						
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.352.800	10.352.800	10.352.800	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*	47 Layanan	47 Layanan	2.895.100	2.895.300	5.109.300	2.214.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan	*Jumlah Dokumen Hasil*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.374.800	3.374.800	3.374.800	-	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi	Penguatan		DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
		Diseminasi Data Pencatatan Sipil	*Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil*							Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah penduduk yang terpasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100 pesen	100 pesen	60.148.500	104.148.400	101.934.400	41.785.900						
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*	12 Laporan	12 Laporan	26.613.600	76.613.600	76.613.600	50.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil*	1 Laporan	1 Laporan	33.534.900	27.534.800	25.320.800	-8.214.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
113.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Perangkat Derah yang Memiliki Akses pemanfaatan Data kependudukan**	**100 pesen**	**100 pesen**	**108.258.000**	**78.369.700**	**78.369.700**	**- 29.888.300**					**Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan Program SIAK**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	***Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan***			***108.258.000***	***78.369.700***	***78.369.700***	***- 29.888.300***						
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan data Administrasi Kependudukan	100 pesen	100 pesen	40.000.800	23.462.500	23.462.500	-16.538.300						
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.800	23.462.500	23.462.500	-16.538.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	100 pesen	100 pesen	68.257.200	54.907.200	54.907.200	-13.350.000						
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	1 Laporan	54.907.200	54.907.200	54.907.200	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Laporan	1 Laporan	13.350.000	-	-	-13.350.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.			
114.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase buku kependudukan yang tersusun**	**100 persen**	**100 persen**	**29.195.300**	**34.402.600**	**34.402.600**	**5.207.300**					**Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan Program SIAK**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	***Persentase buku kependudukan yang tersusun***			***29.195.300***	***34.402.600***	***34.402.600***	***5.207.300***						
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.195.300	34.402.600	34.402.600	5.207.300						
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	29.195.300	34.402.600	34.402.600	5.207.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.14.2.08.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**6.306.941.322**	**4.342.658.869**	**4.687.385.556**	**- 1.619.555.766**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.306.941.322**	**4.342.658.869**	**4.687.385.556**	**- 1.619.555.766**						
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**363.245.050**	**314.953.900**	**538.243.400**	**174.998.350**						
115.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**66.00 9 % % 66.00 9 Persen Persen**	**66.00 9 % % 9 66.00 Persen Persen**	**363.245.050**	**314.953.900**	**511.011.258**	**147.766.208**					**Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Organisasi Perangkat Daerah**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyusun Gender Analysis Pathway Gender Budget Statement (GAP-GBS)	100 %	100 Persen	-	14.942.642	11.000.000	11.000.000						
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG*	3 Laporan	3 Laporan	-	14.942.642	11.000.000	11.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	***Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)*** ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan***			***363.245.050***	***300.011.258***	***500.011.258***	***136.766.208***					
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang difasilitasi	30 Lembaga	17 Persen	363.245.050	300.011.258	500.011.258	136.766.208					
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan*	1 Lembaga	3 Lembaga	363.245.050	300.011.258	500.011.258	136.766.208	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
116.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**-**	**59,5 Indeks**	**-**	**-**	**27.232.142**	**27.232.142**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif]	***Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***			-	-	***27.232.142***	***27.232.142***						
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	-	100 Persen	-	-	27.232.142	27.232.142						
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	0 Lembaga	30 Lembaga	-	-	27.232.142	27.232.142	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**5.943.696.272**	**4.027.704.969**	**4.149.142.156**	**- 1.794.554.116**						
117.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor** **Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan** **Nilai Inovasi Perangkat Daerah** **Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Nilai IKM Perangkat Daerah**	**100** **100 persen** **Persen** **100** **100 Persen** **persen** **81.00** **75.75** **95.00 Nilai** **Nilai** **Nilai**	**100** **100 persen** **Persen** **95.00** **75.75** **81.00 Nilai** **Nilai** **Nilai**	**3.255.598.272**	**2.813.472.669**	**2.934.909.856**	**- 320.688.416**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	165.408.905	99.869.000	149.869.000	- 15.539.905						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah												
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	20.861.000	20.000.000	20.000.000	-861.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***3.234.737.272***	***2.793.472.669***	***2.914.909.856***	***- 319.827.416***					
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.929.704.867	2.619.872.869	2.691.310.056	-238.394.811					
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.883.146.547	2.551.472.869	2.622.910.056	-260.236.491	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	4 Dokumen	46.558.320	68.400.000	68.400.000	21.841.680	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	128.705.000	70.900.700	70.900.700	-57.804.300					
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	6.072.000	2.503.000	2.503.000	-3.569.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.182.000	10.180.000	10.180.000	-5.002.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
										Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.545.000	4.426.000	4.426.000	-1.119.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	17.669.000	6.227.000	6.227.000	-11.442.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	4.995.000	1.995.000	1.995.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	79.242.000	45.569.700	45.569.700	-33.672.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	31.779.500	22.830.100	22.830.100	-8.949.400						
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	13.999.500	12.000.100	12.000.100	-1.999.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	12.780.000	7.830.000	7.830.000	-4.950.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	165.408.905	99.869.000	149.869.000	-15.539.905						
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	43 Unit	10 Unit	144.547.905	79.869.000	129.869.000	-14.678.905	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
118.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**TFR (Angka Kelahiran Total) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**2.42 25.30-25.09 Angka Angka**	**2.42 25.30-25.09 Angka Angka**	**101.978.600**	**-**	**-**	**- 101.978.600**					**Pasangan Usia Subur**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	***Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*** ***TFR (Angka Kelahiran Total)***			***101.978.600***	***-***	***-***	***- 101.978.600***						
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan	100 %	100 Persen	101.978.600	-	-	-101.978.600						
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	12 Dokumen	0 Dokumen	101.978.600	-	-	-101.978.600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kompetitif		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**69.90 9.80 Angka Persen**	**69.90 9.80 Angka Persen**	**1.919.529.400**	**519.432.300**	**519.432.300**	**- 1.400.097.100**					**Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Kampung KB Masyarakat**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	***Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)*** ***Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)***			***1.919.529.400***	***519.432.300***	***519.432.300***	***- 1.400.097.100***						
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana	78 %	78 %	980.046.400	105.000.300	105.000.300	- 875.046.100						
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	12 Laporan	12 Laporan	384.999.800	105.000.300	105.000.300	- 279.999.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	70 Laporan	0 Laporan	469.937.000	-	-	- 469.937.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	1 Dokumen	0 Dokumen	125.109.600	-	-	- 125.109.600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Diberdayakan	324 Orang	100 Persen	314.100.000	35.250.000	35.250.000	- 278.850.000						
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi	*Jumlah Kader yang Mengikuti*	324 Orang	324 Orang	314.100.000	35.250.000	35.250.000	-	Kab. Solok	DAK NON FISIK-	Memperkuat pembangunan	Peningkatan		DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*						278.850.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BOKKB-BOKB	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang dapat melayani MKJP	12 laporan	100 Persen	429.473.000	379.182.000	379.182.000	-50.291.000					
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1200 Orang	1600 Orang	429.473.000	379.182.000	379.182.000	-50.291.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Mandiri	35 Kampung KB	47.73 Persen	195.910.000	-	-	-195.910.000					
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	35 Kampung	0 Kampung	195.910.000	-	-	-195.910.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**13.00 Persen**	**13.00 Persen**	**666.590.000**	**694.800.000**	**694.800.000**	**28.210.000**					**Tim Pendamping Keluarga**	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang didampingi	100 %	100 %	666.590.000	694.800.000	694.800.000	28.210.000					
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	10 laporan	10 laporan	-	28.200.000	28.200.000	28.200.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			ANAK
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	***Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga***			***666.590.000***	***666.600.000***	***666.600.000***	***10.000***						
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang didampingi	100 %	100 %	666.590.000	694.800.000	694.800.000	28.210.000						
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	10 laporan	12 laporan	666.590.000	666.600.000	666.600.000	10.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**7.568.749.448**	**10.971.949.255**	**11.133.541.728**	**3.564.792.280**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.568.749.448**	**10.971.949.255**	**11.133.541.728**	**3.564.792.280**						
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**7.443.749.448**	**10.871.949.255**	**11.046.918.728**	**3.603.169.280**						
121.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 persen**	**100 persen**	**4.489.925.148**	**3.645.832.283**	**3.478.907.763**	**- 1.011.017.385**					**ASN**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***4.489.925.148***	***3.645.832.283***	***3.478.907.763***	***- 1.011.017.385***						
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.972.575.408,60	3.476.836.658	3.286.942.321	-685.633.088						
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.835.295.408,60	3.370.156.658	3.194.902.321	-640.393.088	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	7 Dokumen	137.280.000	106.680.000	92.040.000	-45.240.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan tata kelola pemerintahan		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
										Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang baik dan melayani		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan kinerja Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	244.728.144	47.857.500	78.377.317	-166.350.827					
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	9.100.000	1.500.000	2.405.000	-6.695.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	8 Paket	30.000.044	7.770.000	12.425.000	-17.575.044	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.228.100	1.000.000	1.748.000	-8.480.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	15 Paket	11.000.000	3.746.500	3.746.500	-7.253.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	100 Laporan	9.400.000	2.500.000	5.500.000	-3.900.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	110 Laporan	175.000.000	31.341.000	52.552.817	-122.447.183	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	5.090.000	-	-	-5.090.000						
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	5.090.000	-	-	-5.090.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	100 Persen	64.270.000,40	41.400.000	24.350.000	-39.920.000						
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	12 Laporan	3.000.000	1.000.000	1.500.000	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,40	28.000.000	9.950.000	-35.050.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	16.270.000	12.400.000	12.900.000	-3.370.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	203.261.595	79.738.125	89.238.125	- 114.023.470						
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	13 Unit	13 Unit	168.351.595	59.738.125	89.238.125	- 79.113.470	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	34.910.000	20.000.000	-	- 34.910.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
122.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)**	**100 100 76 indeks nilai Persen**	**100 100 76 indeks nilai Persen**	**801.273.300**	**540.000.000**	**674.794.000**	**- 126.479.300**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***			***801.273.300***	***540.000.000***	***674.794.000***	***- 126.479.300***						
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen 75 %	100 Persen 75 %	801.273.300	540.000.000	674.794.000	- 126.479.300						
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas*	1 Laporan	400 Laporan	85.760.000	87.760.000	91.760.000	6.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
			Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media									kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	1 Permohonan	600 Permohonan	15.918.300	5.926.500	15.926.500	8.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	100 Persentase	70 Persentase	225.550.000	110.000.000	245.794.000	20.244.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	3 Media	32 Media	469.245.000	333.563.500	318.563.500	-150.681.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*	60 Konten	85 Konten	4.800.000	2.750.000	2.750.000	-2.050.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
123.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah**	**3,30 Indeks**	**3,30 Indeks**	**2.152.551.000**	**6.686.116.972**	**6.893.216.965**	**4.740.665.965**					**Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	***Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah***			***2.152.551.000***	***6.686.116.972***	***6.893.216.965***	***4.740.665.965***						
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo	100 Persen	100 Persen	45.000.000	47.000.000	47.000.000	2.000.000						
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain*	0 0	1 0	45.000.000	47.000.000	47.000.000	2.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Penguatan tata kelola		DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*							Kecamatan, Semua Kel/Desa	BATUAN	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan yang baik dan melayani		INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	30 OPD	30 OPD	2.107.551.000	6.639.116.972	6.846.216.965	4.738.665.965						
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	2 Aplikasi	5 Aplikasi	419.600.000	614.800.000	823.310.000	403.710.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	1.677.918.000	6.021.316.972	6.016.306.965	4.338.388.965	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*	2 Dokumen	7 Dokumen	10.033.000	3.000.000	6.600.000	-3.433.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**89.710.000**	**74.500.000**	**68.563.000**	**- 21.147.000**						
124.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** **Persentase jumlah Elemen Data Sektoral yang dikelola**	**2,50** **100 Indeks** **persen**	**2,50** **100 Indeks** **persen**	**89.710.000**	**74.500.000**	**68.563.000**	**- 21.147.000**					**Perangkat Daerah**	
		[Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	***Indeks Pembangunan Statistik (IPS)***			***89.710.000***	***74.500.000***	***68.563.000***	***- 21.147.000***						
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaaan pembangunan daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	89.710.000	74.500.000	68.563.000	-21.147.000						
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik*	50 %	100 %	62.750.000	57.700.000	55.963.000	-6.787.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	60 Orang	60 Orang	15.200.000	8.100.000	8.100.000	-7.100.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	6 Laporan	6 Laporan	11.760.000	8.700.000	4.500.000	-7.260.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**35.290.000**	**25.500.000**	**18.060.000**	**- 17.230.000**						
125.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Tingkat Keamanan Informasi Daerah**	**2,80 100 Indeks persen**	**2,80 100 Indeks persen**	**35.290.000**	**25.500.000**	**18.060.000**	**- 17.230.000**					**Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	***Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***			***35.290.000***	***25.500.000***	***18.060.000***	***- 17.230.000***						
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerinatah Daerah	100 Persen	31,00 Angka	35.290.000	25.500.000	18.060.000	-17.230.000						
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	35.290.000	25.500.000	18.060.000	-17.230.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.18.3.29.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**3.444.143.747**	**3.060.035.423**	**2.951.213.321**	**- 492.930.426**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.444.143.747**	**3.060.035.423**	**2.951.213.321**	**- 492.930.426**						
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**3.444.143.747**	**3.060.035.423**	**2.951.213.321**	**- 492.930.426**						
126.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Meningkatnya layanan administrasi perangkat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.239.143.747**	**2.889.135.423**	**2.842.971.111**	**- 396.172.636**					**ASN DPMPTSP**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	**daerah**											
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***3.239.143.747***	***2.889.135.423***	***2.842.971.111***	***- 396.172.636***					
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.891.484.462	2.541.455.423	2.419.313.321	- 472.171.141					
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.810.064.462	2.460.035.423	2.352.053.321	- 458.011.141	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	81.420.000	81.420.000	67.260.000	- 14.160.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	217.000.000	217.020.715	240.594.235	23.594.235						
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	25.000.000	25.000.000	93.304.000	68.304.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	7.000.000	7.000.000	17.000.000	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	20.000.000	20.020.715	10.020.715	- 9.979.285	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000	150.000.000	105.269.520	- 44.730.480	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	pemberantasan kemiskinan.			TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.000.000	27.000.000	34.000.000	7.000.000						
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	22.000.000	7.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	103.659.285	103.659.285	149.063.555	45.404.270						
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	14 Unit	14 Unit	103.659.285	103.659.285	149.063.555	45.404.270	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
127.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**97,00 Persen**	**97,00 Persen**	**70.000.000**	**52.950.000**	**28.480.000**	**- 41.520.000**					**Masyarakat dan Pelaku Usaha**	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	***Realisasi Total terhadap Target Investasi***			***70.000.000***	***52.950.000***	***28.480.000***	***- 41.520.000***						
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	52.950.000	28.480.000	- 41.520.000						
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	32.950.000	8.480.000	- 41.520.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
128.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**7 Persen**	**7 Persen**	**95.000.000**	**77.950.000**	**60.060.610**	**- 34.939.390**					**Pelaku Usaha**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	***Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan***			***95.000.000***	***77.950.000***	***60.060.610***	***- 34.939.390***						
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non	Jumlah Dokumen Perizinan	3434 Izin	3434 Izin	95.000.000	77.950.000	60.060.610	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	dan Non Perizinan yang diterbitkan						34.939.390					
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	1200 Pelaku Usaha	1200 Pelaku Usaha	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	15.000.000	15.000.000	8.341.910	- 6.658.090	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	230 Kegiatan Usaha	230 Kegiatan Usaha	40.000.000	22.950.000	11.718.700	- 28.281.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
129.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.000.000**	**30.000.000**	**15.000.000**	**- 15.000.000**					**Pelaku Usaha**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	***Persentase Kerja Sama Penanaman Modal*** ***Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha***			***30.000.000***	***30.000.000***	***15.000.000***	***- 15.000.000***						
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000						
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	30.000.000	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
130.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000**	**10.000.000**	**4.701.600**	**- 5.298.400**					**Masyarakat dan Pelaku Usaha**	
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	***Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal***			***10.000.000***	***10.000.000***	***4.701.600***	***- 5.298.400***						
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan yang	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	4.701.600	- 5.298.400						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
		Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dikelola												
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.701.600	- 5.298.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.23.2.24.0.00.00.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**3.672.201.352**	**2.897.548.869**	**3.073.835.570**	**- 598.365.782**						
	2	**NON URUSAN**				**157.760.000**	**-**	**-**	**- 157.760.000**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.514.441.352**	**2.897.548.869**	**3.073.835.570**	**- 440.605.782**						
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**157.760.000**	**-**	**-**	**- 157.760.000**						
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.415.700.253**	**2.815.707.920**	**2.991.994.621**	**- 423.705.632**						
131.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP**	**75.75 85 95 Nilai Nilai Nilai 75,75 95 85 Nilai Nilai Nilai 75.75 Persen 85.00 95.00 75.00 Persen Persen Persen**	**75.75 85 95 Nilai Nilai Nilai 75,75 95 85 Nilai Nilai Nilai 75.75 Persen 85.00 95.00 75.00 Persen Persen Persen**	**3.028.113.403**	**2.335.250.920**	**2.511.537.621**	**- 516.575.782**					**Barang Milik Daerah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Opersional Perangkat Daerah Operasional Penunjang Urusan Kantor Opersional Perangkat Daerah**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah yang terpelihara	100 Peresn	100 Peresn	109.504.885	56.421.805	85.553.505	- 23.951.380						
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	80.822.125	42.455.805	71.587.505	- 9.234.620	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.947.291.278***	***2.292.795.115***	***2.439.950.116***	***- 507.341.162***						
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase pemenuhan	100 Persen	100 Persen	2.576.914.592	2.143.410.920	2.319.697.621	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		Daerah	kinerja pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						257.216.971					
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.515.234.592	2.066.270.920	2.242.557.621	- 272.676.971	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	61.680.000	77.140.000	77.140.000	15.460.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat Waktu	100 persen	100 persen	135.319.926	73.644.195	44.512.495	- 90.807.431						
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.008.000	3.137.000	3.137.000	- 871.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	12 Paket	22.220.000	13.628.000	13.628.000	- 8.592.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	13.760.000	-	-	- 13.760.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	*Jumlah Paket Peralatan*	4 Paket	4 Paket	-	10.558.000	10.558.000	10.558.000	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Memperkuat pembangunan	Peningkatan		DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Tangga	*Rumah Tangga yang Disediakan*							Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	22.000.000	10.500.000	7.500.000	-14.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	70.331.926	34.321.195	8.189.495	-62.142.431	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	206.374.000	61.774.000	61.774.000	-144.600.000						
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	12 Laporan	3.000.000	2.400.000	2.400.000	-600.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	59.374.000	59.374.000	59.374.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	produktif dan kompetitif		
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000	-	-	- 144.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah yang terpelihara	100 Peresn	100 Peresn	109.504.885	56.421.805	85.553.505	- 23.951.380						
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	28.682.760	13.966.000	13.966.000	- 14.716.760	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
132.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvesional dan digital)**	**3,86 Persen 5.11 Persen**	**4100 orang**	**545.346.850**	**480.457.000**	**480.457.000**	**- 64.889.850**					**Pustaka Sekolah dan Pustaka Nagari**	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	***Rasio Kunjungan Pustaka***			***545.346.850***	***480.457.000***	***480.457.000***	***- 64.889.850***						
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola Jumlah Perpustakaan yang dikelola	12 Mou 15 Pustaka 1 Layanan 1 Pustaka 1 Pustakawan 2000 Eksemplar 8 Koleksi	15 Pustaka	475.410.850	349.244.000	375.158.000	- 100.252.850						
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	8 Perpustakaan	7 Perpustakaan	58.800.000	90.663.500	80.562.600	21.762.600	-	PAJAK REKLAME DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	386.260.850	228.796.650	288.656.300	- 97.604.550	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan kualitas sumber daya		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya							Semua Kel/Desa	BLPS	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	8 Eksemplar	8 Eksemplar	30.350.000	29.783.850	5.939.100	- 24.410.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	3 Kegiatan	-	69.936.000	131.213.000	105.299.000	35.363.000						
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	8 Orang	3 Orang	69.936.000	131.213.000	105.299.000	35.363.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**98.741.099**	**81.840.949**	**81.840.949**	**- 16.900.150**						
133.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP**	**85.00 95.00 75.00 Persen Persen Persen**	**85.00 95.00 75.00 Persen Persen Persen**	**12.810.000**	**8.160.000**	**8.160.000**	**- 4.650.000**					**Operasional Penunjang Urusan Kantor**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***12.810.000***	***8.160.000***	***8.160.000***	***- 4.650.000***						
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	12.810.000	8.160.000	8.160.000	- 4.650.000						
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Laporan	2 Laporan	12.810.000	8.160.000	8.160.000	- 4.650.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
134	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Persentase perangkat**	**83.33**	**83.33**	**62.761.099**	**62.761.099**	**62.761.099**	**-**					**OPD dan Nagari**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
.		**ARSIP**	**daearah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis**	**Persen**	**Persen**									**Sekolah, Nagari dan OPD**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	***Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis***			***62.761.099***	***62.761.099***	***62.761.099***	**-**					
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis daerah yang dikelola	65.50 Persen	65.50 Persen	32.397.399	32.397.399	32.397.399	-					
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*	2 Berkas	2 Berkas	14.486.399	14.486.399	14.486.399	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*	10 Laporan	10 Laporan	17.911.000	17.911.000	17.911.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpan Jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	30.363.700	30.363.700	30.363.700	-						
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	30.363.700	30.363.700	30.363.700	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
135.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**60 Persen 60 Persen**	**60 Persen 60 Persen**	**23.170.000**	**10.919.850**	**10.919.850**	**- 12.250.150**					**Nagari, Masyarakat, Sekolah dan OPD**	
		[Pengelolaan Arsip Daerah]	***Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup*** ***Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan***			***23.170.000***	***10.919.850***	***10.919.850***	***- 12.250.150***						
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang dilindungi dan diselamatkan	90 Persen	90 Persen	8.981.000	3.581.000	3.581.000	- 5.400.000						
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip	*Jumlah Arsip yang Dilakukan*	1 Arsip	1 Arsip	8.981.000	3.581.000	3.581.000	-	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Memperkuat pembangunan	-		DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
		Akibat Bencana	*Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*						5.400.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan,dan pemekaran daerah kecamatan desa/kelurahan	95 Persen	95 Persen	14.189.000	7.338.850	7.338.850	-6.850.150						
	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan*	1 Arsip	1 Arsip	14.189.000	7.338.850	7.338.850	-6.850.150	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.26.2.22.2.19.01.0000	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**				**9.228.835.795**	**5.773.365.935**	**7.410.349.428**	**- 1.818.486.367**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.413.273.456**	**1.989.701.000**	**3.508.291.000**	**1.095.017.544**						
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**1.507.500.000**	**1.229.701.000**	**2.329.291.000**	**821.791.000**						
136.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda** **Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan** **Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan** **Rasio Wirausaha Pemuda**	**2.25** **3.76 Persen** **Persen**	**2.25** **3.76 Persen** **Persen** **3.76** **2.25 Persen** **Persen**	**50.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**	**30.000.000**					**Organisasi Kepemudaan Pemuda Pelaku Wirausaha**	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	***Rasio Wirausaha Pemuda*** ***Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan***			***50.000.000***	***80.000.000***	***80.000.000***	***30.000.000***						
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	25 Orang	25 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-						
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	25 Orang	25 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
		Kabupaten/kota										prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Organisasi	4 Organisasi	25.000.000	55.000.000	55.000.000	30.000.000						
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	25 Orang	4 Orang	25.000.000	55.000.000	55.000.000	30.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
137.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)**	**4.16 Persen**	**4.16 Persen**	**1.332.500.000**	**1.024.701.000**	**2.124.291.000**	**791.791.000**					**Atlet Atlet Organisasi Olahraga**	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga]	***Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)***			***1.332.500.000***	***1.024.701.000***	***2.124.291.000***	***791.791.000***						
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia	10 Unit	5 Unit	441.818.000	225.000.000	225.000.000	-216.818.000						
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	10 Unit	5 Unit	441.818.000	225.000.000	225.000.000	-216.818.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Kegiatan	-	50.000.000	-	-	-50.000.000						
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	*Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota*	1 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000	-	-	-50.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
			Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota											
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	540.682.000	499.701.000	1.599.291.000	1.058.609.000						
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	1 Lembaga	1 Lembaga	540.682.000	499.701.000	1.599.291.000	1.058.609.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
138.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**25 Persen**	**25 Persen**	**125.000.000**	**125.000.000**	**125.000.000**	**-**					**SDM Kepramukaan**	
		[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan***			***125.000.000***	***125.000.000***	***125.000.000***	***-***						
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-						
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	50 Orang	50 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**905.773.456**	**760.000.000**	**1.179.000.000**	**273.226.544**						
139.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**793.273.456**	**735.000.000**	**1.154.000.000**	**360.726.544**					**Lembaga adat dan Pelaku Adat**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan***			***793.273.456***	***735.000.000***	***1.154.000.000***	***360.726.544***						
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan	2 Objek	2 Objek	623.273.456	710.000.000	1.129.000.000	505.726.544						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan											
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	2 Objek	2 Objek	623.273.456	710.000.000	1.129.000.000	505.726.544	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	70 Orang	50 Orang	170.000.000	25.000.000	25.000.000	-145.000.000						
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*	70 Orang	50 Orang	70.000.000	25.000.000	25.000.000	-45.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*	40 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	-100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
140.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**	**77.77 Persen**	**77.77 Persen**	**80.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**- 55.000.000**						
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	***Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan***			***80.000.000***	***25.000.000***	***25.000.000***	***- 55.000.000***						
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	30 Orang	80.000.000	25.000.000	25.000.000	-55.000.000						
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	50 Orang	30 Orang	80.000.000	25.000.000	25.000.000	-55.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
141.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan** **Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**80 100 Persen Persen**	**80 100 Persen Persen**	**32.500.000**	**-**	**-**	**- 32.500.000**						
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	***Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*** ***Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan***			***32.500.000***	***-***	***-***	***- 32.500.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	3 Objek	0 Objek	32.500.000	-	-	- 32.500.000						
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	*Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan*	3 Objek	0 Objek	32.500.000	-	-	- 32.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**6.815.562.339**	**3.783.664.935**	**3.902.058.428**	**- 2.913.503.911**						
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**6.815.562.339**	**3.783.664.935**	**3.902.058.428**	**- 2.913.503.911**						
142.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**75 95 81 Angka Angka Angka 81 75 95 Angka Angka Angka 95 75 81 Angka Angka Angka**	**3.848.062.339**	**3.263.664.935**	**3.397.558.428**	**- 450.503.911**					**ASN**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***3.848.062.339***	***3.263.664.935***	***3.397.558.428***	***- 450.503.911***						
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	3.437.224.438	3.044.264.935	2.952.658.428	- 484.566.010						
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.285.484.438	2.876.264.935	2.803.658.428	- 481.826.010	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	151.740.000	168.000.000	149.000.000	- 2.740.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	209.837.901	98.500.000	185.200.000	- 24.637.901						
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	3.337.901	2.250.000	2.950.000	- 387.901	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	17.500.000	14.500.000	14.500.000	- 3.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	*Jumlah Paket Peralatan*	4 Paket	4 Paket	8.000.000	4.750.000	8.750.000	750.000	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Membangun dari desa dan	Peningkatan		DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Tangga	*Rumah Tangga yang Disediakan*							Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	22.000.000	12.000.000	12.000.000	- 10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	5.000.000	5.000.000	- 4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000	60.000.000	142.000.000	- 8.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen	-	-	3.000.000	103.000.000	103.000.000						
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	5 Unit	-	3.000.000	103.000.000	103.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-	51.000.000	44.672.000	44.672.000	- 6.328.000						
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	3.200.000	3.200.000	- 800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	39.000.000	35.472.000	35.472.000	- 3.528.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	6.000.000	6.000.000	- 2.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-	150.000.000	73.228.000	112.028.000	- 37.972.000						
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	120.000.000	69.500.000	101.500.000	- 18.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	30.000.000	3.728.000	10.528.000	- 19.472.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
143.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Tingkat Hunian Akomodasi Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**5.2 14 Persen Persen**	**14 5.2 Persen Persen**	**2.617.500.000**	**190.000.000**	**231.818.000**	**- 2.385.682.000**					**Objek Wisata dan Pokdarwis**	
		[Meningkatnya daya tarik	***Persentase Pertumbuhan***			***2.617.500.000***	***190.000.000***	***231.818.000***	***- 2.385.682.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		destinasi pariwisata]	***Kunjungan Wisatawan Tingkat hunian akomodasi***											
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Dokumen 3 Unit	4 Unit	2.617.500.000	190.000.000	231.818.000	- 2.385.682.000					
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	3 Unit	4 Unit	2.467.500.000	190.000.000	231.818.000	- 2.235.682.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	-	-	- 150.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
144.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Pariwisata yang Meningkat Kunjungan Wisatawannya**	**80 Persen**	**80 Persen**	**250.000.000**	**230.000.000**	**92.158.000**	**- 157.842.000**					**Masyarakat / Wisatawan**	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	***Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya***			***250.000.000***	***230.000.000***	***92.158.000***	***- 157.842.000***						
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000	230.000.000	92.158.000	- 157.842.000						
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000	230.000.000	92.158.000	- 157.842.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
145.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**12.69 Persen**	**12.69 Persen**	**-**	**75.000.000**	**168.824.000**	**168.824.000**					**Pelaku Ekonomi Kreatif**	
		[Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	***Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual***			***-***	***75.000.000***	***168.824.000***	***168.824.000***						
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Terlaksananya Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Kegiatan	2 Promosi	-	75.000.000	168.824.000	168.824.000						
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	*Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif*	-	2 Promosi	-	75.000.000	168.824.000	168.824.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
146.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**62 Persen 63.49 Persen**	**63,49 Persen 63.49 Persen**	**100.000.000**	**25.000.000**	**11.700.000**	**- 88.300.000**					**pelaku pariwisata SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	***Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi***			***100.000.000***	***25.000.000***	***11.700.000***	***- 88.300.000***						
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	1 Laporan	-	100.000.000	-	-	- 100.000.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	-	-	-100.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	25.000.000	11.700.000	11.700.000					
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*	-	50 Orang	-	25.000.000	11.700.000	11.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.27.2.09.3.25.01.0000	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**				**15.827.903.986**	**14.362.025.149**	**12.063.626.248**	**- 3.764.277.738**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**200.000.000**	**187.994.000**	**205.494.000**	**5.494.000**					
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**200.000.000**	**187.994.000**	**205.494.000**	**5.494.000**					
147.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Jumlah Cadangan Pangan**	**142,9 Persen**	**142,9 Persen**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**				**Masyarakat**	
		[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	***Persentase Jumlah Cadangan Pangan***			***10.000.000***	***10.000.000***	***10.000.000***	**-**					
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	6 Unit	6 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-					
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	6 Unit	6 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
148.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor pola pangan harapan**	**84 persen**	**93,60 persen**	**110.000.000**	**104.228.000**	**121.728.000**	**11.728.000**				**Masyarakat**	
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	***Skor Pola Pangan Harapan***			***110.000.000***	***104.228.000***	***121.728.000***	***11.728.000***					
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000	47.113.000	47.113.000	-2.887.000					
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	47.113.000	47.113.000	-2.887.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Data Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	57.115.000	74.615.000	14.615.000						
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	57.115.000	74.615.000	14.615.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
149.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**	**-**	**60.000.000**	**53.766.000**	**53.766.000**	**- 6.234.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan]	***Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan***			***60.000.000***	***53.766.000***	***53.766.000***	***- 6.234.000***						
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan kerawanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	53.766.000	53.766.000	- 6.234.000						
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	*Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	53.766.000	53.766.000	- 6.234.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
150.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	***Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan***			***20.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***	**-**						
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-						
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**15.627.903.986**	**14.174.031.149**	**11.858.132.248**	**- 3.769.771.738**						
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**250.164.070**	**238.164.070**	**250.889.070**	**725.000**						
151.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**2758 Ton/Tahun 2779,62 Ton/Tahun**	**2758 Ton/Tahun 2779,62 Ton/Tahun**	**217.062.220**	**217.062.220**	**229.787.220**	**12.725.000**					**Masyarakat**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah unit Perikanan Yang Beroperasi	2 Kelompok/	2 Kelompok/	55.304.000	55.304.000	55.304.000	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Tercapainya Peningkatan Produksi Benih dan Produksi Ikan Konsumsi dengan Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan serta Pelestarian Perairan Umum	Unit 35 Pokdakan	Unit 35 Pokdakan									
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Unit	2 Unit	55.304.000	55.304.000	55.304.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidava]	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***			***161.758.220***	***161.758.220***	***174.483.220***	***12.725.000***					
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penumbuhan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Perikanan	4 Kelompok	4 Kelompok	161.758.220	161.758.220	174.483.220	12.725.000					
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	3 Kelompok	3 Kelompok	161.758.220	161.758.220	174.483.220	12.725.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
152.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**17,4 Kg/Kapita/ Tahun**	**19,8 Kg/Kapita/ Tahun**	**33.101.850**	**21.101.850**	**21.101.850**	**- 12.000.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	***Angka Konsumsi Ikan***			***33.101.850***	***21.101.850***	***21.101.850***	***- 12.000.000***						
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penumbuhan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Perikanan serta Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	1 Kelompok	1 Kelompok	33.101.850	21.101.850	21.101.850	- 12.000.000						
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	33.101.850	21.101.850	21.101.850	- 12.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**15.377.739.916**	**13.935.867.079**	**11.607.243.178**	**- 3.770.496.738**						
153.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**100 100 100 Persen persen Persen 100 100 100 Persen Persen persen 100 100**	**74,63 85 95 Nilai Nilai Nilai 74,63 85 95 Nilai Nilai Nilai 85 95 74,63 Nilai Nilai**	**13.678.304.766**	**12.150.696.929**	**9.294.241.633**	**- 4.384.063.133**					**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Inovasi Perangkat Daerah	**persen Persen**	**Nilai**									
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)***			***13.678.304.766***	***12.150.696.929***	***9.294.241.633***	***- 4.384.063.133***					
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	12.885.406.705	11.763.201.149	8.649.795.853	- 4.235.610.852					
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	12.603.386.705	11.330.061.149	8.363.605.853	- 4.239.780.852	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	282.020.000	433.140.000	286.190.000	4.170.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	229.582.761	153.959.875	316.959.875	87.377.114						
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	20.000.000	8.000.000	10.000.000	- 10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	84.814.800	51.900.000	123.900.000	39.085.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang*	4 Paket	4 Paket	22.000.000	10.000.000	15.000.000	- 7.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Peningkatan ekonomi		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	kerakyatan dan daya saing daerah		PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	16.337.086	8.000.000	16.000.000	-337.086	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	4.995.000	4.995.000	4.995.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	81.435.875	71.064.875	147.064.875	65.629.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	-	-	12.500.000	12.500.000						
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	-	-	12.500.000	12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 Persen 2 Jenis	100 Persen 2 Jenis	273.000.000	95.000.000	87.000.000	-186.000.000						
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	90.000.000	82.000.000	-18.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*	12 Laporan	0 Laporan	168.000.000	-	-	-168.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Peningkatan ekonomi		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Kantor yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	kerakyatan dan daya saing daerah		PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	290.315.300	138.535.905	227.985.905	- 62.329.395						
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	112 Unit	112 Unit	210.000.000	108.535.905	175.035.905	- 34.964.095	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	55 Unit	55 Unit	30.315.300	15.000.000	20.000.000	- 10.315.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	50.000.000	15.000.000	32.950.000	- 17.050.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
154.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Produksi hasil Kopi Meningkatnya Produksi hasil Kapulaga Meningkatnya Produksi hasil Jagung Meningkatnya Produksi hasil Bawang Merah Meningkatnya Produksi hasil Durian Meningkatnya Produksi Hasil Kelapa Sawit Meningkatnya Produksi Telur Meningkatnya Produksi hasil Manggis Meningkatnya Produksi hasil Kacang Tanah Meningkatnya Produksi hasil pertanian Padi Meningkatnya Produksi hasil Cabe Meningkatnya Produksi hasil Porang Meningkatnya Produksi hasil populasi ternak besar**	**17.995 35.101,41 89.491,9 77.179,1 4.250,6 3.614,7 2.512,9 2.237,4 377,425 Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 4655 38 3862 26136 242 120924 127,061 853**	**17.995 2.512,9 4.250,6 2.237,4 377,425 3.614,7 35.101,41 89.491,9 77.179,1 Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 35.101,410 2.237,4 377,425 77.179,1 89.491,9 17.995 3.614,700 2.512,9**	**380.536.000**	**964.901.000**	**1.525.778.000**	**1.145.242.000**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Populasi Ternak Besar **Produksi Bawang Merah** **Produksi Durian** **Produksi Cabe** **Produksi Telur** **Produksi Kopi** **Produksi Sawit** **Produksi Padi** **Produksi Jagung** **Produksi Sawit** **Produksi Cabe** **Produksi Telur** **Produksi Jagung** **Produksi Padi** **Populasi Ternak Besar** **Produksi Kopi** **Produksi Bawang Merah** **Produksi Durian**	**7530** **72968** **6271** **480** **470,03 Ton** **Ton** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **89.491,9** **17.995** **77.179,1** **35.101,410** **377,425** **2.237,4** **4.250,6** **2.512,9** **3.614,700** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton**	**4.250,6** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **3862** **6271** **120924** **4655** **38** **72968** **470,03** **480** **853** **127,061** **7530** **242** **26136 Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ekor**									
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase perlaksanaan Penyedian Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	-	134.000.000	132.425.000	132.425.000					
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	0 Dosis	2 Dosis	-	134.000.000	132.425.000	132.425.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	***Jumlah Produksi Jagung*** ***Jumlah Produksi Padi*** ***Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah*** ***Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai*** ***Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi*** ***Jumlah Produksi Telur*** ***Total Produksi Durian*** ***Total Produksi Ternak***			***380.536.000***	***830.901.000***	***1.393.353.000***	***1.012.817.000***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
			Besar												
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	72.536.000	477.636.000	912.418.000	839.882.000						
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	1 Laporan	72.536.000	477.636.000	912.418.000	839.882.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100 Persen	100 Persen	308.000.000	353.265.000	480.935.000	172.935.000						
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	96.265.000	92.485.000	-7.515.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	2 Dokumen	2 Dokumen	178.000.000	224.000.000	355.450.000	177.450.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	30.000.000	33.000.000	33.000.000	3.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
155.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Produktivitas Padi Produktivitas Jagung Produktivitas Jagung Cakupan Luas Lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Produktivitas Padi**	**20 8804,23 5,91 5,7 5,87 8794,23 100 10 12,10 1,71 2,52 4,4 Ha Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ha Persen Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha**	**100 4,4 5,7 Persen Ton/Ha Ton/Ha 5,7 100 4,4 Ton/Ha Persen Ton/Ha**	**733.979.150**	**527.522.150**	**655.903.545**	**- 78.075.605**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
				5,7 10 20 100 4,4 8794,23 8804,23 Ton/Ha Ha Ha Persen Ton/Ha Ha Ha										
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	***Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B***			***733.979.150***	***527.522.150***	***655.903.545***	***- 78.075.605***					
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan Prasana Pertanian yang dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	511.979.150	305.522.150	328.067.545	-183.911.605					
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	2 Laporan	2 Laporan	76.058.150	76.058.150	98.608.150	22.550.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*	300 Ha	100 Ha	435.921.000	229.464.000	229.459.395	-206.461.605	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	222.000.000	222.000.000	327.836.000	105.836.000					
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	*Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	182.000.000	182.000.000	234.511.000	52.511.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	1 Unit	1 Unit	40.000.000	40.000.000	93.325.000	53.325.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
156.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan penanggulangan kasus penyakit hewan menular Strategis yang ditangani Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**	**42 100 Persen Persen**	**100 42 Persen Persen**	**80.000.000**	**71.735.000**	**67.640.000**	**- 12.360.000**					**Masyarakat**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Pelayanan Administrasi dan Kesehatan Vaksinasi Jembrana	1500 Layanan 200	1500 Layanan 200	80.000.000	71.735.000	67.640.000	-12.360.000					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Vaksinasi PMK Vaksinasi Rabies	Layanan 400 Layanan	Layanan 400 Layanan									
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	71.735.000	67.640.000	-12.360.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
157.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian (hama)**	**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	***Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian***			***20.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***	**-**						
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-						
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	20 Ha	20 Ha	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
158.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Utama) Persentase ketersediaan penyuluh Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Madya) Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Lanjut) Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Persentase peningkatan Kelas Kelompok Tani (Pemula)**	**33,62 0,23 64,55 64,37 100 1,77 50 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**0,23 100 1,77 33,62 50 64,55 64,37 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**484.920.000**	**201.012.000**	**43.680.000**	**- 441.240.000**					**Kelompok Tani**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	***Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan***			***484.920.000***	***201.012.000***	***43.680.000***	***- 441.240.000***						
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang dibina Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	484.920.000	201.012.000	43.680.000	-441.240.000						
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	25 Unit	0 Unit	259.920.000	-	-	-259.920.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											PERTANIAN	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1 Unit	1 Unit	15.000.000	-	-	-15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	7 Unit	7 Unit	210.000.000	201.012.000	43.680.000	-166.320.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.2.09.3.25.01.0001	**UPTD Puskeswan**				**98.000.000**	**98.000.000**	**94.939.000**	**- 3.061.000**						
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**98.000.000**	**98.000.000**	**94.939.000**	**- 3.061.000**						
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**98.000.000**	**98.000.000**	**94.939.000**	**- 3.061.000**						
159.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan penanggulangan kasus penyakit hewan menular Strategis yang ditangani Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**	**100 42 Persen Persen**	**100 42 Persen Persen**	**98.000.000**	**98.000.000**	**94.939.000**	**- 3.061.000**					**Masyarakat**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	98.000.000	98.000.000	94.939.000	-3.061.000						
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	1 Laporan	98.000.000	98.000.000	94.939.000	-3.061.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.2.09.3.25.01.0002	**UPTD Balai Benih**				**165.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**	**-**						
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**165.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**	**-**						
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**165.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**	**-**						
160.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Telur Meningkatnya Produksi hasil Cabe Meningkatnya Produksi hasil Manggis Meningkatnya Produksi hasil pertanian Padi**	**17.995 3.614,7 35.101,410 72968 377,425 7530**	**377,425 7530 480 127,061 77.179,1 470,03 853**	**165.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**	**-**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
			Produksi Jagung **Meningkatnya Produksi Telur** **Meningkatnya Produksi hasil Kacang Tanah** **Meningkatnya Produksi hasil Kapulaga** **Meningkatnya Produksi hasil Bawang Merah** **Produksi Cabe** **Meningkatnya Produksi hasil Porang** **Produksi Bawang Merah** **Meningkatnya Produksi hasil populasi ternak besar** **Produksi Padi** **Produksi Durian** **Meningkatnya Produksi hasil Durian** **Populasi Ternak Besar** **Meningkatnya Produksi Hasil Kelapa Sawit** **Produksi Kopi** **Meningkatnya Produksi hasil Jagung** **Produksi Sawit** **Meningkatnya Produksi hasil Kopi**	**26136** **2.512,9** **77.179,1** **242** **2.237,4** **120924** **853** **127,061** **89.491,9** **470,03** **480** **4.250,6** **38** **3862** **6271** **4655 Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton**	**6271** **4655** **2.237,4** **242** **2.512,9** **26136** **89.491,9** **4.250,6** **38** **17.995** **72968** **3.614,7** **120924** **35.101,410** **3862 Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton** **Ekor** **Ton** **Ton** **Ton** **Ton**									
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	**-**			***165.000.000***	***165.000.000***	***165.000.000***	**-**					
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat	100 Persen	100 Persen	165.000.000	165.000.000	165.000.000	-					
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	145.000.000	145.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.2.09.3.25.01.0003	**UPTD BBI Pakan Salasa**				**420.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**	**- 120.000.000**					
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN**				**420.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**	**- 120.000.000**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
		PILIHAN													
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**420.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**	**- 120.000.000**						
161.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)**	**2.779,62 2758 Ton Ton/Tahun**	**2.779,62 2758 Ton Ton/Tahun**	**420.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**	**- 120.000.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidava]	**-**			***420.000.000***	***300.000.000***	***300.000.000***	***- 120.000.000***						
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah unit Perikanan Yang Beroperasi Tercapainya Peningkatan Produksi Benih dan Produksi Ikan Konsumsi dengan Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan serta Pelestarian Perairan Umum	2 Kelompok/ Unit 35 Pokdakan	2 Kelompok/ Unit 35 Pokdakan	420.000.000	300.000.000	300.000.000	- 120.000.000						
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Unit	2 Unit	420.000.000	300.000.000	300.000.000	- 120.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.31.2.17.3.30.01.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**				**6.238.842.358**	**5.772.215.882**	**6.386.972.102**	**148.129.744**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.080.000.000**	**867.845.000**	**1.266.207.000**	**186.207.000**						
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.080.000.000**	**867.845.000**	**1.266.207.000**	**186.207.000**						
162.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**22.000.000**	**27.000.000**	**17.000.000**					**KSP/USP**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi sehat Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat	-	16 unit 16 Unit	10.000.000	22.000.000	27.000.000	17.000.000						
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	10.000.000	22.000.000	27.000.000	17.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
163.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000**	**28.000.000**	**21.238.051**	**- 8.761.949**					**Pengurus/Anggota Koperasi**	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	***Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan***			***30.000.000***	***28.000.000***	***21.238.051***	***- 8.761.949***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen Pengurus/Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan Persentase pengurus/pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	-	1,26 persen 54.7 Persen	30.000.000	28.000.000	21.238.051	- 8.761.949					
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	30 Orang	30 Orang	30.000.000	28.000.000	21.238.051	- 8.761.949	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
164.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**	**-**	**-**	**140.000.000**	**81.952.000**	**53.452.890**	**- 86.547.110**					**UMKM**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	***Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal*** ***Pertumbuhan Wirausaha***			***140.000.000***	***81.952.000***	***53.452.890***	***- 86.547.110***						
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perizinan serta kemitraan	-	159 Unit Usaha 159 Unit Usaha	140.000.000	81.952.000	53.452.890	- 86.547.110						
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	80.000.000	47.912.000	35.002.000	- 44.998.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*	50 Orang	50 Orang	60.000.000	34.040.000	18.450.890	- 41.549.110	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
165.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**	**-**	**900.000.000**	**735.893.000**	**1.164.516.059**	**264.516.059**					**UMKM**	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	***Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil***			***900.000.000***	***735.893.000***	***1.164.516.059***	***264.516.059***						
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi Usaha Kecil	-	15 Usaha Mikro	900.000.000	735.893.000	1.164.516.059	264.516.059						
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*	350 Unit Usaha	500 Unit Usaha	900.000.000	735.893.000	1.164.516.059	264.516.059	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
											UMUM (DAU)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**5.153.842.358**	**4.904.370.882**	**5.054.370.882**	**- 99.471.476**						
	3	**NON URUSAN**				**5.000.000**	**-**	**-**	**- 5.000.000**						
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**575.000.000**	**689.327.200**	**653.162.170**	**78.162.170**						
166.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**	**-**	**-**	**6.150.000**	**6.150.000**	**17.992.000**	**11.842.000**					**Sarana perdagangan**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	***Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya***			***6.150.000***	***6.150.000***	***17.992.000***	***11.842.000***						
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdaganganyang dikelola Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan di kelola	4 Buah 98 %	4 Buah 98 %	6.150.000	6.150.000	17.992.000	11.842.000						
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	1 Unit	1 Unit	6.150.000	6.150.000	17.992.000	11.842.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Pasar Muara Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
167.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**	**-**	**-**	**442.862.200**	**442.862.200**	**432.965.200**	**- 9.897.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	***Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting***			***442.862.200***	***442.862.200***	***432.965.200***	***- 9.897.000***						
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Presentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	41.750.000	41.750.000	31.853.000	- 9.897.000						
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	4 Laporan	4 Laporan	41.750.000	41.750.000	31.853.000	- 9.897.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu Koefisien Harga barang Kebutuhan Pokok antar waktu	-	10,13 % 10-13 Koefisien	401.112.200	401.112.200	401.112.200	-						
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang*	1 Laporan	1 Laporan	401.112.200	401.112.200	401.112.200	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Peningkatan ekonomi kerakyatan		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kabupaten/Kota	*Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*							Semua Kel/Desa		pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan daya saing daerah		KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
168.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**	**-**	**75.672.800**	**190.000.000**	**154.063.970**	**78.391.170**					**Sarana perdagangan**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***			***75.672.800***	***190.000.000***	***154.063.970***	***78.391.170***						
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	-	700 Unit	75.672.800	190.000.000	154.063.970	78.391.170						
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	700 Unit	700 Unit	75.672.800	190.000.000	154.063.970	78.391.170	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
169.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**	**-**	**50.315.000**	**50.315.000**	**48.141.000**	**- 2.174.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	***Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan***			***50.315.000***	***50.315.000***	***48.141.000***	***- 2.174.000***						
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	" Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal) " Presentase peningkatan penggunaan produk dalam daerah (lokal)	-	89 % 89 Persen	50.315.000	50.315.000	48.141.000	- 2.174.000						
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*	25 UMKM	25 UMKM	50.315.000	50.315.000	48.141.000	- 2.174.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.000.000**	**-**	**-**	**- 5.000.000**						
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**4.578.842.358**	**4.215.043.682**	**4.467.602.932**	**- 111.239.426**						
170.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**3.958.842.358**	**3.715.043.682**	**3.675.172.532**	**- 283.669.826**					**OPD**	
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	87.037.500	82.711.198	82.711.198	- 4.326.302						
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	23.600.000	19.273.698	19.273.698	- 4.326.302	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya layanan	***Nilai AKIP Perangkat***			***3.935.242.358***	***3.695.769.984***	***3.695.769.984***	***- 239.472.374***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		administrasi perangkat daerah]	***Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***											
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.585.688.256	3.463.215.882	3.220.264.702	- 365.423.554					
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.501.688.256	3.379.215.882	3.104.944.702	- 396.743.554	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	10 Dokumen	84.000.000	84.000.000	115.320.000	31.320.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	101.116.602	101.116.602	142.116.602	41.000.000						
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	300.000	300.000	300.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	16.000.000	16.000.000	27.000.000	11.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	4 Laporan	4 Laporan	66.816.602	66.816.602	96.816.602	30.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan ekonomi kerakyatan		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
			SKPD									pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan daya saing daerah		KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.665.030	120.665.030						
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.665.030	120.665.030						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	100 %	185.000.000	68.000.000	54.415.000	-130.585.000						
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000	65.000.000	51.415.000	-8.585.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	-	-	-5.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	117.000.000	-	-	-117.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	87.037.500	82.711.198	137.711.198	50.673.698						
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	17 Unit	17 Unit	63.437.500	63.437.500	118.437.500	55.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	23.600.000	19.273.698	19.273.698	-4.326.302	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
171.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**	**-**	**585.000.000**	**460.000.000**	**752.430.400**	**167.430.400**					**-**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	***Persentase sentra industri yang dibina dan dikembangkan***			***585.000.000***	***460.000.000***	***752.430.400***	***167.430.400***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	585.000.000	460.000.000	752.430.400	167.430.400					
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	585.000.000	460.000.000	752.430.400	167.430.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
172.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**	**-**	**-**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**-**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	***Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan***			***40.000.000***	***40.000.000***	***40.000.000***	**-**						
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-						
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.2.17.3.30.01.0001	**UPTD Pasar**				**645.000.000**	**450.000.000**	**365.750.000**	**- 279.250.000**						
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**645.000.000**	**450.000.000**	**365.750.000**	**- 279.250.000**						
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**645.000.000**	**450.000.000**	**365.750.000**	**- 279.250.000**						
173.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**	**-**	**-**	**645.000.000**	**450.000.000**	**365.750.000**	**- 279.250.000**					**Sarana perdagangan**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**-**			***645.000.000***	***450.000.000***	***365.750.000***	***- 279.250.000***						
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	645.000.000	450.000.000	365.750.000	- 279.250.000						
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	1 Unit	1 Unit	645.000.000	450.000.000	365.750.000	- 279.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Pasar Muara Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	4.01.0.00.0.00.01.0001	**Bagian Pemerintahan Umum**				**275.000.000**	**184.500.000**	**166.500.000**	**- 108.500.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**275.000.000**	**184.500.000**	**166.500.000**	**- 108.500.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**275.000.000**	**184.500.000**	**166.500.000**	**- 108.500.000**						
174	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG**	**Meningkatnya Layanan**	**100**	**100**	**30.000.000**	**93.682.000**	**73.358.000**	**43.358.000**					**Organisasi**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
.		**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Administrasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**75.75 95 Persen Nilai Nilai 75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95 Persen Nilai Nilai 75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai**								**Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***30.000.000***	***93.682.000***	***73.358.000***	***43.358.000***					
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	63.878.000	43.554.000	33.554.000					
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	63.878.000	43.554.000	33.554.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	29.804.000	29.804.000	9.804.000					
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	20.000.000	29.804.000	29.804.000	9.804.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
175.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektivitas Kerja Sama Daerah Persentase Rumah Tahfidz Aktif Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah**	**100 91.57 2.93 Persen Persen Nilai 2.93 100 Nilai Persen**	**100 91.57 2.93 Persen Persen Nilai 2.93 100 Nilai Persen**	**245.000.000**	**90.818.000**	**93.142.000**	**- 151.858.000**				**Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat]	***Efektivitas Kerja Sama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan***			***245.000.000***	***90.818.000***	***93.142.000***	***- 151.858.000***					
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	230.000.000	87.524.000	89.848.000	- 140.152.000					
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan tata kelola		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Kewilayahan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang baik dan melayani		
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	87.524.000	89.848.000	-110.152.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Daerah	100 Persen	100 Persen	15.000.000	3.294.000	3.294.000	-11.706.000						
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000	3.294.000	3.294.000	-11.706.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0002	**Bagian Hukum**				**240.001.031**	**179.499.631**	**179.499.631**	**- 60.501.400**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**240.001.031**	**179.499.631**	**179.499.631**	**- 60.501.400**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**240.001.031**	**179.499.631**	**179.499.631**	**- 60.501.400**						
176.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai**	**30.001.031**	**30.001.031**	**36.401.031**	**6.400.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***30.001.031***	***30.001.031***	***36.401.031***	***6.400.000***						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	16.400.000	6.400.000						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	16.400.000	6.400.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.001.031	20.001.031	20.001.031	-						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	1 Unit	20.001.031	20.001.031	20.001.031	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
177.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Efektivitas Kerja Sama Daerah**	**2.93 100 Nilai Persen**	**2.93 100 Nilai Persen**	**210.000.000**	**149.498.600**	**143.098.600**	**- 66.901.400**					**Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat]	***Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan***			***210.000.000***	***149.498.600***	***143.098.600***	***- 66.901.400***						
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	100 Persen	100 Persen	210.000.000	149.498.600	143.098.600	- 66.901.400						
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	13.246.600	13.246.600	- 26.753.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	3 Kasus	3 Kasus	150.000.000	121.087.000	114.687.000	- 35.313.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	15.165.000	15.165.000	- 4.835.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0003	**Bagian Kesra**				**14.567.999.000**	**11.923.999.000**	**8.712.699.000**	**- 5.855.300.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**14.567.999.000**	**11.923.999.000**	**8.712.699.000**	**- 5.855.300.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**14.567.999.000**	**11.923.999.000**	**8.712.699.000**	**- 5.855.300.000**						
178.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**30.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**20.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***30.000.000***	***50.000.000***	***50.000.000***	***20.000.000***						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
179.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektivitas Kerja Sama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Rumah Tahfidz Aktif**	**100 2.93 91.57 Persen Nilai Persen**	**100 2.93 91.57 Persen Nilai Persen**	**14.537.999.000**	**11.873.999.000**	**8.662.699.000**	**- 5.875.300.000**					**Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase rumah tafidz aktif***			***14.537.999.000***	***11.873.999.000***	***8.662.699.000***	***- 5.875.300.000***						
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	14.537.999.000	11.873.999.000	8.662.699.000	- 5.875.300.000						
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	7 Dokumen	7 Dokumen	8.623.000.000	6.719.373.000	7.353.945.000	- 1.269.055.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	3 Dokumen	3 Dokumen	5.899.999.000	5.154.626.000	1.308.754.000	- 4.591.245.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0004	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**682.500.000**	**337.500.000**	**1.337.500.000**	**655.000.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**682.500.000**	**337.500.000**	**1.337.500.000**	**655.000.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**682.500.000**	**337.500.000**	**1.337.500.000**	**655.000.000**						
180.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 95 81**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 95 81**	**682.500.000**	**337.500.000**	**1.337.500.000**	**655.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai IKM Perangkat Daerah **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75.75 Nilai** **Nilai** **Nilai**	**75.75 Nilai** **Nilai** **Nilai**									
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***682.500.000***	***337.500.000***	***1.337.500.000***	***655.000.000***					
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-					
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	50.000.000	30.000.000	66.500.000	16.500.000						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	50.000.000	30.000.000	66.500.000	16.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	612.500.000	287.500.000	1.251.000.000	638.500.000						
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	4 Laporan	4 Laporan	262.500.000	91.700.000	834.295.900	571.795.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	10.000.000	20.000.000	- 30.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000	185.800.000	396.704.100	96.704.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0005	**Bagian Perekonomian dan SDA**				**120.000.000**	**62.000.000**	**62.000.000**	**- 58.000.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**120.000.000**	**62.000.000**	**62.000.000**	**- 58.000.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**120.000.000**	**62.000.000**	**62.000.000**	**- 58.000.000**						
181.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Perangkat Daerah** **Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**81** **75.75** **95 Nilai** **Nilai** **Nilai**	**81** **75.75** **95 Nilai** **Nilai** **Nilai**	**30.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**10.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah	**81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**									
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	-			***30.000.000***	***40.000.000***	***40.000.000***	***10.000.000***					
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000					
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-					
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
182.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan UKPBJ Tingkat Kematangan UKPBJ Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**3 100 Tingkat Persen 75 3 Indeks Tingkat**	**3 100 Tingkat Persen 75 3 Indeks Tingkat**	**90.000.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**- 68.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan***			***90.000.000***	***22.000.000***	***22.000.000***	***- 68.000.000***						
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi kebijakan perekonomian	100 Persen	100 Persen	45.000.000	7.500.000	7.500.000	- 37.500.000						
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	2.500.000	2.500.000	- 12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	2.500.000	2.500.000	- 12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan	*Jumlah Dokumen Hasil*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi	Penguatan		SEKRETARIAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Ekonomi Mikro Kecil	*Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*						12.500.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi	100 Persen	100 Persen	45.000.000	14.500.000	14.500.000	-30.500.000					
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	2.500.000	2.500.000	-12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-7.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	4.500.000	4.500.000	-10.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0006	**Bagian Administrasi Pembangunan**				**100.000.000**	**49.500.000**	**31.500.000**	**- 68.500.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**100.000.000**	**49.500.000**	**31.500.000**	**- 68.500.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**100.000.000**	**49.500.000**	**31.500.000**	**- 68.500.000**						
183.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**55.000.000**	**40.000.000**	**22.000.000**	**- 33.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***55.000.000***	***40.000.000***	***22.000.000***	***- 33.000.000***						
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	25.000.000	-	-	-25.000.000						
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	-	-	-15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	5 Laporan	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	20.000.000	5.000.000	- 5.000.000						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	20.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	17.000.000	- 3.000.000						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	20.000.000	20.000.000	17.000.000	- 3.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
184.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Kematangan UKPBJ Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**3 100 Tingkat Persen**	**3 100 Tingkat Persen**	**45.000.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**- 35.500.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan]	***Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan***			***45.000.000***	***9.500.000***	***9.500.000***	***- 35.500.000***						
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	100 Persen	45.000.000	9.500.000	9.500.000	- 35.500.000						
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	-	6.458.000	- 8.542.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	6.458.000	3.042.000	- 11.958.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	3.042.000		- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	melayani		
	4.01.0.00.0.00.01.0007	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**				**145.000.000**	**54.500.000**	**54.500.000**	**- 90.500.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**145.000.000**	**54.500.000**	**54.500.000**	**- 90.500.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**145.000.000**	**54.500.000**	**54.500.000**	**- 90.500.000**						
185.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai**	**30.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**10.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***30.000.000***	***40.000.000***	***40.000.000***	***10.000.000***						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
186.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Kematangan UKPBJ Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**Tingkat 3 (Proaktif) 100 Nilai Persen**	**Tingkat 3 (Proaktif) 100 Nilai Persen**	**115.000.000**	**14.500.000**	**14.500.000**	**- 100.500.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan]	***Tingkat Kematangan UKPBJ***			***115.000.000***	***14.500.000***	***14.500.000***	***- 100.500.000***						
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100 Persen	100 Persen	115.000.000	14.500.000	14.500.000	- 100.500.000						
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	8.500.000	8.500.000	- 21.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan	*Jumlah Dokumen Hasil*	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	5.370.000	5.370.000	-	Kab. Solok	PAJAK BARANG	Memperkuat reformasi	Penguatan		SEKRETARIAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Secara Elektronik	*Layanan Pengadaan Secara Elektronik*						64.630.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN JASA TERTENTU (PBJT)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	5 Orang	0 Orang	15.000.000	630.000	630.000	-14.370.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0008	**Bagian Organisasi**				**105.000.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**- 55.500.000**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**105.000.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**- 55.500.000**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**105.000.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**- 55.500.000**						
187.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**105.000.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**- 55.500.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Indeks Kematangan Organisasi***			***105.000.000***	***49.500.000***	***49.500.000***	***- 55.500.000***						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	32 Indeks	32 Indeks	75.000.000	9.500.000	9.500.000	-65.500.000						
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	2.785.000	2.785.000	-12.215.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	5 Laporan	5 Laporan	30.000.000	4.937.000	4.937.000	-25.063.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	1.778.000	1.778.000	-28.222.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0009	**Bagian Umum**				**22.215.990.129**	**20.479.910.301**	**24.944.645.701**	**2.728.655.572**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.215.990.129**	**20.479.910.301**	**24.944.645.701**	**2.728.655.572**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**22.215.990.129**	**20.479.910.301**	**24.944.645.701**	**2.728.655.572**						
188.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai 95 75.75 81 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95 81 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 81 95 75.75 Nilai Nilai Nilai 95 75.75 81 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**22.215.990.129**	**20.479.910.301**	**24.944.645.701**	**2.728.655.572**					**Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***21.848.778.129***	***20.191.488.301***	***21.269.044.301***	***- 579.733.828***						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	12.546.805.733	11.762.621.932	12.379.698.677	-167.107.056						
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	12.215.055.733	11.445.851.932	12.019.738.677	-195.317.056	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	316.770.000	316.770.000	359.960.000	43.190.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	14.980.000	-	-	-14.980.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100.000.000	-	-	-100.000.000						
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	102 Paket	0 Paket	100.000.000	-	-	-100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.159.014.000	1.858.751.000	3.561.351.659	1.402.337.659						
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	136.150.000	136.150.000	110.141.000	-26.009.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	99.999.000	99.999.000	99.999.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	150.455.000	150.455.000	220.320.000	69.865.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	150.000.000	150.000.000	250.002.000	100.002.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	115.672.000	62.049.000	72.199.000	-43.473.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	506.795.000	506.795.000	1.212.192.000	705.397.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	melayani		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	999.943.000	753.303.000	1.596.498.659	596.555.659	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.582.637.446	755.850.760	1.457.036.655	-125.600.791						
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	0 Unit	1.000.288.446	-	-	-1.000.288.446	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	8 Unit	10 Unit	215.137.000	467.428.760	403.778.655	188.641.655	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	20 Unit	367.212.000	288.422.000	1.053.258.000	686.046.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	3.150.969.450	4.132.982.109	4.477.035.210	1.326.065.760						
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	519.999.450	519.999.450	743.578.710	223.579.260	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	2.611.970.000	3.593.982.659	3.714.456.500	1.102.486.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	2.625.863.500	1.919.004.500	2.997.433.500	371.570.000						
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	45 Unit	27 Unit	1.200.000.500	1.094.887.500	1.369.556.500	169.556.000	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan tata kelola		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*							Kecamatan, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang baik dan melayani		
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	10 Unit	19.430.000	72.750.000	193.480.000	174.050.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	2 Unit	1.257.429.000	369.067.000	1.153.067.000	- 104.362.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	149.004.000	382.300.000	281.330.000	132.326.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	50.700.000	50.700.000	72.090.000	21.390.000						
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	1 Paket	4 Paket	50.700.000	50.700.000	72.090.000	21.390.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0010	**KDH/WKDH**				**7.064.058.000**	**5.254.840.210**	**6.095.085.555**	**- 968.972.445**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**7.064.058.000**	**5.254.840.210**	**6.095.085.555**	**- 968.972.445**						
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**7.064.058.000**	**5.254.840.210**	**6.095.085.555**	**- 968.972.445**						
189.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 81 95 Nilai Nilai Nilai 81 75.75 95 Nilai Nilai Nilai 95 81 75.75 Nilai Nilai Nilai**	**7.064.058.000**	**5.254.840.210**	**6.095.085.555**	**- 968.972.445**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	**-**			***6.764.562.000***	***5.193.050.210***	***6.095.085.555***	***- 669.476.445***						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat	100 Persen	100 Persen	2.661.260.000	1.775.789.500	2.605.837.500	- 55.422.500						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			waktu											
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	49.988.000	47.814.500	47.814.500	-2.173.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	99.995.000	99.995.000	99.995.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	39.963.000	14.800.000	14.800.000	-25.163.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	298.557.000	149.013.000	309.023.000	10.466.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	49.000.000	49.000.000	49.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	628.665.000	498.615.000	526.320.000	-102.345.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	1.495.092.000	916.552.000	1.558.885.000	63.793.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	299.496.000	61.790.000	31.666.000	-267.830.000						
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	10 Unit	299.496.000	61.790.000	31.666.000	-267.830.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	386.070.000	407.070.000	358.875.610	-27.194.390					
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	6.150.000	6.150.000	6.150.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	151.805.610	-98.194.390	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	129.920.000	150.920.000	200.920.000	71.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	500.000.000	420.232.500	507.744.845	7.744.845					
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	4 Unit	500.000.000	420.232.500	507.744.845	7.744.845	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100 Persen	100 Persen	1.105.884.000	987.871.610	944.500.000	-161.384.000					
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	20 Paket	10 Paket	449.884.000	339.524.000	288.500.000	-161.384.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	8 Orang	6 Orang	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000	392.347.610	400.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.111.348.000	1.602.086.600	1.646.461.600	-464.886.400					
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	1.148.754.000	870.761.600	933.530.600	-215.223.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	962.594.000	731.325.000	933.530.600	-29.063.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.5.06.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**				**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**						
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**						
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**				**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**						
190.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan**	**50 Persen**	**50 Persen**	**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**					**Organisasi Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan]	***Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan***			***10.000.000***	**-**	**-**	**- *10.000.000***						
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Terlaksananya kerjasama terkait daerah perbatasan	50 Persen	50 Persen	10.000.000	-	-	-10.000.000						
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-10.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**				**22.985.038.629**	**22.157.864.425**	**23.722.899.442**	**737.860.813**						
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.985.038.629**	**22.157.864.425**	**23.722.899.442**	**737.860.813**						
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**22.985.038.629**	**22.157.864.425**	**23.722.899.442**	**737.860.813**						
191.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**100 100 % persen 100 100 persen % 81.00 75.00 95.00 Nilai Nilai Nilai**	**100 100 % persen 100 100 persen % 81.00 75.00 95.00 Nilai Nilai Nilai**	**15.561.201.079**	**14.855.274.550**	**15.577.779.001**	**16.577.922**					**SEKRETARIAT DPRD**	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-10.000.000						
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	6 Orang	6 Orang	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.			
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***15.531.201.079***	***14.835.274.550***	***15.557.779.001***	***26.577.922***					
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Daerah	100 %	100 %	13.179.556.429	12.208.224.418	12.185.355.035	-994.201.394					
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/bulan	49 Orang/bulan	13.029.196.429	12.046.164.418	12.023.295.035	-1.005.901.394	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	150.360.000	162.060.000	162.060.000	11.700.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	557.349.000	932.754.482	932.754.482	375.405.482						
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	36.057.000	36.057.000	36.057.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	38.300.000	38.300.000	38.300.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	26.780.000	179.340.000	179.340.000	152.560.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	90.236.000	272.176.000	272.176.000	181.940.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	95.400.000	163.635.482	163.635.482	68.235.482	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	melayani		
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	137.325.000	109.995.000	109.995.000	-27.330.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	133.251.000	133.251.000	133.251.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	274.290.000	274.290.000	274.290.000	-						
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	3 Unit	3 Unit	97.750.000	97.750.000	97.750.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	176.540.000	176.540.000	176.540.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persediaan Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	100 %	100 %	123.347.650	123.347.650	123.347.650	-						
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	12 Laporan	92.727.650	92.727.650	92.727.650	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	25.620.000	25.620.000	25.620.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	498.328.000	398.328.000	398.328.000	-100.000.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	2 Unit	1 Unit	180.296.000	180.296.000	180.296.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6 Unit	178.404.000	178.404.000	178.404.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	12 Unit	139.628.000	39.628.000	39.628.000	-100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	100 %	100 %	375.000.000	375.000.000	575.652.000	200.652.000						
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	5 Paket	6 Paket	325.000.000	325.000.000	325.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	25 Orang	25 Orang	50.000.000	50.000.000	250.652.000	200.652.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	523.330.000	523.330.000	1.068.051.834	544.721.834						
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	4 Laporan	25 Laporan	523.330.000	523.330.000	1.068.051.834	544.721.834	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
192.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda Persentase Pengawasan**	**100 100 1 persen Perda 100 100 persen Perda 100 1 persen Perda 1**	**100 100 1 persen Perda 100 100 persen Perda 100 1 persen Perda 1**	**7.423.837.550**	**7.302.589.875**	**8.145.120.441**	**721.282.891**					**SEKRETARIAT DPRD**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Penyelenggaraan Pemerintahan **Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n** **Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda** **Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan** **Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda** **Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda** **Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan**	**100** **100 Perda** **Persen** **persen** **1** **100 Perda persen**	**100** **100 Perda** **Persen** **persen** **1** **100 Perda persen**									
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan]	***Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N*** ***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** ***Persentase Peningkatan Ranperda Tahun N***			***7.423.837.550***	***7.302.589.875***	***8.145.120.441***	***721.282.891***					
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	1.110.705.000	1.110.705.000	1.320.081.000	209.376.000					
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	6 Dokumen	3 Dokumen	1.110.705.000	1.110.705.000	1.320.081.000	209.376.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disahkan	100 Persen	100 Persen	1.469.976.000	1.469.976.000	1.469.976.000	-					
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	2 Dokumen	2 Dokumen	309.232.000	309.232.000	309.232.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	947.180.000	947.180.000	947.180.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	1 Dokumen	1 Dokumen	213.564.000	213.564.000	213.564.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	468.201.875	468.201.875	523.480.041	55.278.166					
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	4 Laporan	4 Laporan	22.260.000	22.260.000	22.260.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	4 Laporan	4 Laporan	22.260.000	22.260.000	22.260.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	4 Laporan	4 Laporan	22.203.875	22.203.875	22.203.875	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	4 Dokumen	1 Dokumen	197.136.000	197.136.000	197.136.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	4 Dokumen	1 Dokumen	204.342.000	204.342.000	259.620.166	55.278.166	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	1.336.128.000	1.336.128.000	1.451.438.400	115.310.400					
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	4 Dokumen	4 Dokumen	930.128.000	930.128.000	1.099.438.400	169.310.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	3 Orang	3 Orang	54.000.000	54.000.000	-	- 54.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	6 Orang	6 Orang	252.000.000	252.000.000	252.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	100 Persen	100 Persen	588.895.000	588.895.000	588.895.000	-						
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	3 Dokumen	25 Dokumen	588.895.000	588.895.000	588.895.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100 Persen	100 Persen	2.449.931.675	2.328.684.000	2.791.250.000	341.318.325						
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	4 Dokumen	24 Dokumen	2.235.797.675	2.014.550.000	2.227.092.600	- 8.705.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	4 Dokumen	4 Dokumen	214.134.000	314.134.000	564.157.400	350.023.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.03.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				**5.366.036.075**	**4.959.061.697**	**4.948.693.319**	**- 417.342.756**						
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.366.036.075**	**4.959.061.697**	**4.948.693.319**	**- 417.342.756**						
	5.01	**PERENCANAAN**				**5.241.036.375**	**4.736.561.597**	**4.747.599.219**	**- 493.437.156**						
193.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**75.75 81.00 95.00 Poin Poin Indeks 75.75 81.00 Poin Poin 75.75 95.00 81.00 Poin Indeks Poin 81.00 75.75 95.00 Poin Poin Indeks 95.00 81.00 75.75**	**75.75 81.00 95.00 Poin Poin Indeks 75.75 81.00 Poin Poin 75.75 95.00 81.00 Poin Indeks Poin 81.00 75.75 95.00 Poin Poin Indeks 95.00 81.00 75.75**	**4.338.790.276**	**4.080.881.812**	**4.049.552.144**	**- 289.238.132**					**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu Pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah Pemenuhan**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Indeks Poin Poin**	**Indeks Poin Poin**									**kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***4.338.790.276***	***4.080.881.812***	***4.049.552.144***	***- 289.238.132***						
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	10.000.000	-	-	- 10.000.000						
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	-	-	- 10.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.751.482.606	3.268.071.962	3.046.025.915	- 705.456.691						
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.643.482.606	3.167.871.962	2.938.895.915	- 704.586.691	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	108.000.000	100.200.000	107.130.000	- 870.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	197.424.000	118.924.000	195.171.479	- 2.252.521						
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	7.989.000	4.030.000	7.030.000	- 959.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	26.707.000	30.010.000	36.036.000	9.329.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.551.000	8.017.000	8.017.000	-2.534.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	18.911.000	8.065.000	19.921.479	1.010.479	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	6.990.000	4.050.000	4.050.000	-2.940.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	126.276.000	64.752.000	120.117.000	-6.159.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	91.344.670	102.403.100	158.205.800	66.861.130						
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	0 Unit	31.760.000	-	-	-31.760.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 Unit	18 Unit	15.840.000	22.680.000	57.680.000	41.840.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	7 Unit	43.744.670	79.723.100	100.525.800	56.781.130	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	58.670.750	35.471.300	49.017.500	-9.653.250						
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan tata kelola pemerintahan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang baik dan melayani		RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	37.400.750	22.401.300	22.401.300	- 14.999.450	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	18.270.000	10.070.000	23.616.200	5.346.200	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	229.868.250	556.011.450	601.131.450	371.263.200						
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	10 Unit	9 Unit	139.867.250	97.412.450	111.412.450	- 28.454.800	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	90.001.000	458.599.000	489.719.000	399.718.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
194.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi proses dan isi Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi Persentase pencapaian indeks perencanaan dimensi proses dan isi Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional**	**100 Persen 90 100 93.06 Persen Persen Persen 93.06 100 Persen Persen**	**100 Persen 90 100 93.06 Persen Persen Persen 93.06 100 Persen Persen**	**540.799.799**	**370.679.885**	**390.092.175**	**- 150.707.624**					**Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional Persentase Keselarasan***			***540.799.799***	***370.679.885***	***390.092.175***	***- 150.707.624***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			RPJMD dengan RKPD ***Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut***											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPDP, RPJMD, RPJPD)	100 Persen	100 Persen	390.799.799	251.810.885	271.223.175	-119.576.624					
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	1 Dokumen	1 Dokumen	44.999.999	13.905.000	13.905.000	-31.094.999	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	45.000.000	18.733.000	25.124.500	-19.875.500	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	30.000.000	13.474.000	5.251.000	-24.749.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	69.999.800	51.651.000	59.843.000	-10.156.800	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	7 Usulan	7 Usulan	30.000.000	17.273.885	23.152.775	-6.847.225	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	170.800.000	136.774.000	143.946.900	-26.853.100	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	70.000.000	91.022.000	91.022.000	21.022.000						
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	6.988.000	6.988.000	-23.012.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	30 Orang	30 Orang	40.000.000	84.034.000	84.034.000	44.034.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pengendalian Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	100 Persen	100 Persen	80.000.000	27.847.000	27.847.000	-52.153.000					
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	16.677.000	16.677.000	-23.323.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000	11.170.000	11.170.000	-28.830.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
195.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah**	**100 Persen 90 Persen 100 Persen 90 Persen 100 Persen**	**100 Persen 90 Persen 100 Persen 90 Persen 100 Persen**	**361.446.300**	**284.999.900**	**307.954.900**	**- 53.491.400**					**Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD***			***361.446.300***	***284.999.900***	***307.954.900***	***- 53.491.400***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan ***Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA*** ***Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut***										
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen	127.767.300	100.000.100	100.000.100	- 27.767.200					
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	2 Dokumen	4 Dokumen	28.557.000	25.943.500	23.529.500	- 5.027.500	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	30 Laporan	30 Laporan	8.201.000	4.170.000	6.564.000	- 1.637.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	60 Laporan	60 Laporan	11.564.700	11.204.000	8.806.000	- 2.758.700	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	43.171.100	41.406.100	43.774.000	602.900	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	20 Laporan	20 Laporan	10.300.000	5.175.000	5.166.000	-5.134.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	20 Laporan	20 Laporan	25.973.500	12.101.500	12.160.600	-13.812.900	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen	114.478.500	94.999.800	117.954.800	3.476.300						
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	42.178.000	35.367.000	35.367.000	-6.811.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	8 Laporan	8 Laporan	10.257.000	7.578.000	7.578.000	-2.679.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	16 Laporan	16 Laporan	34.824.000	27.162.000	27.162.000	-7.662.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	10.796.500	9.379.800	32.379.800	21.583.300	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	4 Laporan	4 Laporan	8.333.000	7.923.000	7.923.000	-410.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	8 Laporan	8 Laporan	8.090.000	7.590.000	7.545.000	-545.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	119.200.500	90.000.000	90.000.000	-29.200.500						
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	36.064.000	29.989.000	29.989.000	-6.075.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	4 Laporan	4 Laporan	3.947.900	3.747.900	3.747.900	-200.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	8 Laporan	8 Laporan	27.164.000	19.724.000	19.724.000	-7.440.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	2 Dokumen	4 Dokumen	25.772.000	20.249.000	20.249.000	-5.523.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	4 Laporan	4 Laporan	3.916.600	3.954.100	3.954.100	37.500	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat*	8 Laporan	8 Laporan	22.336.000	12.336.000	12.336.000	-10.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
			Daerah Bidang Kewilayahan									narkoba, judi, dan penyeludupan.			
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**124.999.700**	**222.500.100**	**201.094.100**	**76.094.400**						
196.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**124.999.700**	**222.500.100**	**201.094.100**	**76.094.400**					**Perangkat daerah**	
		[Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	***Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan***			***124.999.700***	***222.500.100***	***201.094.100***	***76.094.400***						
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000						
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*	-	1 Dokumen	-	-	100.000.000	100.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan	100 Persen 700 Indeks	100 Persen 700 Indeks	124.999.700	222.500.100	101.094.100	- 23.905.600						
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*	4 Laporan	1 Laporan	64.999.900	192.732.000	76.582.000	11.582.100	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	5 Laporan	1 Laporan	59.999.800	29.768.100	24.512.100	- 35.487.700	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.02.0.00.0.00.05.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**126.978.384.416**	**112.620.223.510**	**120.007.503.094**	**- 6.970.881.322**						
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**126.978.384.416**	**112.620.223.510**	**120.007.503.094**	**- 6.970.881.322**						
	5.02	**KEUANGAN**				**126.978.384.416**	**112.620.223.510**	**120.007.503.094**	**- 6.970.881.322**						
197.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan operasional kantor**	**100 Persen**	**100 persen**	**24.128.036.636**	**25.808.819.460**	**20.530.741.090**	**- 3.597.295.546**					**opd OPD**	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	13.500.000	13.500.000	13.500.000						
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	-	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	872.584.000	69.763.550	590.059.325	- 282.524.675						
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	25.000.000	4.000.000	10.700.000	- 14.300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	1.996.807.159	317.412.750	554.134.000	-1.442.673.159					
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	9 Unit	9 Unit	1.896.807.159	37.432.750	254.154.000	-1.642.653.159	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***22.206.229.477***	***25.753.886.710***	***20.252.387.090***	***- 1.953.842.387***					
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 Persen	100 persen	21.038.145.477	25.317.668.160	19.195.422.765	-1.842.722.712					
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	20.389.965.477	25.141.988.160	18.788.262.765	-1.601.702.712	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	648.180.000	175.680.000	407.160.000	-241.020.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	872.584.000	69.763.550	590.059.325	-282.524.675					
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	2.572.000	7.572.000	2.572.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	258.085.000	16.943.000	182.005.000	-76.080.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	40.000.000	15.765.000	30.265.000	-9.735.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	544.499.000	30.483.550	359.517.325	-184.981.675	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	100 Persen	220.500.000	90.475.000	177.625.000	-42.875.000						
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	75.575.000	75.575.000	-9.425.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000	12.900.000	100.050.000	75.050.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	-	-	-105.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	1.996.807.159	317.412.750	554.134.000	-1.442.673.159						
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	50.000.000	229.980.000	249.980.000	199.980.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
198.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**100.876.847.780**	**84.194.062.050**	**95.672.420.004**	**- 5.204.427.776**					**OPD Pemerintahan desa/nagari**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase ketersediaan	100 Persen	100 persen	1.253.546.400	901.984.000	951.984.000	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		Rencana Anggaran Daerah	dokumen penganggaran yang tepat waktu						301.562.400					
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	33 Dokumen	33 Dokumen	38.842.000	23.740.000	23.740.000	- 15.102.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	33 Dokumen	33 Dokumen	38.812.000	24.490.000	24.490.000	- 14.322.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan]	***Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik*** ***Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD*** ***Persentase laporan keuangan tepat waktu*** ***Persentase Penurunan SILPA*** ***Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar***			***100.799.193.780***	***84.145.832.050***	***95.624.190.004***	***- 5.175.003.776***						
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	100 persen	1.253.546.400	901.984.000	951.984.000	- 301.562.400						
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	158.596.200	106.852.000	113.384.000	- 45.212.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	158.578.400	107.640.000	122.072.000	- 36.506.400	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	2 Dokumen	327.061.000	221.545.000	240.757.000	- 86.304.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran*	2 Dokumen	2 Dokumen	293.655.000	219.561.000	229.385.000	- 64.270.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
		Perubahan APBD	*Perubahan APBD*									pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	5 Dokumen	5 Dokumen	238.001.800	198.156.000	198.156.000	-39.845.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ketersediaan Dokumen Penyaluran dan Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu.	100 persen	100 persen	158.000.000	158.000.000	123.000.000	-35.000.000						
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	13.741.000	13.741.000	-1.259.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	150 Orang	150 Orang	113.000.000	114.259.000	79.259.000	-33.741.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah disahkan tepat waktu dan mendapatkan OPINI WTP	100 persen	100 persen	281.767.100	199.999.800	199.999.800	-81.767.300						
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	11.550.000	11.550.000	-450.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000	34.500.000	34.500.000	8.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan	*Jumlah Laporan*	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	-	-	-	Kab. Solok	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi	-		BADAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*						40.000.000	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	2 Laporan	2 Laporan	57.000.000	98.850.000	98.850.000	41.850.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 0	2 0	85.000.000	55.099.800	55.099.800	-29.900.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	45.567.100	-	-	-45.567.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	16.200.000	-	-	-16.200.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	99.183.534.280	82.934.078.250	94.397.436.204	-4.786.098.076						
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	4 Laporan	4 Laporan	98.183.534.280	81.934.078.250	93.497.436.204	-4.686.098.076	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	-100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
										Semua Kel/Desa		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DAERAH
199.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase BMD berkondisi baik**	**100 %**	**100 %**	**1.135.500.000**	**2.217.342.000**	**3.054.342.000**	**1.918.842.000**					**OPD**	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	***Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap***			***1.135.500.000***	***2.217.342.000***	***3.054.342.000***	***1.918.842.000***						
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Asset Daerah yang terkelola dengan baik	100 persen	100 persen	1.135.500.000	2.217.342.000	3.054.342.000	1.918.842.000						
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000	-	-	- 12.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000	12.500.000	12.500.000	- 1.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	7.516.000	7.516.000	- 7.484.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	950.000.000	1.824.644.000	2.661.644.000	1.711.644.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	78.000.000	281.236.000	281.236.000	203.236.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	36.500.000	32.500.000	32.500.000	- 4.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	38.946.000	38.946.000	28.946.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka	*Jumlah Laporan Hasil*	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Solok	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi	-		BADAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*							Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
200.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Peningkatan Pengelolaan dan Capaian Target PAD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**838.000.000**	**400.000.000**	**750.000.000**	**- 88.000.000**					**wajib pajak dan retribusi**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan*** ***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah*** ***Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital***			***838.000.000***	***400.000.000***	***750.000.000***	***- 88.000.000***						
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	98 persen	98 persen	838.000.000	400.000.000	750.000.000	- 88.000.000						
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	251.000.000	12.878.000	12.878.000	- 238.122.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	3 Unit	3 Unit	122.000.000	145.374.000	495.374.000	373.374.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	-	-	- 40.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	9000 Obyek Pajak	9000 Obyek Pajak	100.000.000	-	-	- 100.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000	120.664.000	120.664.000	- 39.336.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	-	-	- 25.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	121.084.000	121.084.000	- 3.916.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**31.020.364.356**	**41.621.152.851**	**36.496.248.189**	**5.475.883.833**						
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**31.020.364.356**	**41.621.152.851**	**36.190.679.989**	**5.170.315.633**						
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**30.585.137.656**	**41.365.108.651**	**36.190.679.989**	**5.605.542.333**						
201.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**100 persen 81.00 95.00 76.05 Nilai Nilai Nilai**	**100 persen 81.00 95.00 76.05 Nilai Nilai Nilai**	**29.405.683.856**	**33.640.152.851**	**28.678.361.416**	**- 727.322.440**					**ASN**	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	111.988.000	89.028.000	89.028.000	- 22.960.000						
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	21.000.000	21.820.000	21.820.000	820.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***29.384.683.856***	***33.618.332.851***	***28.678.361.416***	***- 706.322.440***						
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	29.064.480.708	33.413.706.851	28.197.166.316	- 867.314.392						
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	327 Orang/bulan	327 Orang/bulan	28.947.480.708	33.237.986.851	28.021.446.316	- 926.034.392	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	117.000.000	175.720.000	175.720.000	58.720.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	150.615.148	100.717.000	130.834.200	-19.780.948					
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.494.948	4.481.000	10.654.200	6.159.252	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.699.800	13.605.000	17.731.000	2.031.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.498.500	5.594.000	9.392.000	3.893.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	19.999.900	14.927.000	14.927.000	-5.072.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	4.995.000	4.995.000	8.220.000	3.225.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	99.927.000	57.115.000	69.910.000	-30.017.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.500.000	-	214.599.900	187.099.900					
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	27.500.000	-	214.599.900	187.099.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	51.100.000	36.701.000	39.721.000	-11.379.000					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
			tepat waktu												
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	38.520.000	26.871.000	26.871.000	-11.649.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	9.580.000	8.330.000	11.350.000	1.770.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	111.988.000	89.028.000	96.040.000	-15.948.000						
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	90.988.000	67.208.000	74.220.000	-16.768.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	21.000.000	21.820.000	21.820.000	820.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
202.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Sistem Merit Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi**	**325 indeks 96 3.90 Persen Persen**	**325 indeks 96 3.90 Persen Persen**	**1.179.453.800**	**7.724.955.800**	**7.512.318.573**	**6.332.864.773**					**ASN ASN**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian]	***Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi***			***1.179.453.800***	***7.724.955.800***	***7.512.318.573***	***6.332.864.773***						
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah sistem informasi yang aktif Persentase perencanaan &	2 Aplikasi 98,83 Persen	2 Aplikasi 98,83 Persen	519.121.200	7.465.827.300	7.313.417.773	6.794.296.573						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			pengadaan pegawai yang sesuai dengan ANJAB & ABK											
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	1 Dokumen	1 Dokumen	444.626.300	205.592.100	53.182.573	-391.443.727	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.334.100	-	-	-23.334.100	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*	1 Lembaga	1 Lembaga	21.711.300	-	-	-21.711.300	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	29.449.500	7.260.235.200	7.260.235.200	7.230.785.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pegawai yang promosi dan mutasi berdasarkan talent pool	100 Persen	100 Persen	222.720.400	172.902.800	112.792.000	-109.928.400						
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	1 Dokumen	1 Dokumen	86.290.600	-	30.229.000	-56.061.600	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	1 Dokumen	1 Dokumen	136.429.800	172.902.800	82.563.000	-53.866.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja	100 Persen	100 Persen	218.348.000	48.419.000	49.506.800	-168.841.200						
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	1 Dokumen	1 Dokumen	135.003.000	48.419.000	49.506.800	-85.496.200	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	3 Orang	3 Orang	38.350.000	-	-	-38.350.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.		MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	*Jumlah ASN Fungsional yang Dibina*	10 Orang	10 Orang	44.995.000	-	-	- 44.995.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja individu	100 Persen	100 Persen	219.264.200	37.806.700	36.602.000	- 182.662.200						
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.794.200	-	20.561.000	7.766.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa*	100 Orang	100 Orang	36.474.700	-		- 36.474.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	1 Orang	3 Orang	92.575.700	37.806.700	16.041.000	- 76.534.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	1 Laporan	1 Laporan	36.160.900	-	-	- 36.160.900	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani*	1 Dokumen	1 Dokumen	41.258.700	-	-	- 41.258.700	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**435.226.700**	**256.044.200**	**305.568.200**	**- 129.658.500**						
203.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi** **Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**	**63 Persen** **100 Persen**	**63 Persen** **100 Persen**	**435.226.700**	**256.044.200**	**305.568.200**	**- 129.658.500**					**ASN**	
		[Meningkatnya Kualitas SDM ASN]	***Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi*** ***Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis***			***435.226.700***	***256.044.200***	***305.568.200***	***- 129.658.500***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional ***Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan***											
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai analisa kebutuhan diklat	78,55 Persen	78,55 Persen	435.226.700	256.044.200	305.568.200	- 129.658.500					
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	1 Laporan	1 Laporan	435.226.700	256.044.200	305.568.200	- 129.658.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**				**5.548.869.555**	**4.762.056.636**	**4.914.852.079**	**- 634.017.476**					
	6	**NON URUSAN**				**21.551.000**	**-**	**-**	**- 21.551.000**					
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.527.318.555**	**4.762.056.636**	**4.914.852.079**	**- 612.466.476**					
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**5.527.318.555**	**4.762.056.636**	**4.914.852.079**	**- 612.466.476**					
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**21.551.000**	**-**	**-**	**- 21.551.000**					
204.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Cakupan Layanan Operasional Kantor**	**100 75,75 95 81.00 persen Nilai Nilai Nilai 75,75 81.00 95 Nilai Nilai Nilai 75,75 81 95 Nilai Nilai Nilai 81.00 95 75,75 Nilai Nilai Nilai 95 75,75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95 81.00 75,75 100 Nilai Nilai**	**100 75,75 95 81.00 persen Nilai Nilai Nilai 75,75 81.00 95 Nilai Nilai Nilai 75,75 81 95 Nilai Nilai Nilai 81.00 95 75,75 Nilai Nilai Nilai 95 75,75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95 81.00 75,75 100 Nilai Nilai**	**5.029.470.925**	**4.241.982.306**	**4.360.634.859**	**- 668.836.066**					**Kabupaten Solok Selatan**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
				Nilai persen	Nilai persen									
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	25.204.000	786.200	6.096.200	-19.107.800					
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-	38 Paket	-	-	5.310.000	5.310.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***5.029.470.925***	***4.241.982.306***	***4.355.324.859***	***- 674.146.066***					
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.514.430.835	4.036.296.636	4.089.326.189	-425.104.646					
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.430.910.835	3.945.056.636	3.998.086.189	-432.824.646	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	83.520.000	91.240.000	91.240.000	7.720.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	25.204.000	786.200	6.096.200	-19.107.800					
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	0 Orang	-	500.000	500.000	500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	0 Orang	16.444.000	-	-	-16.444.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	2 Orang	2 Orang	8.760.000	286.200	286.200	-8.473.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat	100 Persen	100 Persen	209.299.770	75.580.220	120.885.220	-88.414.550					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			waktu											
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	3.006.000	3.006.000	3.006.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.107.000	-	-	-5.107.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	28.455.000	15.250.000	15.250.000	-13.205.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.831.000	4.831.000	4.831.000	-	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	12.600.000	5.050.000	5.050.000	-7.550.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	6.750.000	2.475.000	2.475.000	-4.275.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	151.556.770	44.968.220	90.273.220	-61.283.550	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	70.933.000	15.592.000	15.592.000	-55.341.000						
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	7 Unit	70.933.000	15.592.000	15.592.000	-55.341.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 persen	100 persen	28.545.000	17.724.250	17.724.250	-10.820.750						
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	2.500.000	2.500.000	-500.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	17.565.000	10.004.250	10.004.250	-7.560.750	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	7.980.000	5.220.000	5.220.000	-2.760.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	181.058.320	96.003.000	111.011.000	-70.047.320						
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	3 Unit	154.658.320	76.004.000	91.012.000	-63.646.320	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	26.400.000	19.999.000	19.999.000	-6.401.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
205.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Tindak lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Tindak lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N)**	**81.00 86.00 Persen Persen 81 86 Persen Persen**	**81.00 86.00 Persen Persen 81 86 Persen Persen**	**360.557.200**	**282.952.200**	**313.502.200**	**- 47.055.000**					**Kabupaten Solok Selatan**	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	***Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1***			***360.557.200***	***282.952.200***	***313.502.200***	***- 47.055.000***						
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan (LHP) yang diterbitkan	66 Laporan	66 Laporan	304.177.760	232.922.760	264.417.760	-39.760.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	3 Laporan	3 Laporan	42.082.220	30.107.220	29.162.220	-12.920.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	9 Laporan	15 Laporan	82.414.440	50.154.440	68.894.440	-13.520.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	6 Laporan	6 Laporan	30.062.220	30.107.220	29.162.220	-900.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	6 Laporan	6 Laporan	40.182.220	30.107.220	39.162.220	-1.020.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	6 Laporan	6 Laporan	40.052.220	32.312.220	29.792.220	-10.260.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	12 Dokumen	4 Dokumen	69.384.440	60.134.440	68.244.440	-1.140.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah yang ditangani	3 Laporan	3 Laporan	56.379.440	50.029.440	49.084.440	-7.295.000						
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	2 Laporan	2 Laporan	25.957.220	14.997.220	14.997.220	-10.960.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	2 Laporan	4 Laporan	30.422.220	35.032.220	34.087.220	3.665.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
												penyeludupan.			
206.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**	**III Level III Nilai**	**III Level III Nilai**	**158.841.430**	**237.122.130**	**240.715.020**	**81.873.590**					**Kabupaten Solok Selatan**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	***Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)***			***158.841.430***	***237.122.130***	***240.715.020***	***81.873.590***						
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100 persen	100 persen	21.634.440	20.023.330	23.616.220	1.981.780						
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	14.412.220	10.001.110	8.594.000	-5.818.220	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	7.222.220	10.022.220	15.022.220	7.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	137.206.990	217.098.800	217.098.800	79.891.810						
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	68.625.775	150.177.885	150.177.885	81.552.110	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	23.431.220	33.751.475	33.751.475	10.320.255	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	4 Kegiatan	4 Kegiatan	20.572.220	18.232.220	18.232.220	-2.340.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	24.577.775	14.937.220	14.937.220	-9.640.555	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		INSPEKTORAT
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Sangir**				**2.593.751.317**	**2.055.734.702**	**2.067.133.403**	**- 526.617.914**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.593.751.317**	**2.055.734.702**	**2.067.133.403**	**- 526.617.914**						
	7.01	**KECAMATAN**				**2.593.751.317**	**2.055.734.702**	**2.067.133.403**	**- 526.617.914**						
207.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**72.00 82.00**	**72.00 82.00**	**2.346.236.950**	**1.942.934.702**	**1.884.333.403**	**- 461.903.547**					**ASN Perangkat Daerah**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**95.00 Nilai Nilai Nilai 72.00 95.00 82.00 Nilai Nilai Nilai 82.00 72.00 95.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 72.00 82.00 Nilai Nilai Nilai**	**95.00 Nilai Nilai Nilai 72.00 95.00 82.00 Nilai Nilai Nilai 82.00 72.00 95.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 72.00 82.00 Nilai Nilai Nilai**									
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara.	100 Persen	100 Persen	57.000.000	32.000.000	32.000.000	- 25.000.000					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	5 Unit	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000	2.000.000	2.000.000	- 3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.341.236.950***	***1.910.934.702***	***1.852.333.403***	***- 488.903.547***					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100 Persen	100 Persen	2.000.000	-	-	- 2.000.000					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	-	-	- 1.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	-	-	- 1.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase pemenuhan	100 Persen	100 Persen	2.199.736.950	1.845.934.702	1.787.333.403	-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Daerah	kinerja Keuangan perangkat daerah.						412.403.547					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.151.916.950	1.798.734.702	1.740.133.403	-411.783.547	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	46.320.000	47.200.000	47.200.000	880.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	-	-	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	63.500.000	44.500.000	44.500.000	-19.000.000						
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	7.500.000	3.500.000	3.500.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000	30.000.000	30.000.000	-10.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu.	100 Persen	100 Persen	24.000.000	20.500.000	20.500.000	-3.500.000						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	500.000	500.000	-500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara.	100 Persen	100 Persen	57.000.000	32.000.000	32.000.000	-25.000.000						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	52.000.000	-	-	-52.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		KECAMATAN SANGIR
208.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**- 2.000.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***5.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***- 2.000.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
209	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase kegiatan**	**100**	**100**	**20.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**- 5.000.000**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
.		**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**pemberdayaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**Persen**									**Kecamatan Sangir**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***20.000.000***	***15.000.000***	***15.000.000***	***- 5.000.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinirnya kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen	20.000.000	15.000.000	15.000.000	- 5.000.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	15.000.000	15.000.000	- 5.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
210 .	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**- 3.000.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir**	
		[Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***8.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***- 3.000.000***						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	8.000.000	5.000.000	5.000.000	- 3.000.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	5.000.000	5.000.000	- 3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
211 .	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang di fasilitasi**	**100 100**	**100 100**	**170.000.000**	**68.000.000**	**118.000.000**	**- 52.000.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***170.000.000***	***68.000.000***	***118.000.000***	***- 52.000.000***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	170.000.000	68.000.000	118.000.000	- 52.000.000						
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	500 Orang	500 Orang	60.000.000	20.000.000	20.000.000	- 40.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	500 Orang	500 Orang	60.000.000	18.000.000	68.000.000	8.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	30.000.000	30.000.000	- 20.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		KECAMATAN SANGIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
													melayani	
212.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**44.514.367**	**21.800.000**	**41.800.000**	**- 2.714.367**					**Masyarakat Kecamatan Sangir**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***44.514.367***	***21.800.000***	***41.800.000***	***- 2.714.367***						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen	44.514.367	21.800.000	41.800.000	- 2.714.367						
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	500.000	500.000	- 500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	500.000	500.000	- 500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	7 Dokumen	7 Dokumen	12.514.367	500.000	500.000	- 12.014.367	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	20.300.000	40.300.000	10.300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Sungai Pagu**				**3.259.977.545**	**2.982.784.883**	**2.833.914.046**	**- 426.063.499**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.240.977.545**	**2.982.784.883**	**2.833.914.046**	**- 407.063.499**						
	7	**NON URUSAN**				**19.000.000**	**-**	**-**	**- 19.000.000**						
	7.01	**KECAMATAN**				**3.240.977.545**	**2.982.784.883**	**2.833.914.046**	**- 407.063.499**						
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**19.000.000**	**-**	**-**	**- 19.000.000**						
213.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah**	**74.20 Nilai 95.00 74.20 82.00 Nilai Nilai 95.00 74.20 Nilai Nilai 95.00 82.00 74.20 Nilai Nilai**	**74.20 Nilai 95.00 74.20 82.00 Nilai Nilai 95.00 74.20 Nilai Nilai 95.00 82.00 74.20 Nilai Nilai**	**3.009.327.545**	**2.812.134.883**	**2.626.964.046**	**- 382.363.499**					**ASN Perangkat Daerah**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Nilai IKM Perangkat Daerah **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Nilai**									
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	66.000.000	30.277.500	30.277.500	-35.722.500					
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	10.000.000	-	-	-10.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.999.327.545***	***2.812.134.883***	***2.626.964.046***	***- 372.363.499***					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.801.067.306	2.719.034.883	2.532.810.646	-268.256.660					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.771.067.306	2.682.034.883	2.463.164.046	-307.903.260	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	37.000.000	69.646.600	39.646.600	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	107.850.000	40.296.500	42.349.900	-65.500.100					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	3.000.000	1.760.000	1.760.000	-1.240.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	12.000.000	-	-	-12.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.000.000	-	-	-5.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	6.000.000	6.873.900	-3.126.100	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	-	-	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	75.850.000	19.536.500	20.716.000	-55.134.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu.	100 Persen	100 Persen	34.410.239	22.526.000	21.526.000	-12.884.239						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	4 Laporan	15.410.239	15.000.000	15.000.000	-410.239	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	17.000.000	5.526.000	5.526.000	-11.474.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik	100 Persen	100 Persen	66.000.000	30.277.500	30.277.500	-						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara						35.722.500					
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	56.000.000	30.277.500	30.277.500	-25.722.500	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SUNGAI PAGU
214.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.500.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**- 5.100.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***7.500.000***	***2.400.000***	***2.400.000***	***- 5.100.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	7.500.000	2.400.000	2.400.000	-5.100.000						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	12 Laporan	7.500.000	2.400.000	2.400.000	-5.100.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
215.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000**	**10.000.000**	**9.995.000**	**- 10.005.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***20.000.000***	***10.000.000***	***9.995.000***	***- 10.005.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinirnya kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen	20.000.000	10.000.000	9.995.000	-10.005.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	4 Laporan	20.000.000	10.000.000	9.995.000	-10.005.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif		KECAMATAN SUNGAI PAGU
216.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.000.000**	**-**	**-**	**- 15.000.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***15.000.000***	***-***	***-***	***- 15.000.000***						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	15.000.000	-	-	-15.000.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia*	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	-	-	-15.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		KECAMATAN SUNGAI PAGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kecamatan	*dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*									pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	melayani		
217.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**171.150.000**	**138.750.000**	**158.700.000**	**- 12.450.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***171.150.000***	***138.750.000***	***158.700.000***	***- 12.450.000***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	100 Persen	100 Persen	171.150.000	138.750.000	158.700.000	- 12.450.000						
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	30 Orang	49.650.000	25.000.000	25.000.000	- 24.650.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50 Orang	25 Orang	91.500.000	83.750.000	133.700.000	42.200.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	- 30.000.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU
218.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**37.000.000**	**19.500.000**	**35.855.000**	**- 1.145.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***37.000.000***	***19.500.000***	***35.855.000***	***- 1.145.000***						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen	37.000.000	19.500.000	35.855.000	- 1.145.000						
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	11 Dokumen	11 Dokumen	12.000.000	4.500.000	4.500.000	- 7.500.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SUNGAI PAGU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	15.000.000	31.355.000	6.355.000	Kab. Solok Selatan, Sungai Pagu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	-		KECAMATAN SUNGAI PAGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
												narkoba, judi, dan penyeludupan.			
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh**				**3.074.927.107**	**2.597.035.648**	**2.996.399.910**	**- 78.527.197**						
	7	**NON URUSAN**				**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.064.927.107**	**2.597.035.648**	**2.996.399.910**	**- 68.527.197**						
	7.01	**KECAMATAN**				**3.064.927.107**	**2.597.035.648**	**2.996.399.910**	**- 68.527.197**						
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**10.000.000**	**-**	**-**	**- 10.000.000**						
219.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**81.00 74.20 95.00 Nilai Nilai Nilai 81.00 95.00 74.20 Nilai Nilai Nilai 95.00 74.20 81.00 Nilai Nilai Nilai**	**81.00 74.20 95.00 Nilai Nilai Nilai 81.00 95.00 74.20 Nilai Nilai Nilai 95.00 74.20 81.00 Nilai Nilai Nilai**	**2.874.877.107**	**2.434.233.550**	**2.783.597.812**	**- 91.279.295**					**ASN Perangkat Daerah ASN Perangkat Daerah**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.874.877.107***	***2.434.233.550***	***2.783.597.812***	***- 91.279.295***						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100 Persen	100 Persen	17.950.000	2.510.000	2.510.000	- 15.440.000						
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	1.510.000	1.510.000	- 8.490.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	7.950.000	1.000.000	1.000.000	- 6.950.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.542.959.900	2.356.785.652	2.686.009.914	143.050.014						
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.482.959.900	2.297.785.652	2.627.009.914	144.050.014	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi*	4 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	57.000.000	57.000.000	7.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto	PAJAK BARANG DAN JASA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan tata kelola		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pelaksanaan Tugas ASN							Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	TERTENTU (PBJT)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang baik dan melayani		DIATEH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	4 Laporan	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-8.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu	100 Persen	100 Persen	138.944.000	20.938.000	27.885.000	-111.059.000						
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Tahun Paket	4 Paket	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	6.000.000	6.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.000.000	1.989.000	1.989.000	-2.011.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	-	-	-10.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4.005.000	4.005.000	-995.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	4 Laporan	4 Laporan	104.944.000	4.944.000	11.891.000	-93.053.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			SKPD							Diateh, Semua Kel/Desa		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu.	100 Persen	100 Persen	57.056.000	-	-	-57.056.000					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0 Unit	15.056.000	-	-	-15.056.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	42.000.000	-	-	-42.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu.	100 Persen	100 Persen	30.000.000	21.999.900	21.999.900	-8.000.100					
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	18.999.900	18.999.900	-2.000.100	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara.	100 Persen	100 Persen	87.967.207	31.999.998	45.192.998	-42.774.209					
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	6 Unit	67.967.207	29.999.998	41.153.998	-26.813.209	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	20.000.000	2.000.000	4.039.000	-15.961.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
										Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		
220.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**- 2.000.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***4.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***- 2.000.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	- 2.000.000						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	12 Laporan	4.000.000	2.000.000	2.000.000	- 2.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
221.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**- 5.000.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***15.000.000***	***10.000.000***	***10.000.000***	***- 5.000.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinirnya kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	4 Laporan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
222.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**- 2.500.000**					**Masyarakat**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***4.500.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***- 2.500.000***						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	4.500.000	2.000.000	2.000.000	- 2.500.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000	2.000.000	2.000.000	- 2.500.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
223.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**132.500.000**	**119.960.000**	**149.960.000**	**17.460.000**					**Masyarakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		PEMERINTAHAN UMUM	**umum tingkat kecamatan yang di fasilitasi**											
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***132.500.000***	***119.960.000***	***149.960.000***	***17.460.000***					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	132.500.000	119.960.000	149.960.000	17.460.000					
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	500 Orang	100 Orang	57.500.000	22.495.000	22.495.000	-35.005.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	500 Orang	100 Orang	35.000.000	20.000.000	70.000.000	35.000.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	77.465.000	57.465.000	17.465.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
224.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**44.050.000**	**28.842.098**	**48.842.098**	**4.792.098**					**Masyarakat**
		[Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***44.050.000***	***28.842.098***	***48.842.098***	***4.792.098***					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen	44.050.000	28.842.098	48.842.098	4.792.098					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 tahun Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	2.000.000	2.000.000	-2.500.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	1 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	2.000.000	2.000.000	-2.500.000	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi*	8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000	9.780.000	9.780.000	-	Kab. Solok	PENERIMAAN	Memperkuat reformasi	Penguatan		KECAMATAN KOTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kepala Desa	*dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*						5.220.000	Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		PARIK GADANG DIATEH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.050.000	15.062.098	35.062.098	15.012.098	Kab. Solok Selatan, Koto Parik Gadang Diateh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Sangir Jujuan**				**2.304.574.739**	**1.890.650.587**	**2.117.430.705**	**- 187.144.034**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.304.574.739**	**1.890.650.587**	**2.117.430.705**	**- 187.144.034**						
	7.01	**KECAMATAN**				**2.304.574.739**	**1.890.650.587**	**2.117.430.705**	**- 187.144.034**						
225.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Rata - rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Rata - rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Rata - rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilaai IKM Perangkat Daerah**	**73,24 81 95 Nilai Nilai Nilai 81 73,24 95 Nilai Nilai Nilai 95 73,24 81 Nilai Nilai Nilai**	**73,24 81 95 Nilai Nilai Nilai 81 73,24 95 Nilai Nilai Nilai 95 73,24 81 Nilai Nilai Nilai**	**2.097.325.045**	**1.767.935.886**	**1.906.354.634**	**- 190.970.411**					**Masyakat Kecamatan Sangir Jujuan Masyarakat Kecamatan Sangir Jujuan Perangkat Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.097.325.045***	***1.767.935.886***	***1.906.354.634***	***- 190.970.411***						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000	7.080.000	3.240.000	- 6.760.000						
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	3.240.000	3.840.000	- 1.160.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	3.840.000	3.840.000	- 1.160.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR JUJUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.712.667.045	1.633.760.686	1.772.060.634	59.393.589					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.662.381.615	1.586.560.517	1.713.340.634	50.959.019	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	50.285.430	47.200.169	58.720.000	8.434.570	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	167.052.000	78.463.200	65.716.000	-101.336.000					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	1.657.000	866.000	866.000	-791.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	11.070.000	11.070.000	13.105.000	2.035.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	3.980.000	3.980.000	3.980.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.460.000	4.505.000	4.505.000	-10.955.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	900.000	900.000	-2.100.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	131.885.000	57.142.200	42.360.000	-89.525.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	-	KECAMATAN SANGIR JUJUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang tersedia	100 Persen	100 Persen	98.062.000	-	-	- 98.062.000						
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	6 Unit	48.066.000	-	-	- 48.066.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	49.996.000	-	-	- 49.996.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	100 Persen	17.700.000	13.550.000	12.550.000	- 5.150.000						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	8.400.000	7.400.000	- 3.600.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	4.700.000	3.150.000	3.150.000	- 1.550.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 Persen	100 Persen	91.844.000	35.082.000	48.948.000	- 42.896.000						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	43.954.000	28.834.000	42.700.000	- 1.254.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	4 Unit	47.890.000	6.248.000	6.248.000	- 41.642.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
226	**7.01.02**	**PROGRAM**	**Persentase Pelayanan yang**	**100**	**100**	**6.885.000**	**975.000**	**1.725.000**	**- 5.160.000**					**Masyakat**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
.		**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**terlayani sesuai Standar**	**Persen**	**Persen**									**Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***6.885.000***	***975.000***	***1.725.000***	***- 5.160.000***					
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	6.885.000	975.000	1.725.000	- 5.160.000					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	12 Laporan	6.885.000	975.000	1.725.000	- 5.160.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
227 .	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Yang di laksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**29.700.000**	**3.075.000**	**4.020.000**	**- 25.680.000**					**Masyakat Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***29.700.000***	***3.075.000***	***4.020.000***	***- 25.680.000***					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkooordinirnya kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	29.700.000	3.075.000	4.020.000	- 25.680.000					
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	29.700.000	3.075.000	4.020.000	- 25.680.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
228 .	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.400.000**	**675.000**	**675.000**	**- 4.725.000**					**Masyakat Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***5.400.000***	***675.000***	***675.000***	***- 4.725.000***					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	5.400.000	675.000	675.000	- 4.725.000					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	5.400.000	675.000	675.000	- 4.725.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
229 .	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**131.420.000**	**103.500.007**	**186.614.071**	**55.194.071**					**Masyakat Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***131.420.000***	***103.500.007***	***186.614.071***	***55.194.071***					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	100 Persen	131.420.000	103.500.007	186.614.071	55.194.071					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi											
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	250 Orang	60.900.000	18.810.007	21.997.000	-38.903.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50 Orang	250 Orang	45.550.000	26.550.000	106.477.071	60.927.071	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	12 Dokumen	24.970.000	58.140.000	58.140.000	33.170.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
230.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**33.844.694**	**14.489.694**	**18.042.000**	**- 15.802.694**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Jujuan**	
		[Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***33.844.694***	***14.489.694***	***18.042.000***	***- 15.802.694***						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	33.844.694	14.489.694	18.042.000	-15.802.694						
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	5 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	1.800.000	1.800.000	-2.700.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	5 Dokumen	4 Dokumen	3.255.000	1.800.000	1.800.000	-1.455.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.089.694	10.889.694	14.442.000	-11.647.694	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR JUJUAN
	7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Sangir Batang Hari**				**2.585.150.005**	**2.165.820.864**	**2.078.943.715**	**- 506.206.290**						
	7	**NON URUSAN**				**4.560.000**	**-**	**-**	**- 4.560.000**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.580.590.005**	**2.165.820.864**	**2.078.943.715**	**- 501.646.290**						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.560.000**	**-**	**-**	**- 4.560.000**					
	7.01	**KECAMATAN**				**2.580.590.005**	**2.165.820.864**	**2.078.943.715**	**- 501.646.290**					
231.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**100 Persen 73,24 81,00 95,00 Nilai Nilai Nilai 81,00 95,00 73,24 Nilai Nilai Nilai 95,00 73,24 81,00 Nilai Nilai Nilai 95,00 73,24 91 Nilai Nilai Nilai**	**100 Persen 73,24 81,00 95,00 Nilai Nilai Nilai 81,00 95,00 73,24 Nilai Nilai Nilai 95,00 73,24 81,00 Nilai Nilai Nilai 95,00 73,24 91 Nilai Nilai Nilai**	**2.385.150.005**	**2.015.470.864**	**1.852.442.715**	**- 532.707.290**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.385.150.005***	***2.015.470.864***	***1.852.442.715***	***- 532.707.290***					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000	3.500.000	3.500.000	- 6.500.000					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	1.750.000	1.750.000	- 3.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	1.750.000	1.750.000	- 3.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.131.041.678	1.901.422.014	1.730.206.865	- 400.834.813						
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	17 Orang/bulan	13 Orang/bulan	2.075.521.678	1.863.820.864	1.673.496.865	- 402.024.813	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi*	12 Dokumen	12 Dokumen	50.520.000	35.851.150	54.960.000	4.440.000	Kab. Solok Selatan, Sangir	PAJAK BARANG DAN JASA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan tata kelola		KECAMATAN SANGIR BATANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pelaksanaan Tugas ASN							Batang Hari, Semua Kel/Desa	TERTENTU (PBJT)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang baik dan melayani		HARI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	1.750.000	1.750.000	-3.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	128.314.120	46.274.000	48.274.000	-80.040.120						
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	3.432.120	-	2.000.000	-1.432.120	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	12.000.000	7.000.000	7.000.000	-5.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.560.000	-	-	-4.560.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	6.000.000	6.000.000	-4.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	4.950.000	2.250.000	2.250.000	-2.700.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	93.372.000	29.504.000	29.504.000	-63.868.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	melayani		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	25.561.207	-	5.187.000	-20.374.207					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	120 Unit	120 Unit	25.561.207	-	5.187.000	-20.374.207	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	16.350.000	11.780.000	11.780.000	-4.570.000						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.130.000	5.130.000	5.130.000	-	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	8.720.000	5.150.000	5.150.000	-3.570.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 Persen	100 Persen	73.883.000	52.494.850	53.494.850	-20.388.150						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	73.883.000	52.494.850	53.494.850	-20.388.150	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
232.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.950.000**	**4.050.000**	**4.050.000**	**- 900.000**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***4.950.000***	***4.050.000***	***4.050.000***	***- 900.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.950.000	4.050.000	4.050.000	-900.000						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kecamatan												
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	4.950.000	4.050.000	4.050.000	-900.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14.130.000**	**9.900.000**	**18.150.000**	**4.020.000**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***14.130.000***	***9.900.000***	***18.150.000***	***4.020.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	14.130.000	9.900.000	18.150.000	4.020.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	14.130.000	9.900.000	18.150.000	4.020.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
234.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.000.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**- 6.300.000**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***9.000.000***	***2.700.000***	***2.700.000***	***- 6.300.000***						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-masalah terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	9.000.000	2.700.000	2.700.000	-6.300.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	2.700.000	2.700.000	-6.300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
235.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**125.225.000**	**105.900.000**	**167.451.000**	**42.226.000**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***125.225.000***	***105.900.000***	***167.451.000***	***42.226.000***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	125.225.000	105.900.000	167.451.000	42.226.000						
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	500 Orang	500 Orang	91.650.000	38.175.000	49.726.000	-41.924.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												penyeludupan.		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	500 Orang	500 Orang	7.875.000	6.750.000	56.750.000	48.875.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	25.700.000	60.975.000	60.975.000	35.275.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
236.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**46.695.000**	**27.800.000**	**34.150.000**	**- 12.545.000**					**Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari**	
		[Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***46.695.000***	***27.800.000***	***34.150.000***	***- 12.545.000***						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	46.695.000	27.800.000	34.150.000	- 12.545.000						
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	7 Dokumen	7 Dokumen	6.300.000	3.150.000	3.150.000	- 3.150.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	7 Dokumen	7 Dokumen	9.450.000	3.150.000	3.150.000	- 6.300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	7 Dokumen	7 Dokumen	12.070.000	3.750.000	3.750.000	- 8.320.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	18.875.000	17.750.000	24.100.000	5.225.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
	7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Pauh Duo**				**3.050.487.500**	**2.633.478.604**	**2.495.628.850**	**- 554.858.650**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.042.477.400**	**2.633.478.604**	**2.495.628.850**	**- 546.848.550**						
	7	**NON URUSAN**				**8.010.100**	**-**	**-**	**- 8.010.100**						
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.010.100**	**-**	**-**	**- 8.010.100**						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		
		BIDANG XX													
	7.01	**KECAMATAN**				**3.042.477.400**	**2.633.478.604**	**2.495.628.850**	**- 546.848.550**						
237.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan operasional Kantor Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**100 persen 75,75 91 95 Nilai Nilai Nilai 75.75 95 91 Nilai Nilai Nilai undefined undefined**	**100 persen 75,75 91 95 Nilai Nilai Nilai 75.75 95 91 Nilai Nilai Nilai undefined undefined**	**2.840.487.500**	**2.483.997.204**	**2.285.682.850**	**- 554.804.650**					**Aparatur Kecamatan Pauh Duo Pegawai Kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.840.487.500***	***2.483.997.204***	***2.285.682.850***	***- 554.804.650***						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	15.000.000	2.595.000	2.595.000	- 12.405.000						
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	1.360.000	1.360.000	- 8.640.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	1.235.000	1.235.000	- 3.765.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.599.678.850	2.388.669.679	2.177.219.925	- 422.458.925						
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.553.678.850	2.331.478.604	2.123.628.850	- 430.050.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	38.000.000	52.862.075	52.862.075	14.862.075	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	4 Laporan	8.000.000	4.329.000	729.000	- 7.271.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan	100 persen	100 persen	127.115.255	36.317.000	49.452.400	- 77.662.855						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
			administrasi umum perangkat daerah											
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	3.000.000	2.298.000	2.298.000	-702.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	6.500.000	6.500.000	10.000.000	3.500.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.000.000	8.500.000	9.700.000	-300.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1.050.000	1.550.000	-1.450.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	89.615.255	2.969.000	10.904.400	-78.710.855	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	18.077.100	17.577.100	17.577.100	-500.000						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-500.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	-	8.010.100	8.010.100	8.010.100	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	*Jumlah Laporan Penyediaan*	12 Laporan	12 Laporan	8.010.100	-	-	-	Kab. Solok	PAJAK BARANG	Memperkuat reformasi	Penguatan		KECAMATAN PAUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Sumber Daya Air dan Listrik	*Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*						8.010.100	Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	DAN JASA TERTENTU (PBJT)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		DUO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	7.567.000	7.567.000	7.567.000	-	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persen	100 persen	80.616.295	38.838.425	38.838.425	- 41.777.870						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	60.616.295	32.878.425	32.878.425	- 27.737.870	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	20.000.000	5.960.000	5.960.000	- 14.040.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
238.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.500.000**	**3.569.400**	**1.169.000**	**- 3.331.000**					**Masyarakat Kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***4.500.000***	***3.569.400***	***1.169.000***	***- 3.331.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.500.000	3.569.400	1.169.000	- 3.331.000						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	3.569.400	1.169.000	- 3.331.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
239.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**30.000.000**	**11.507.000**	**11.507.000**	**- 18.493.000**					**Masyarakat dan Nagari kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***30.000.000***	***11.507.000***	***11.507.000***	***- 18.493.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	30.000.000	11.507.000	11.507.000	- 18.493.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di*	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	11.507.000	11.507.000	- 18.493.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan tata kelola pemerintahan		KECAMATAN PAUH DUO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Wilayah Kecamatan							Kel/Desa	BENTUK LAIN	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang baik dan melayani	
240.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.500.000**	**2.700.000**	**765.000**	**- 3.735.000**					**Masyarakat kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi***			***4.500.000***	***2.700.000***	***765.000***	***- 3.735.000***						
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian masalah-masalah terkait ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	4.500.000	2.700.000	765.000	- 3.735.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000	2.700.000	765.000	- 3.735.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
241.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi**	**100 persen**	**100 persen**	**132.000.000**	**101.805.000**	**151.805.000**	**19.805.000**					**Masyarakat dan Nagari kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***132.000.000***	***101.805.000***	***151.805.000***	***19.805.000***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	132.000.000	101.805.000	151.805.000	19.805.000						
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	400 Orang	500 Orang	70.000.000	26.680.000	26.680.000	- 43.320.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	300 Orang	500 Orang	37.000.000	15.125.000	65.125.000	28.125.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	60.000.000	60.000.000	35.000.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
242.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**39.000.000**	**29.900.000**	**44.700.000**	**5.700.000**					**Nagari Se Kecamatan Pauh Duo**	
		[Meningkatnya pembinaan dan	***Persentase pembinaan dan***			***39.000.000***	***29.900.000***	***44.700.000***	***5.700.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		pengawasan pemerintahan desa]	***pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	100 persen	100 persen	39.000.000	29.900.000	44.700.000	5.700.000					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	1.125.000	1.125.000	- 2.875.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	1.125.000	1.125.000	- 3.875.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	4 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.650.000	7.650.000	- 2.350.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	34.800.000	14.800.000	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN PAUH DUO
	7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Sangir Balai Janggo**				**2.212.341.326**	**1.773.736.111**	**1.680.865.601**	**- 531.475.725**						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.212.341.326**	**1.773.736.111**	**1.680.865.601**	**- 531.475.725**						
	7.01	**KECAMATAN**				**2.212.341.326**	**1.773.736.111**	**1.680.865.601**	**- 531.475.725**						
243.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**75,75 89,19 95,00 Nilai Nilai Nilai 75,75 95,00 89,19 Nilai Nilai Nilai 95,00 75,75 89,19 Nilai Nilai Nilai 95,00 89,19 75,75 Nilai Nilai Nilai 95**	**75,75 89,19 95,00 Nilai Nilai Nilai 75,75 95,00 89,19 Nilai Nilai Nilai 95,00 75,75 89,19 Nilai Nilai Nilai 95,00 89,19 75,75 Nilai Nilai Nilai 95**	**2.012.341.326**	**1.622.436.111**	**1.460.320.101**	**- 552.021.225**					**Kantor Camat Sangir Balai Janggo**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
				75,75 89,19 Nilai Nilai	**75,75 89,19 Nilai Nilai Nilai**									
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***2.012.341.326***	***1.622.436.111***	***1.460.320.101***	***- 552.021.225***					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.000.000	4.000.000	4.000.000	-6.000.000					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.726.969.101	1.513.866.111	1.350.995.601	-375.973.500					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.691.969.101	1.469.486.111	1.306.615.601	-385.353.500	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	42.380.000	42.380.000	12.380.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	132.772.225	60.640.000	62.395.000	-70.377.225					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.000.000	1.500.000	1.500.000	-2.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.000.000	8.000.000	8.000.000	-7.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.000.000	1.750.000	1.750.000	-2.250.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	11.918.225	5.000.000	5.000.000	-6.918.225	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000	1.125.000	2.880.000	-1.620.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	93.354.000	43.265.000	43.265.000	-50.089.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	12.600.000	6.010.000	5.009.500	-7.590.500						
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.300.000	1.840.000	839.500	-1.460.500	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	7.300.000	2.670.000	2.670.000	-4.630.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	130.000.000	37.920.000	37.920.000	-92.080.000					
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	60.000.000	33.000.000	33.000.000	-27.000.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	70.000.000	4.920.000	4.920.000	-65.080.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
244.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.790.000**	**1.800.000**	**45.000**	**- 2.745.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo**	
		[Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar***			***2.790.000***	***1.800.000***	***45.000***	***- 2.745.000***						
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	2.790.000	1.800.000	45.000	-2.745.000						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	2.790.000	1.800.000	45.000	-2.745.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
245.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**38.000.000**	**14.050.000**	**14.050.000**	**- 23.950.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan]	***Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan***			***38.000.000***	***14.050.000***	***14.050.000***	***- 23.950.000***						
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	38.000.000	14.050.000	14.050.000	-23.950.000						
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	38.000.000	14.050.000	14.050.000	-23.950.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
246.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.860.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**- 1.060.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo**	
		[Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang***			***2.860.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***- 1.060.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
			difasilitasi												
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	2.860.000	1.800.000	1.800.000	- 1.060.000						
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	2.860.000	1.800.000	1.800.000	- 1.060.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
247.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**117.170.000**	**118.250.000**	**169.250.500**	**52.080.500**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan]	***Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi***			***117.170.000***	***118.250.000***	***169.250.500***	***52.080.500***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	117.170.000	118.250.000	169.250.500	52.080.500						
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	400 Orang	500 Orang	76.450.000	39.000.000	39.000.000	- 37.450.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	300 Orang	500 Orang	23.700.000	17.000.000	67.000.000	43.300.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	12 Dokumen	17.020.000	62.250.000	63.250.500	46.230.500	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
248.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**39.180.000**	**15.400.000**	**35.400.000**	**- 3.780.000**					**Masyarakat Kecamatan Sangir Balai Janggo**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan***			***39.180.000***	***15.400.000***	***35.400.000***	***- 3.780.000***						
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	39.180.000	15.400.000	35.400.000	- 3.780.000						
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	1.800.000	1.800.000	- 3.200.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo,	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan tata kelola pemerintahan		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
			Pemerintahan Desa							Semua Kel/Desa	BENTUK LAIN	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang baik dan melayani		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	1.800.000	1.800.000	-3.200.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	10.120.000	1.800.000	1.800.000	-8.320.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.060.000	10.000.000	30.000.000	10.940.000	Kab. Solok Selatan, Sangir Balai Janggo, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
	8.01.0.00.0.00.01.0000	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**				**4.223.847.682**	**3.501.565.802**	**4.258.903.780**	**35.056.098**						
	8	**NON URUSAN**				**22.000.000**	**-**	**-**	**- 22.000.000**						
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**4.201.847.682**	**3.501.565.802**	**4.258.903.780**	**57.056.098**						
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**22.000.000**	**-**	**-**	**- 22.000.000**						
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**4.201.847.682**	**3.501.565.802**	**4.258.903.780**	**57.056.098**						
249.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Inovasi Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah**	**75.75 95.00 81 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai**	**75.75 95.00 81 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai 95.00 75.75 81.00 Nilai Nilai Nilai**	**1.819.974.706**	**1.626.166.846**	**1.436.897.624**	**- 383.077.082**					**ASN dan Tenaga Outsourcing Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan ASN Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan ASN Kantor Kesbangpol**	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 Unit 5 unit	82.003.500	66.321.500	74.190.500	-7.813.000						
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	17.200.000	20.000.000	20.000.000	2.800.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		
												penyeludupan.			
		[Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah*** ***Nilai Inovasi Perangkat Daerah***			***1.802.774.706***	***1.606.166.846***	***1.416.897.624***	***- 385.877.082***						
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.518.420.206	1.455.712.346	1.236.138.124	-282.282.082						
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.471.620.206	1.332.792.346	1.160.858.124	-310.762.082	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	4 Dokumen	46.800.000	122.920.000	75.280.000	28.480.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	191.381.000	89.623.000	107.829.000	-83.552.000						
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	4 Paket	2.437.000	1.001.000	2.573.000	136.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	31.139.000	22.342.000	27.250.000	-3.889.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	4.946.000	2.698.000	6.389.000	1.443.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	-	6.500.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	13.000.000	-	-	-13.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
												narkoba, judi, dan penyeludupan.		
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	-	4.500.000	4.515.000	4.515.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	-	-	-9.000.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	130.859.000	52.582.000	55.102.000	-75.757.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	28.170.000	14.510.000	18.740.000	-9.430.000						
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	2.890.000	2.890.000	-1.110.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	18.600.000	9.700.000	9.700.000	-8.900.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	5.570.000	1.920.000	6.150.000	580.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 Unit 5 unit	82.003.500	66.321.500	74.190.500	-7.813.000						
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	64.803.500	46.321.500	54.190.500	-10.613.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**900.367.000**	**698.792.980**	**1.147.412.380**	**247.045.380**					**Masyarakat, Peserta Upacara**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		KARAKTER KEBANGSAAN	**Karakter Kebangsaan**											**Hari Lahir Pancasila, Peserta Upacara Hari Bela Negara,**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	***Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***			***900.367.000***	***698.792.980***	***1.147.412.380***	***247.045.380***						
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	900.367.000	698.792.980	1.147.412.380	247.045.380						
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	1000 Orang	500 Orang	92.200.000	10.650.000	71.270.000	- 20.930.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*	75 Orang	75 Orang	808.167.000	688.142.980	1.076.142.380	267.975.380	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
251.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**965.777.976**	**958.521.976**	**958.521.976**	**- 7.256.000**					**Partai Politik dan Masyarakat**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	***Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik***			***965.777.976***	***958.521.976***	***958.521.976***	***- 7.256.000***						
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Politik dan Peningkatan Demokrasi	1000 Orang 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	965.777.976	958.521.976	958.521.976	- 7.256.000						
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	200 Orang	100 Orang	965.777.976	958.521.976	958.521.976	- 7.256.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
252.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.900.000**	**4.150.000**	**4.150.000**	**- 16.750.000**					**Ormas Yang Dibina**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif***			***20.900.000***	***4.150.000***	***4.150.000***	***- 16.750.000***						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	20.900.000	4.150.000	4.150.000	-16.750.000					
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	25 Orang	25 Orang	20.900.000	4.150.000	4.150.000	-16.750.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
253.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**55.100.000**	**5.190.000**	**8.190.000**	**- 46.910.000**					**Siswa SLTP/SLTA dan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan**	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	***Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan***			***55.100.000***	***5.190.000***	***8.190.000***	***- 46.910.000***						
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Orang 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	55.100.000	5.190.000	8.190.000	-46.910.000						
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	100 Orang	100 Orang	55.100.000	5.190.000	8.190.000	-46.910.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan ketahanan sosial budaya		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
254.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**461.728.000**	**208.744.000**	**703.731.800**	**242.003.800**					**pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	***Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan***			***461.728.000***	***208.744.000***	***703.731.800***	***242.003.800***						
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5000 Orang	1 Rekomendasi	461.728.000	208.744.000	703.731.800	242.003.800						
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,*	4000 Orang	4000 Orang	461.728.000	208.744.000	703.731.800	242.003.800	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	-		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH	
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*									penyeludupan.		
	J U M L A H					**924.647.291.815**	**775.761.397.729**	**847.432.227.488**	**- 77.215.064.327**					

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2026 dan mengakomodir beberapa kali regulasi penyesuaian perubahan penjabaran belanja perangkat daerah melalui pergeseran APBD Tahun 2026 serta hasil verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Dipindai dengan CamScanner